



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2019-2023.
- (2) Sistematika RPJMD Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - i. BAB IX PENUTUP

Pasal 3

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penjabaran RPJMD lebih lanjut dituangkan dalam:

- a. RKPD;
- b. Renstra-Perangkat Daerah; dan
- c. Renja-Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran atau kebutuhan pembiayaan dalam RPJMD, dilakukan penyesuaian melalui penyusunan RKPD, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk setiap tahunnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HILARIA YUSNANI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : () / (2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2023

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Kayong Utara merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kayong Utara untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kayong Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 171

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografis.....	II-18
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-20
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	II-20
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-30
2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga.....	II-34
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-37
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	II-37
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-99
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-15
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-106
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-108
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-110
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-113

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH 2013-2018	III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-4
3.1.2. Neraca Daerah.....	III-30
3.1.2. Prop	III-43
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013-2018.....	III-47
3.2.1. Pendapatan Daerah.....	III-48
3.2.2. Belanja Daerah	III-50
3.2.3. Analisis Pembiayaan	III-53

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1.1 Perekonomian	IV-2
4.1.2 Sosial Budaya	IV-3
4.1.3 Infrastruktur	IV-7
4.1.4 Lingkungan.....	IV-7
4.1.5 Tata Kelola Pemerintahan	IV-8
4.2. ISU STRATEGIS	IV-37
4.2.1 Isu-isu Internasional	IV-38
4.2.2 Isu-isu Nasional.....	IV-41
4.2.3 Isu-Isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat	IV-43
4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Kayong Utara	IV-44

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI	V-1
5.2. MISI	V-2
5.3. KESELARASAN VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023 DENGAN VISI DAN MISI RPJPD KAYONG UTARA TAHUN 2008-2025	V-3
5.4. KESELARASAN VISI, MISI RPJMD KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023 DENGAN VISI MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023	V-6
5.5. TUJUAN DAN SASARAN	V-8
5.6. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	V-11

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI	VI-2
6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	VI-4
6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN	VI-7

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	VII-1
7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-4

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
8.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH.....	VIII-1
8.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-2
BAB IX PENUTUP	
9.1. PEDOMAN TRANSISI.....	IX-2
9.2. KAIDAH PELAKSANA.....	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan 2017	II-2
Tabel 2.2.	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kayong Utara 2017.....	II-5
Tabel 2.3.	Kondisi Air Tanah	II-5
Tabel 2.4.	Iklim dan Curah Hujan Kabupaten Kayong Utara	II-6
Tabel 2.5.	Rerata Curah Hujan Kayong Utara Tahun 2017	II-7
Tabel 2.6.	Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Kayong Utara.....	II-10
Tabel 2.7.	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Kayong Utara.....	II-10
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara 2017	II-18
Tabel 2.9.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017	II-22
Tabel 2.9.	Perkembangan Tingkat PengangguranTerbuka Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%).....	II-28
Tabel 2.10.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara 2013-2017.....	II-32
Tabel 2.11.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara 2013-2017	II-32
Tabel 2.12.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017.....	II-33
Tabel 2.13.	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 - 2017	II-39
Tabel 2.14.	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 - 2017	II-41
Tabel 2.15.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 - 2017	II-43
Tabel 2.16.	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017	II-45
Tabel 2.17.	Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK/MA Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 - 2016.....	II-47
Tabel 2.18.	Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2017	II-107
Tabel 2.19.	Banyaknya Kendaraan di Kabupaten Kayong Utara Menurut Angkutan 2017	II-107
Tabel 2.20.	Laporan Anev Jenis Kejahatan Sat Reskrim Polres Kayong Utara Periode Tahun 2017 Dibanding 2018	II-111
Tabel 2.21.	Penduduk KKU Berumur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	II-114

Tabel 2.22.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017	II-114
Tabel 2.23.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-115
Tabel 3.1.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017 (<i>dalam jutaan rupiah</i>)	III-9
Tabel 3.2.	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019-2023	III-18
Tabel 3.3.	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017.....	III-22
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017.....	III-24
Tabel 3.5.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019-2023.....	III-27
Tabel 3.6.	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017 (<i>dalam jutaan rupiah</i>)	III-29
Tabel 3.7.	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017.....	III-31
Tabel 3.8.	Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017	III-42
Tabel 3.9.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Kayong 2017.....	III-44
Tabel 3.10.	Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017 (<i>dalam jutaan rupiah</i>)	III-53
Tabel 4.1.	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara	IV-10
Tabel 5.1.	Perumusan Penjelasan Visi	V-2
Tabel 5.2.	Perumusan Penjelasan Misi	V-3
Tabel 5.3.	Hubungan antara Misi RPJMD kabupaten Kayong Utara 2019 – 2023 dengan RPJMD Prov. Kalbar 2018 – 2023 serta RPJMN 2015-2019	V-6
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kayong Utara	VI-2
Tabel 6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kayong Utara.....	VI-4
Tabel 6.3.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023	VI-8

Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII-3
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019-2023 Kabupaten Kayong Utara.....	VII-5
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023	VIII-2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 -2023	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-9
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara.....	II-2
Gambar 2.2. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017	II-19
Gambar 2.3. Pertumbuhan Penduduk Kab. Kayong Utara Tahun 2013-2017.....	II-20
Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kayong Utara, Provinsi dan Nasional Tahun 2013-2017	II-21
Gambar 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Kab. Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016-2017.....	II-23
Gambar 2.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014–2017 (Juta Rp).....	II-24
Gambar 2.7. Laju Inflasi Kabupaten Kayong Utara 2011-2016 (persen)	II-26
Gambar 2.8. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kayong Utara, Kalbar dan Nasional Tahun 2013-2017	II-27
Gambar 2.8. Kondisi IPM Kabupaten Kayong Utara Terhadap Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017.....	II-29
Gambar 2.9. Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) 2014-2017	II-31
Gambar 2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017	II-34
Gambar 2.11. Jumlah Lapangan Olah Raga 2013-2017	II-35
Gambar 2.12. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 2013-2017	II-36
Gambar 2.13. Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya 2013-2017	II-37
Gambar 2.14. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2014-2017.....	II-38
Gambar 2.15. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017	II-40
Gambar 2.16. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017	II-42
Gambar 2.17. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017	II-44

Gambar 2.18. Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 - 2017	II-46
Gambar 2.19. Angka Kelulusan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017	II-47
Gambar 2.20. Persentase Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs.....	II-49
Gambar 2.21. Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) 2014-2017	II-50
Gambar 2.22. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 2014-2017	II-51
Gambar 2.23. Rasio Angka Kematian Bayi 2013-2016.....	II-52
Gambar 2.24. Rasio Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup 2013-2016	II-53
Gambar 2.25. Rasio Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	II-55
Gambar 2.26. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk 2012-2014.....	II-56
Gambar 2.27. Presentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 2013-2017	II-57
Gambar 2.28. Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 2012-2017	II-58
Gambar 2.29. Persentase Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) 2012-2017	II-59
Gambar 2.30. Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 2012-2017.....	II-60
Gambar 2.31. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 2013-2017	II-62
Gambar 2.32. Persentase Cakupan Kunjungan Bayi 2013-2017	II-63
Gambar 2.33. Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik 2013-2017	II-64
Gambar 2.34. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 2013-2017	II-65
Gambar 2.35. Persentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik 2015-2017	II-66
Gambar 2.36. Persentase Proporasi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak 2012-2014	II-67
Gambar 2.37. Persentase Rasio Rumah Layak Huni 2013-2017	II-68
Gambar 2.38. Persentase Rumah tangga (RT) Pengguna Air Bersih 2013-2017	II-69
Gambar 2.39. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 2013-2017.....	II-70
Gambar 2.40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017	II-72
Gambar 2.41. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan 2013-2017	II-73
Gambar 2.42. Persentase Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek 2013-2017	II-74

Gambar 2.43. Jumlah Lapangan Olah Raga 2013-2017	II-75
Gambar 2.44. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2013-2017	II-76
Gambar 2.45. Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya 2013-2017	II-77
Gambar 2.46. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2013-2017.....	II-78
Gambar 2.47. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 2013-2017.....	II-79
Gambar 2.48. Persentase Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas 2013- 2017	II-80
Gambar 2.49. Ketersediaan Pangan Utama 2013-2017 (kg/1000 penduduk)	II-80
Gambar 2.50. Persentase luas lahan bersertifikat 2014-2017	II-81
Gambar 2.51. Persentase Penanganan Sampah 2013-2017	II-82
Gambar 2.52. Persentase Indikator Kinerja Kunci Kebersihan 2013-2017.....	II-83
Gambar 2.53. Persentase Kepemilikan KTP 2013-2017.....	II-84
Gambar 2.54. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 2013-2017	II-85
Gambar 2.55. Persentase PKK aktif 2013-2017	II-86
Gambar 2.56. Persentase Posyandu Aktif 2013-2017	II-86
Gambar 2.57. Persentase Prevalensi peserta KB aktif 2013-2017	II-87
Gambar 2.58. Persentase Angkutan Darat 2013-2017	II-88
Gambar 2.59. Pameran/Expo Yang Telah Diselenggarakan 2013-2017	II-89
Gambar 2.60. Persentase Koperasi Aktif 2012-2017	II-90
Gambar 2.61. Persentase Usaha Mikro dan Kecil 2012-2017	II-91
Gambar 2.62. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 2014-2017	II-91
Gambar 2.63. Jumlah Lapangan Olah Raga 2013-2017	II-92
Gambar 2.64. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2013-2017	II-94
Gambar 2.65. Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya 2013-2017	II-94
Gambar 2.66. Jumlah Pengunjung Perpustakaan 2013-2017.....	II-95
Gambar 2.67. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 2014-2017	II-96
Gambar 2.68. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 2014-2017	II-97
Gambar 2.69. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 2013- 2017	II-98
Gambar 2.70. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 2013-2017 (ton/Ha)	II-99

Gambar 2.71. Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 2013-2017	II-100
Gambar 2.72. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 2013-2017.....	II-101
Gambar 2.73. Persentase Sumber Penerangan Rumah Tangga di Kab. Kayong Utara 2013-2017	II-102
Gambar 2.74. Persentase Produksi Ikan 2013-2017.....	II-104
Gambar 2.75. Produksi Perikanan Laut 2013-2017 (ton)	II-105
Gambar 2.76. Persentase Konsumsi Ikan 2013-2017	II-106
Gambar 2.77. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2017 (km).....	II-109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum melakukan tindakan-tindakan berupa implementasi program-program pembangunan. Melalui perencanaan, sesuatu yang hendak dicapai sudah ditentukan. Perencanaan sendiri didasarkan pada sumberdaya atau potensi yang dimiliki, kesempatan-kesempatan yang harus dimanfaatkan, serta kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

Indikatif. RPJMD 2019–2023 Kabupaten Kayong Utara merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Citra Duani dan Wakil Bupati Effendi Ahmad yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih diamanatkan untuk mewujudkan Visi Misi berserta penjabarannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD tersebut merupakan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusunnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Proses penyusunan RPJMD harus tetap memperhatikan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Pertama adalah pendekatan Teknokratik, perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis dan diskusi dengan tenaga ahli sesuai dengan substansi. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka piker komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu sebelumnya telah disusun RPJMD teknokratik. Kedua adalah Pendekatan Partisipatif, perencanaan dilakukan dengan mengikut sertakan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Oleh karena itu dalam proses penyusunan ini nanti akan diselenggarakan forum konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Ketiga adalah Pendekatan Politik, perencanaan yang disusun dalam RPJMD merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong utara dan merupakan perwujudan dari visi dan misi Kepala dan wakil Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan pendanaan pembangunan lima tahunan beserta indikator dan target pencapaiannya kinerjanya. Hasil rancangan RPJMD ini harus dikonsultasikan dan dibahas dengan anggota DPRD Kabupaten Kayong utara untuk mendapatkan kesepakatan awal dan persetujuan akhir. Keempat adalah Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*, Perencanaan secara top down dilaksanakan dengan

memperhatikan kebijakan-kebijakan, perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan Kabupaten Kayong Utara, mandat maupun intruksi lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Kayong utara, dan menggali aspirasi dari seluruh Perangkat Daerah serta Desa dalam rangka menyusun strategi dan kebijakan untuk mensukseskan visi misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Kedudukan RPJMD terhadap RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. Kedudukan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Kayong Utara juga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara setiap tahunnya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

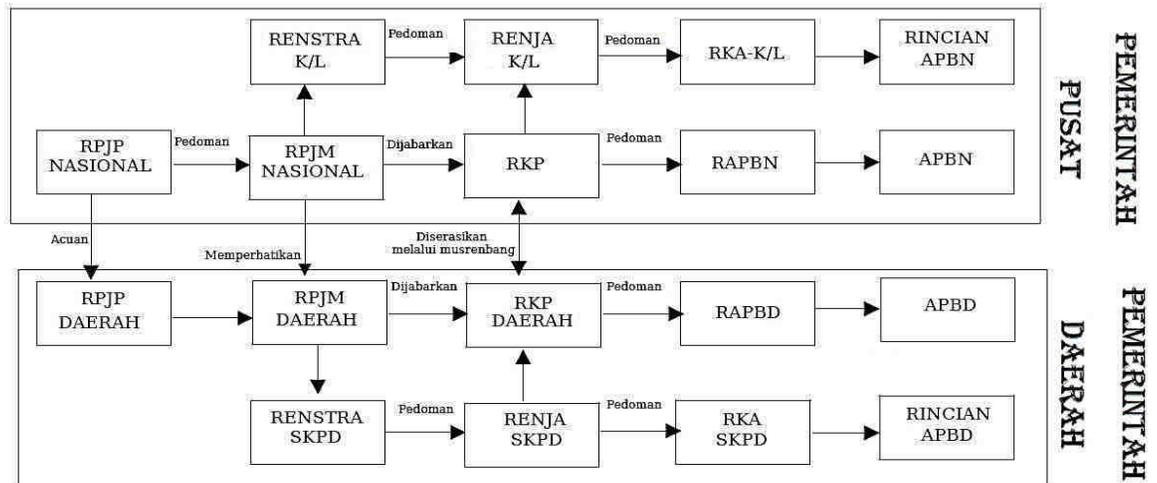
- Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), (Lembaran

- Negara RI Tahun 2017 No. 136);
28. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 No. 3, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 3);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara tahun 2015-2023;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rancangan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Kayong Utara juga mengacu beberapa dokumen perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi dikarenakan dokumen ini diharapkan menjadi landasan penting dalam penyusunan RPJMD periode selanjutnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra OPD. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Adapun dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai acuan adalah: RPJM Nasional. RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, serta dengan misi:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut pemerintah memiliki 7 agenda pembangunan yaitu:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;

- 2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
- 3) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim;
- 5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh;
- 6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan;
- 7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kayong Utara, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada berpedoman pada RTRW Kabupaten, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Nasional 2008-2028. Keseluruhan dokumen perencanaan diatas saling keterkaitan dan kesinambungan antara yang satu dokumen dengan dokumen perencanaan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga perencanaan tidak berjalan sendiri-sendiri secara sektoral namun menjadi satu kesatuan system yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara adalah:

1. Sebagai instrumen untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam penyusunan RPJMD secara terpadu dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, terarah dan terukur;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Tujuan penyusunan Rancangan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Kayong Utara adalah:

1. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan RPJMD periode selanjutnya;
2. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menentukan program program prioritas;
3. Sebagai tolak ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPJMD sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Provinsi Kalimantan Barat
6. Menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan

program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Bab ini terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan strategi, arah kebijakan dan skala prioritas. Bab ini terdiri dari Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Kabupaten Kayong utara Tahun 2018-2023, serta tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Bab terdiri dari Visi; Misi; dan Tujuan dan Sasaran.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan

program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB VII. KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program pembangunan daerah serta pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan target capaian pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB IX. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan. Di Mana kecamatan-kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan laut. Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten paling kecil di Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah mencapai 4.568,26 km². Luas wilayah Sukadana yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kayong Utara mencapai 1.027,07 km² atau 22,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan Kecamatan Simpang Hilir merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas 1.538,99 km² atau 33,69 persen dari luas wilayah Kabupaten Kayong Utara. Luas wilayah Kabupaten Kayong Utara Menurut Kecamatan dapat dilihat pada table 2.1

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan 2017

Kecamatan District	Luas Wilayah Wide Area (Km²)	Presentase Precentage
Pulau Maya = Pulau Karimata	1.189,41	26,04
Sukadana	1.027,07	22,48
Simpang Hilir	1.538,99	33,69
Teluk Batang	654,77	14,33
Seponti	158,01	3,46
Kayong Utara Utara	4.568,26	100,00

Sumber Data: Kayong Utara Dalam Angka 2018

Menurut Undang-undang RI No 6 Tahun 2007 dan Surat Mendagri No. 135/439/SJ Tanggal 27 Februari 2007, luas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah 4.568,26 km². Luas wilayah ini relative kecil jika dibandingkan wilayah Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat. Kabupaten Kayong Utara terdiri dari lima kecamatan dan wilayah yang luas adalah kecamatan Simpang Hilir Selatan dengan luas 1.538,99 km², kemudian kecamatan Pulau Maya dengan luas 1.189,41 km², dan kecamatan yang paling kecil adalah Sempoti 3,46 % dari luas Kabupaten Kayong Utara dengan luas 158,01 km².

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara

Sumber: Kayong Utara Dalam Angka 2018

2.1.1.2. Batas Wilayah

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, kabupaten Ketapang, dan Selat Karimata;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang

Wilayah Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan. Di Mana kecamatan kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan laut.

2.1.1.3. Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Kayong Utara berada di sisi selatan Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 0 43' 5,15" Lintang Selatan sampai dengan 1 46' 35,21" Lintang Selatan dan 108 40' 58,88" Bujur Timur sampai dengan 110 24' 30,50" Bujur Timur.

Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau-pulau besar dan kecil, dataran rendah dan dataran tinggi, kawasan gambut dan rawa dengan 4 aliran sungai besar dan satu danau. Sebagian besar sungai-sungai tersebut bermuara ke laut dan selat.

2.1.1.4. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Kayong Utara membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi berbukit dan bergelombang. Kondisi kemiringan tanah menurut Kelas Lereng (Ha) khususnya Kecamatan Sukadana < 2 % sebesar 37.690 Ha, kelas Lereng 2 – 14 % 35.818 Ha, Kelas Lereng > 40 % 21.412 Ha dengan Jumlah total sebesar 94 920 Ha. Untuk Kecamatan Simpang Hilir untuk Kelas Lereng < 2 % sebesar 112.653 Ha, Kelas Lereng 2

– 14 % sebesar 87.949 Ha, Kelas Lereng 15 – 40 % sebesar 625 Ha, Kelas Lereng > 40 % sebesar 16.508 Ha dengan jumlah Total 217.280 Ha.

2.1.1.5. Kondisi Geologi

Sebagian besar daerah Kabupaten Kayong Utara terdiri atas tanah kuarter (322.040 Ha atau 76,30 persen), intrusif dan plutonik asam (68.145 Ha atau 16,14 persen), efusif tak dibagi (24.825 Ha atau 5,88 persen), intrusif dan plutonik basa menengah (6.325 Ha atau 1,50 persen), yang terhampar di sebagian besar setiap Kecamatan. Geologi kuarter merupakan kondisi yang rentan terhadap perubahan, baik secara alami maupun oleh ulah manusia yang akan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Formasi Geologi Kecamatan Sukadana memiliki tanah kuarter sebesar 50.120 Ha, 2.250 Ha Intrusif dan Plutonik Basa menengah, 7800 Ha Efusif Tak Dibagi dan Intrusif & Plutonik Asam. sedangkan Kecamatan Simpang Hilir memiliki Formasi Geologi 167.705 Ha tanah Kuarter dan 755 Ha tanah Trias, 4.075 Ha Intrusif dan Plutonik Basa Menengah, 17.025 Efusif tak dibagi, 27.720 Ha Intrusif dan Plutonik Asam.

2.1.1.6. Kondisi Hidrologi

Sistem hidrologi wilayah Kabupaten Kayong Utara berupa sungai-sungai besar yang sebagian membentuk anak sungai pada bagian hulu dan aliran sungai yang menghubungkan kawasan gambut ataupun rawa-rawa. Di Kabupaten Kayong Utara terdapat danau besar yakni Danau Najam. Sedangkan sungai besar adalah Sungai Simpang, Sungai Paduan, Sungai Siduk dan Rantau Panjang yang merupakan bagian dari DAS dengan sebagian besar bermuara langsung ke Laut dan Selat. DAS terluas adalah Sungai Simpang dengan luas 95,75 km² yang berada di kecamatan Simpang Hilir. Sedangkan sungai terpanjang di Kabupaten Kayong Utara adalah sungai Melano dengan panjang 57,33 km terletak di kecamatan Simpang Hilir.

Adapun sub DAS tersebar di bagian pedalaman atau hulu. Pada daerah kepulauan, pada umumnya sungai – sungai bermuara ke laut tanpa adanya anak sungai pada bagian hulu. Secara lebih lengkap Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kayong Utara 2017

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama DAS	Luas Area (km ²)
1. Pulau Maya	o Gandualan	18,09	Gondalawan	39,60
	o Besar	8,80		
	o Ledang	8,99		
	o Kepuyu			
2. Sukadana	o Beringin Siduk	23,99	Sungai Siduk	57,00
	o Randau Mayam Melinsum	8,11		
	o Semanai	14,21		
3. Simpang Hilir	o Melano	57,33	Sungai Simpang	95,75
	o Rantau Panjang	23,18		
	o Sungai Mata-mata	22,19	Sungai Rantau Panjang	26,25
4. Teluk Batang	o Paduan	27,11	Sungai Paduan	68,00
	o Simpang Lidah	21,55		
	o Sekuson	23,00		
	o Rangkas	11,80		
5. Seponti	Sepeti	13,88	Sungai Seponti	78,40
	Durian Sebatang	13,67	Sungai Lida	76,00
	Durhaka			
6. Kep. Karimata	Abon			

Sumber: *Kayong Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2. 3 Kondisi Air Tanah

No.	Air Tanah dan Mata Air	Lokasi	Sumberdaya	Kondisi
1	Kecamatan Sukadana	Riam Berasap	2 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
		Desa Sejahtera	2 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
		Desa Pampang	8 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
		Desa Pangkalan Buton	3 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
		Desa Sedahan Jaya	2 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
		Desa Benawai Agung	4 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
		Desa Harapan Mulia	6 Titik Mata Air	Layak Konsumsi

No.	Air Tanah dan Mata Air	Lokasi	Sumberdaya	Kondisi
2	Kec. Teluk Batang	Desa Teluk Batang	1 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
3	Kec. Pulau Maya	Desa Tanjung Satai	1 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
4	Kec. Kepulauan Karimata	Desa Padang	2 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
		Desa Pelapis	1 Titik Mata Air	Layak Konsumsi
5	Kec. Sukadana	Air terjun Riam Berasap dan Air Pauh,	Tinggi 10-12 meter, debit 0,2 dan 0.6 m ³ /detik	Indikasi

Sumber: *Kayong Utara Dalam Angka 2018*

2.1.1.7. Kondisi Klimatologi

A. Musim

Wilayah Kabupaten Kayong Utara dan umumnya di Indonesia, hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

B. Temperatur

Temperatur udara di suatu daerah antara lain dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dan iklim daerah tersebut. Kabupaten Kayong Utara sebagai salah satu wilayah Indonesia yang beriklim tropis, salah satu cirinya adalah mempunyai temperature udara yang relatif tinggi dan panas. Letak Kabupaten Kayong Utara yang relatif dekat dengan garis Khatulistiwa semakin memperkuat temperature yang relatif tinggi sehingga udaranya menjadi lebih panas.

Tabel 2. 4 Iklim dan Curah Hujan Kabupaten Kayong Utara

Suhu (Derajat Celcius)	Iklim	Curah Hujan (mm)
27-31	Tropis	200.00

Sumber: *Kayong Utara Dalam Angka 2018*

C. Curah Hujan

Curah Hujan di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah iklim, keadaan geografi dan perputaran / pertemuan arus udara. Pada tahun 2016 di Kabupaten Kayong Utara rata – rata curah hujan berkisar 314,83 mm lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Curah Hujan tertinggi terjadi di bulan Maret tahun 2016 sebesar 492,00 mm dan terendah di bulan Agustus 18 mm. Curah hujan sebesar itu termasuk tinggi dengan intensitas yang cukup, hal ini dipengaruhi oleh daerah yang memiliki hutan tropis yang lebat dan disertai dengan kelembaban udara yang tinggi.

Rata-rata hari hujan perbulan sepanjang tahun 2016 di Kabupaten Kayong Utara sebesar 13,83 hari, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 11,33 hari. Hari hujan terbanyak di bulan November sebanyak 18 hari dan terendah di bulan Juni, 9,6 hari selama sebulan. Adanya perubahan iklim global pada beberapa tahun terakhir juga memberi dampak langsung terhadap perubahan iklim di Kabupaten Kayong Utara. Hal ini terlihat dengan adanya pergeseran pola curah hujan dan hari hujan dicermati keterbandingannya antar waktu ke waktu dari tahun ke tahun.

Dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi di Kayong Utara Utara, biasanya akan selalu disertai kecepatan angin yang tinggi pula.

Tabel 2. 5 Rerata Curah Hujan Kayong Utara Tahun 2017

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)
1	Januari	397,5
2	Februari	517,0
3	Maret	492,0
4	April	255,0
5	Mei	408,5
6	Juni	326,0
7	Juli	222,5
8	Agustus	56,5

9	September		247,5
10	Oktober		256,5
11	November		443,0
12	Desember		156,0
	Rata-rata	2017'	314,83
		2016	314,83
		2005	284,58
		2014	218,12

*Sumber Data: Kayong Utara Dalam Angka 2018
Ket. 2017: data tahun sebelumnya.*

2.1.1.8. Kondisi Penggunaan Lahan

Luas Kabupaten Kayong Utara menurut Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka Tahun 2018 adalah 4.568,26 km². Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas Kabupaten Kayong Utara secara resmi. Dari total luasan tersebut terbagi dalam golongan penggunaan lahan antara lain Kawasan budidaya terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industry, pariwisata, pemukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah banjir. Banjir yang terjadi di Kayong Utara dampak dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Ketapang. Hal itu bisa dilihat, secara geografis Kayong Utara tidak terpisahkan dari lanskap Ketapang. Sehingga, Kayong Utara merupakan penerima dampak dari apapun bentuk pengelolaan sumber daya alam di Ketapang. Selain itu kawasan hutan dan kondisi taman nasional setempat mengalami kerusakan cukup parah. Selain kerusakan lingkungan tingginya curah hujan berpotensi banjir khususnya daerah pantai. Wilayah yang keda dampak banjir kecamatan Sukadana berupa banjir Rob.

Banjir juga melanda desa yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Ketapang, yaitu Desa Simpang Tiga dan Desa Riam Berasap. Selain bencana banjir Kabupaten Kayong Utara dilanda bencana tanah longsor di Kecamatan Kepulauan Karimata Desa Betok Jaya. Bencana kebakaran hutan dan lahan juga melanda Kabupaten Kayong Utara.

2.1.1.10. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Kayong Utara diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara guna mengembangkan Kabupaten Kayong Utara sebagai simpul, Pariwisata, industri, perdagangan, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi perikanan, pertanian dan pariwisata bahari dengan menetapkan hierarki dan fungsi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah, kawasan perkotaan dan perdesaan dan wilayah sekitarnya.

a. Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Perda Kabupaten Kayong Utara No.8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035, struktur ruang Kabupaten Kayong Utara sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat-pusat kegiatan seperti PKW, PKL, PPK, PPL tersebar di seluruh kecamatan. Sistem jaringan prasarana wilayah yang ada di Kabupaten Kayong Utara diantaranya sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan

telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Tabel 2.6 Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Kayong Utara

No	Pusat Kegiatan	Wilayah
1	Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan (PKWp)	Sukadana, Teluk Batang, Teluk Melano.
2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Desa Pelapis Kec. P. Karimata, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kawasn perkotaan Tanjung Satai Kec. P. Maya, Sempoti Jaya Kec. Sempoti
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Padang di Kecamatan Kepulauan Karimata; • Desa Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya; • Desa Betok Kecamatan Kepulauan Karimata; • Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang; • Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang; • Desa Kamboja Kecamatan Pulau Maya; • Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti; • Desa Simpang Tiga di Kecamatan Sukadana

Sumber data: Perda No. 15 Tahun 2015 RTRW Kab. Kayong Utara

Tabel 2. 7 Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Kayong Utara

No.	Sistem Jaringan	Prasarana Wilayah
1	Transportasi Darat, Laut, Udara	<p>Transportasi Darat</p> <p><i>Jalan arteri primer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ruas jalan Teluk Batang - Seponti - Muara Tiga Kabupaten Kubu Raya; ○ Ruas jalan Teluk Melano - Simpang Dua; ○ Ruas jalan Teluk Batang - Teluk Melano – Sukadana – Siduk <p><i>Jalan kolektor primer K1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ruas jalan Tanah Merah Kecamatan Sukadana; ○ Ruas jalan Lingkar Payak Hitam Kecamatan Sukadana; ○ Ruas jalan Sedahan Kecamatan Sukadana;

No.	Sistem Jaringan	Prasarana Wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruas jalan Tambak Rawang Kecamatan Sukadana; ○ Ruas jalan Ampera Kecamatan Simpang Hilir; ○ Ruas jalan Sukamaju Kecamatan Teluk Batang; ○ Ruas jalan Kamboja Kecamatan Pulau Maya. <p><i>Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Terminal Penumpang tipe B di Kecamatan Teluk Batang, Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Sukadana; ○ Terminal Penumpang tipe C di Desa Simpang Tiga di Kecamatan Sukadana, Desa Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir, Desa Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya dan Desa Seponti Jaya di Kecamatan Seponti; ○ Terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan pelabuhan laut, pusat perdagangan Teluk Batang dan Teluk Melano; ○ Jembatan timbang di Teluk Batang; ○ Unit pengujian kendaraan bermotor di Sukadana; <p><i>Angkutan sungai, danau dan penyeberangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelabuhan sungai Teluk Batang, Seponti Jaya, Durian Sebatang, Sukadana, dan Matan. ○ Transportasi penyeberangan : Tanjung Satai – Sukadana; b. Tanjung Satai – Betok; c. Tanjung Satai – Pelapis; d. Pelapis – Sukadana; dan e. Betok – Sukadana. f. Teluk Melano – Matan <p>Transportasi Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelabuhan pengumpul Nasional (Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang). ○ Pelabuhan Pengumpan Regional (Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata) ○ Pelabuhan Pengumpan Lokal: <ul style="list-style-type: none"> 1. pelabuhan Sukadana di Kecamatan Sukadana; 2. Pelabuhan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya; 3. Pelabuhan Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir; 4. Pelabuhan Pelapis di Kecamatan Kepulauan Karimata; 5. Pelabuhan Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya. <p>Transportasi Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bandar udara pengumpan ditetapkan di Kecamatan Simpang Hilir; ○ Bandar udara penerbangan perintis ditetapkan di

No.	Sistem Jaringan	Prasarana Wilayah
		Pulau Karimata (Air Strip untuk daerah terisolir).
2.	Energi dan Kelistrikan	<p>Pembangkit tenaga listrik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembangkit listrik tenaga gas batu bara di Teluk Batang; ○ Pembangkit listrik tenaga diesel di Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Simpang Hilir; ○ Pembangkit listrik tenaga air di Riam Berasap Kecamatan Sukadana, desa Betok dan desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata; ○ Pembangkit listrik tenaga hybrid di desa Pelapis dan desa Betok Kecamatan Kepulauan Karimata; ○ Pembangkit listrik tenaga surya di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Simpang Hilir; ○ Pembangkit listrik tenaga uap Sukadana di Kecamatan Sukadana
3.	Telekomunikasi	<p>Transmisi telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Stasiun telepon otomatis (STO) di Kecamatan Sukadana; ○ Rumah Kabel dan kotak pembagi tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang; ○ Jaringan kabel sekunder tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang; ○ Satuan sambungan telepon tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang; ○ Jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke telepon genggam dengan menggunakan sistem GSM, CDMA, dan/atau UMTS (3G); ○ Jaringan satelit tanpa menggunakan BTS; ○ Jaringan multimedia terpusat di Kota sukadana; ○ Telekomunikasi untuk penanganan bencana yang tersebar di seluruh kecamatan di Daerah; ○ Pembangunan stasiun Radio Lokal sebagai di Sukadana; ○ Penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.
4.	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> ● Daerah Sungai dan Rawa Nasional ● Penatagunaan pada DAS Matan wilayah cangkupan Taman Nasional Gunung Palung ● Pemanfaatan sumber irigasi untuk pertanian, transportasi dan pembangkit listrik. ● Daeah Rawa Nasional ● Daerah rawa Teluk Batang, Padu Banjar, Tanjung Satai;

No.	Sistem Jaringan	Prasarana Wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> • Daerah rawa provinsi • Daerah rawa Mata-Mata, Rantau Panjang, Siduk, Kamboja, Penjalaan, Sei Paduan, Gunung Tujuh. • Daerah rawa kabupaten • Daerah rawa Pelerang, Mentubang, Sei Belit, Riam Berasap, Teluk Batang I, Alur Bandung, Pemangkat, Nipah Kuning, Dusun Besar, Dusun Kecil; • Daerah irigasi Provinsi • Budi daya pertanian lahan basah; daerah irigasi Begasing, Sedahan, Munting. • Budidaya pertanian lahan kering terletak di Kecamatan Seponti • Daerah irigasi kabupaten • Daerah irigasi Tanjung Belimbing, Tanjung Gunung, Mentubang, Air Paoh, Sejahtera, Tambak Rawang, Tanah Merah, Sembutak, Batu Bedil, Setegar, Payak Itam, Rantau Panjang, dan daerah irigasi Matan. • Prasarana air baku dan air bersih • Pengembangan system perpipaan (intake) air baku dari sumber Cabang Panti Gunung Palung, Gunung Topeng, Gunung Peramas, Gunung Mandi Bintang, Begasing, Air Lalau dan Riam Berasap di Kecamatan Sukadana, Gunung Dusun di Kecamatan Pulau Maya. • Pengembangan air baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya; • pengembangan prasarana air baku Sungai Paduan di Kecamatan Teluk Batang, Sungai Sepeti Kec. Seponti, dan air tanah sebagai sumber air bersih. • Jaringan air bersih perkotaan dan perdesaan. • Sistem pengendalian banjir sungai dan pasang naik kawasan pesisir.
5.	Prasarana Pengolahan Lingkungan	<p>Jaringan prasarana dan pengelolaan lingkungan</p> <p>TPS berada di setiap desa, dan TPA di setiap kecamatan, pembangunan dan normalisasi saluran drainase kota dan pemukiman, pengolahan dan pembuangan air limbah.</p> <p>Jaringan prasarana air bersih</p> <p>pembangunan bendungan/bendung/embung dan sistem jaringan air bersih;</p> <p>Pemenuhan air bersih/ minum dengan perpipaan.</p>

Sumber data: Perda No.8 Tahun 2015 tentang RTRW Kab. Kayong Utara

b. Kawasan Strategis Kabupaten

Selain Pusat Kegiatan Lokal, Rencana Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Kayong Utara terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Kayong Utara adalah:

Dari Sudut Kepentingan ekonomi Meliputi :

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maya Karimata;
- Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Seponti, Teluk Batang, Simpang Hilir, Pulau Maya dan Sukadana;
- Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Perawas – Teluk Melano;
- Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Teluk Melano – Teluk Batang;
- Kawasan Strategis pelabuhan Samudera Pelapis sebagai kawasan pengembangan Tanki Timbun CPO;
- Kawasan Strategis perkotaan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Kayong Utara dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan pariwisata;
- Kawasan Strategis Pusat Informasi Kepulauan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Karimata.
- Kawasan Strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir
- Kawasan Minapolitan Sukadana di Kecamatan Sukadana;
- Kawasan Minapolitan Rantau Panjang di Kecamatan Simpang Hilir;
- Kawasan Minapolitan Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang;
- Kawasan Minapolitan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya;
- Kawasan Minapolitan Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi :

- Kawasan Strategis Penyangga Taman Nasional Gunung Palung;
- Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove;
- Kawasan Strategis Perhutanan Sosial di Kecamatan Pulau Maya;
- Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan terumbu Karang di Kepulauan Karimata dan sekitarnya

Sudut kepentingan sosial budaya meliputi :

- Kompleks makam raja-raja Sukadana;
- Perkampungan adat Bali di Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana;
- Kawasan pantai Pulau Datuk di Kecamatan Sukadana;

c. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan

Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan hewan besar, dengan komoditas unggulan berupa komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan pertanian tanaman pangan Kabupaten Kayong Utara meliputi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.

Untuk kawasan pertanian hortikultura tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Sedangkan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan

Kecamatan Pulau Maya. Kawasan perkebunan dikembangkan di Kecamatan Seponti, Teluk Batang dan Simpang Hilir.

Peruntukan Kawasan peternakan tersebar di Kabupaten Kayong Utara dan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Pengembangan dan pengelolaan peternakan dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak. Pengembangan kawasan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis perikanan tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti, dan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.

Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap diarahkan pada Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Kawasan perikanan budidaya terdiri atas kawasan budidaya perikanan air tawar, budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut, budidaya rumput laut, dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan.

Kawasan perikanan air tawar berlokasi di kawasan rawa dan sungai di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana, Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana. Kawasan perikanan air payau berlokasi di Desa Dusun Besar, Desa Satai Lestari, dan Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya. Budidaya rumput laut berlokasi di Kecamatan Kepulauan Karimata. Kawasan budidaya perikanan laut terletak pada kawasan kepulauan dan pesisir di Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Pelabuhan pendukung kegiatan perikanan

terdiri atas kawasan pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Sukadana, kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai berada di Teluk Batang.

d. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan budidaya peruntukan Hutan Produksi Konversi tersedia seluas 3.515,24 Ha tersebar di beberapa Kecamatan diantaranya Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir, Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana. Kawasan hutan yang digunakan sebagai Taman Nasional Gunung Palung adalah dengan luas 88.371 hektar, luas hutan lindung sebesar 75.177 Ha, luas hutan produksi sebesar 82.987 Ha.

e. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya dan kawasan wisata buatan. Kawasan wisata alam tersebar di beberapa lokasi diantaranya (1) Pantai Pulau Datuk; (2) Pantai Pasir Mayang, dan Pantai Tambak Rawang di Kecamatan Sukadana; (3) Air terjun Air Paoh dan air terjun Riam Berasap Kecamatan Sukadana; (4) Kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kecamatan Sukadana; (5) Bukit Batudaya di Kecamatan Simpang Hilir dan: (6) wisata bahari menjadi andalan Kabupaten Kayong Utara berupa, kawasan terumbu karang di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Kawasan wisata budaya direncanakan di Desa Sedahan Jaya dan Batu Cap di Kecamatan Sukadana. Dan Kawasan wisata buatan diarahkan pada kawasan Pantai Pulau Datuk di Kecamatan Sukadana dan tersebar di wilayah Kabupaten Kayong Utara lainnya.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas

Pengelolaan kawasan peruntukan tambang di Kabupaten Kayong Utara terdiri dari pertambangan mineral logam dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan mineral logam dan mineral bukan

logam dan batuan dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan berdasarkan usulan penetapan Wilayah Pertambangan.

Usulan penetapan Wilayah Pertambangan disampaikan Bupati kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan pertimbangan BKPRD Kabupaten. Usulan penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana untuk mineral logam dan bukan logam disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan dan harus berada di luar kawasan taman nasional, kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan.

g. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan peruntukan industri sedang dan rumah tangga meliputi sentra industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Teluk Batang, sentra industri pengolahan hasil Perkebunan dan Pertanian di Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Simpang Hilir. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan peruntukan industri lainnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

2.1.2. Aspek Demografis

2.1.2.1. Jumlah Penduduk Penyebaran dan Gender

Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2017 sebanyak 109.101 jiwa, yang terdiri dari 50,88% laki-laki, dan 49,12% perempuan dan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kayong Utara sebesar 104. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Kayong Utara didominasi penduduk laki-laki, selain itu juga persebaran penduduk berdasarkan kelompok, umur, penduduk Kabupaten Kayong Utara di dominasi yang berusia 0-14 tahun, dengan kepadatan penduduk sekitar 23 jiwa/km². Dari

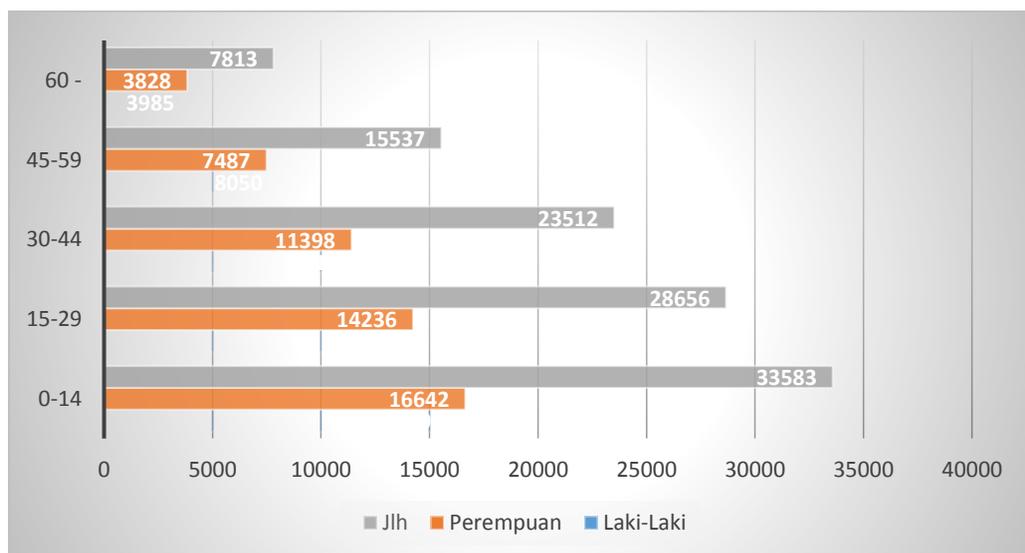
enam kecamatan, di Kabupaten Kayong Utara, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Simpang Hilir, dengan presentase sekitar 30% dari total penduduk Kabupaten Kayong Utara. Daerah yang terpadat penduduknya adalah kecamatan Teluk Batang dengan kepadatan 101,02 Jiwa/km² dan kecamatan Sukadana sebagai ibu kota Kabupaten Kayong Utara terpadat kedua setelah Kecamatan Teluk Batang dengan kepadatan 47,83 jiwa/km².

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara 2017

No.	Kecamatan	Luas (km)	Jiwa	%	Kepadatan Penduduk
1	Pulau Maya	1.105,30	15.130	13,87	13,69
2	Sukadana	517,33	24.743	22,68	47,83
3	Simpang Hilir	2.031,09	32.565	29,85	16,03
4	Teluk Batang	213,82	21.601	19,80	101,02
5	Seponti	417,74	11.551	10,59	27,65
6	Kep. Karimata	282,97	3.511	3,22	12,41
TOTAL		4.568.26	109.101	100	23,88

Sumber: *Kayong Utara Dalam Angka 2018*

Gambar 2. 2 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017



Sumber: *Kabupaten Kayong Dalam Angka 2018*

2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 109.101 jiwa, meningkat sebesar 1,7 % dibanding tahun 2016 berjumlah 107.268 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,8 % per tahun sebagaimana tabel berikut.

Gambar 2. 3 Pertumbuhan Penduduk Kab. Kayong Utara Tahun 2013-2017



Sumber data : Kab. Kayong Utara Dalam Angka 2018

Pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat setiap tahunnya disebabkan angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Sedangkan struktur penduduk di Kabupaten Kayong Utara mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

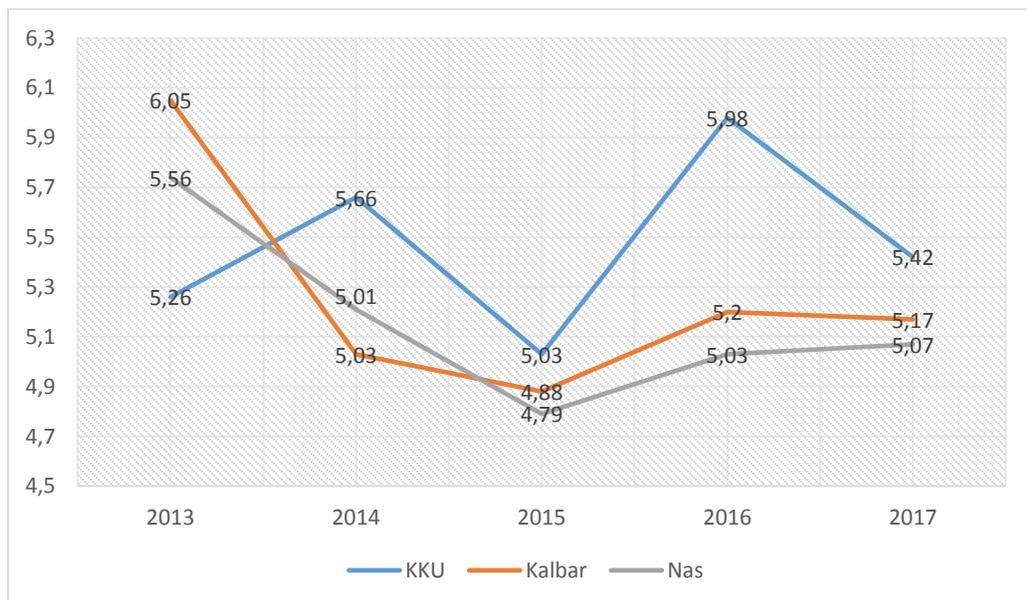
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kayong Utara selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara sebesar 5,26 persen. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,4 persen, namun pada tahun 2015 melambat sebesar 0,63

persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara pada tertinggi dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) yaitu pada tahun 2016 sebesar 5,98 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara berada diatas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,03 persen dan Provinsi sebesar 5,20 persen pada tahun yang sama.

Bila dilihat dari kurun waktu 2014 – 2017 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara telah melampaui kinerja baik Provinsi Kalimantan Barat, bahkan telah melampaui kinerja pertumbuhan ekonomi Nasional, sebagaimana tabel dibawah ini.

Gambar 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kayong Utara, Provinsi dan Nasional Tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Provinsi Kalbar 2018-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2016 meningkat dratis sebesar 0,95 persen dibanding tahun sebelumnya yang berata diatas rata-rata Nasional dan Provinsi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 didukung oleh peningkatan terhadap sektor pertanian sebesar 2,04 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,48 persen, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 5,87 persen, walaupun ada sektor-sektor lainnya yang melambat pada tahun yang sama tetapi tidak mempengaruhi terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Kayong Utara secara keseluruhan.

Tabel 2.9 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017

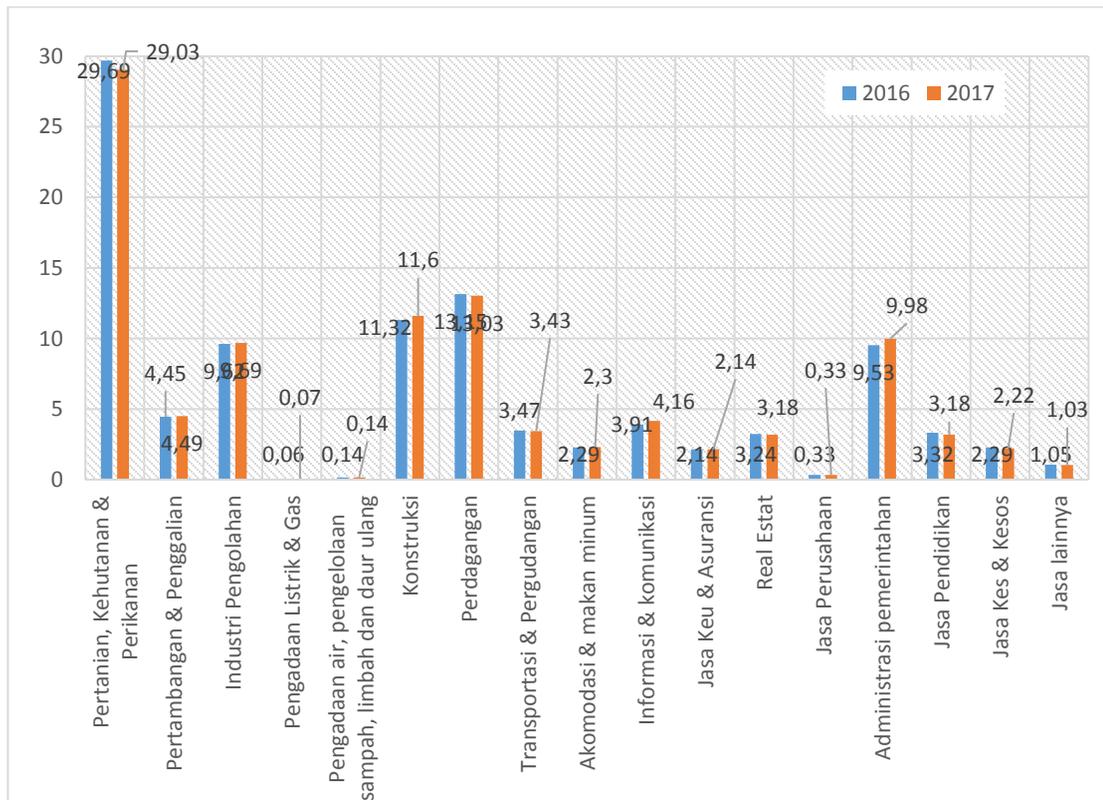
No	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,88	31,30	30,31	29,69	29,03
2	Pertambangan dan Penggalian	4,34	4,36	4,38	4,45	4,49
3	Industri Pengolahan	10,04	9,79	9,47	9,62	9,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
6	Konstruksi	10,41	10,56	11,02	11,32	11,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,82	12,90	13,18	13,15	13,03
8	Transportasi dan Pergudangan	3,34	3,44	3,45	3,47	3,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,14	2,17	2,25	2,29	2,30
10	Informasi dan Komunikasi	3,74	3,74	3,84	3,91	4,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,16	2,17	2,14	2,14
12	Real Estate	3,43	3,37	3,33	3,24	3,18
13	Jasa Perusahaan	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,23	8,78	9,16	9,53	9,98
15	Jasa Pendidikan	3,50	3,45	3,43	3,32	3,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,33	2,33	2,37	2,29	2,22
17	Jasa Lainnya	1,14	1,11	1,10	1,05	1,03
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kayong Utara

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 mengalami penurunan terutama pada sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hingga 0,66 persen. Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian turun sebesar 0,42 persen, Kehutanan dan Penebangan kayu sebesar 0,07 persen dan perikanan sebesar 0,15 persen. Walaupun angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara menurun menjadi 5,42 persen, tetapi angka tersebut masih di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07 persen dan provinsi sebesar 5,17 persen.

Jika dilihat secara sektoral, pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Kayong Utara rata-rata lebih tinggi pertumbuhan ekonomi sektoral. Hanya terdapat 4 (empat) sektor ekonomi yang pertumbuhannya lebih rendah yaitu sektor pertambangan-penggalian, industri pengolahan, sektor perdagangan-hotel-restoran, dan sektor pertanian. Relatif lebih pesatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Kayong Utara mengindikasikan bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten Kayong Utara relatif tidak tertinggal dibanding Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat.

Gambar 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Kab. Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016-2017



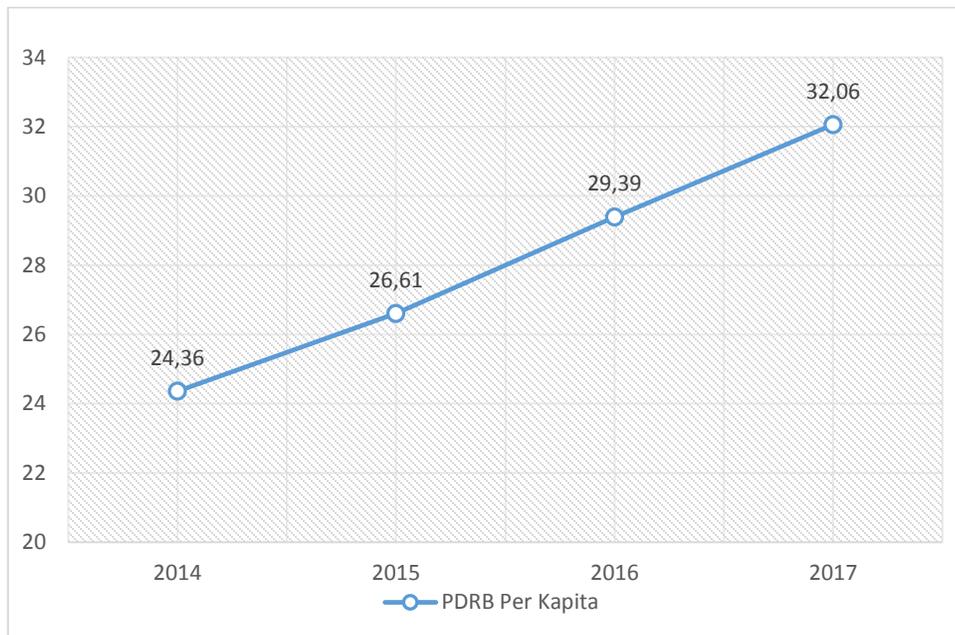
2.2.1.2. PDRB per Kapita

Pada tahun 2017 PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten Kayong Utara adalah sebesar 32,06 juta rupiah. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Kayong Utara selama satu tahun pendapatan rata-ratanya sebesar 32,06 juta rupiah. Bila dibanding tahun sebelumnya 2016 sebesar 29,39 juta rupiah, meningkat sebesar 9,10 persen. Kondisi PDRB per kapita Kabupaten

Kayong Utara dari tahun 2014 – 2017 menunjukkan peningkatan rata-rata setiap tahunnya sebesar 9,59 persen.

PDRB Kabupaten Kayong Utara masih diatas Kabupaten Bengkayang sebesar 29,91 juta rupiah, Landak sebesar 24,46 juta rupiah, Mempawaah sebesar 27,05 juta rupiah, Sekadau sebesar 26,90 juta dan Melawi sebesar 21,56 juta rupiah.

Gambar 2. 6 PDRB Per Kapita Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014–2017 (Juta Rp)



Sumber: BPS Kab. Kayong Utara

2.2.1.3. Indeks Gini

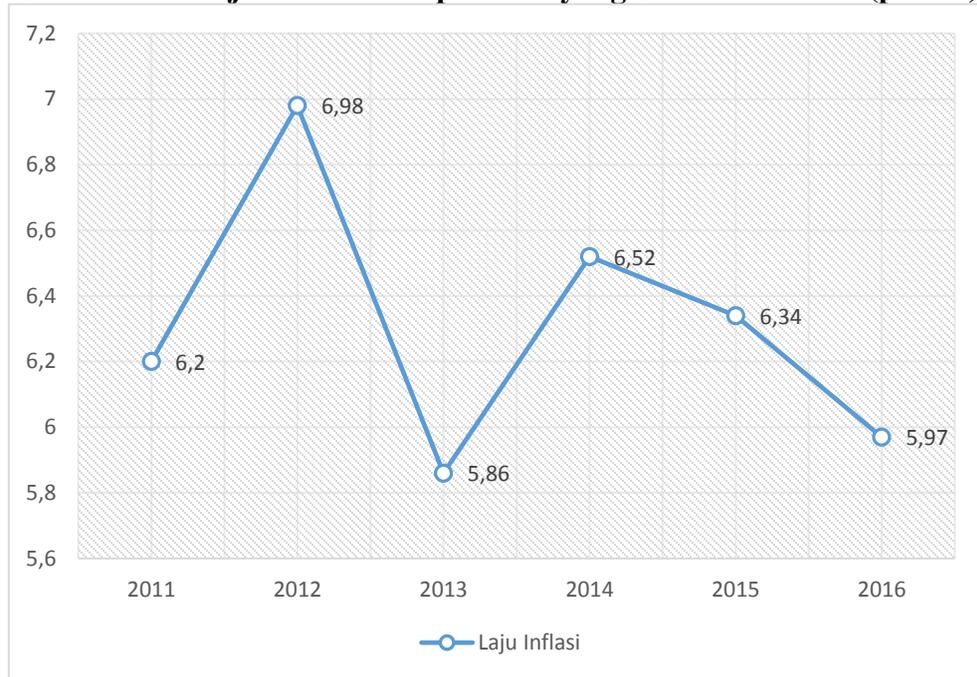
Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Indek gini Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu 2013-2017 berfluktuasi berkisar 00,31 hingga 00,16. Pada tahun 2013 kondisi indek gini pada angka 00,31 mengalami penurunan pada tajam dengan angka 00,16, kemudian naik lagi pada tanhun 2017 menjadi 00,28. Kondisi indek gini Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 masih sejajar bahkan lebih baik

dibanding dengan beberapa kabupaten/ kota lainnya se Kalimantan Barat atau Provinsi Kalimantan Barat dengan angka 00,33.

2.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah. Inflasi yang tinggi mengindikasikan perekonomian yang tidak stabil, tetapi inflasi yang bernilai nol juga tidak baik bagi perekonomian yang mengindikasikan perekonomian sedang lesu. Oleh karena itu angka inflasi harus dijaga kestabilannya diambang kenormalan karena inflasi juga akan mempengaruhi indikator-indikator ekonomi lainnya termasuk tingkat suku bunga dan investasi. Salah satu gejala terjadinya inflasi adalah terjadinya lonjakan harga yang tajam sehingga bisa menyebabkan daya beli masyarakat sedikit menurun. Jika dilihat secara berkala, laju inflasi atas dasar harga produsen Kabupaten Kayong Utara memiliki trend yang searah dan selalu lebih tinggi dibanding laju inflasi Kalimantan Barat. Laju inflasi Kalimantan Barat tahun 2016 sebesar 4,19 persen, relative lebih rendah dari pada laju inflasi Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 5,97 persen. Kondisi wilayah dan biaya transportasi diduga memberikan dampak pada tingginya harga-harga di Kabupaten Kayong Utara, termasuk meningkatkan biaya faktor produksi sehingga harga barang pada tingkat produsen mengalami inflasi.

Gambar 2. 7 Laju Inflasi Kabupaten Kayong Utara 2011-2016 (persen)

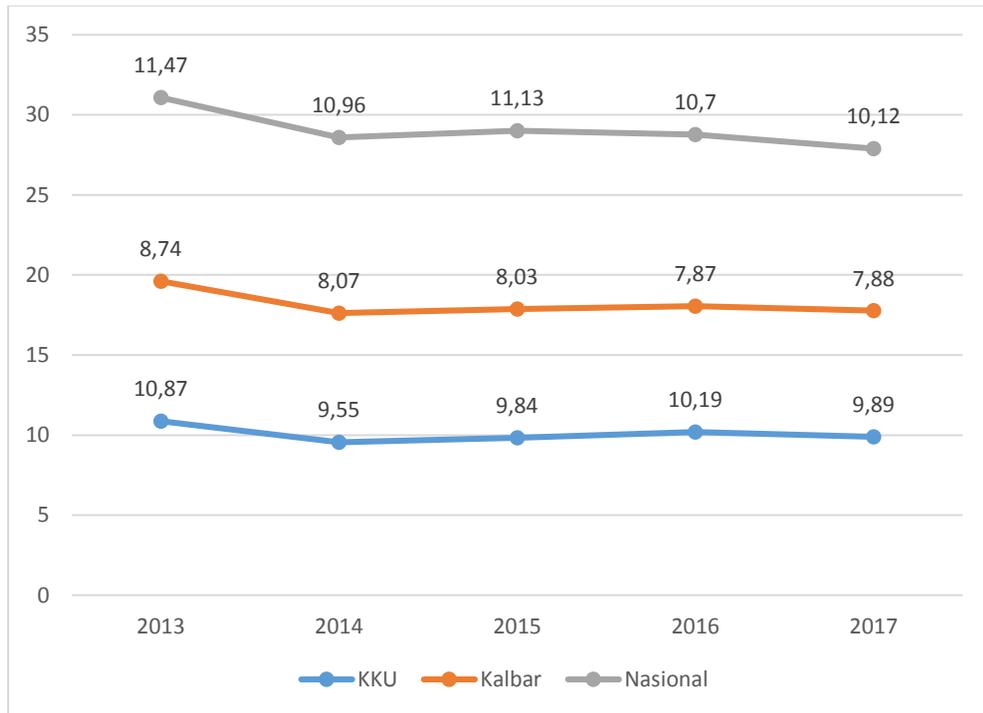
Sumber data : BPS Kab. Kayong Utara

2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Jadi, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan.

Selama kurun waktu 2013-2017 jumlah penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara berfluktuasi dengan rata-rata pertahun sebesar 10,07 persen dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2013 dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,87, kemudia pada tahun 2014 dan 2015 turun berkisar 1,2 persen dan kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 10,19 persen, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 9,89 persen, sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kayong Utara, Kalbar dan Nasional Tahun 2013-2017



Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Data pada Gambar 2.8 di atas menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara sudah berada dibawah Nasional, namun masih diatas rata-rata Provinsi. Kondisi ini menjadi bahan kajian perencanaan pembangunan dan penganggaran dalam menentukan strategi, arah kebijakan, dan program yang dapat menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari tahun ke tahun.

2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Kayong Utara bersih berkisar antara 3-5 persen selama kurun waktu Tahun 2013-2017. Pengangguran terbuka pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,90 poin yaitu menjadi 3,76 persen dibanding kondisi pada tahun 2013 sebesar 4,66 persen. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 5,00 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 59,69 turun dibanding tahun 2014 sebesar 70,43 persen. Untuk tahun 2016 BPS tidak melakukan survei sehingga data TPT maupun TPAK tidak tersedia.

Kondisi TPT Kabupaten Kayong Utara masih dibawah kabupaten Kubu Raya dan diatas Kabupaten Sambas sebagaimana tabel 2.10

Tabel 2. 9 Perkembangan Tingkat PengangguranTerbuka Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sambas	3,03	3,70	4,85	n.a	4,24
2	Bengkayang	2,30	3,74	3,15	n.a	2,40
3	Landak	3,24	3,43	5,81	n.a	2,03
4	Mempawah	5,66	5,57	7,12	n.a	6,72
5	Sanggau	0,78	3,25	5,13	n.a	3,27
6	Ketapang	4,70	2,06	4,29	n.a	3,97
7	Sintang	2,24	3,06	2,48	n.a	1,93
8	Kapuas Hulu	2,09	2,02	3,00	n.a	2,21
9	Sekadau	1,44	0,31	2,97	n.a	0,64
10	Melawi	3,99	2,46	3,03	n.a	2,11
11	Kayong Utara	4,66	4,08	3,76	n.a	5,00
12	Kubu Raya	9,26	6,18	6,11	n.a	5,91
13	Kota Pontianak	6,12	7,05	9,44	n.a	9,36
14	Kota Singkawang	4,59	8,22	6,12	n.a	8,08

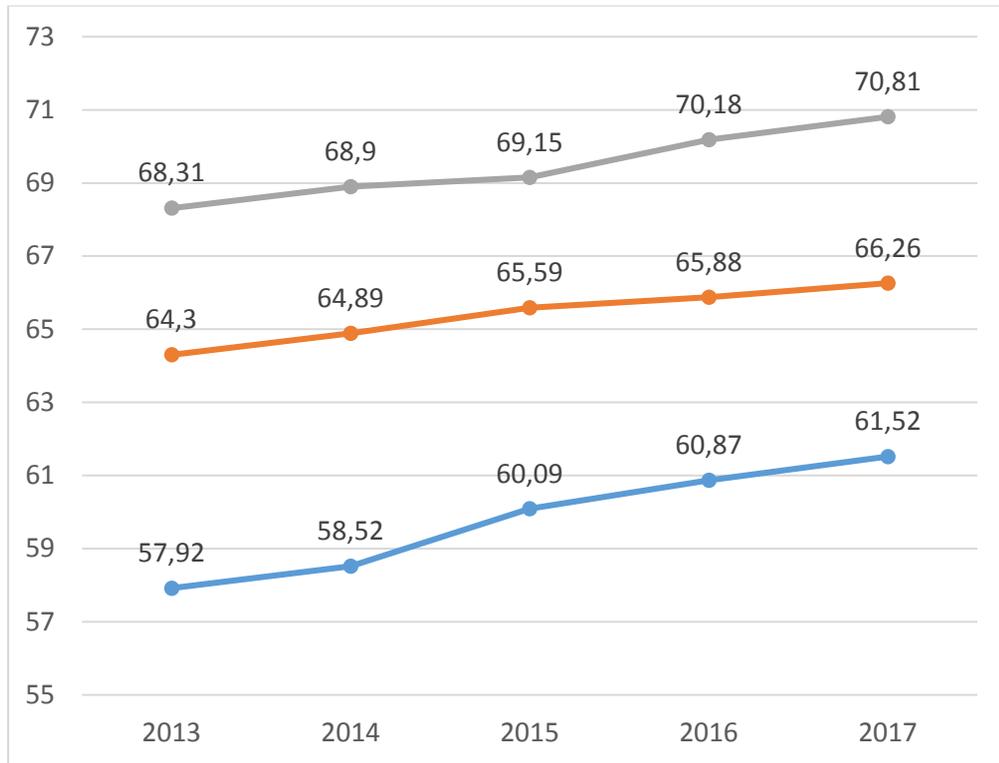
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kayong Utara cenderung mengalami kemajuan dimana pada tahun 2013 IPM Kabupaten Kayong Utara sebesar 57,92 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi 61,52. Bila dilihat secara rata-rata peningkatan angka IPM Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,90 point.

Kondisi IPM Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 masih lebih rendah dibanding IPM Provinsi sebesar 66,26 dan IPM Nasional sebesar 70,81. Peringkat IPM Kabupaten Kayong Utara dibanding dengan 14 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat 14 dan dibawah Kabupaten Sekadau.

Gambar 2. 8 Kondisi IPM Kabupaten Kayong Utara Terhadap Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017



Sumber: RPJMD Provins Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

2.2.1.8. Konflik Sosial

Faktor keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah. Kondusifitas di suatu wilayah juga berperan dalam mendorong datangnya investasi di wilayah tersebut. Selama periode 2013-2018, kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Kayong Utara cukup kondusif dengan digambarkan tidak terdapatnya kasus konflik sosial di masyarakat.

2.2.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indek kualitas lingkungan berisi pengukuran rutin dari variabel fisik, kimia dan biologi yang mana ditujukan untuk menggambarkan kondisi lingkungan. Idek kualitas lingkungan Hidup (IKLH) meliputi kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan yang direpresentasikan melalui

nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Data ini biasanya informasi penting untuk memutuskan efektivitas dari regulasi dalam peningkatan kualitas lingkungan. Secara konseptual, data pemantauan lingkungan menyediakan umpan balik yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas aktivitas regulasi. Selain itu IKLH dapat juga menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

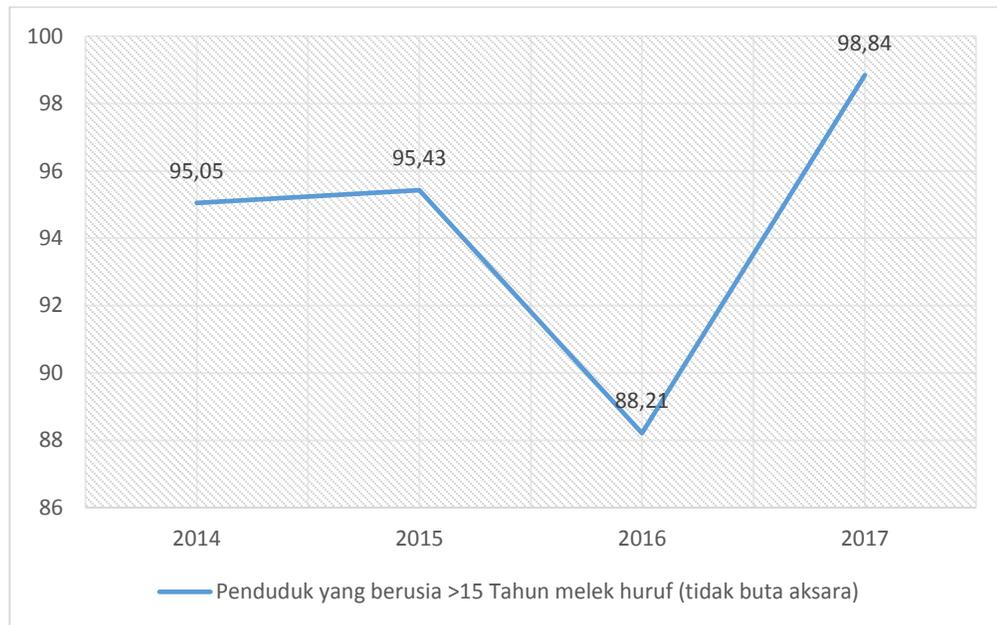
Disamping itu estimasi timbunan sampah Kabupaten Kayong Utara 86,45 m³/hari. Permasalahan sampah dihadapi terhadap pengelolaan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem Open Dumping dan belum ada pengolahan lebih lanjut untuk penanganan masalah sampah tersebut.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka melek huruf Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2017 sebesar 98,84% mengalami kenaikan sebesar 10,63% dari tahun sebelumnya dengan nilai 88,21%. Hal ini berbeda dibanding dengan angka melek huruf provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar 93,25% menurun sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 93,28%.

Gambar 2. 9 Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) 2014-2017



Sumber Data: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) tahun 2014 berada pada posisi 95.05% yang kemudian naik menjadi 95.43% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 88.21% dan kembali naik secara signifikan menjadi 98.84% satu tahun kemudian.

2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas

pendidikan semakin baik. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kayong Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sebesar 5,85 tahun. Namun bila dibandingkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat, Kabupaten Kayong Utara termasuk pada urutan terendah dibawah Kabupaten Bengkayang dengan angka 6,09 Tahun dan tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 9,79 tahun.

Tabel 2. 10 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,14	5,19	5,37	5,84	5,85

Sumber: Kabupaten Kayong Dalam Angka 2018

2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan dari tahun ketahun seiring dengan peigkatakan angka Rata-rata Lama Sekolah. HLS Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2013 sebesar 10,58 pada tahun 2014 menjadi 10,89, pada tahun 2015 meningkat dengan angka 11,74 dan seterusnya hingga tahun 2017 mencapai angka 11,78 tahun sebagaimana tabel 2.11 dibawah ini.

Tabel 2. 11 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	10,58	10,89	11,74	11,75	11,78

Sumber: Kabupaten Kayong Dalam Angka 2018

2.2.2.3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup menjadi ukuran statistik yang umum digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat

bertahan hidup dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Dengan membaiknya kondisi kesehatan, sosial dan perekonomian daerah, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka pada tahun 2013 angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Kayong Utara sebesar 67,03 tahun meningkat menjadi 67,46 tahun pada tahun 2017. Peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,3 poin, begtu juga pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,06 poin dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,07 poin atau dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,12 % per tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kayong Utara dari tahun ke tahun seorang bayi yang dilahirkan dapat hidup lebih lama di banding tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2. 12 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,03	67,03	67,33	67,39	67,46

Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2018

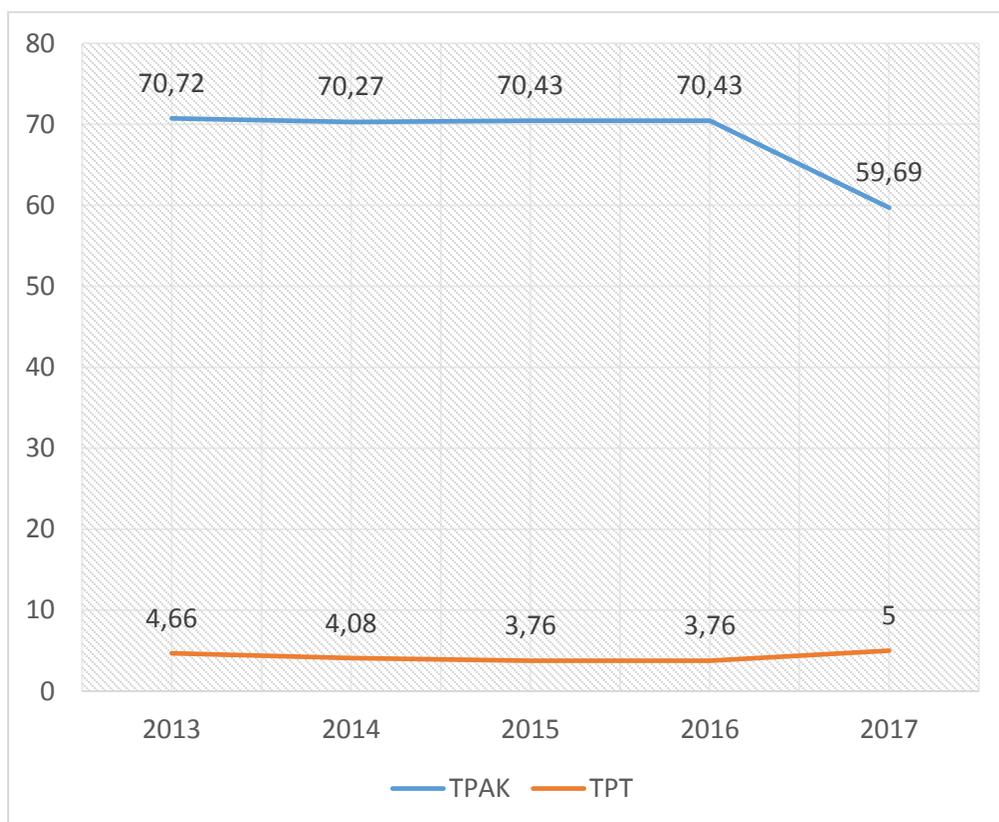
2.2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena dengan bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2017 sebesar 59,69 % menurun

dibanding tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan rata-rata pertahun sebesar 70,30 %.

Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lapangan kerja utama berada pada sector pertanian sebesar 66,15 %% dan yang terendah pada sector keuangan sebesar 0,19 %. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 70,72 %. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kayong Utara sebesar 5,00 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,76 %. Dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka jadi meningkat.

Gambar 2. 10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017



Sumber data : Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2018

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) diperoleh dengan penghitungan jumlah gelanggang yang ada dibagi dengan jumlah

penduduk Kayong Utara dikali 1000 penduduk. Gelanggang/balai remaja di Kabupaten Kayong Utara belum terdapat dari tahun 2013-2014. Namun, dari tahun 2015-2016 telah terdapat gelanggang/balai remaja sebanyak 2 (dua) gelanggang dan tidak terdapat gelanggang/balai remaja pada tahun 2017.

Gambar 2. 11 Jumlah Lapangan Olah Raga 2013-2017



Sumber Data: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa jumlah lapangan olah raga di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal jumlah lapangan olah raga tahun 2013 sebanyak 13 (tiga belas) buah yang kemudian mengalami penurunan menjadi 9 (sembilan) buah pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut naik menjadi 12 (dua belas) buah dan tahun 2016 pada angka yang sama sebesar 12 (dua belas buah) yang kembali mengalami penurunan menjadi 8 (buah) satu tahun kemudian.

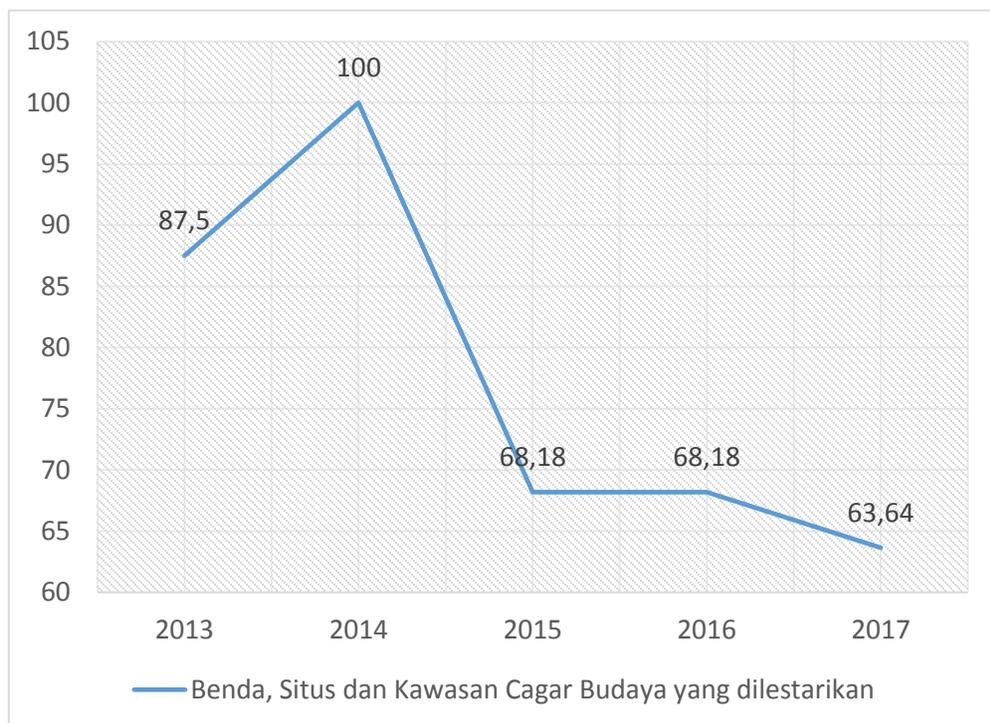
2.2.3.2. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali secara rutin per tahun selama kurun 2013-2016 yang kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 4 (sempat) kali. Selain penyelenggaraan seni dan

budaya Kabupaten Kayong Utara memiliki Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan diperoleh dengan memperhitungkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dikali 100%. Adapun capaian pada indikator tersebut di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 12 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 2013-2017



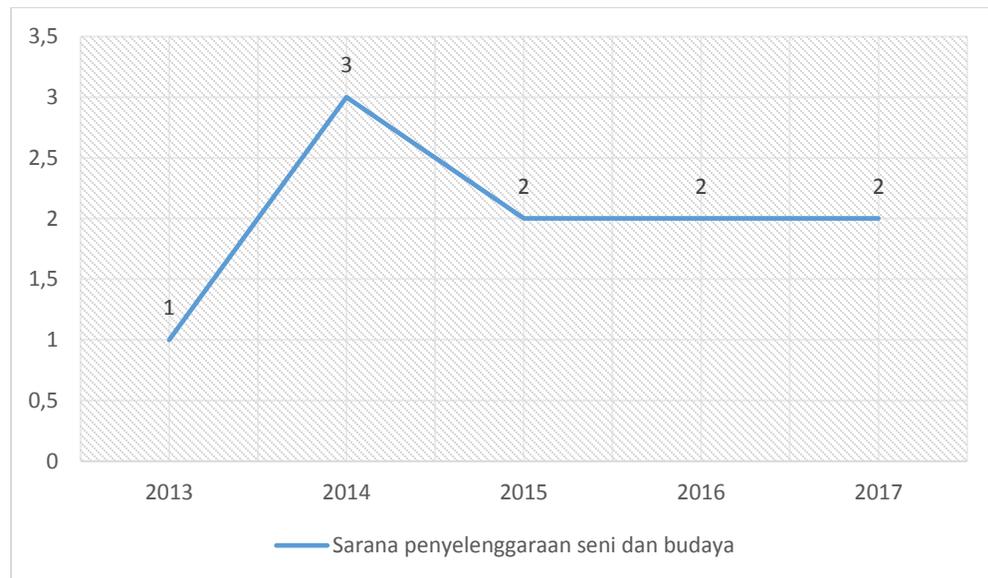
Sumber Data: LKPJ KKU Tahun 2017

Beradsarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2013 berada pada posisi 87.5% yang kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut mengalami penurunan secara signifikan pada angka 68.18% dan tahun 2016 pada angka

yang sama sebesar 68.18% yang kembali mengalami penurunan menjadi 63.64% satu tahun kemudian.

2.2.3.1 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Gambar 2. 13 Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya 2013-2017



Sumber Data: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa jumlah saranan penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2015 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal sarana penyelenggaraan seni dan budaya tahun 2013 sebanyak 1 (satu) buah yang kemudian naik menjadi 3 (tiga) buah dan berada pada angka 2 (dua) buah dari tahun 2015-2017.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

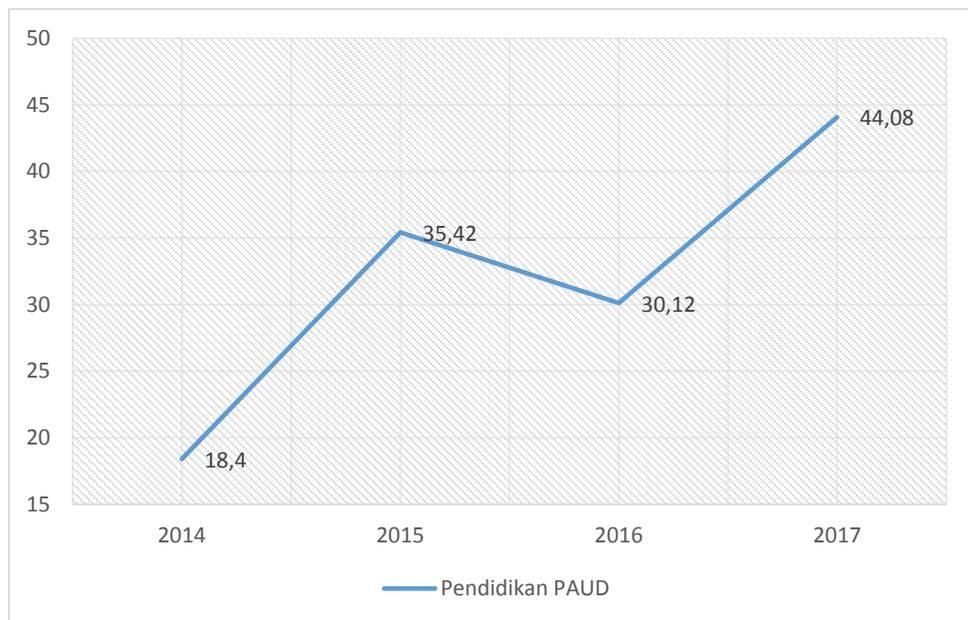
Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan poin yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah, yang mana pembangunan pendidikan suatu wilayah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, oleh karena itu perlu diupayakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengetahui tingkat capaian penyelenggaraan urusan bidang pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, indikator-indikator yang digunakan

adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Kayong Utara.

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Partisipasi pendidikan merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka partisipasi bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan (PAUD). Di Kabupaten Kayong Utara partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun. Adapun capaian pendidikan PAUD di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017:

Gambar 2. 14 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2014-2017



Sumber: Data diolah LKPJ KKU tahun 2014-2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal pendidikan PAUD tahun 2014 berada pada posisi 18.4% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 35.42% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 30.12% dan kembali naik menjadi 44.08% satu tahun kemudian.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka partisipasi kasar bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang tertentu (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) dengan jumlah penduduk usia tertentu (7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun). Adapun capaian pendidikan pada APK di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016:

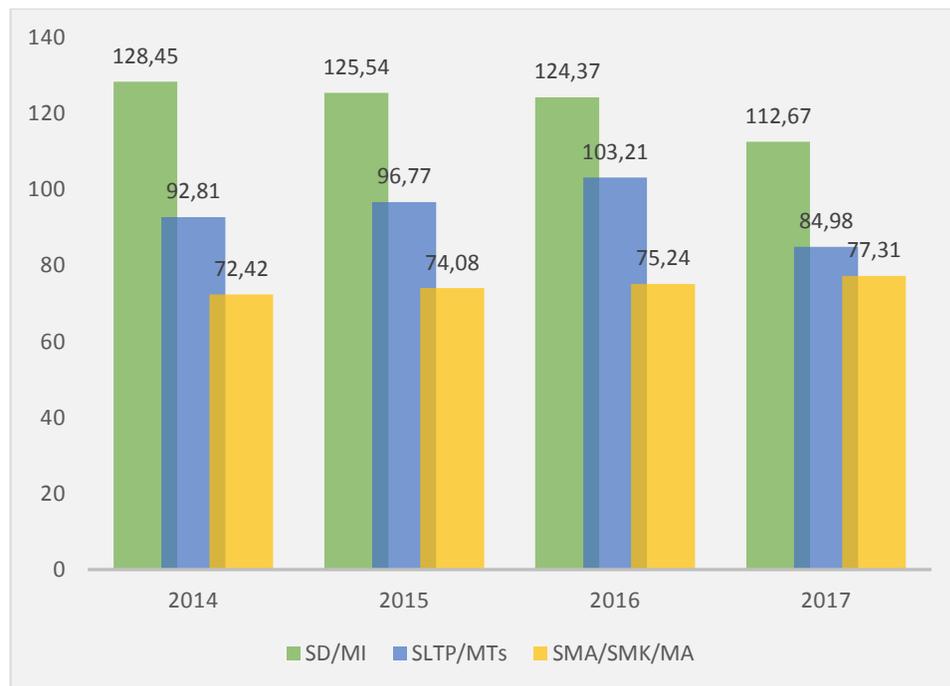
Tabel 2. 13 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 - 2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	128,45	125,54	124,37	112,67
2	Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTs (%)	92,81	96,77	103,21	84,98
3	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA (%)	72,42	74,08	75,24	77,31

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara

Untuk melihat perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat melalui Gambar dibawah ini:

Gambar 2. 15 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa perkembangan angka partisipasi kasar SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016 mengalami penurunan. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APK SD/MI tahun 2014 berada pada posisi 128,45% yang mengalami penurunan menjadi 125,54% pada tahun 2015, menurun lagi menjadi 124,37% pada tahun berikutnya, dan kondisi terus mengalami penurunan menjadi 112,67 % pada tahun 2017.

Dari Gambar di atas diketahui pula bahwa perkembangan angka partisipasi kasar SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APK SMP/MTs tahun 2014 berada pada posisi 92,81% yang naik menjadi 96,77% pada tahun 2015, dan naik lagi menjadi 103,21% pada tahun 2016, namun turun menjadi 84,98% pada tahun 2017

Gambar di atas juga menunjukkan bahwa perkembangan angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016 mengalami peningkatan. Hal tersebut tampak dari kondisi

awal APK SMA/MA/SMK tahun 2014 berada pada posisi 72,42% yang naik menjadi 74,08% pada tahun 2015, mengalami peningkatan lagi pada tahun 2016 menjadi 75,24%, dan berada pada posisi 77,31 % pada tahun 2017.

C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni bermanfaat untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa berusia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dengan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun pada periode yang sama. Adapun capaian pendidikan pada APM di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017:

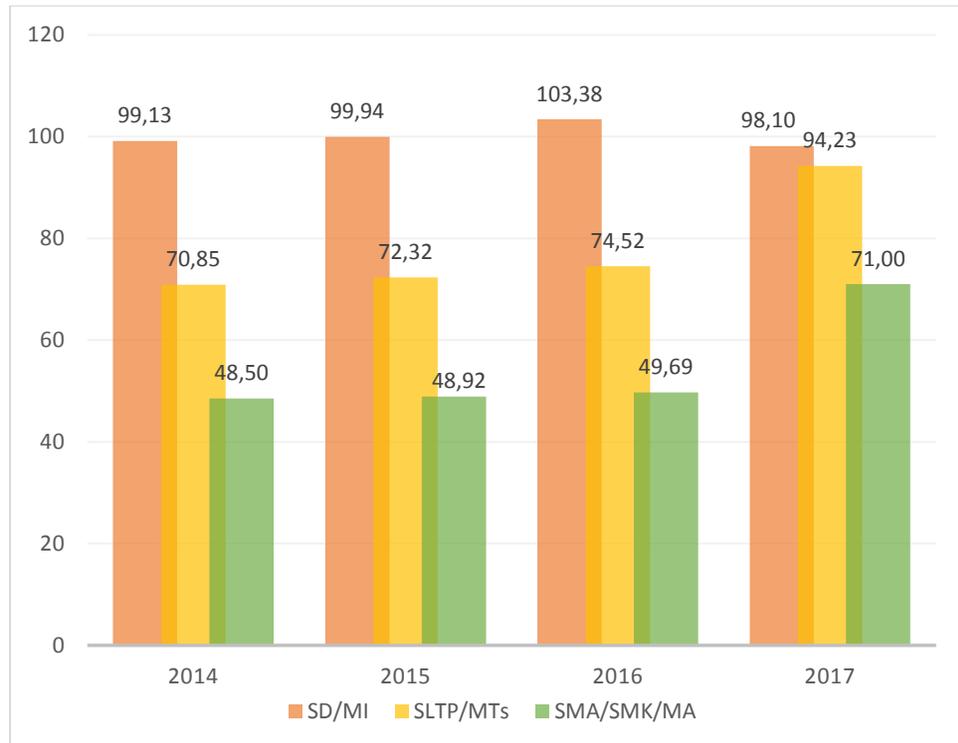
Tabel 2. 14 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 - 2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi Murni SD/MI (%)	98,49	99,94	103,38	98,10
2	Angka Partisipasi Murni SLTP/MTs (%)	70,85	72,32	74,52	94,23
3	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (%)	48,50	48,92	49,69	71,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara

Untuk melihat perkembangan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat melalui Gambar dibawah ini:

Gambar 2. 16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017



Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2018, (diolah).

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa perkembangan angka partisipasi murni SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APM SD/MI tahun 2014 berada pada posisi 99,13% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 99,94% pada tahun 2015, dan tahun 2016 capaian tersebut naik secara signifikan pada angka 103,38% namun mengalami penurunan menjadi 98,10% pada tahun berikutnya.

Dari Gambar di atas diketahui pula bahwa perkembangan angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APM SMP/MTs/Paket B tahun 2014 berada pada posisi 70,85% yang kemudian naik menjadi 72,32% pada tahun 2015, capaian tersebut naik secara signifikan pada angka 74,52% tahun 2016, dan menjadi 94,23% pada tahun berikutnya.

Gambar di atas juga menunjukkan bahwa perkembangan angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APM SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2014 berada pada posisi 48,50% yang mengalami peningkatan menjadi 48,92%, pada tahun 2015 pada angka 49,69%, dan kembali naik secara signifikan pada tahun berikut yaitu berada pada posisi 71 % tahun 2017.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Angka Partisipasi Sekolah juga merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Realisasi pencapaian indikator ini bervariasi pada setiap tingkatannya, dan dapat dilihat pada tabel berikut:

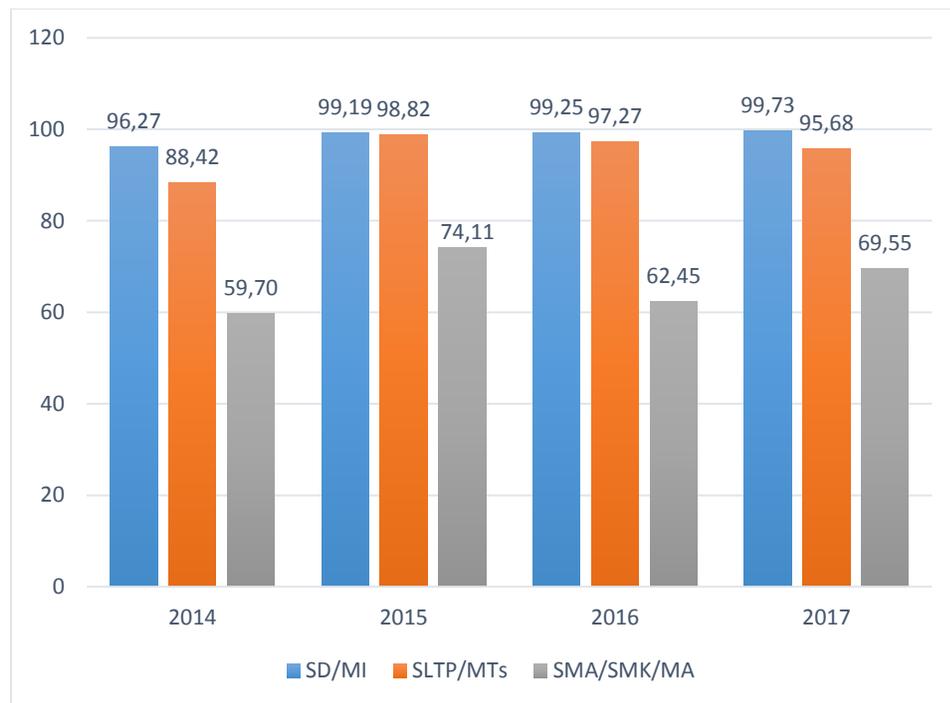
Tabel 2. 15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 - 2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	96,27	99,19	99,25	99,73
2	SLTP/MTs	88,42	98,82	97,27	95,68
3	SMA/SMK/MA	59,70	74,11	62,45	69,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, (data dolah)

Untuk melihat perkembangan Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat melalui Gambar dibawah ini:

Gambar 2. 17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, (data dolah)

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa perkembangan angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami kemajuan sangat baik. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APM SD/MI tahun 2014 berada pada posisi 96,27% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 99,14% pada tahun 2015, dan tahun 2016 capaian tersebut naik secara signifikan pada angka 99,25% dan terus mengalami peningkatan menjadi 99,73% pada tahun 2017.

Namun berbeda dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017, terlihat dari Gambar di atas bahwa pada tingkatan ini Angka Partisipasi Sekolah cenderung turun. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APM SMP/MTs/Paket B tahun 2014 berada pada posisi 88,42% yang kemudian naik menjadi 98,82% pada tahun 2015, akan tetapi pada 2 tahun berikutnya secara terus menerus menurun menjadi 97,27% tahun 2016, dan menjadi 95,68% pada tahun 2017.

Dari Gambar di atas juga dapat diketahui bahwa perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016 cenderung mengalami fluktuasi. Kondisi ini terlihat dari kondisi awal APM SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2014 berada pada posisi 59,70%, yang mengalami peningkatan menjadi 74,11% pada tahun 2015, namun pada tahun 2016 kondisi ini menurun menjadi 62,45%, dan kembali naik secara pada tahun berikut yaitu berada pada posisi 69,55% tahun 2017.

E. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah bermanfaat untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Angka Putus Sekolah diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk usia tertentu dengan jumlah penduduk usia sama yang pernah/sedang bersekolah. Adapun capaian pendidikan pada Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017:

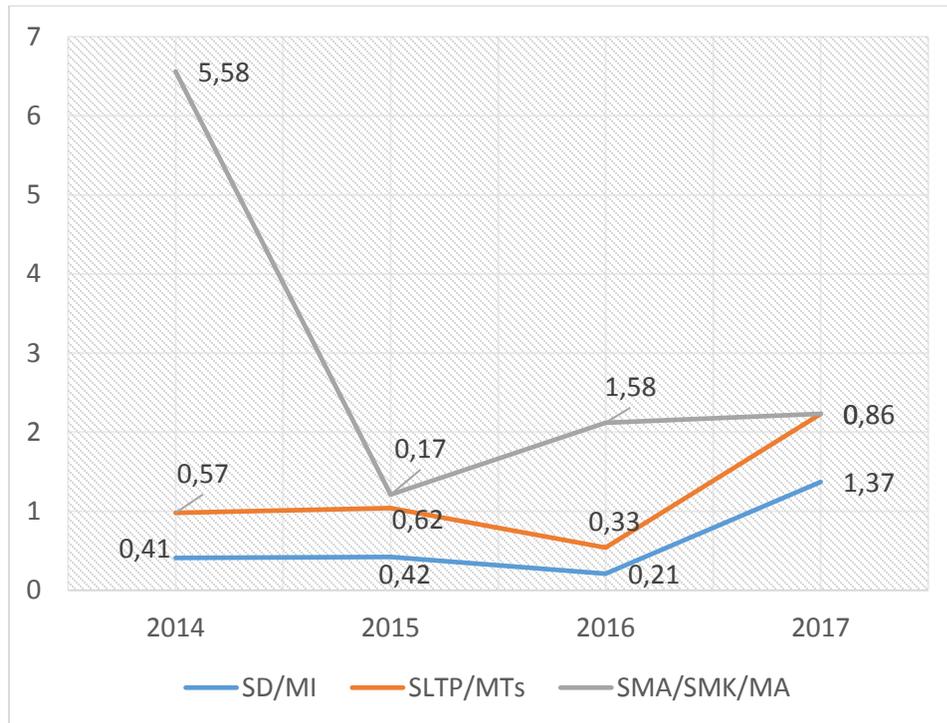
Tabel 2. 16 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI	0,41	0,42	0,21	1,37
2	Persentase Angka Putus Sekolah SLTP/MTs	0,57	0,62	0,33	0,86
3	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	5,58	0,17	1,58	n/a

Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Untuk melihat perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat melalui Gambar di bawah ini:

Gambar 2. 18 Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 - 2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa persentase angka partisipasi putus sekolah SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APTS SD/MI tahun 2014 berada pada posisi 0.41% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 0.42% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 turun menjadi 0.21% dan mengalami peningkatan menjadi 1.34% satu tahun kemudian.

Dari Gambar di atas diketahui pula bahwa persentase angka partisipasi putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APTS SMP/MTs tahun 2014 berada pada posisi 0,57% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,67% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 turun menjadi 0,33% dan mengalami peningkatan menjadi 0,86% satu tahun kemudian.

Gambar di atas juga menunjukkan bahwa persentase angka partisipasi putus sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Kayong Utara selama kurun

waktu 2014-2016 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APTS SMA/SMK/MA tahun 2014 berada pada posisi 5,58% yang kemudian turun secara signifikan menjadi 0,17% pada tahun 2015 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 1,58% satu tahun kemudian.

F. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tada tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Adapun capaian angka kelulusan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017:

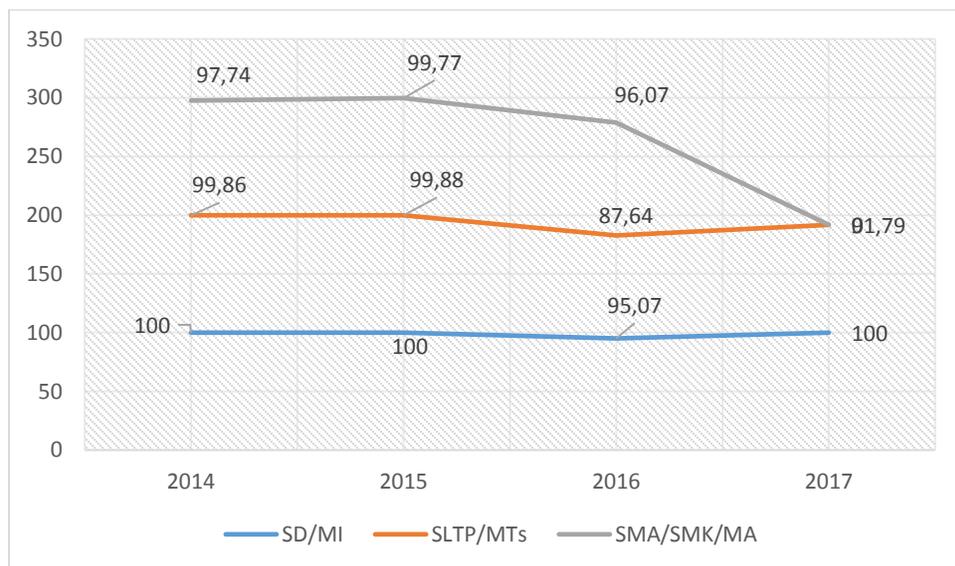
Tabel 2. 17 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK/MA Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 - 2016

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	95,07	100
2	Angka Kelulusan (AL) SLTP/MTs	99,86	99,88	87,64	91,79
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	97,74	99,77	96,07	n/a

Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Untuk melihat perkembangan persentase angka lulus sekolah di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat melalui Gambar dibawah ini:

Gambar 2. 19 Angka Kelulusan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui kondisi persentase angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal angka kelulusan SD/MI tahun 2014 berada pada posisi 100% dan pada angka yang sama tahun 2015 sebesar 100%. Namun, tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan menjadi 95,07% dan kembali naik menjadi 100% satu tahun kemudian.

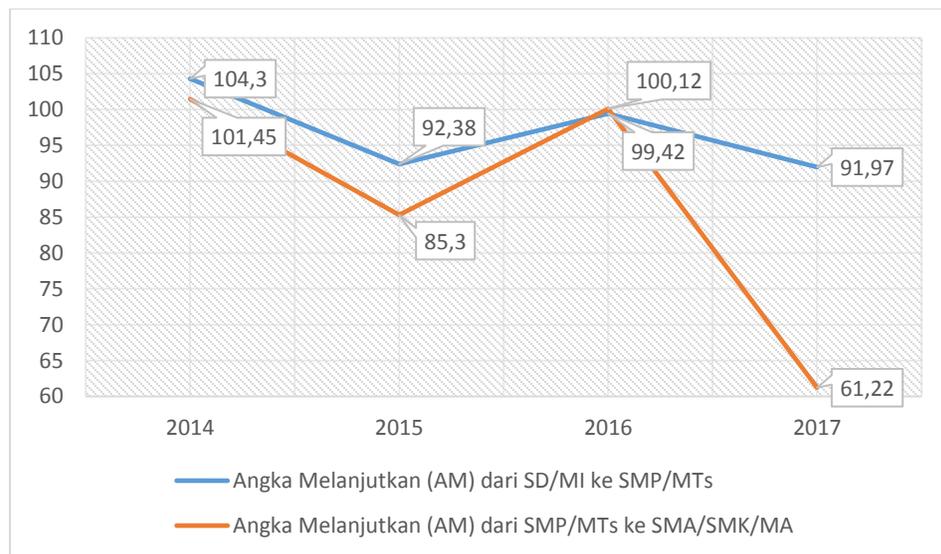
Dari Gambar di atas diketahui pula bahwa persentase angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal AL SMP/MTs tahun 2014 berada pada posisi 99,86% yang kemudian naik menjadi 99,88% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan secara signifikan pada angka 87,64% dan kembali naik menjadi 91,97% satu tahun kemudian.

Gambar di atas juga menunjukkan bahwa persentase angka kelulusan SMA/SMK/MA di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal AL SMA/SMK/MA tahun 2014 berada pada posisi 97,74% yang kemudian naik menjadi 99,77% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 96,07% satu tahun 2016.

G. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah persentase jumlah siswa baru tingkat pertama pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa lulusan pada jenjang pendidikan di bawahnya pada tahun ajaran sebelumnya. Adapun capaian angka melanjutkan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017:

Gambar 2. 20 Persentase Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs



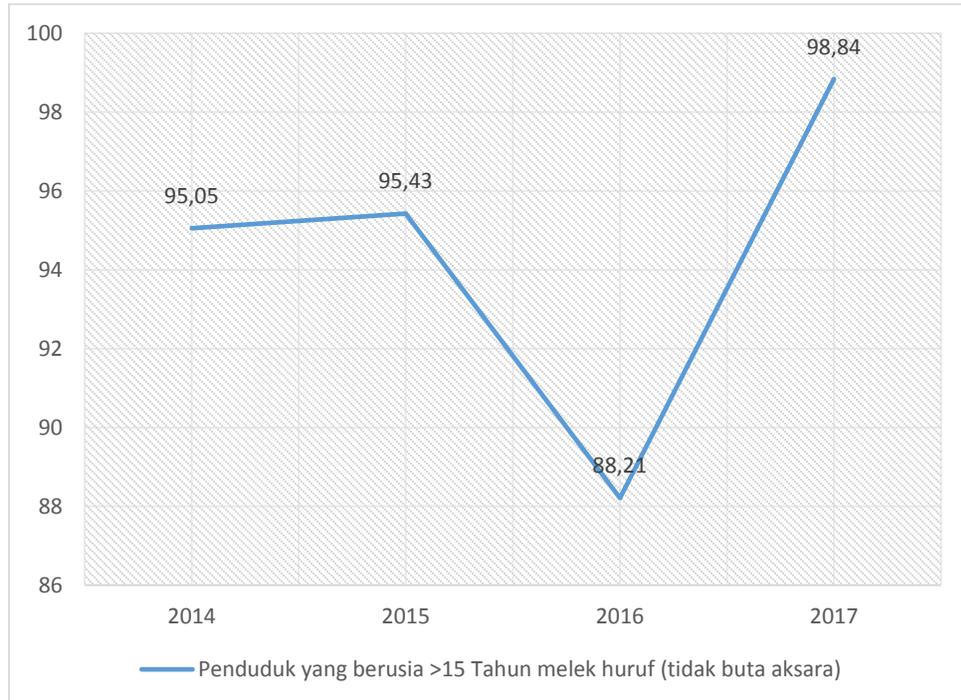
Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal AM dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2014 berada pada posisi 104.3% yang mengalami penurunan menjadi 92.38% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut naik pada angka 99.42% dan mengalami penurunan kembali menjadi 91.97% satu tahun kemudian.

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2014 berada pada posisi 101.45% yang mengalami penurunan menjadi 85.3% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut naik pada angka 100.12% dan kembali mengalami penurunan secara signifikan menjadi 61.22% satu tahun kemudian.

H. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Gambar 2. 21 Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) 2014-2017

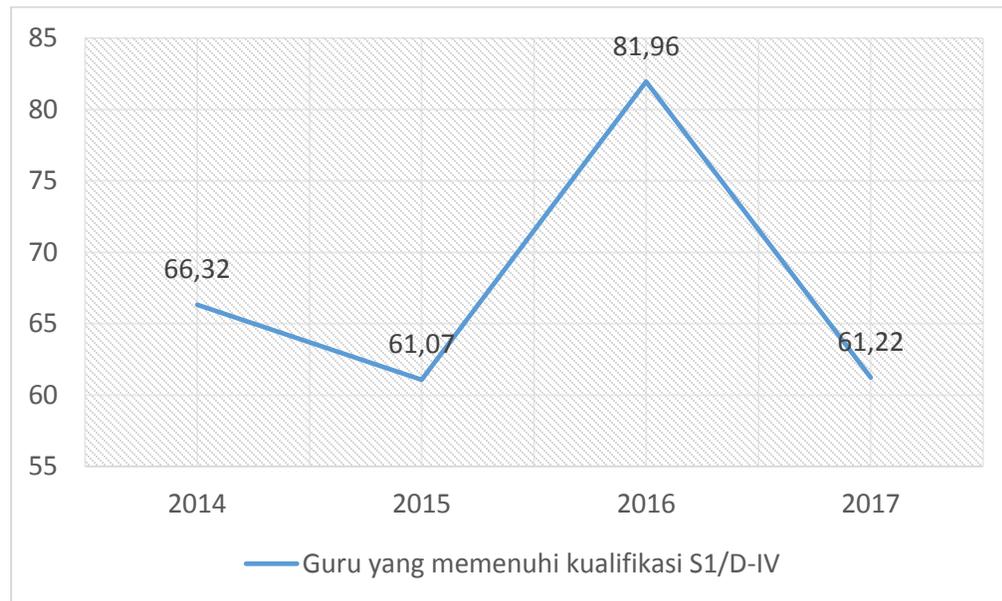


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) tahun 2014 berada pada posisi 95.05% yang kemudian naik menjadi 95.43% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 88.21% dan kembali naik secara signifikan menjadi 98.84% satu tahun kemudian.

I. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Gambar 2. 22 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 2014-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2014 berada pada posisi 66.32% yang kemudian turun menjadi 61.07% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut naik secara signifikan pada angka 81.96% dan kembali mengalami penurunan menjadi 61.22% satu tahun kemudian.

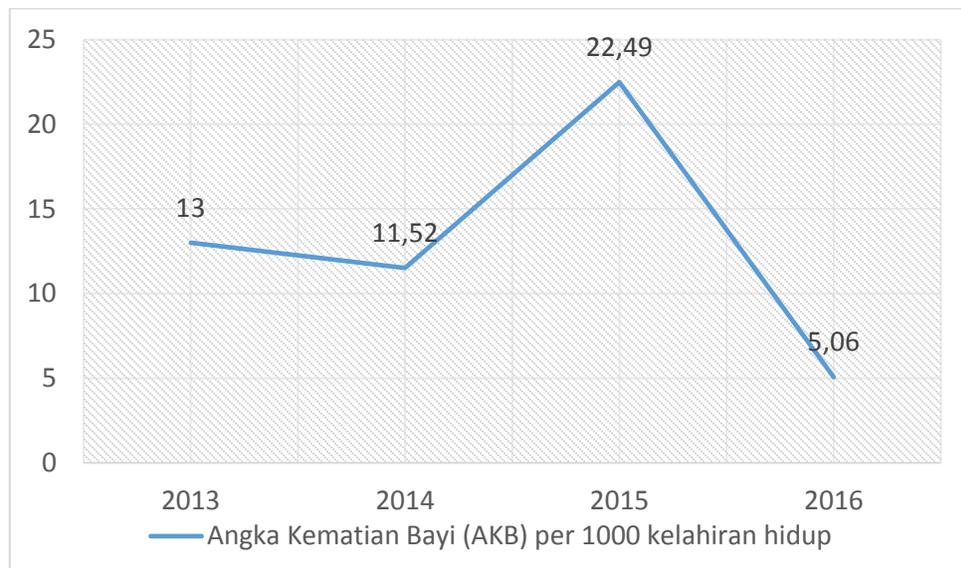
2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Banyak tenaga medis Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2016 sebanyak 377 orang, dan di dominasi oleh perawat sebanyak 15 orang dan dokter gigi 1 orang. Banyaknya sarana kesehatan pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2016 adalah 82 fasilitas, yang terdiri dari 8 puskesmas, dan 74 pusku. Sedangkan jumlah apotek baru terdapat 1 buah, tepatnya di Kecamatan Sukadana, sedangkan puskesmas terbanyak terdapat di Kecamatan Sampang Hilir dengan jumlah 2 puskesmas dan 22 pusku.

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat angka kematian bayi (AKB). Angka Kematian Bayi diperoleh dengan membandingkan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dengan jumlah kelahiran hidup. Adapun capaian angka kematian bayi di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016:

Gambar 2. 23 Rasio Angka Kematian Bayi 2013-2016



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2016

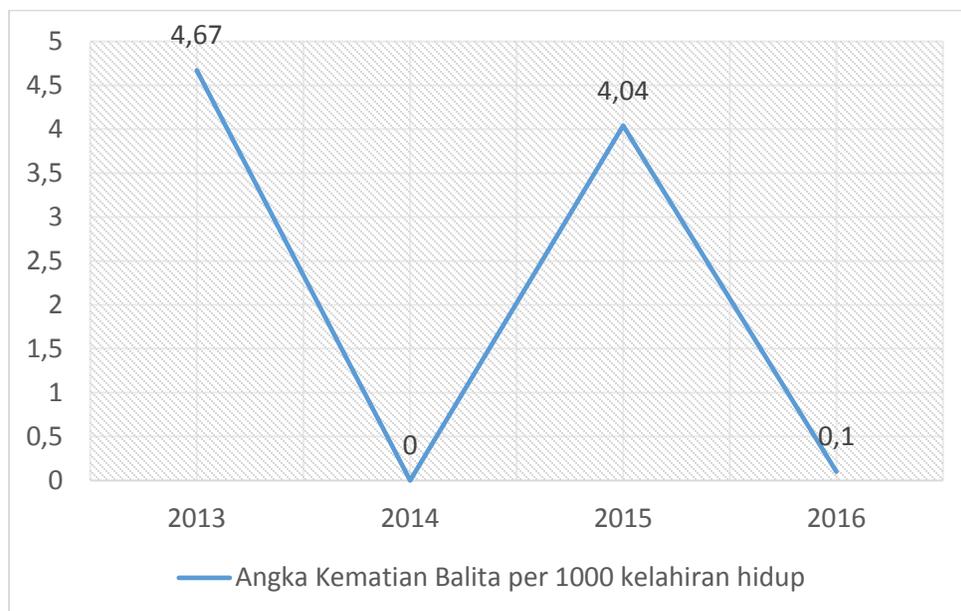
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa rasio angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal AKB tahun 2013 berada pada posisi 13.00 yang kemudian turun menjadi 11.52 pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut

mengalami kenaikan pada angka 22.49 dan kembali turun secara signifikan menjadi 5.06 satu tahun kemudian.

B. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Bayi terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBa bermanfaat untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Di Kabupaten Kayong Utara AKBa diperoleh dengan membandingkan jumlah kematian penduduk usia 0-59 bulan/0-4 tahun dengan jumlah penduduk usia 0-59 bulan/0-4 tahun pada pertengahan tahun per seribu kelahiran hidup. Adapun capaian angka kematian balita di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016:

Gambar 2. 24 Rasio Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup 2013-2016



Sumber Data: Laporan Kinerja Pemerintah KKU 2016

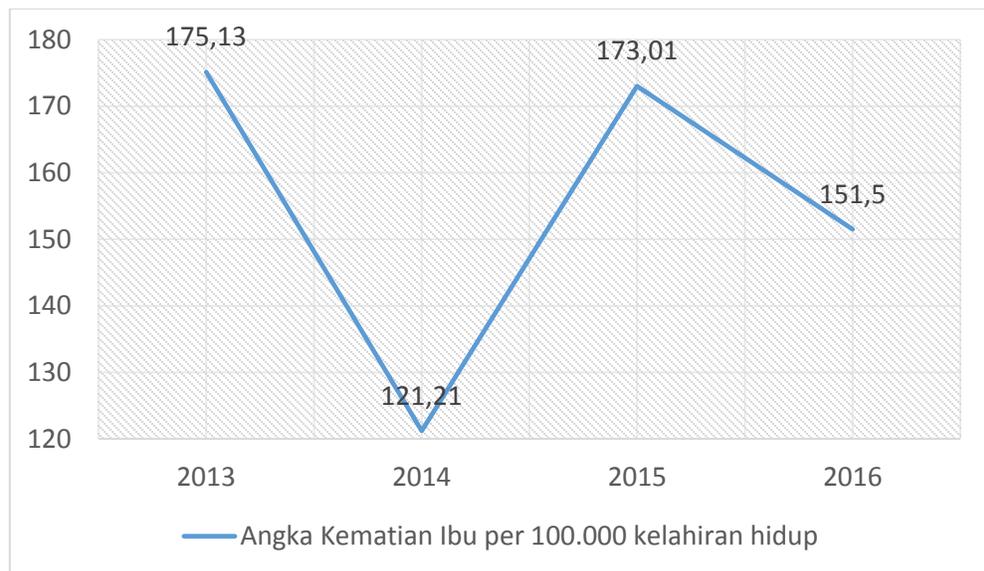
Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa rasio angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari

kondisi awal AKBa tahun 2013 berada pada posisi 4.67 yang kemudian turun secara signifikan menjadi 0.00 pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut mengalami kenaikan pada angka 4.04 dan kembali turun menjadi 0.10 satu tahun kemudian.

C. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Kematian ibu adalah kematian dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolanya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Di Kabupaten Kayong Utara, Angka Kematian Bayi diperoleh dengan membandingkan jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran dengan jumlah kelahiran hidup. Adapun capaian angka kematian ibu di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016:

Gambar 2. 25 Rasio Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup



Sumber Data: Laporan Kinerja Pemerintah KKU 2016

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa rasio angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal AKI tahun 2013 berada pada posisi 175.13 yang kemudian turun menjadi 121.21 pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut mengalami kenaikan secara signifikan pada angka 173.01 dan kembali turun menjadi 151.50 satu tahun kemudian.

D. Rasio posyandu per satuan balita

E. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

1) Puskesmas

Puskesmas di Kabupaten Kayong selama kurun waktu 2012-2014 tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) unit. Namun, jumlah tersebut naik menjadi 8 (delapan) unit dari tahun 2013-2014.

2) Poliklinik / Balai Pengobatan

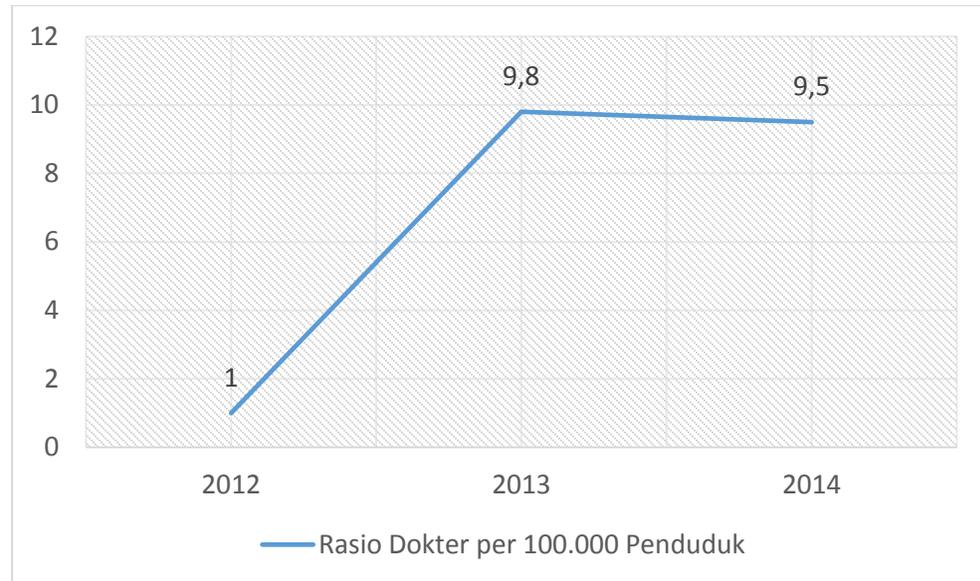
Poliklinik/balai pengobatan di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 2 (dua) unit selama kurun waktu 2012-2014.

3) Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit selama kurun waktu 2012-2014.

F. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Gambar 2. 26 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk 2012-2014



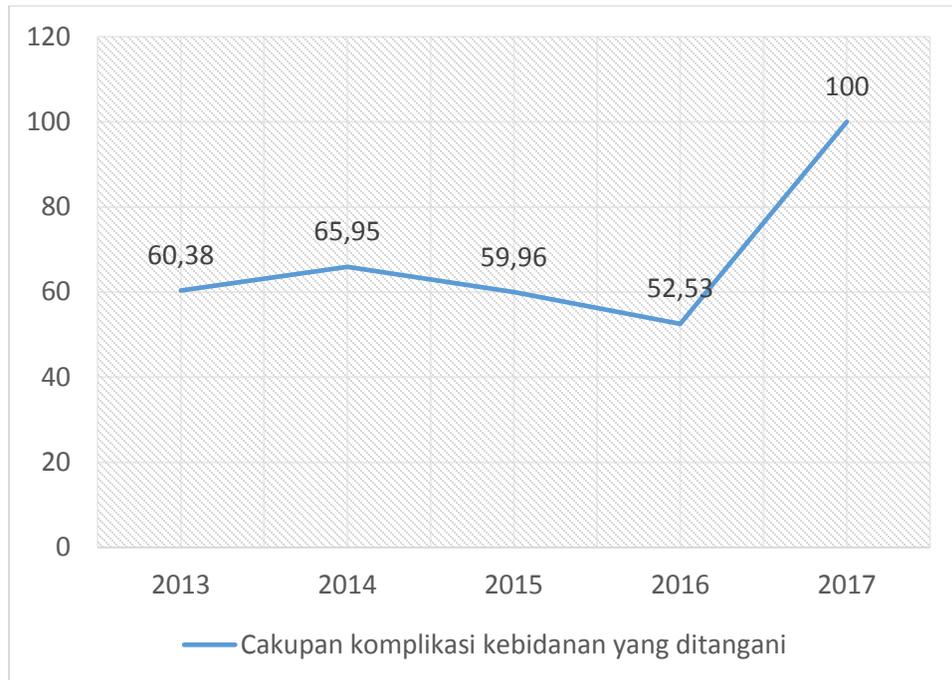
Sumber Data: RAD PPDT KKU Tahun 2016

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2014 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal rasio dokter per 100.000 penduduk tahun 2012 berada pada posisi 1 yang kemudian naik menjadi 9.8 pada tahun 2013 dan kembali mengalami penurunan pada angka 9.5 satu tahun kemudian.

G. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani diperoleh dengan membandingkan antara jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Adapun capaian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 27 Presentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

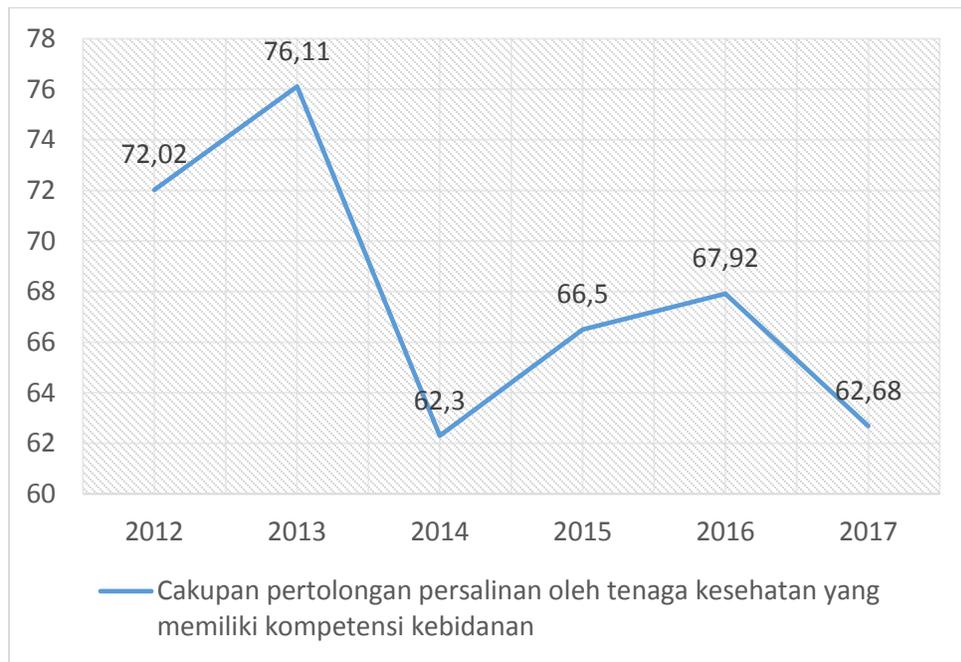
Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2013 berada pada posisi 60,38% yang kemudian naik menjadi 65,95% pada tahun 2014 dan mengalami penurunan menjadi 59,96% satu tahun kemudian. Capaian tersebut mengalami penurunan kembali tahun 2016 pada angka 52,53% dan kembali naik secara signifikan menjadi 100% satu tahun kemudian.

H. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diperoleh dengan membandingkan antara jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Adapun capaian cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017

Gambar 2. 28 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 2012-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

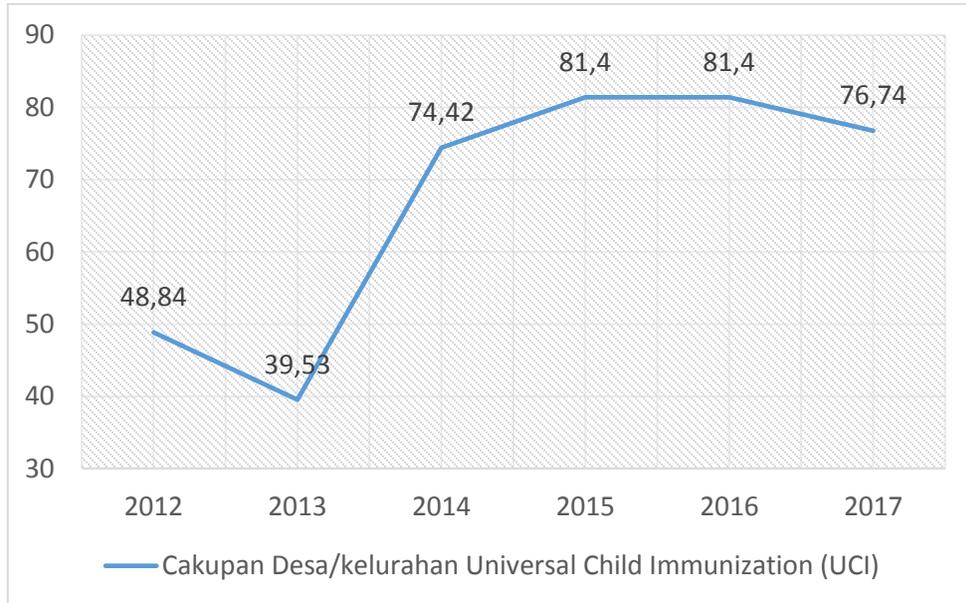
Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2012 berada pada posisi 72.02% yang kemudian naik menjadi 76.11% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan menjadi 62.3% satu tahun kemudian. Namun, tahun 2015 capaian tersebut naik pada angka 66.5% yang kemudian naik menjadi 67,92% tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan secara signifikan menjadi 62,68% satu tahun kemudian.

I. Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) diperoleh dengan membandingkan antara jumlah desa/kelurahan *Universal Child*

Immunization (UCI) dengan jumlah seluruh desa/kelurahan. Adapun capaian cakupan Desa/kelurahan UCI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017:

Gambar 2. 29 Persentase Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) 2012-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa persentase cakupan desa/kelurahan universal child immunization di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal cakupan desa/kelurahan universal child immunization tahun 2012 berada pada posisi 48.84% yang kemudian turun menjadi 39.53% pada tahun 2013 dan naik secara signifikan menjadi 74.42% satu tahun kemudian. Namun, capaian tersebut naik pada angka 81.4% selama kurun waktu 2015-2016 dan kembali mengalami penurunan menjadi 76.74% satu tahun kemudian.

J. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan diperoleh dengan membandingkan antara jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu

wilayah kerja dalam waktu yang sama. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Kayong Utara mengalami kestabilan dengan capaian sebesar 100% selama kurun waktu 2012-2017.

K. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 (satu) tahun dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Adapun capaian kesehatan pada Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017:

Gambar 2. 30 Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 2012-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA tahun 2012 berada pada posisi 75.53% selama kurun waktu dan tetap pada angka yang sama sebesar 75.53% pada tahun 2013 yang kemudian naik menjadi 85.42% tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian

tersebut mengalami penurunan pada angka 60.57% yang kemudian menjadi 56.07% pada tahun 2016 dan kembali naik menjadi 63.8% satu tahun kemudian.

L. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 (satu) tahun dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017 sudah mencapai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh kasus DBD yang ada di Kabupaten Kayong Utara telah tertangani seluruhnya.

M. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin diperoleh dengan membandingkan antara jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan Strata 1 (satu) dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Kayong Utara. Adapun capaian cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 31 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 2013-2017

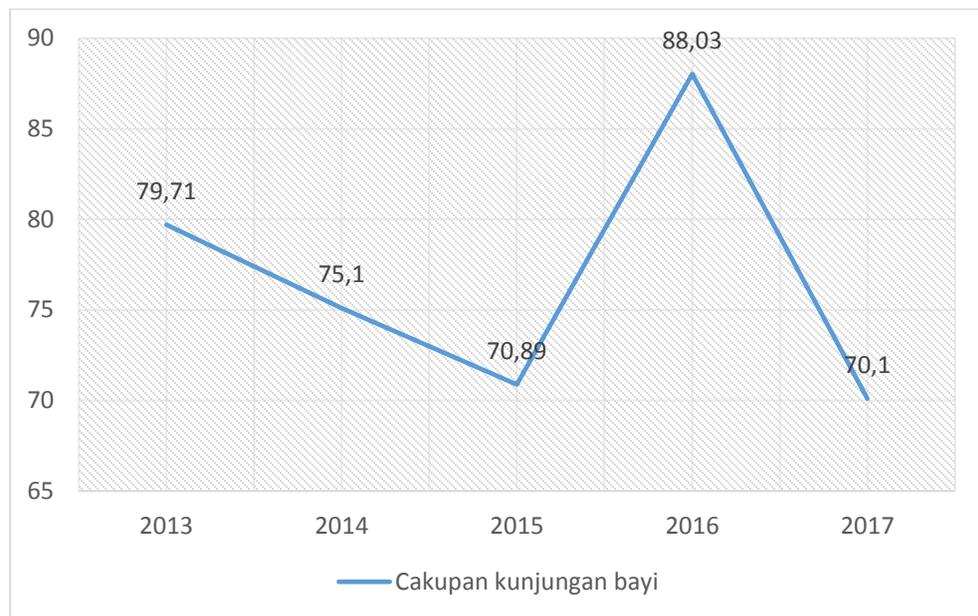


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2013 berada pada posisi 44.95% yang kemudian mengalami penurunan secara signifikan menjadi 4.02% pada tahun 2014 dan naik kembali tahun 2015 menjadi 4.17%. Capaian tersebut naik secara signifikan pada tahun 2016 pada angka 128.61% dan kembali mengalami penurunan secara signifikan menjadi 78.75% satu tahun kemudian.

N. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi diperoleh dengan membandingkan antara jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Adapun capaian cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 32 Persentase Cakupan Kunjungan Bayi 2013-2017

Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal cakupan kunjungan bayi tahun 2013 berada pada posisi 79.71% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 75.1% pada tahun 2014 dan 70.89% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut naik menjadi 88.03% dan kembali turun menjadi 70.1% satu tahun kemudian.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Pekerjaan Umum

1) Panjang jalan kota dalam kondisi baik

Panjang jalan kota dalam kondisi baik diperoleh dengan membandingkan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan panjang seluruh jalan Kabupaten Kayong Utara. Adapun capaian pada indikator panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 33 Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik 2013-2017



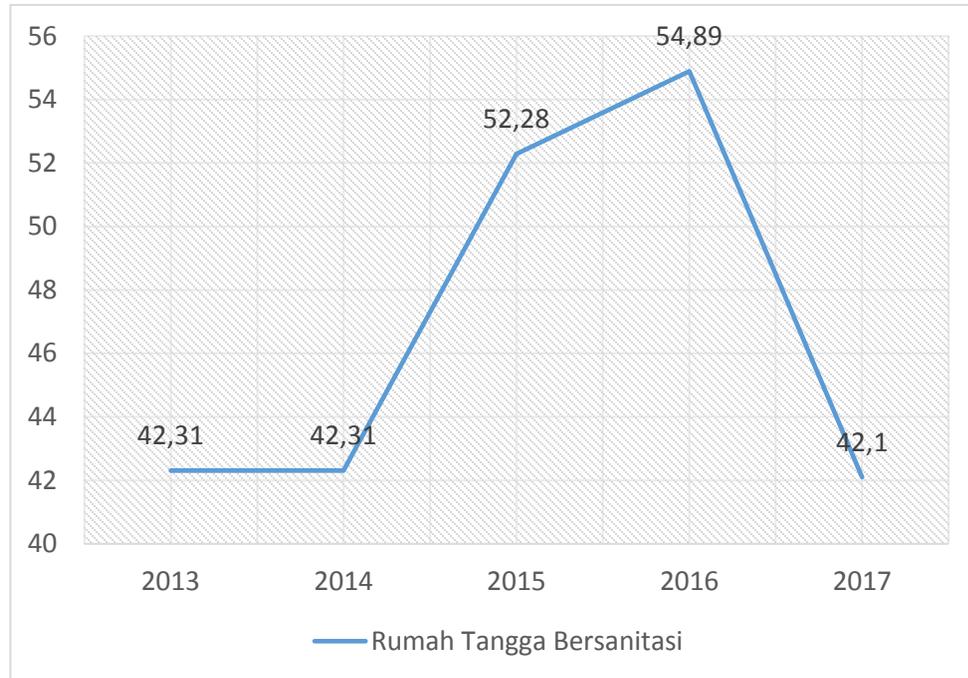
Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal panjang jalan kota dalam kondisi baik tahun 2013 berada pada posisi 37.03% dan tetap pada angka 37.03% pada tahun 2014 yang naik pada tahun 2015 menjadi 41.71%. Kemudian, tahun 2016 capaian tersebut naik menjadi 53.3% dan naik kembali pada angka 54.07% satu tahun kemudian.

2) Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah Tangga Bersanitasi diperoleh dengan membandingkan antara jumlah rumah tangga bersanitasi dengan jumlah total rumah tangga di lingkungan Kabupaten Kayong Utara. Adapun capaian tersebut di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 34 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

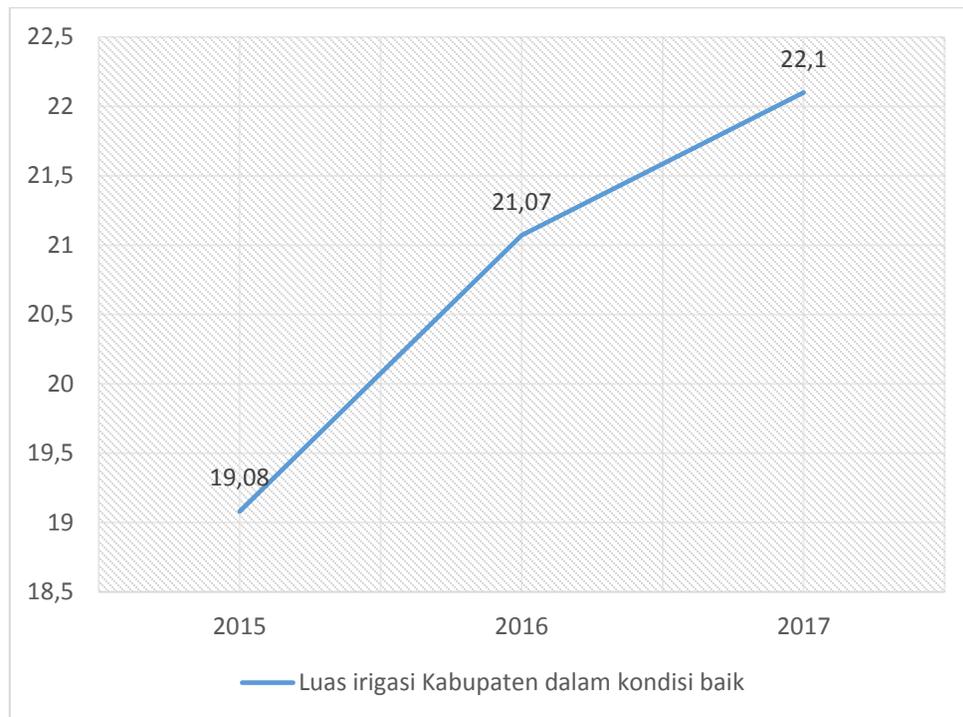
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal rumah tangga bersanitasi tahun 2013 berada pada posisi 42.31% dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2014 sebesar 42.31% yang kemudian naik menjadi 52.28% tahun 2015 dan 54.89% satu tahun kemudian. Namun, tahun 2017 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 42.1%.

3) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dengan membandingkan antara Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan Luas irigasi Kabupaten Kayong Utara. Adapun capaian luas irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2015-2017:

Gambar 2. 35 Persentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik 2015-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2015-2017 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2015 berada pada posisi 19.08% yang kemudian naik menjadi 21.07 pada tahun 2016 dan naik kembali menjadi 22.1% satu tahun kemudian.

- 4) Proporsi rumah tangga dengan air minum layak

Gambar 2. 36 Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak 2012-2014



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2014

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2014 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2012 berada pada posisi 63.85% yang kemudian naik menjadi 65.49 pada tahun 2013 dan naik kembali menjadi 75.19% satu tahun kemudian.

5) Kawasan Kumuh

Kawasan Kumuh diperoleh dengan membandingkan antara Luas Kawasan Kumuh dengan luas wilayah Kabupaten Kayong Utara. Persentase kawasan kumuh di Kabupaten Kayong tahun 2013-2014 berada pada angka sebesar 0.04% dan masih tidak berubah pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0.04%.

B. Penataan Ruang

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

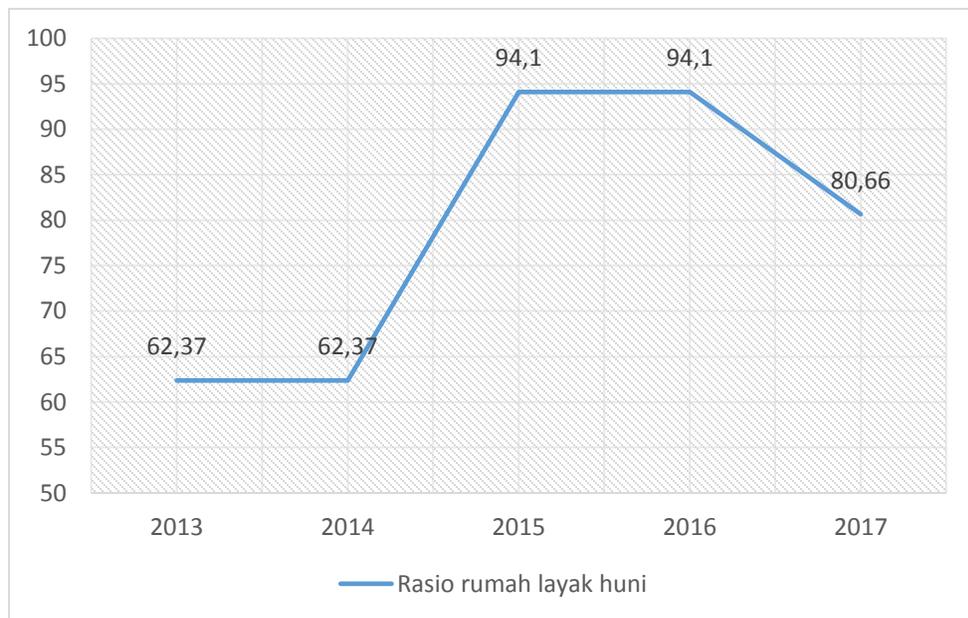
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB diperoleh dari perhitungan jumlah Luas ruang terbuka hijau dibagi dengan Luas wilayah ber HPL/HGB dikali 100%.

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Kayong Utara tahun yang sama dikalikan 100%. Adapun capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 37 Persentase Rasio Rumah Layak Huni 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa rasio rumah layak huni di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal rasio rumah layak huni tahun 2013 berada pada posisi 62.37% dan tetap pada angka sama sebesar 61.37% tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut naik pada angka 94.1% dan tahun 2016 tetap pada angka yang sama sebesar 94.1% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 80.66 satu tahun kemudian.

B. Persentase lingkungan pemukiman kumuh

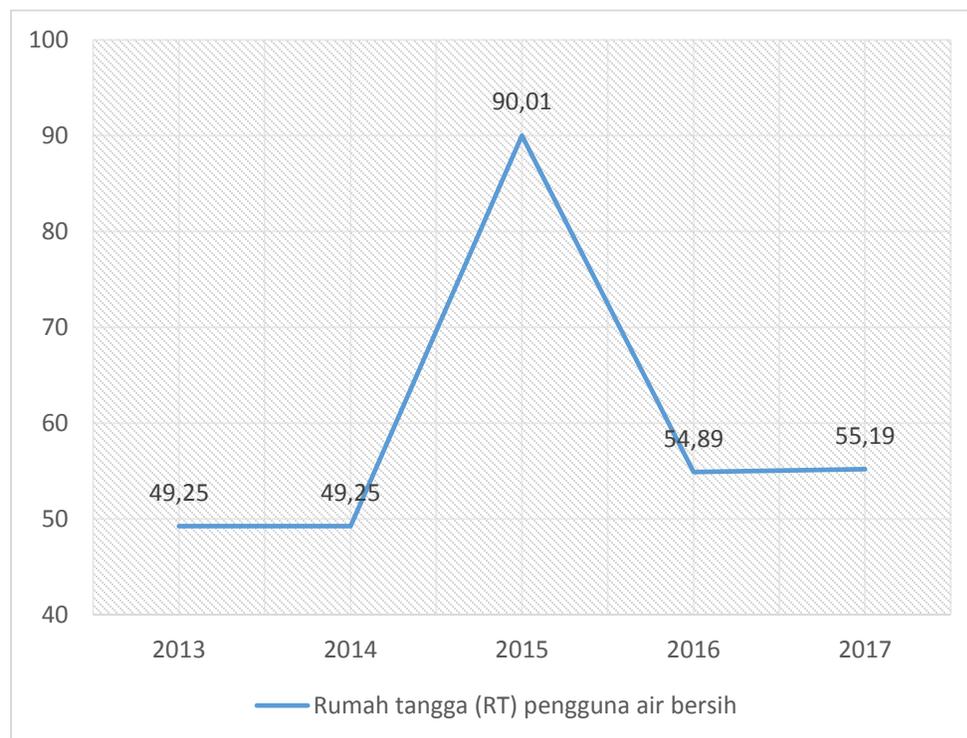
Lingkungan pemukiman kumuh diperoleh dari perhitungan luas lingkungan permukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Kayong Utara dikalikan 100%. Persentase lingkungan pemukiman kumuh tahun 2013 berada pada angka 0.8% yang kemudian turun menjadi 0.04%

pada tahun 2014 dan tetap pada angka yang sama sebesar 0.04% pada tahun 2015. Namun, mengalami kenaikan menjadi 0.043% tahun 2016 dan kembali turun menjadi 0.04% satu tahun kemudian.

C. Rumah tangga (RT) pengguna air bersih

Rumah tangga (RT) pengguna air bersih diperoleh dari perhitungan jumlah (RT) pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Kayong Utara dikalikan 100%. Adapun capaian di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 38 Persentase Rumah tangga (RT) Pengguna Air Bersih 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal rumah tangga pengguna air bersih tahun 2013 berada pada posisi 49.25% dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2014 sebesar 49.25% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 90.01% pada tahun 2015. Namun,

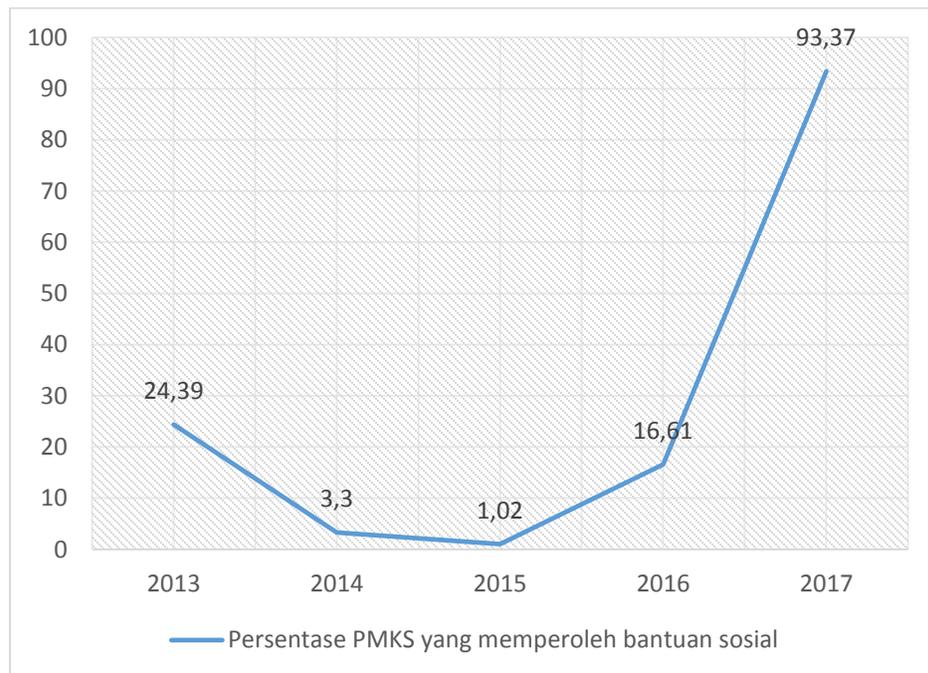
tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 54.89% dan kembali naik menjadi 55.19% satu tahun kemudian.

2.3.1.5. Urusan Sosial

A. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial diperoleh dari perhitungan jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun yang sama. Adapun capaian di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 39 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 2013-2017



Sumber: LKPJ KKKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Kyaong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal PMKS yang memperoleh bantuan sosial berada pada posisi 24.39% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 3.3% pada tahun 2014 dan 1.02 % pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut naik pada angka 16.61% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 93.37% satu tahun kemudian.

B. Penanganan PMKS (penyangang masalah kesejahteraan sosial)

Penyangang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga/masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial secara memadai dan wajar). Penanganan PMKS (penyangang masalah kesejahteraan social) di Kabupaten Kayong Utara tahun 2013 berada pada posisi 18.7% dan mengalami penurunan menjadi 1.41% pada tahun 2015.

C. Persentase penyangang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Persentase penyangang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Kayog Utara pada tahun 2013 berada pada posisi 0.21% dan naik pada tahun 2017 menjadi 8.42%.

2.3.1.6. Urusan Tenaga Kerja

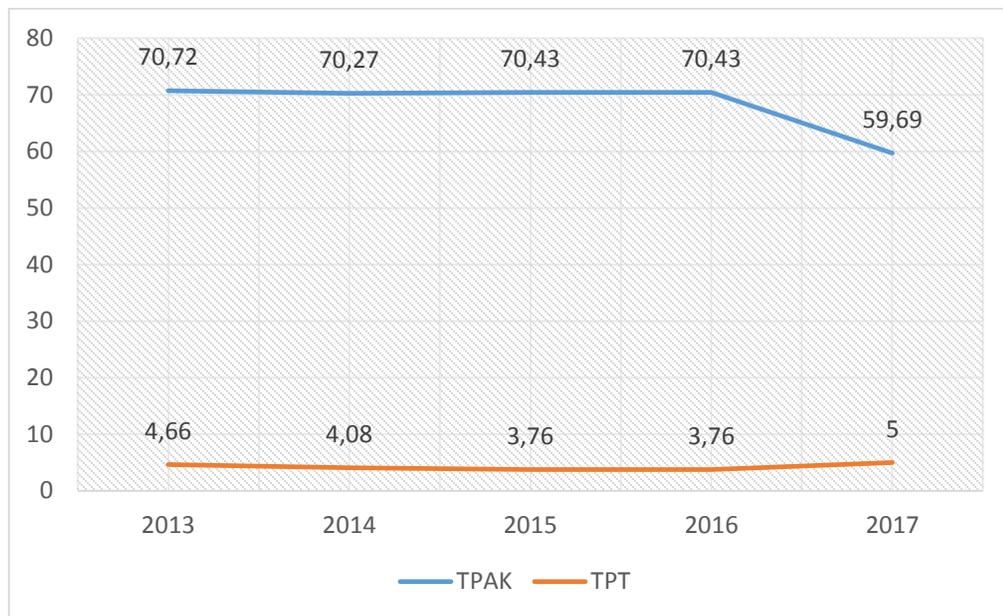
A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena dengan bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2017 sebesar 59,69 % menurun dibanding tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan rata-rata pertahun sebesar 70,30 %.

Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lapangan kerja utama berada pada sector pertanian sebesar 66,15 %% dan yang terendah pada sector keuangan sebesar 0,19 %.

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 70,72 %. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kayong Utara sebesar 5,00 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,76 %. Dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka jadi meningkat.

Gambar 2. 40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017



Sumber data : Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2018

B. Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan diperoleh dengan memperhitungkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar dan dikali dengan 100%. Adapun capaian pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 41 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan 2013-2017

Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

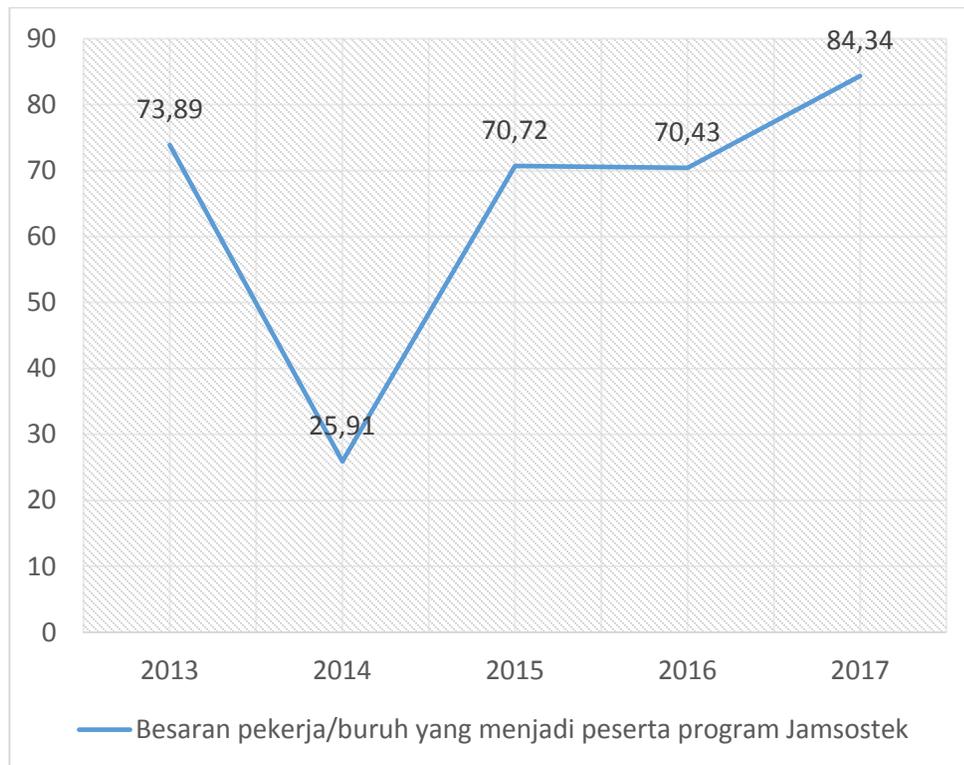
Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal pencari kerja yang ditempatkan tahun 2013 berada pada posisi 6.78% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 83.13% pada tahun 2014. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 42.11% pada tahun 2015 38.46% pada tahun 2016 dan kembali naik secara signifikan menjadi 70.09% satu tahun kemudian.

C. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek tahun 2013 berada pada posisi 73.89% yang kemudian mengalami penurunan secara signifikan menjadi 26.91% pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut naik pada angka 70.72% yang kemudian mengalami penurunan

menjadi 70.43% tahun 2016 dan kembali naik pada tahun 2017 menjadi 83.34%, sebagaimana gambar 2.15 dibawah ini

Gambar 2. 42 Persentase Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek 2013-2017



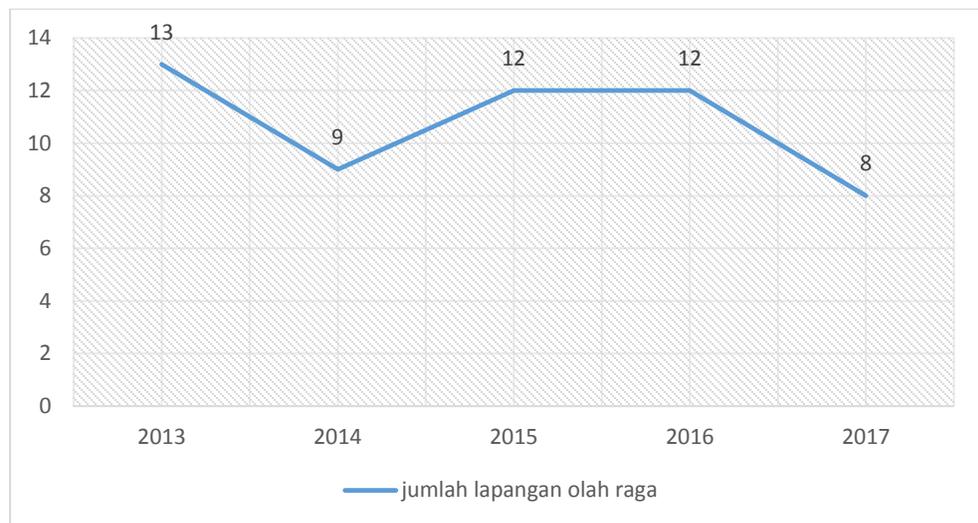
Sumber: LKPJ KCU Tahun 2017

2.3.1.7. Urusan Seni Budaya dan Olah raga

A. Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) diperoleh dengan penghitungan jumlah gelanggang yang ada dibagi dengan jumlah penduduk Kayong Utara dikali 1000 penduduk. Gelanggang/balai remaja di Kabupaten Kayong Utara belum terdapat dari tahun 2013-2014. Namun, dari tahun 2015-2016 telah terdapat gelanggang/balai remaja sebanyak 2 (dua) gelanggang dan tidak terdapat gelanggang/balai remaja pada tahun 2017.

Gambar 2. 43 Jumlah Lapangan Olah Raga 2013-2017



Sumber Data: LKPJ KGU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa jumlah lapangan olah raga di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal jumlah lapangan olah raga tahun 2013 sebanyak 13 (tiga belas) buah yang kemudian mengalami penurunan menjadi 9 (sembilan) buah pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut naik menjadi 12 (dua belas) buah dan tahun 2016 pada angka yang sama sebesar 12 (dua belas buah) yang kembali mengalami penurunan menjadi 8 (buah) satu tahun kemudian.

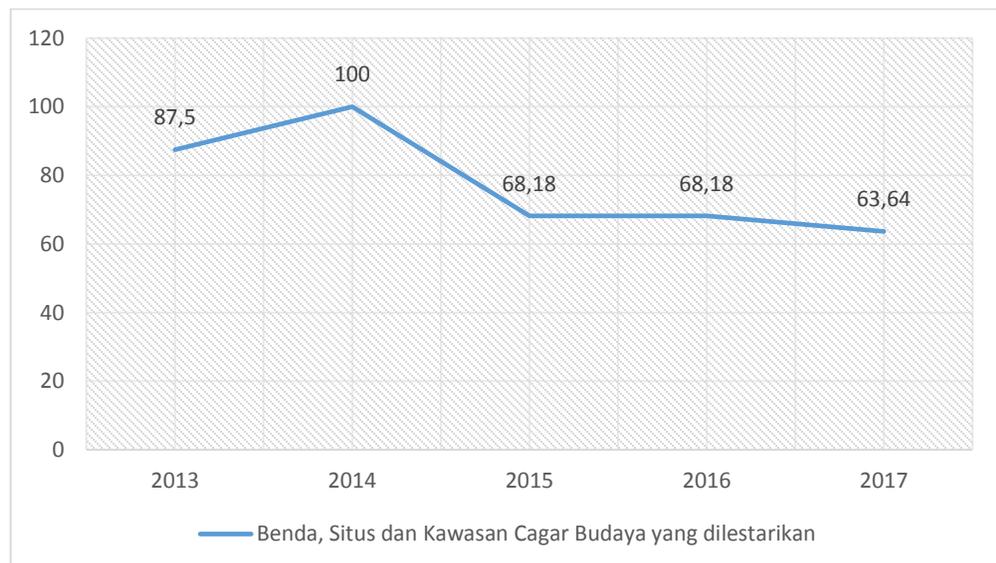
B. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali secara rutin per tahun selama kurun 2013-2016 yang kemudian naik

pada tahun 2017 menjadi 4 (sempat) kali. Selain penyelenggaraan seni dan budaya Kabupaten Kayong Utara memiliki Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan diperoleh dengan memperhitungkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dikali 100%. Adapun capaian pada indikator tersebut di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 44 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2013-2017

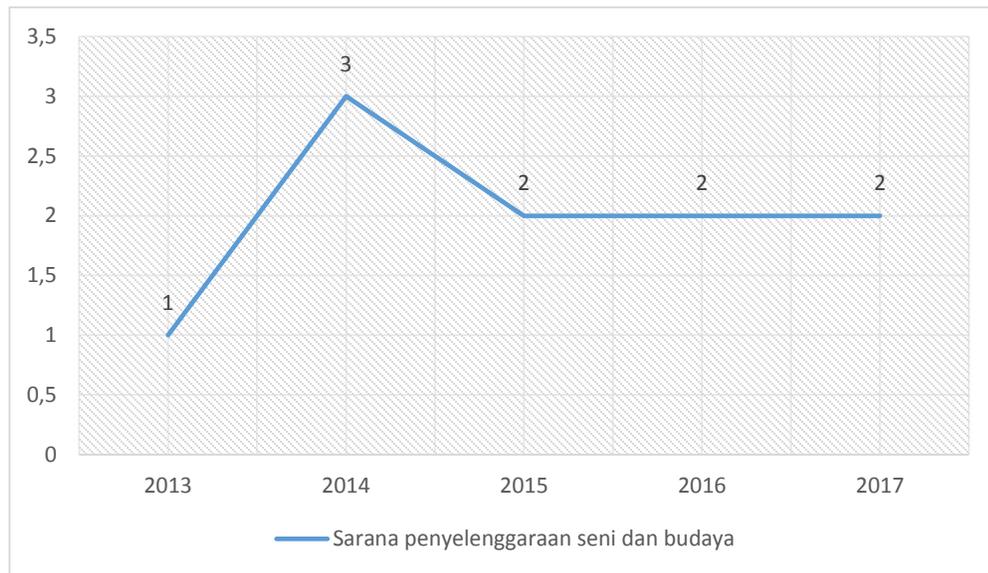


Sumber Data: LKPJ KKU Tahun 2017

Beradsarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2013 berada pada posisi 87.5% yang kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut mengalami penurunan secara signifikan pada angka 68.18% dan tahun 2016 pada angka yang sama sebesar 68.18% yang kembali mengalami penurunan menjadi 63.64% satu tahun kemudian.

C. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Gambar 2. 45 Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya 2013-2017



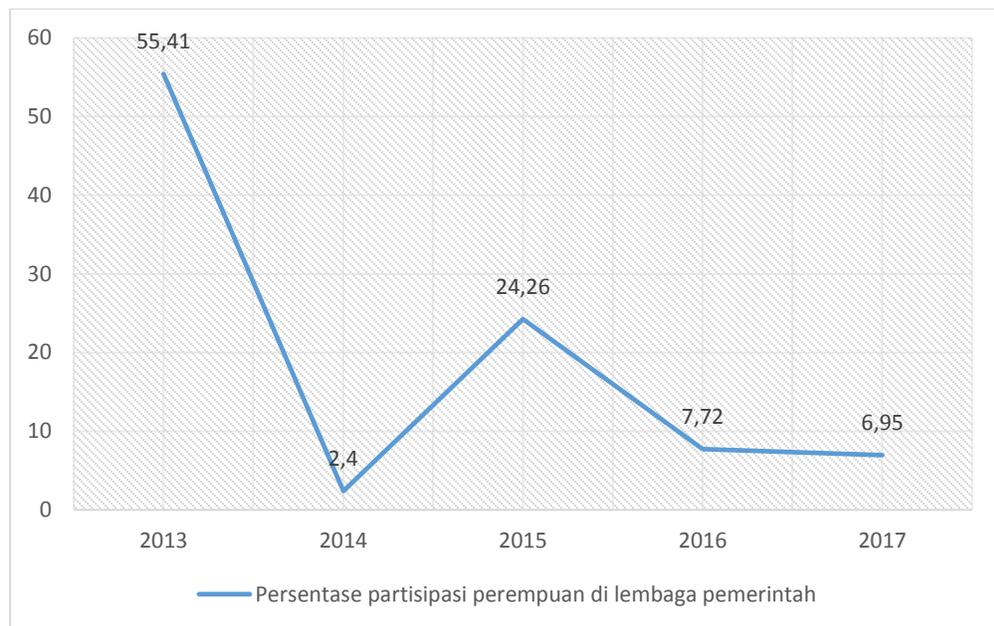
Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa jumlah saranan penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2015 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal sarana penyelenggaraan seni dan budaya tahun 2013 sebanyak 1 (satu) buah yang kemudian naik menjadi 3 (tiga) buah dan berada pada angka 2 (dua) buah dari tahun 2015-2017

2.3.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah diperoleh dengan memperhitungkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibagi dengan jumlah pekerja perempuan dan dikalikan 100%. Adapun capaian partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 46 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2013-2017



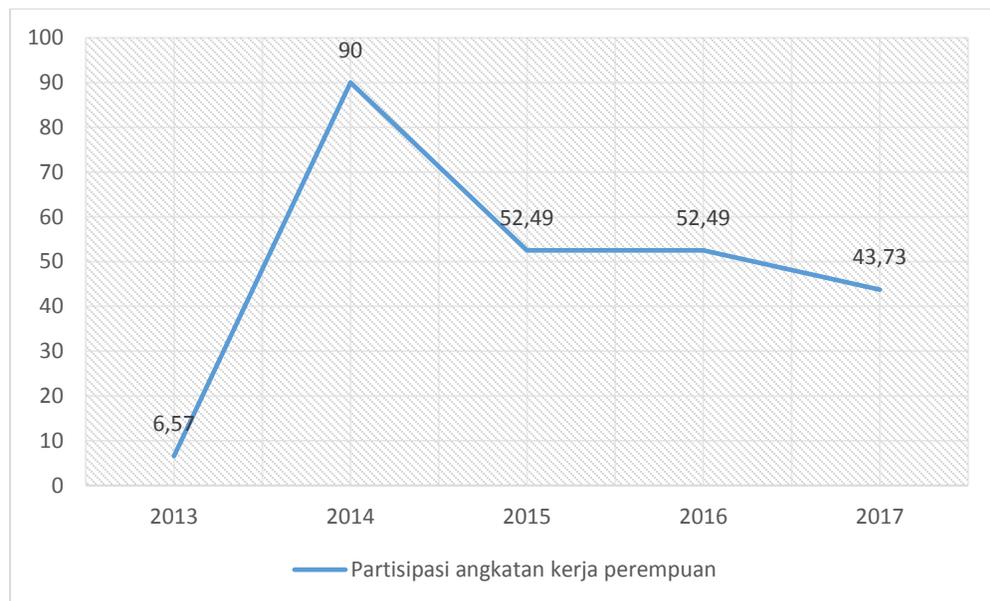
Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2013 berada pada posisi 55.41% yang kemudian mengalami penurunan secara signifikan menjadi 2.4% pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut naik pada angka 24.26% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 7.72% tahun 2016 dan 6.95% satu tahun kemudian.

B. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan diperoleh dengan memperhitungkan jumlah pekerja perempuan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Adapun capaian partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 47 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2013 berada pada posisi 6.57% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 90% pada tahun 2014. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 52.49% selama kurun waktu 2015-2016 dan 43.73% pada tahun 2017.

C. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas diperoleh dengan memperhitungkan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf, dibagi dengan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun. Adapun capaian pada angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 48 Persentase Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas tahun 2013 berada pada posisi 92.49% yang kemudian mengalami penurunan secara signifikan menjadi 63.41% pada tahun 2014. Namun, capaian tersebut naik pada angka 71.42% dari tahun 2015-2016 dan mengalami penurunan menjadi 70.74% pada tahun 2017.

2.3.1.9. Urusan Pangan

A. Ketersediaan pangan utama

Gambar 2. 49 Ketersediaan Pangan Utama 2013-2017 (kg/1000 penduduk)



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal ketersediaan pangan utama tahun 2013 berada pada posisi 39155,43 kg yang kemudian mengalami penurunan sebesar 378421,03 kg. Capaian tersebut turun secara signifikan pada angka 141092,73 kg pada tahun 2015 dan 80019,58 kg pada tahun 2016. Namun, capaian tersebut naik menjadi 279937,82 satu tahun kemudian.

B. Regulasi ketahanan pangan

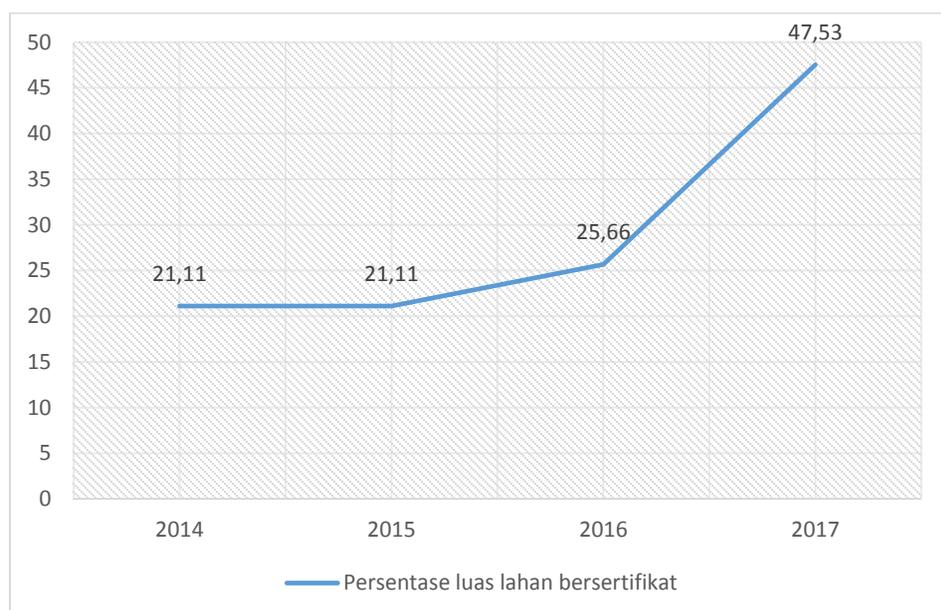
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara belum memiliki regulasi ketahanan pangan dari tahun 2013-2014. Namun, dari tahun 2015-2017 pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah memiliki regulasi tersebut.

2.3.1.10. Urusan Pertanahan

A. Persentase luas lahan bersertifikat

Luas lahan bersertifikat diperoleh dari luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kayong Utara dibagi dengan luas lahan yang seharusnya bersertifikat dikali 100%. Adapun capaian persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017:

Gambar 2. 50 Persentase luas lahan bersertifikat 2014-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal luas lahan bersertifikat tahun 2013 berada pada posisi 21.11% dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2014 sebesar 21.11%. Kemudian, tahun 2016 capaian tersebut naik menjadi 25.66% dan naik kembali pada angka 47.53% satu tahun kemudian.

B. Pengajuan izin lokasi

Terdapat 2 (dua) pengajuan izin lokasi di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016 yang kemudian meningkat menjadi 11(sebelas) pengajuan pada tahun 2017.

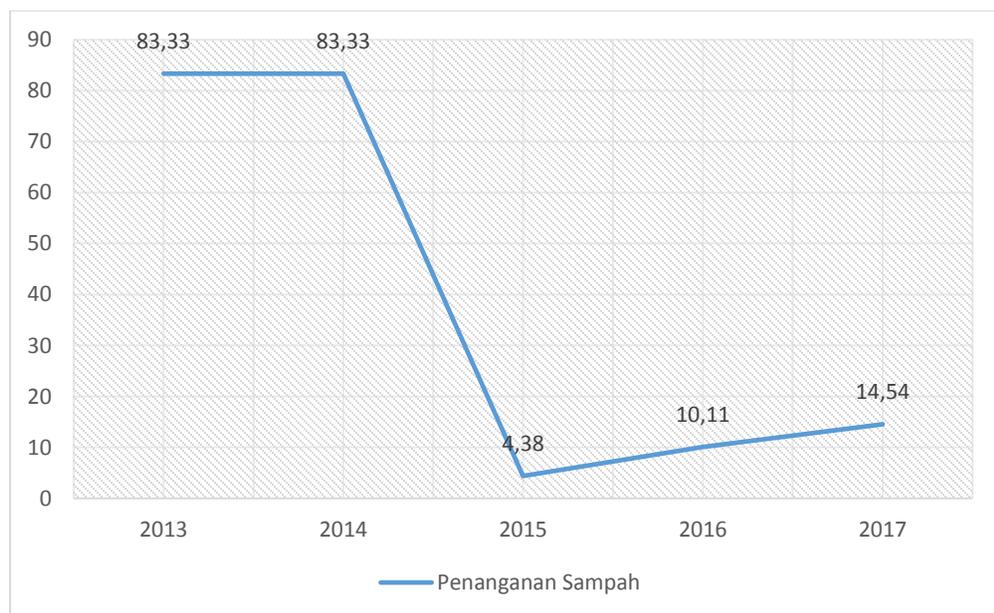
C. Izin lokasi yang telah ditetapkan

Terdapat 2 (dua) izin lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2016 yang kemudian meningkat menjadi 11(sebelas) pengajuan pada tahun 2017.

2.3.1.11. Urusan Lingkungan Hidup

A. Penanganan Sampah

Gambar 2. 51 Persentase Penanganan Sampah 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal penanganan sampah tahun 2013 berada pada posisi 83.33% dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2014 sebesar 83.33% yang kemudian mengalami penurunan secara signifikan menjadi 4.38% pada tahun 2015. Namun, capaian tersebut naik menjadi 10.11% pada tahun 2016 dan 14.54% satu tahun kemudian.

B. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk diperoleh dari jumlah daya tampung TPS yang dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Kayong Utara.

C. Indikator Kinerja Kunci Kebersihan

Gambar 2. 52 Persentase Indikator Kinerja Kunci Kebersihan 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase indikator kinerja kunci kebersihan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal indikator kinerja kunci kebersihan pada posisi 16.67% selama kurun waktu 2013-2015 yang kemudian naik secara signifikan menjadi 87.5% pada tahun 2016 dan tetap pada angka yang sama sebesar 87.5% satu tahun kemudian.

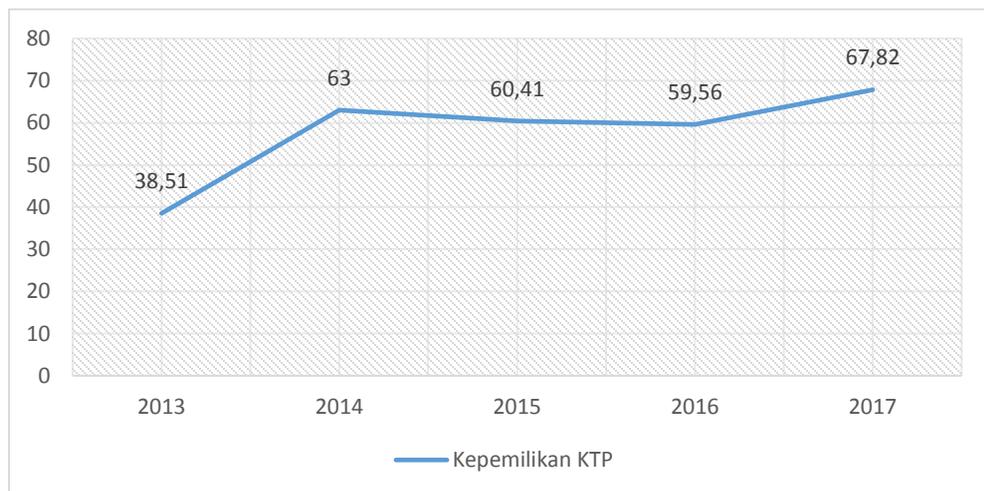
D. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum lingkungan diperoleh dengan jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dari jumlah kasus lingkungan hidup yang ada juga. Penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kayong Utara adalah 0% dari tahun 2013-2015 dan kemudian meningkat menjadi 100% dari tahun 2016-2017. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Kayong Utara berhasil menyelesaikan setiap kasus lingkungan yang terjadi.

2.3.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Kepemilikan KTP

Gambar 2. 53 Persentase Kepemilikan KTP 2013-2017

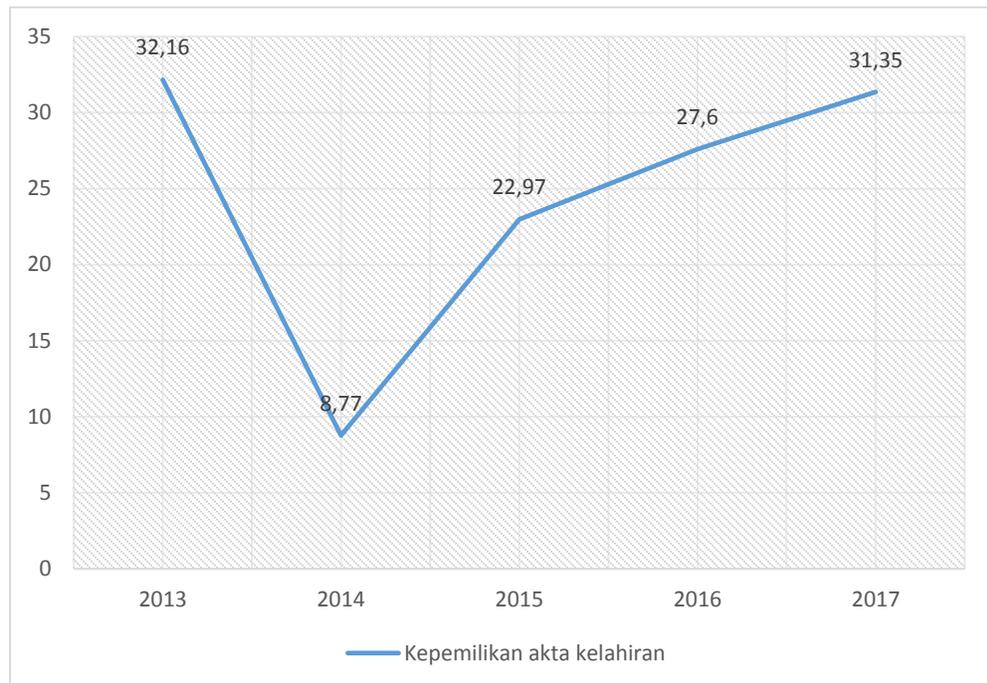


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase kepemilikan KTP mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal kepemilikan KTP tahun 2013 berada pada posisi 38.51% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 63%. Namun, capaian tersebut turun menjadi 60.41% pada tahun 2015 dan 59.56% pada tahun 2016 yang kemudian kembali naik menjadi 67.82% satu tahun kemudian.

B. Kepemilikan akta kelahiran

Gambar 2. 54 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal kepemilikan akte kelahiran tahun 2013 berada pada posisi 32.16% yang kemudian mengalami penurunan secara signifikan menjadi 8.77% pada tahun 2014. Namun, capaian tersebut naik menjadi 22.97% pada tahun 2015 yang kemudian naik menjadi 27.6% pada tahun 2016 dan kembali naik menjadi 31.35% satu tahun kemudian.

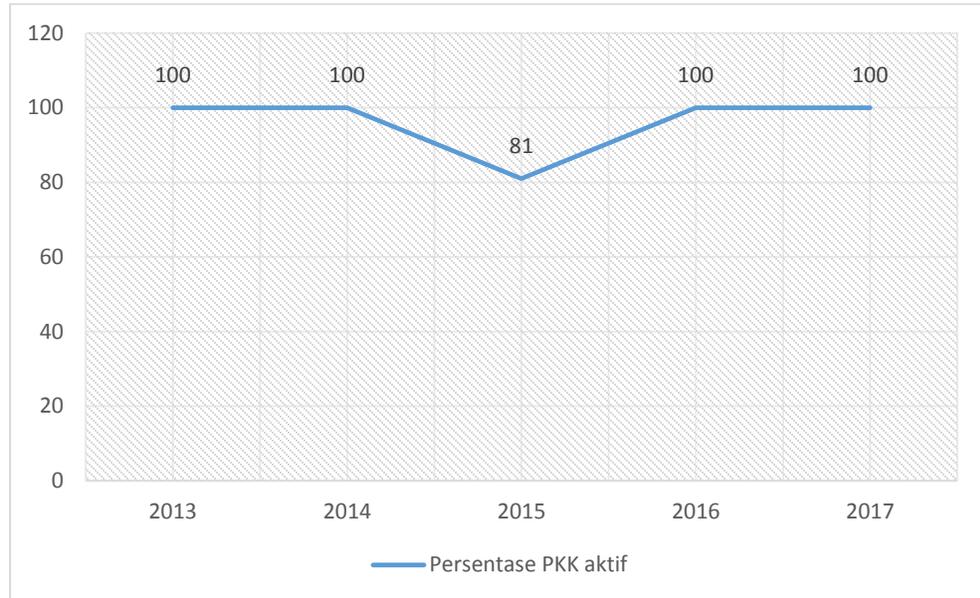
C. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2016 telah ada.

2.3.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Persentase PKK aktif

Gambar 2. 55 Persentase PKK aktif 2013-2017

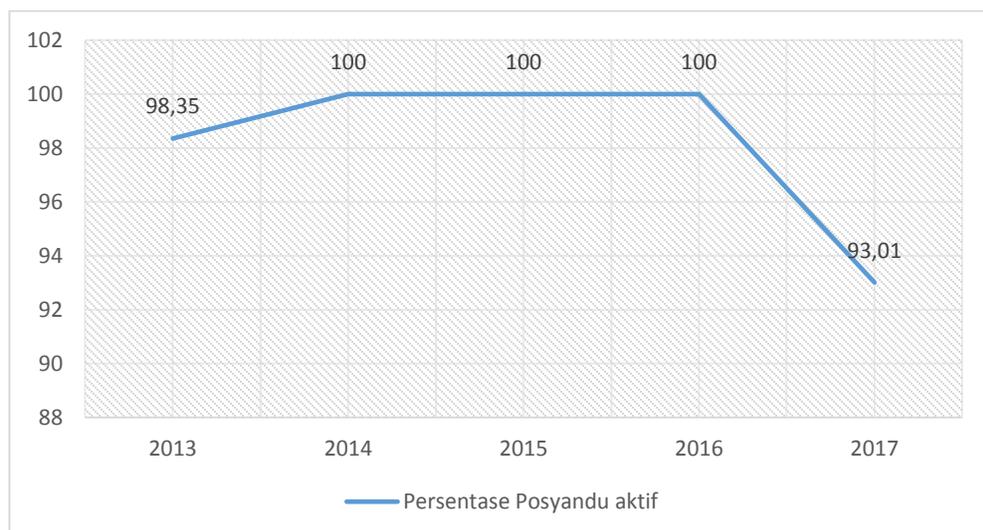


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase PKK aktif di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal PKK aktif pada posisi 100% dari tahun 2013-2014 yang kemudian mengalami penurunan menjadi 81% pada tahun 2015. Namun, capaian tersebut naik menjadi 100% dari tahun 2016-2017.

B. Persentase Posyandu aktif

Gambar 2. 56 Persentase Posyandu Aktif 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

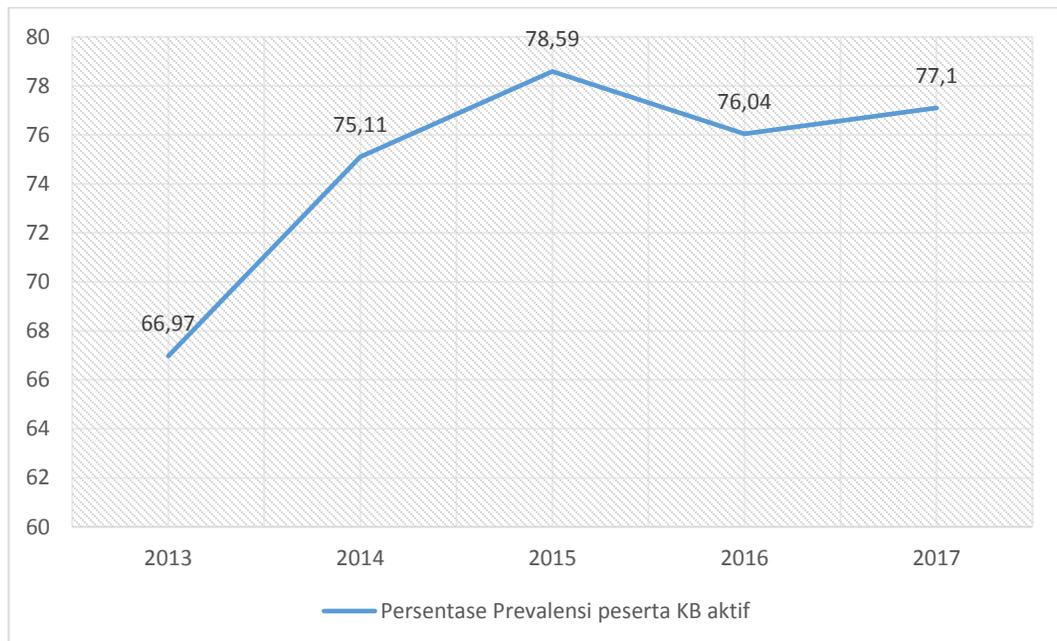
Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase posyandu aktif di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal posyandu aktif tahun 2013 berada pada posisi 98.35% yang kemudian naik menjadi 100% selama kurun waktu 2014-2016. Namun, tahun 2017 mengalami penurunan pada angka 93.01%.

2.3.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Persentase Prevalensi peserta KB aktif

Persentase Prevalensi peserta KB aktif diperoleh dari jumlah peserta program KB aktif pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah pasangan usia subur pada tahun yang sama. Adapun capaian di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 57 Persentase Prevalensi peserta KB aktif 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

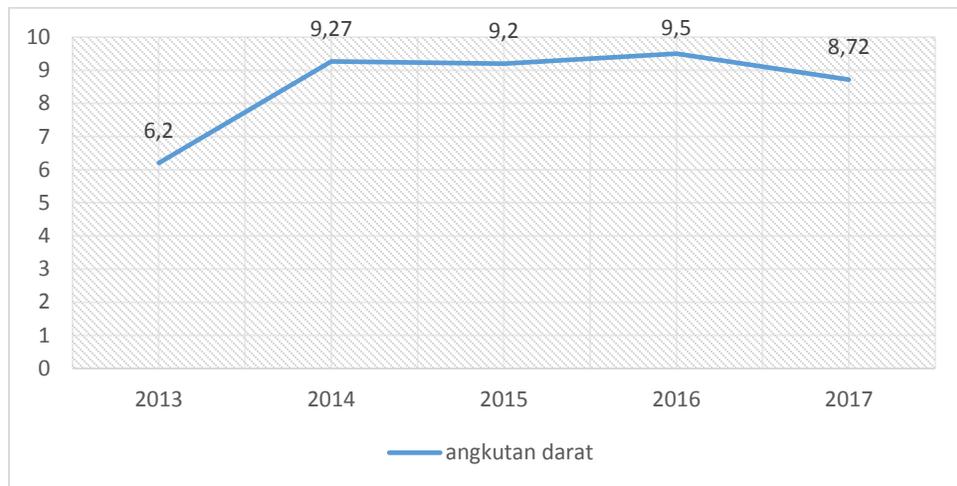
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa persentase prevalensi peserta KB aktif selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal persentase prevalensi peserta KB aktif tahun 2013 berada pada posisi 66.97% yang kemudian naik menjadi 75.11% pada tahun 2014 dan 78.59% pada tahun 2015. Namun,

tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 76.04% dan kembali naik menjadi 77.1% satu tahun kemudian.

2.3.1.15. Urusan Perhubungan

A. Angkutan Darat

Gambar 2. 58 Persentase Angkutan Darat 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase angkutan darat di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal angkutan darat tahun 2013 berada pada posisi 6.2% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 9.27% pada tahun 2014. Namun, tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 9.2% yang kemudian naik menjadi 9.5% pada tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan menjadi 8.72% satu tahun kemudian.

2.3.1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika

A. Website Resmi Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah memiliki website resmi sebanyak 1 (satu) website selama kurun waktu 2014-2016 yang kemudian tahun 2017 naik menjadi 4 (empat) website.

B. Pameran/Expo yang telah diselenggarakan

Pameran/Expo yang telah diselenggarakan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal pameran/expo yang telah diselenggarakan sebanyak 0 dari tahun 2013-2014 dan naik menjadi 1 (satu) kali pada tahun 2015. Kemudian, capaian tersebut kembali naik sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2016 dan 7 (tujuh) kali satu tahun kemudian.

Gambar 2. 59 Pameran/Expo Yang Telah Diselenggarakan 2013-2017

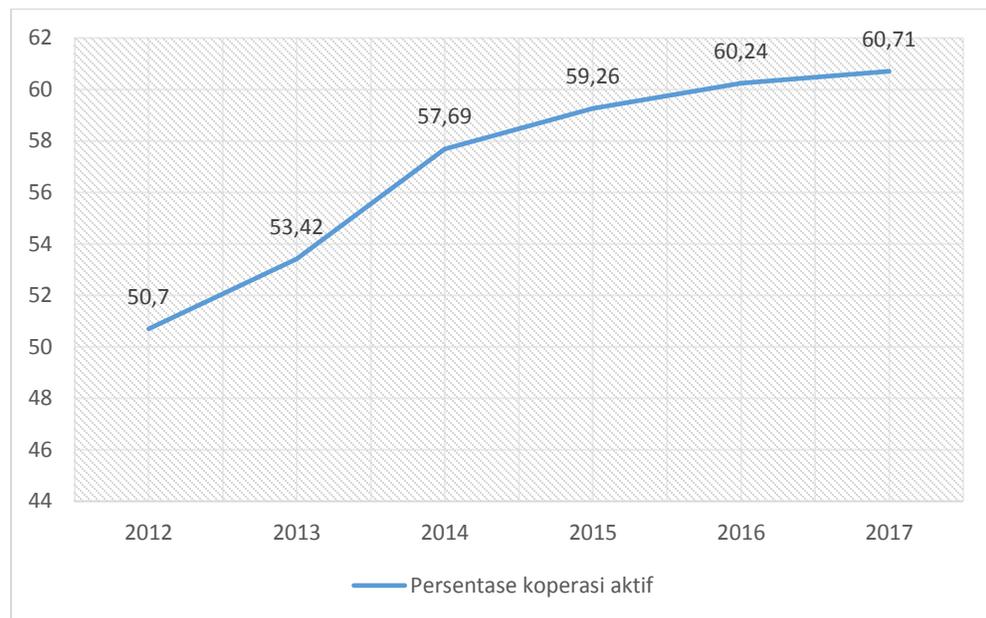


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

2.3.1.17. Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

A. Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah Koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Kayong Utara. Adapun capaian persentase koperasi aktif di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017:

Gambar 2. 60 Persentase Koperasi Aktif 2012-2017

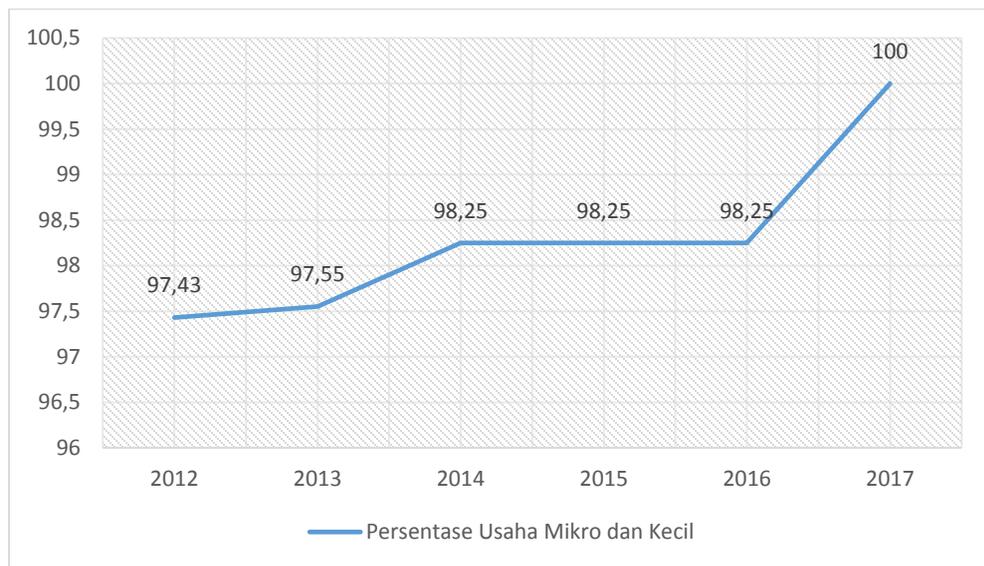
Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase koperasi aktif di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal persentase koperasi aktif tahun 2012 berada pada posisi 50.7% yang kemudian naik menjadi 53.42% pada tahun 2013 dan 57.69% pada tahun 2014. Demikian pula, tahun 2015 capaian tersebut naik pada angka 59.26% yang kemudian naik menjadi 60.24% pada tahun 2016 dan 60.71% satu tahun kemudian.

B. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 837 dengan Jumlah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Adapun capaian Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017:

Gambar 2. 61 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 2012-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2017 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal usaha mikro dan kecil tahun 2012 berada pada posisi 97.43% dan naik menjadi 97.55% pada tahun 2013 dan 98.25% pada tahun 2014. Kemudian, capaian tersebut naik pada angka 98.25% dari tahun 2014-2016 dan naik menjadi 100% pada tahun 2017.

2.3.1.18. Urusan Penanaman Modal

A. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Gambar 2. 62 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 2014-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN tahun 2014 berada pada posisi 71.207.833.000 yang kemudian mengalami penurunan secara signifikan menjadi 36.522.740.000 pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 naik pada angka 41.848.750.000 dan mengalami penurunan menjadi 5.935.000.000 satu tahun kemudian.

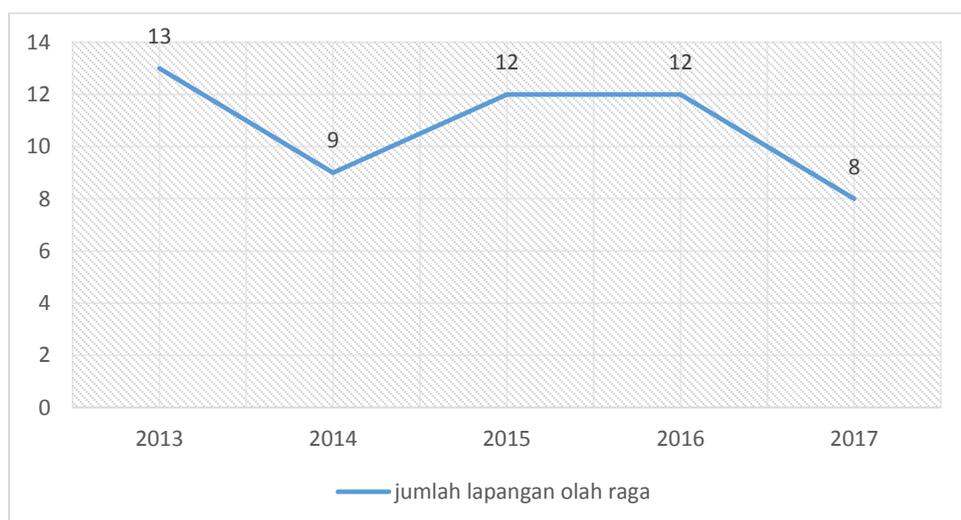
2.3.1.19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

A. Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) diperoleh dengan penghitungan jumlah gelanggang yang ada dibagi dengan jumlah penduduk Kayong Utara dikali 1000 penduduk. Gelanggang/balai remaja di Kabupaten Kayong Utara belum terdapat dari tahun 2013-2014. Namun, dari tahun 2015-2016 telah terdapat gelanggang/balai remaja sebanyak 2 (dua) gelanggang dan tidak terdapat gelanggang/balai remaja pada tahun 2017.

B. Jumlah lapangan olah raga

Gambar 2. 63 Jumlah Lapangan Olah Raga 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa jumlah lapangan olah raga di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami

fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal jumlah lapangan olah raga tahun 2013 sebanyak 13 (tiga belas) buah yang kemudian mengalami penurunan menjadi 9 (sembilan) buah pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut naik menjadi 12 (dua belas) buah dan tahun 2016 pada angka yang sama sebesar 12 (dua belas buah) yang kembali mengalami penurunan menjadi 8 (buah) satu tahun kemudian.

2.3.1.20. Urusan Statistik

A. Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah memiliki buku “Kabupaten Dalam Angka” secara rutin per tahun selama kurun waktu 2013-2017.

B. Buku “Pendapatan Domestik Regional Bruto”

Buku “PDRB” Kabupaten Kayong Utara telah terdapat di dalam buku Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka secara rutin per tahun selama kurun waktu 2012-2017.

2.3.1.21. Urusan Kebudayaan

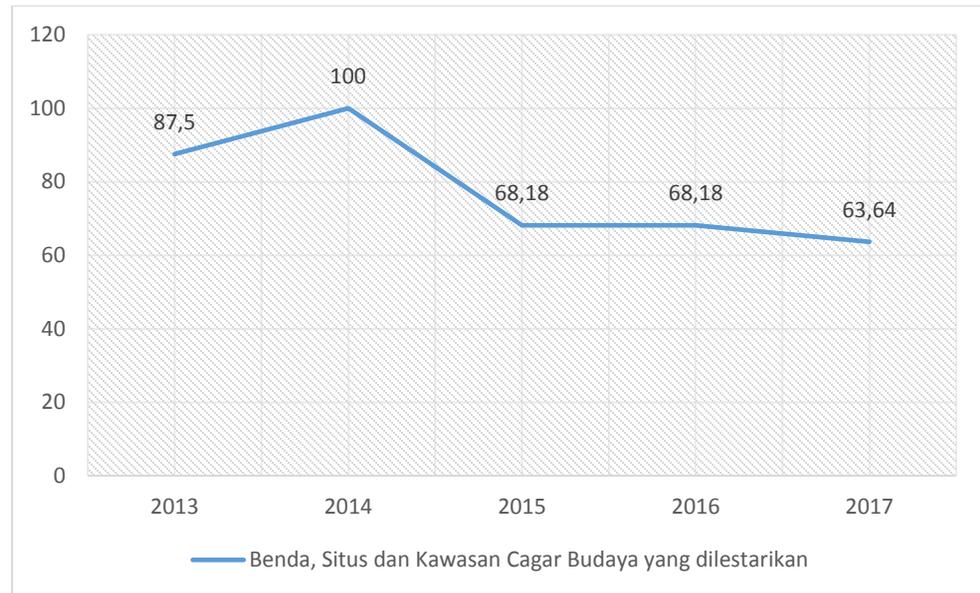
A. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali secara rutin per tahun selama kurun 2013-2016 yang kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 4 (sempat) kali.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan diperoleh dengan memperhitungkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dikali 100%. Adapun capaian pada indikator tersebut di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 64 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2013-2017

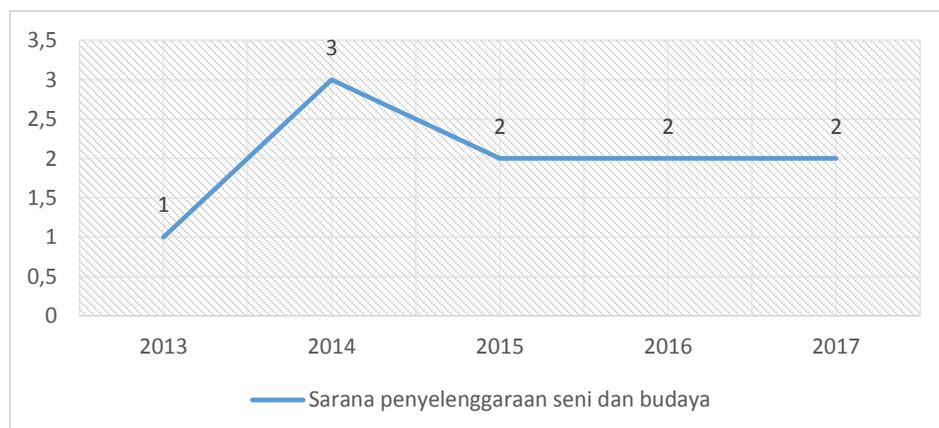


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2013 berada pada posisi 87.5% yang kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2014. Namun, tahun 2015 capaian tersebut mengalami penurunan secara signifikan pada angka 68.18% dan tahun 2016 pada angka yang sama sebesar 68.18% yang kembali mengalami penurunan menjadi 63.64% satu tahun kemudian.

C. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Gambar 2. 65 Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya 2013-2017



Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2015 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal sarana penyelenggaraan seni dan budaya tahun 2013 sebanyak 1 (satu) buah yang kemudian naik menjadi 3 (tiga) buah dan berada pada angka 2 (dua) buah dari tahun 2015-2017.

2.3.1.22. Urusan Perpustakaan

A. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun, baik yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Adapun capaian pada indikator tersebut di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 66 Jumlah Pengunjung Perpustakaan 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar diatas diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2013 sebesar 581 kunjungan yang kemudian mengalami penurunan menjadi 310 kunjungan. Namun, capaian

tersebut naik sebesar 1333 kunjungan pada tahun 2015 dan 11288 kunjungan pada tahun 2016 yang kembali mengalami penurunan menjadi 1750 kunjungan satu tahun kemudian.

B. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Gambar 2. 67 Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 2014-2017

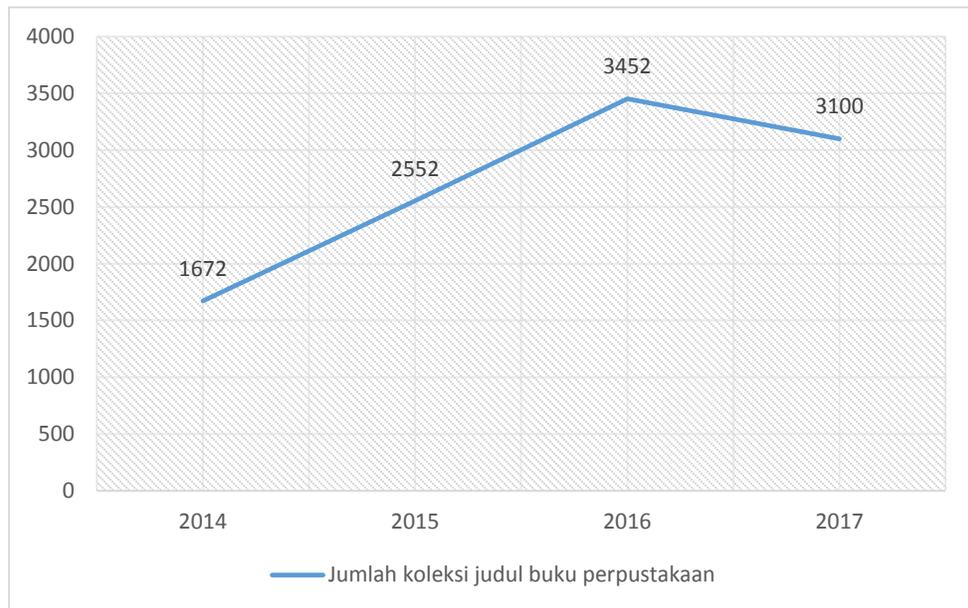


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami peningkatan. Hal tersebut tampak dari kondisi awal jumlah koleksi buku perpustakaan tahun 2014 sebesar 5010 buku yang kemudian naik menjadi 6539 buku pada tahun 2015. Kemudian, capaian tersebut naik menjadi 10140 buku pada tahun 2016 dan 10500 buku satu tahun selanjutnya.

C. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Gambar 2. 68 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 2014-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal jumlah koleksi judul buku perpustakaan tahun 2014 sebesar 1672 buku yang kemudian naik menjadi 2552 buku pada tahun 2015 dan 2452 buku pada tahun 2016. Namun, capaian tersebut turun pada tahun 2017 menjadi 3100 buku.

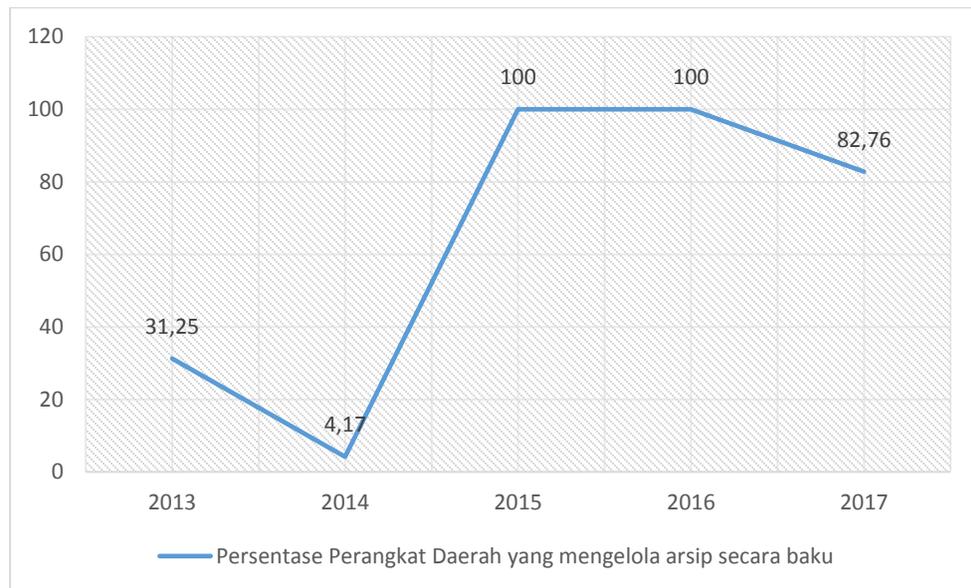
2.3.1.23. Urusan Kearsipan

A. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku diperoleh dengan memperhitungkan jumlah OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku dibagi dengan jumlah OPD di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Adapun capaian Perangkat Daerah yang mengelola

arsip secara baku di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 69 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2014-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tahun 2013 berada pada posisi 31.25% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 4.17% pada tahun 2014. Namun, capaian tersebut naik secara signifikan pada angka 100% dari tahun 2015-2016 dan kembali mengalami penurunan menjadi 82.76% satu tahun kemudian.

B. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Kayong Utara adalah 1 (satu) kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun selama kurun waktu 2013-2016. Namun, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 8 (delapan) kegiatan.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.1.24. Urusan Pertanian

A. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar diperoleh dengan membandingkan antara jumlah produksi padi per tahun pada kurun waktu tertentu dengan luas lahan yang digunakan pada tahun yang sama. Adapun capaian di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 70 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 2013-2017 (ton/Ha)



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

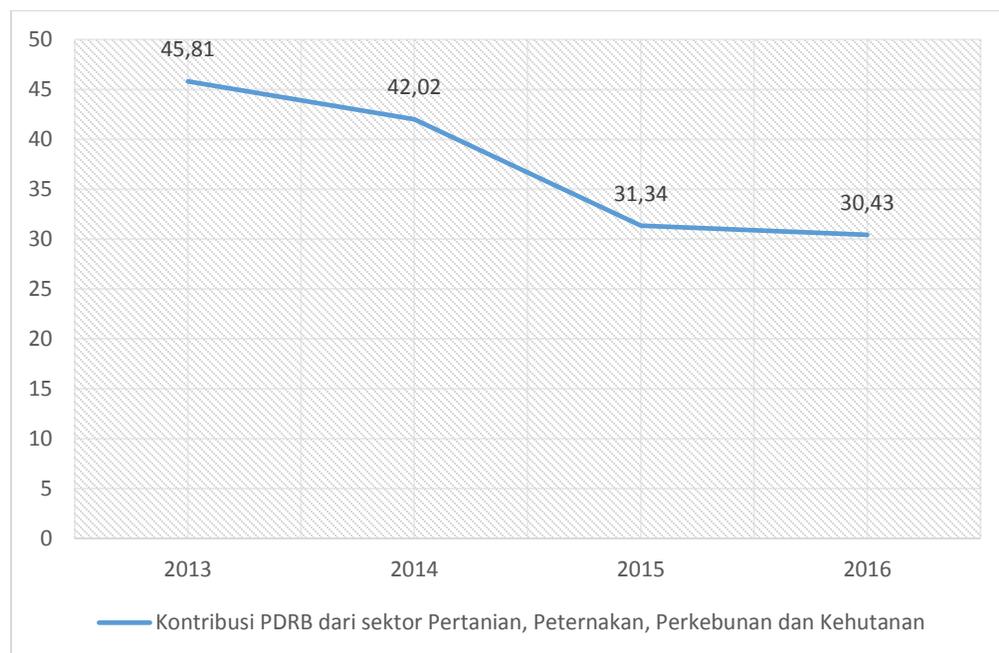
Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tampak dari kondisi awal produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar tahun 2013 berada pada posisi 3.17 ton/ha yang kemudian mengalami penurunan menjadi 2.33 ton/ha pada tahun 2014 dan 2.32 ton/ha pada tahun 2015. Namun, capaian tersebut naik pada angka 2.77 ton/ha pada tahun 2016 dan 2.82 ton/ha satu tahun kemudian.

B. Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa pertanian

Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa pertanian diperoleh dengan membandingkan jumlah kontribusi PDRB pada kurun waktu tertentu dari sektor pertanian dibandingkan dari keseluruhan PDRB pada tahun yang sama. Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa pertanian di Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 adalah 19.29%.

C. Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

Gambar 2. 71 Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016 mengalami penurunan. Hal tersebut tampak dari kondisi awal kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan tahun 2013 berada pada posisi 45.81% yang turun pada tahun 2014 menjadi 42.02%.

Kemudian, capaian tersebut turun menjadi 31.34% pada tahun 2016 dan 30.43% satu tahun kemudian.

2.3.1.25. Urusan Kehutanan

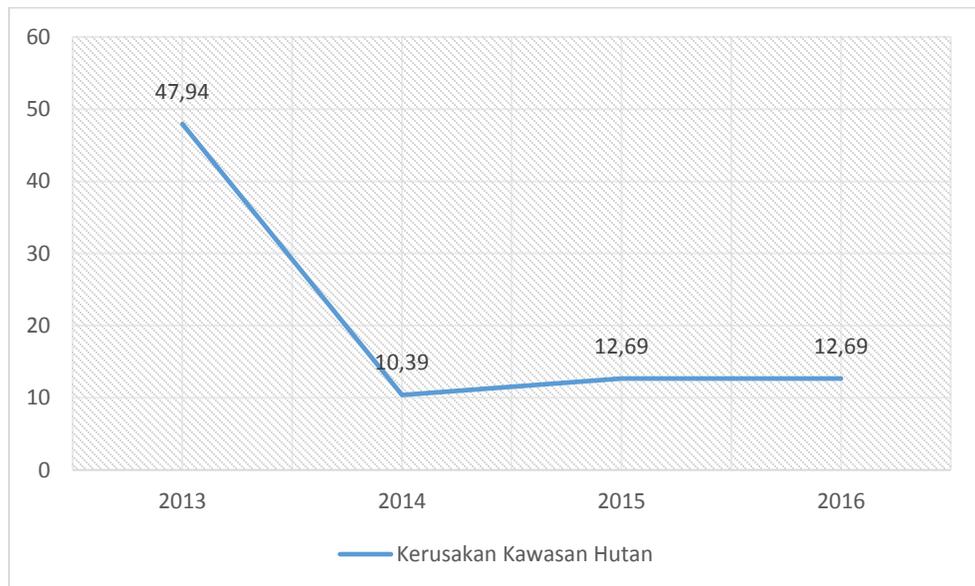
A. Rehabilitasi lahan kritis

Rehabilitasi lahan kritis bermanfaat untuk terbentuknya lahan yang produktif dan pemulihan untuk usahatani konservasi yang berfungsi untuk mengurangi risiko terjadi banjir dan kekeringan.

B. Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan kawasan hutan diperoleh dengan membandingkan antara luas kerusakan kawasan hutan dengan luas kawasan hutan. Adapun capaian kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 72 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 2013-2017



Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal kerusakan kawasan hutan tahun 2013 berada pada posisi 47.94% yang kemudian turun secara signifikan menjadi 10.39% pada tahun 2014. Namun,

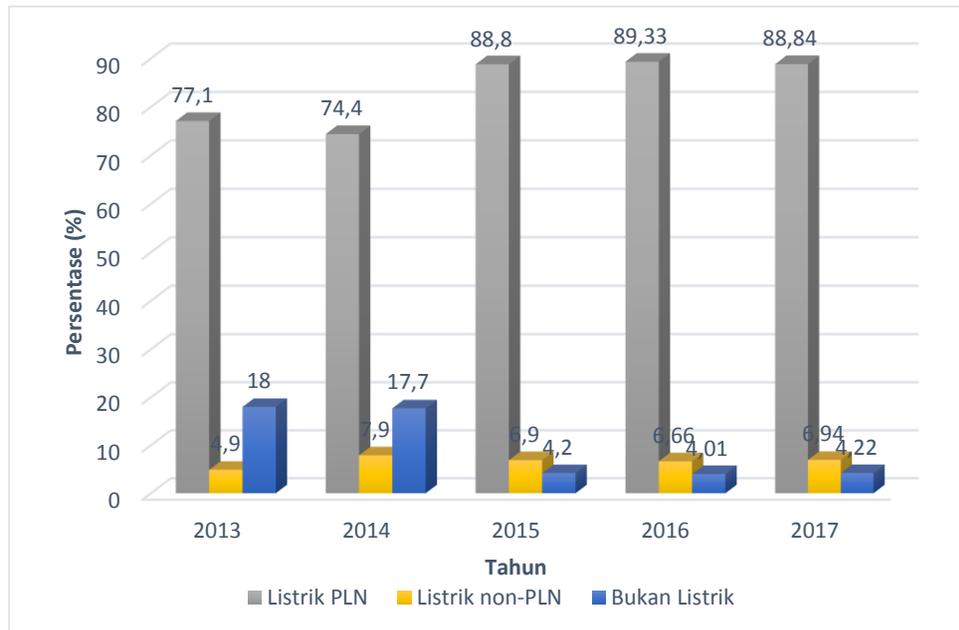
capaian tersebut mengalami peningkatan pada angka 12.69% dan tetap sama dengan angka 12.59 satu tahun kemudian.

2.3.1.26. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Sumber Penerangan Rumah Tangga

Penyedia tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Adapun persentase sumber penerangan rumah tangga listrik di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 73 Persentase Sumber Penerangan Rumah Tangga di Kab. Kayong Utara 2013-2017



Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2014-2018, BPS

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2012-2014 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal rumah tangga dengan akses listrik tahun 2012 berada pada posisi 88.58% yang kemudian turun menjadi 81.64% pada tahun 2013 dan naik kembali menjadi 82.31% satu tahun kemudian.

B. Persentase pertambangan tanpa ijin

Pertambangan tanpa ijin dimaksudkan untuk mengukur besarnya luasan penambangan liar yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Persentase pertambangan tanpa ijin diperoleh dengan membagi luas pertambangan liar yang diterbitkan dibagi dengan luas areal penambangan liar. Persentase pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Kayong utara tahun 2013 berada pada posisi 0%. Namun, capaian tersebut berada pada angka 100% selama kurun waktu 2014-2016.

2.3.1.27. Urusan Perdagangan

A. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih diperoleh dengan perhitungan (ekspor Luar negeri + Ekspor Antar Daerah) - (Impor Luar Negeri - Impor Dalam Daerah). Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2016 adalah Tanda Daftar Industri (TDI) karena belum ada kegiatan. Namun, capaian tersebut pada tahun 2017 berada pada angka -161242,63.

2.3.1.28. Urusan Transmigrasi

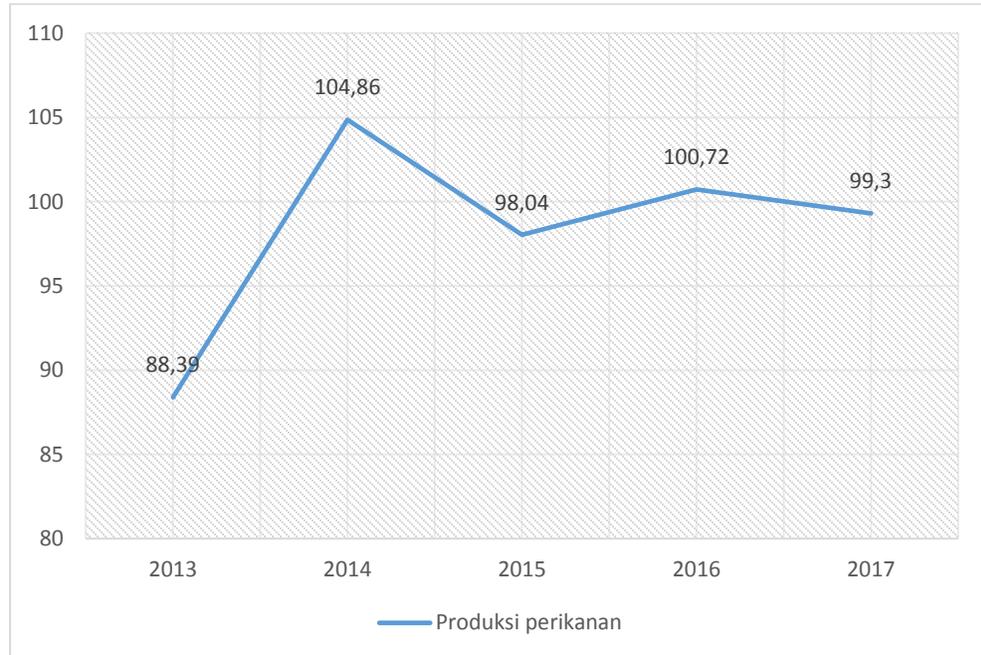
A. Persentase Transmigran Swakarsa

Persentase transmigran swakarsa diperoleh dari jumlah transmigran swakarsa dibagi dengan jumlah transmigran. Capaian persentase transmigran swakarsa di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2013 berada pada posisi 18.75% yang kemudian turun menjadi 7.83% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 tidak terdapat transmigran swakarsa. Namun, tahun 2016 capaian tersebut berada pada angka 100% dan tidak terdapat transmigran swakarsa satu tahun kemudian.

2.3.1.29. Urusan Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan

Gambar 2. 74 Persentase Produksi Ikan 2013-2017

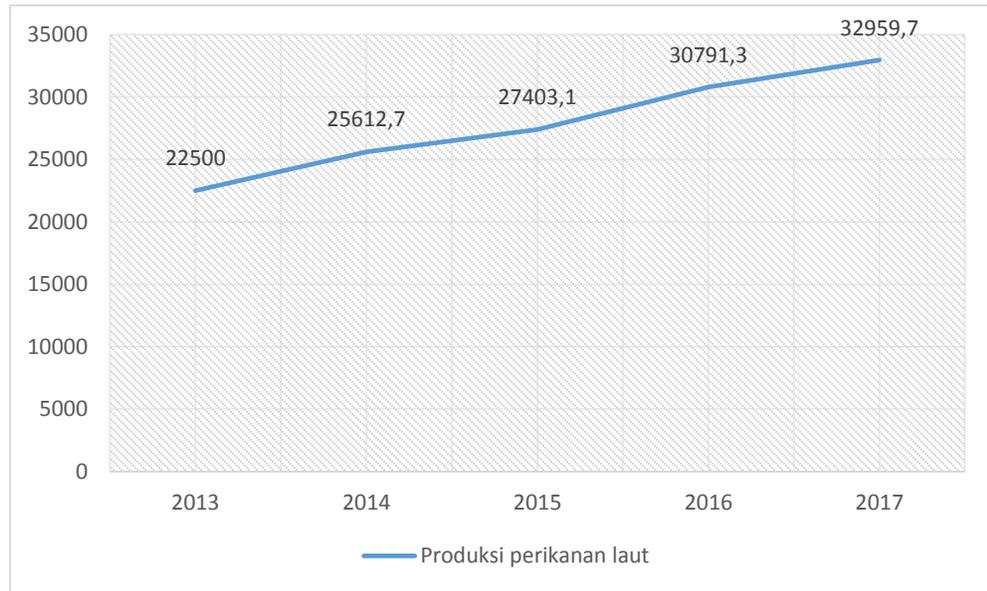


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase produksi ikan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal konsumsi ikan tahun 2013 berada pada posisi 88.39% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 104.86% pada tahun 2014. Namun, tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 98.04% yang kemudian naik menjadi 100.72% pada tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan menjadi 99.3% satu tahun kemudian.

B. Produksi perikanan laut

Gambar 2. 75 Produksi Perikanan Laut 2013-2017 (ton)

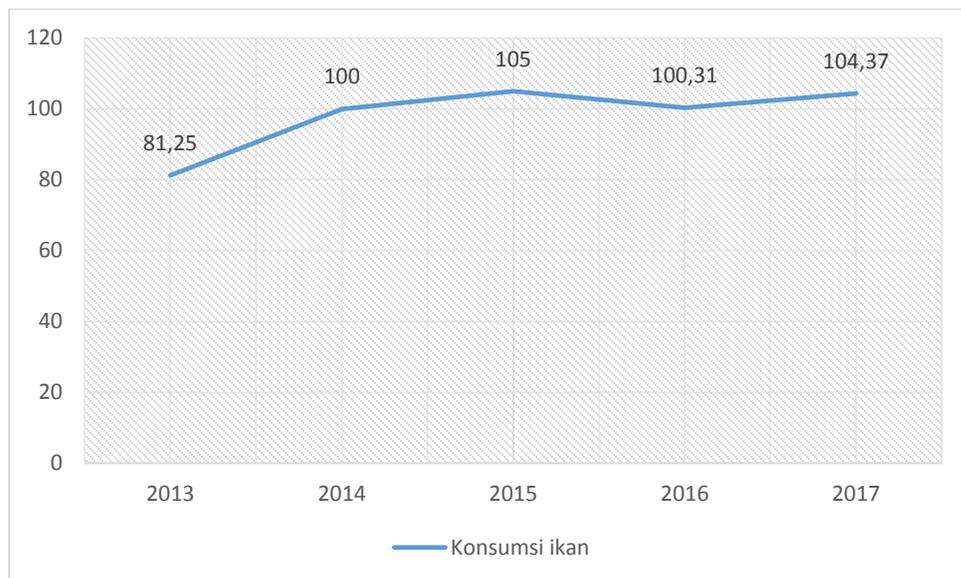


Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa produksi perikanan laut di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal produksi perikanan laut tahun 2013 berada pada posisi 22.500 ton yang naik menjadi 25.612.70 ton pada tahun 2015 dan 27.403,10 ton pada tahun 2016. Kemudian, capaian tersebut naik menjadi 30.791,30 ton pada tahun 2016 dan pada angka 32.959,70 satu tahun kemudian.

C. Konsumsi ikan

Jumlah konsumsi ikan diperoleh dengan membandingkan jumlah konsumsi ikan dengan target produksi ikan daerah. Adapun capaian kelautan dan perikanan pada konsumsi ikan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017:

Gambar 2. 76 Persentase Konsumsi Ikan 2013-2017

Sumber: LKPJ KKU Tahun 2017

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa persentase konsumsi ikan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal konsumsi ikan tahun 2013 berada pada posisi 81.25% yang kemudian naik secara signifikan menjadi 100% pada tahun 2014 dan 105% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 capaian tersebut mengalami penurunan pada angka 100.31% dan kembali naik menjadi 104.37% satu tahun kemudian.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah.

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa

besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga per kapita di tahun 2015 sampai dengan 2017 di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 18 Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2017

Uraian	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Makanan/Food	Rp.	1.611.249	1.794.076	1.974.963
Non Makanan/Non Food	Rp.	468.315	490.754	501.093
Total Pengeluaran RT	Rp.	2.079.565	2.284.830.	2.476.056

Sumber:

Secara rata-rata selama periode 2015-2017 total pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan, konsumsi makanan lebih mendominasi dibandingkan konsumsi non makanan. Sedangkan perkembangan total rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan.

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

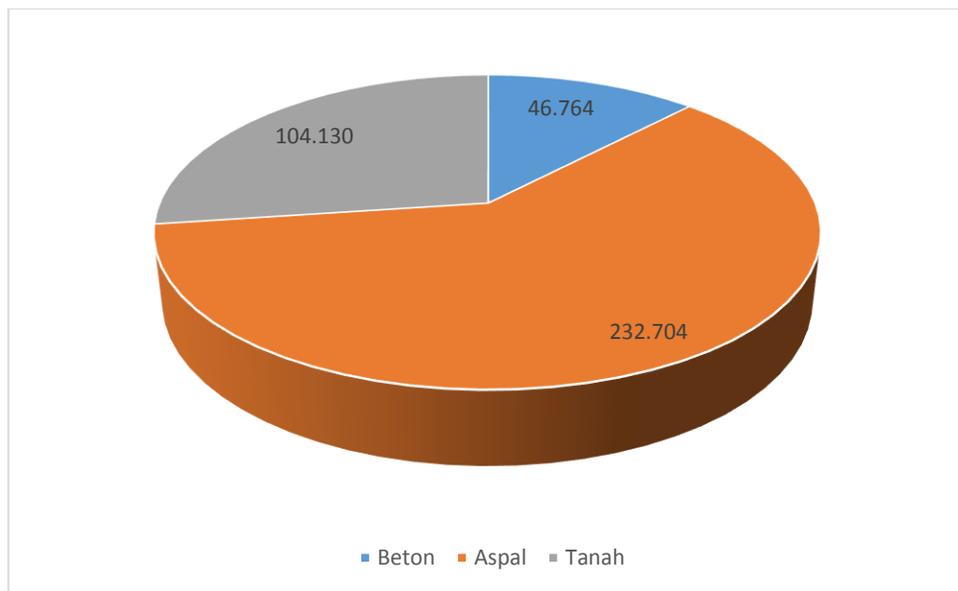
Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

2.4.2.1. Transportasi dan Infrastruktur Jalan

Panjang jalan di Kayong Utara tahun 2017 tercatat sepanjang 383,598 km, Jika dibagi menurut kondisinya, jalan kondisi baik sepanjang 142,603 Km, sedang sepanjang 52,168 Km rusak sepanjang 117,130 Km dan 71,697 Km yang mengalami rusak berat. Sebagian besar permukaan jalan berupa aspal 232,704 Km, permukaan tanah sepanjang 104,130 Km dan beton 46,764 Km. Panjang Jalan

Menurut Jenis Permukaan Tahun 2017 (km) dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2. 77 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2017 (km)



Sumber: Kayong Utara Dalam Angka Tahun 2018

Pada tahun 2017, jumlah kendaraan di Kabupaten Kayong Utara mencapai 5.548 unit, dimana 5.522 diantaranya merupakan kendaraan darat pribadi dan 26 unit adalah Angkutan Penumpang sungai/laut. Menurut jenisnya, kendaraan pribadi terdiri 147 (2,7%) kendaraan roda 4 dan 5.375 (97,3%) kendaraan roda 2. Jumlah sarana angkutan sungai/laut terdiri dari motor air 8. Unit, speed boat 16 dan kapal feri 2 unit.

Tabel 2. 19 Banyaknya Kendaraan di Kabupaten Kayong Utara Menurut Angkutan 2017

Jenis Angkutan	Jumlah Kendaraan
Roda 4	147
Roda 2	5.375
Speed Boat	16
Motor Air	8
Kapal Feri	2
Jumlah Total	5.548

Sumber ; Kabupaten Kayong Utara dalam Angka

2.4.2.2. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah pelanggan tenaga listrik PLN di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 22.364 pelanggan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 20.528 pelanggan. Produksi listrik selama tahun 2017 adalah 30.439.786 Kwh

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih

Pada tahun 2017, jumlah pelanggan Unit Pelayanan Teknis (UPT) air bersih di Kabupaten Kayong Utara adalah sebanyak 2.159 pelanggan.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Perkembangan investasi di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, antara lain melalui kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan/pengembangan infrastruktur kawasan peruntukan industri, peningkatan sistem informasi investasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Kayong Utara maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal kepolisian harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum polisi. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat

keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2. 20 Laporan Anev Jenis Kejahatan Sat Reskrim Polres Kayong Utara Periode Tahun 2017 Dibanding 2018

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		JAN S/D DES		JAN S/D DES 2018	
		L	S	L	S
I	KJHT KONVENSIONAL				
1	CURRAS	0	0	0	0
2	CURRAT	11	10	5	4
3	CURI BIASA	1	1	2	0
4	CURRANMOR	2	2	0	0
5	PEMBUNUHAN	0	0	0	0
6	ANIRAT	0	0	2	1
7	ANIAYA RINGAN	2	2	4	4
8	PERTOLONGAN JAHAT	0	0	0	0
9	PENCABULAN	0	0	0	0
10	PERKOSAAN	0	0	0	0
11	PERZINAHAN	0	0	0	0
12	TEMPATI TNH TANPA IJIN/UU NO.50/60	0	0	0	0
13	CURI DLM KELUARGA	0	0	0	0
14	PENIPUAN	1	1	3	3
15	PENGELAPAN	4	4	6	4
16	PEMALSUAN	0	0	0	0
17	PENGEROYOKAN	0	0	1	2
18	PENGRUSAKAN	3	2	2	2
19	PENYEROBOTAN TANAH	0	0	0	0
20	KEBAKARAN	0	0	0	0
21	PEMBAKARAN	0	0	0	0
22	PERBUATAN TIDAK ENAK	0	0	0	0
23	PENGHINAAN	0	0	0	0
24	KRN LALAI ORG MATI	0	0	0	0
25	PERJUDIAN	7	7	10	9
26	PERAMPASAN	0	0	0	0
27	PERKAWINAN HALANG	0	0	1	1
28	UU DRT NO. 12 / 1951	1	1	0	0
29	PEMERASAN	0	0	0	0
30	BAWA LARI ANAK GADIS	0	0	0	0
31	PERLINDUNGAN ANAK	8	8	4	4
32	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0
33	UANG PALSU	0	0	0	0

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		JAN S/D DES		JAN S/D DES 2018	
		L	S	L	S
34	JAMINAN FIDUSIA	0	0	0	0
35	PENGGELAPAN DLM JABATAN	2	2	0	0
36	CUBIS/TIPIRING	0	0	1	1
37	PENGANCAMAN	0	0	1	1
38	MIRAS	0	0	3	3
39	PERCOBAAN PEMBUNUHAN	0	0	1	1
40	GK / LAIN-LAIN	3	3	0	0
	JUMLAH	47	45	46	40
II	KJHT TRANS NASIONAL	L	S	L	S
1	TERORISME	0	0	0	0
2	SENPI / HANDAK	0	0	0	0
3	BAJAK LAUT	0	0	0	0
4	PEOPLE SMUGGLING /CRIME	0	0	0	0
5	EKONOMI	0	0	0	0
6	MONEY LAUNDRY	0	0	0	0
7	CYBER CRIME	0	0	0	0
8	ORANG ASING	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0
III	KJHT KONTIJENSI	L	S	L	S
1	KEAMANAN	0	0	0	0
2	UNJUK RASA	0	0	0	0
3	KONFLIK APARAT	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0
IV	KJHT YG RUGI NEGARA	L	S	L	S
1	KORUPSI	0	0	0	0
2	UU NO. 18/2004 TTG PERKEBUNAN	0	0	1	1
3	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	1	1
4	ILLEGAL LOGGING	4	4	2	2
5	PERTAMBANGAN / UU NO. 4 TAHUN 2009	0	0	0	0
6	PERLINDUNGAN KONSUMEN & PANGAN	0	0	0	0

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		JAN S/D DES		JAN S/D DES 2018	
		L	S	L	S
7	MIGAS	0	0	0	0
8	UU KETERBUKAAN INFORMASI	0	0	1	1
9	TELEKOMUNIKASI / IT E	0	0	2	2
10	UU GEOGRAFIS	0	0	0	1
	JUMLAH	4	4	7	8
	JUMLAH SELURUHNYA	51	49	53	48

2.4.3.2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Bagi Kabupaten Kayong Utara upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas

tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2. 21 Penduduk KKKU Berumur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Lulusan (%)					
2.	Penduduk yg termasuk angkatan kerja (Orang)	46,159	41,422	51,205		45,248
3.	Penduduk Pendidikan SD	10,469	14,032	15,250		11,145
4.	Penduduk Pendidikan SMP	5,563	6,151	8,069		3,655
5.	Penduduk Pendidikan SMA	8,774	1,201	9,841		7,247
6.	Penduduk Pendidikan Diploma	1,201	813	1,044		1,235
7.	Penduduk Pendidikan S1	3,529	3,715	2,067		2,500

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2012-2017 menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, pada Tahun 2012 sebesar 58,18%, dan pada Tahun 2017 menurun menjadi sebesar 53,90%. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 22 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Ketergantungan (%)	58,43	54,77	54,49	54,19	53,90
2.	Penduduk (Orang)	101.529	103.282	105.477	107.268	109.101
3.	Penduduk Usia 0-14 Tahun (orang)	34.016	32.581	33.017	33.301	33.583
4.	Penduduk Usia +65 Tahun (orang)	3.430	3.967	4.184	4.397	4.628
5.	Penduduk Usia 15-64 Tahun (Orang)	64.083	66.734	68.276	69.570	70.890

Sumber: Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2018

Tabel 2. 23 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen			18.4	35.42	30.12	44.08	
1.2	Angka partisipasi kasar								
	APK SD/MI	Persen			128.45	125.54	124.73		melampaui (>)
	APK SMP/MTs	Persen			92.81	96.7	103.21		2014 dan 2015 belum tercapai (<), sementara 2016 melampaui (>)
	APK SMA/MA/SMK	Persen			72.42	74.08	75.24		2014 dan 2015 melampaui (>), sementara 2016 belum tercapai (<)
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen							
1.4	Angka Partisipasi Murni								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib dasar									
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen			98.49	76.8	103.37	91.86	dari tahun ke tahun naik turun dengan tahun 2017 belum tercapai (<)
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen			52.85	50.6	74.52	73.7	belum tercapai (<)
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen			40.25	34.9	49.69		belum tercapai (<)
1.5	Angka partisipasi sekolah	Persen							
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A								
	7 – 12 Tahun								
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Persen	2.2	2.82	23.9				
	Masih Sekolah	Persen	95.8	93.9	75.5				
	Tidak Bersekolah lagi	Persen	2	3.24	0.6				
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
	13 – 15 Tahun									
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Persen	1.2	0	18.7					
	Masih Sekolah	Persen	81	81.8	78.5					
	Tidak Bersekolah lagi	Persen	17.7	18.2	2.8					
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C									
	16 – 18 Tahun									
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Persen	1.4	0.32	16.2					
	Masih Sekolah	Persen	61.5	54.9	75.7					
	Tidak Bersekolah lagi	Persen	37	44.8	8.1					
1.6	Angka Putus Sekolah:									
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen			0.41	0.42	0.21	1.34		
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen			0.57	0.62	0.33	0.86		
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen			5.58	0.17	1.58			
1.7	Angka Kelulusan:									
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen			100	100	95.07	100		

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen			99.86	99.88	87.64	91.79		
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen			97.74	99.77	96.07			
1.8	Angka Melanjutkan (AM):									
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen			104.3	92.38	99.42	91.97		
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen			101.45	85.3	100.12	61.22		
1.9	Fasilitas Pendidikan:									
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen								
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen								
1.10`	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio								
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar									
	Rasio Guru/murid SD/MI	Rasio								
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah									
	Rasio Guru/murid SLTP/MTs	Rasio								
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar									
	Rasio Guru/murid SLTA/SMK/MA	Rasio								
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio								
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen								
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen			95.05	95.43	88.21	98.84		
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen			66.32	61.07	81.96	61.22		
2	Kesehatan									
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio		13.00	11.52	22.49	5.06			2013,2014,2016 belum tercapai (<), sementara 2015 melampaui (>)
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Rasio								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio		4.67	0.00	4.04	0.10			
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio								
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Rasio		175.13	121.21	173.01	151.50			belum tercapai (<)
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio								
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk									
	Puskesmas	Unit	7	8	8					
	Poliklinik / Balai Pengobatan	Unit	2	2	3					
	Puskesmas Pembantu	Unit	27	27	27					
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit	-	-	-					
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk									
	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	Rasio	1	9.8	9.5					
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen		60.38	65.95	59.96	52.53	100		
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	72.02	76.11	62.3	66.5	67.92	62.68		
2.13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	48.84	39.53	74.42	81.4	81.4	76.74		
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100		
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Persen								
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen								
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen								
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	75.53	75.53	85.42	60.75	56.07	63.8		
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Rasio								
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Rasio								
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen								
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2.25	Penderita diare yang ditangani	Persen								
2.26	Angka kejadian Malaria	Rasio								
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	Rasio								
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen								
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen								
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen								
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS									
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen		44.95	4.02	4.17	128.61	78.75		
2.34	Cakupan kunjungan bayi	Persen		79.71	75.1	70.89	88.03	70.1		
2.35	Cakupan puskesmas	Persen								
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	Persen								
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen								
2.38	Cakupan pelayanan nifas	Persen								
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen								
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen								
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen								
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen								
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen								
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen								
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Pekerjaan Umum									
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Persen		37.03	37.03	41.71	53.3	54.07		
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk									
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen								
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen								
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen								
3.1.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen								
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi									
	Rumah Tangga Bersanitasi	Persen		42.31	42.31	52.28	54.89	42.1		

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen								
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen								
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen								
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen								
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen				19.08	21.07			
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen				19.08	21.07	22.1		
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi									
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen								
	Proporsi rumah tangga dengan air minum layak	Persen	63.85	65.49	75.19					
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh									
	Kawasan Kumuh	Persen		0.04	0.04			0.04		
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen								
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio								
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio								
3.1.	Peningkatan Jalan Kabupaten DAK	Persen								
3.2.	Peningkatan Jalan Kabupaten APBN	Persen								
3.3.	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten DAU	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib dasar									
3.4.	Pemeliharaan Rutin Jalan kabupaten DAU	Persen							
3.5.	Perawatan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum DAU	Persen							
3.6.	Peningkatan Jembatan Kabupaten DAU	Persen							
3.7.	Peningkatan Jalan Poros Desa DAU	Persen							
3.8.	Peningkatan Jalan Poros Desa DAK Bidang Transportasi Perdesaan	Persen							
3.9.	Peningkatan Jembatan Poros Desa DAU	Persen							
7.	Program Penyehatan Lingkungan	Persen							
7.1.	Sanitasi Lingkungan	Persen							
7.2.	Pengembangan Persampahan	Persen							
8.	Program Pengembangan Air Minum	Persen							

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
3.2	Penataan Ruang									
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen		TDI	6.51	4964.45	1.64	1.64		
3.2.3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan									
3.2.3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan									
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen								
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan									
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW	Persen								
6.	Program Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
6.1.	Penataan bangunan gedung dan Lingkungan	Persen								
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
4.1	Rasio rumah layak huni	Persen		62.37	62.37	94.1	94.1	80.66		
4.2	Rasio permukiman layak huni									
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen								
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen								
4.5	Persentase pemukiman yang tertata	Persen								
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen		0.8	0.04	0.04	0.043	0.04		
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen								
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
4.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU									
	Rumah tangga (RT) pengguna air bersih	Persen		49.25	49.25	90.01	54.89	55.19		
9.	Program Pengembangan Permukiman	Persen								
9.1.	Pengembangan Permukiman Non Fisik	Persen								
9.2.	Pengembangan Permukiman Perkotaan	Persen								
9.3.	Pengembangan Permukiman Non Perdesaan	Persen								
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen								
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen								
5.4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen								
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen								
6	Sosial									
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen		24.39	3.3	1.02	16.61	93.37		
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen								
	Penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Persen		18.7		1.41				

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen								
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen								
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen								
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	buah		0	0	0	0	0		

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Layanan Urusan Wajib dasar									
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen							
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen							
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen							
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen			0.21			8.42	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Rasio							
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen							
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen							
	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen		6.78	83.13	42.11	38.46	70.09	
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persen							
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen		73.89	25.91	70.72	70.43	84.34	
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen							
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen							
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen							

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen								
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen								
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen								
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio								
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen		55.41	2.4	24.26	7.72	6.95		
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen								
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen								
2.4	Rasio KDRT	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen								
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen		6.57	90	52.49	52.49	43.73		
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen								
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen								
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen								
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen								
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen								
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD									
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP									
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA									
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi									
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun									
	angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	Persen		92.49	63.41	71.42	71.42	70.74		

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persen								
3	Pangan									
3.1	Ketersediaan pangan utama	kg per 1000 penduduk		393155.43	378421.03	141097.73	80019.68	279937.82		
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita									
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen								
	Regulasi ketahanan pangan	ada/ tidak ada		tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada		
4	Pertanahan									
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen		TDI	21.11	21.11	25.66	47.53		
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen		TDI	0	0	0	0		
4.3	Penyelesaian izin lokasi			TDI						
	Pengajuan izin lokasi	pengajuan			2	2	2	11		
	Izin lokasi yang telah ditetapkan	izin lokasi			2	2	2	11		

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
5	Lingkungan Hidup									
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/ tidak ada								
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada/ tidak ada								
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada/ tidak ada								
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air									
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara									
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen								
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota									
5.9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA									
5.10.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
5.11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional									
5.12	Penetapan hak MHA									
5.13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen								
5.14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen								
5.15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat									
5.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/ tidak ada								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
5.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen								
5.18	Timbulan sampah yang ditangani	Persen								
5.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen								
5.20.	Persentase cakupan area pelayanan	Persen								
5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani									
	Penanganan Sampah	Persen		83.33	83.33	4.38	10.11	14.54		
5.22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota									
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	m ³		639.23	639.23	0.3	0.79	0.78		

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
5.23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen								
5.24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen								
	Indikator Kinerja Kunci Kebersihan	Persen		16.67	16.67	16.67	87.5	87.5		
	Penegakan hukum lingkungan	Persen		0	0	0	100	100		
2.1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air									
2.1.1	pH Air Sungai	pH								
2.1.2	BOD Sungai	g/l								
2.1.3	COD Sungai	g/l								
2.1.4	TSS Air Sungai	g/l								
2.1.5	TDS Air Sungai	g/l								
2.1.6	DO Air Sungai	g/l								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib dasar									
2.2	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara								
2.2.1	Mutu Udara Ambien								
	- SO 2 di udara	ug /m3							
	- CO di udara	ug /m3							
	- NO 2 di udara	ug /m3							
	- PM 10	ug /m3							
	0	ug /m3							
2.2.2	Emisi Sumber Tidak Bergerak								
	0	m g/m3							
	0	m g/m3							
	- Opasitas	m g/m3							
	- Partikel	m g/m3							

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.3	Pelayanan Pencegahan Kerusakan Tanah Akibat Produksi Biomassa	%								
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk									
	Kepemilikan KTP	Persen		38.51	63	60.41	59.56	67.82		
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran									
	Kepemilikan akta kelahiran	Persen		32.16	8.77	22.97	27.6	31.35		
6.3	Rasio pasangan berakte nikah									
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/ tidak ada								
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah /belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah			
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen								
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen								
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)									
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK									
7.4	Persentase LSM aktif									
7.5	Persentase LPM Berprestasi	Persen								
7.6	Persentase PKK aktif	Persen		100	100	81	100	100		
7.7	Persentase Posyandu aktif	Persen		98.35	100	100	100	93.01		
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen								
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)									
8.2	Total Fertility Rate (TFR)									
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen								
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk									
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan									
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan									
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga									
8.9	Ratio Akseptor KB	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen								
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen								
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen								
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen								
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen								
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen								
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen								
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen								
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen								
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen								
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen								
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen								
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen								
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen								
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen								
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen								
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen								
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes									
	Persentase Prevalensi peserta KB aktif	Persen		66.97	75.11	78.59	76.04	77.1		
9	Perhubungan	Persen								
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum									
9.2	Rasio ijin trayek									
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum									
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis									
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persen								
	angkutan darat	Persen		6.2	9.27	9.2	9.5	8.72		
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
9.7	Pemasangan Rambu- rambu	Persen								
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan									
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum									
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun									
10.1.	Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persen								
10.2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persen								
10.3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persen								
10.4.	program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
10.5.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persen								
10.6.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor									
10.7.	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Jasa									
10.8.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media									
10.9.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika									
10	Komunikasi dan Informatika									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen								
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi									
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen								
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet									
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi									
	website resmi milik Pemerintah Daerah	website			1	1	1	4		
	Pameran/Expo yang telah diselenggarakan	kali		0	0	1	4	7		
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
11.1	Persentase koperasi aktif	Persen	50.7	53.42	57.69	59.26	60.24	60.71		
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen								
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	97.43	97.55	98.25	98.25	98.25	100		
12	Penanaman Modal									
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)									
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)									
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja									
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	rupiah		TDI	71,207,833 ,000	36,522,740 ,000	41,848,750 ,000	5,935,000, 000		
13	Kepemudaan dan Olah Raga									
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen								
13.2	Persentase wirausaha muda	Persen								
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen								
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen								
13.6	Jumlah atlet berprestasi									
13.7	Jumlah prestasi olahraga									
	jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	sudah /belum		0	belum	sudah	sudah	belum		
	jumlah lapangan olahraga	buah		13	9	12	12	8		
14	Statistik									
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/ tidak ada				ada				
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/ tidak ada		ada	ada	ada	ada	ada		
14.3	Buku "PDRB"	ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		
15	Persandian									
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
16	Kebudayaan									
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali		1	1	1	1	4		
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen		87.5	100	68.18	68.18	63.64		
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi									
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu									
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah		1	3	2	2	2		
	Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Persen								
	Menggali dan menumbuhkembangkan adat, budaya, seni dan kearifan lokal	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan-peninggalan sejarah daerah.	Persen								
	Perekaman dan digitalisasi peninggalan-peninggalan bersejarah .	Persen								
	Mendukung terbentuknya pengelolaan museum dan taman budaya daerah.	Persen								
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.	Persen								
	Memfasilitasi penyelenggaraan dialog kebudayaan daerah.	Persen								
	Memfasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
17	Perpustakaan									
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	kunjungan		581	310	1333	11288	1750		
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku			5010	6539	10140	10500		
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio								
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun									
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku			1672	2552	3452	3100		
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen								
18	Kearsipan									
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen		31.25	4.17	100	100	82.76		
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan		1	1	1	1	8		
Layanan Urusan Pilihan										

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
1	Pariwisata									
1.1	Kunjungan wisata	orang		13824000	0	63500	75600	41601		
1.2	Lama kunjungan Wisata									
1.3	PAD sektor pariwisata	Persen								
3.1.	Penataan terhadap obyek- obyek wisata strategis	Persen								
3.2.	Penyusunan kebijakan strategis pengembangan obyek- obyek wisata alam dan budaya daerah.	Persen								
3.3.	Pemasaran dan pengembangan tujuan wisata daerah	Persen								
3.4.	Membangun kemitraan dalam pembangunan pariwisata daerah	Persen								
3.5.	Pengembangan dan penguatan informasi dan database kepariwisataan daerah.	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
3.6.	Memberikan dukungan aktivitas organisasi para pelaku industri pariwisata dan budaya daerah.	Persen								
2	Pertanian									
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen								
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen								
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen		45.81						
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen								
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen								
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha		3.17	2.33	2.32	2.77	2.82		
2.6	Cakupan bina kelompok petani	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa pertanian	Persen						19.29		
	Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan			45.81	42.02	31.34	30.43			
1.2	Tanaman Pangan									
1.2.1.	Produksi Padi	ton								
1.2.2.	Produksi Jagung	ton								
1.2.3.	Produktivitas Padi	ton/Ha								
1.2.4.	Produktivitas Jagung	ton/Ha								
1.3.	Tanaman Perkebunan									
1.3.1.	Produksi Karet	ton								
1.3.3.	Luas Karet Rakyat	Ha								
1.4.1.	Jumlah Kambing	ekor								
1.4.2.	Jumlah sapi	ekor								
1.4.3.	Jumlah ayam pedaging	ekor								
1.4.4.	Jumlah itik	ekor								
3	Kehutanan									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen		0.21	0.28	0.18	0.18			
	Rehabilitasi lahan kritis	Ha		700	395	263	26300			2013 dan 2016 melampaui (>), 2014 dan 2015 belum tercapai (<)
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen		47.94	10.39	12.69	12.69			
3.3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan									
	Luas Lahan Kritis	Ha								
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen								
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik									
	Rumah tangga dengan akses listrik	Persen	88.58	81.64	82.31					
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
4.3	Persentase pertambangan tanpa ijin	Persen		0	100	100	100			
5.1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persen								
5.2.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Persen								
5.3.	Program Konservasi Sumber daya Mineral	Persen								
5.4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Persen								
5.5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persen								
5.6.	Program Pengawasan, Pembinaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Permukaan	Persen								
5	Perdagangan									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan			TDI	TDI	TDI	TDI	- 161247.63		
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen								
6	Perindustrian									
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen								
7	Transmigrasi									
7.1	Persentase transmigran swakarsa	Persen		18.75	7.83		100			
8	Kelautan dan Perikanan									
8.1	Produksi perikanan	Persen		88.39	104.86	98.04	100.72	99.3		
	Produksi perikanan laut	ton		22,500	25,612.70	27,403.10	30,791.30	32,959.70		2013 belum tercapai (<), sementara 2014-2017 melampaui (>)
8.2	Konsumsi ikan	Persen		81.25	100	105	100.31	104.37		
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen								
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
8.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen								
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial									
8.7	Nilai tukar nelayan	Persen								
Penunjang Urusan										
1	Perencanaan Pembangunan									
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/ tidak ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/ tidak ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/ tidak ada		ada	ada	ada	ada	ada		

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/ tidak ada								
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD									
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen		87		47.37	83.75			
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen								
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen								
2	Keuangan									
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Persen								
2.2	Persentase SILPA	Persen								
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen								
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen								
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen								
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen								
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen								
2.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu								
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan									
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen								
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah									
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah									
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah									
4	Penelitian dan pengembangan									
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen								
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen								
	Penerapan SIDA:									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen								
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen								
5	Pengawasan									
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen								
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen								
5.3	Jumlah temuan BPK									
6	Sekretariat Dewan									
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/ tidak ada								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/ tidak ada								
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/ tidak ada								
Politik di Daerah										
	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan		0	1	1	1	1	2	

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN							Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kegiatan		0	1	1	1	1		
	Memberikan bantuan dan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi sosial lainnya	Persen								
	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik	Persen								
	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Persen								
	Pendidikan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa	Persen								
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persen								
	Tata Kelola Pemerintahan									
	Meningkatkan Diklat struktural	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Layanan Urusan Wajib dasar									
	Meningkatkan Diklat fungsional	Persen							
	Meningkatkan Diklat teknis dan kompetensi	Persen							
	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Persen							
	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah	Persen							
	Meningkatkan pelaksanaan SPM	Persen							
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar	Persen							
	Melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi pemda	Persen							
	Meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu	Persen							
	Peningkatan sistem informasi kependudukan	Persen							

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Peningkatan sistem administrasi dan layanan informasi kearsipan	Persen								
	Peningkatan sistem pelayanan perpustakaan daerah	Persen								
	Peningkatan ketersediaan bahan pustaka untuk perpustakaan	Persen								
	Peningkatan penyebarluasan jaringan komunikasi dan informasi pembangunan	Persen								
	Peningkatan penyebarluasan jaringan komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persen								
	Penyusunan LAKIP daerah	Persen								
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembanguna daerah	Persen								
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persen								
	Perencanaan dan koordinasi program pembangunan daerah	Persen								
	Melakukan evaluasi RPJMD Kab. Kayong Utara	Persen								
	Melakukan evaluasi RPJPD Kab. Kayong Utara	Persen								
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.	Persen								
	Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap perangkat Kelurahan, Desa dan anggota BPD.	Persen								
	Mengurangi jumlah Desa tertinggal di Kabupaten Kayong Utara.	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Melaksanakan lomba pembangunan desa	Persen								
	Melakukan monitoring terhadap ADD	Persen								
	Penerapan teknologi tepat guna di wilayah pedesaan	Persen								
	Tugas Umum Pemerintahan									
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat									
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	Persen								
	Meningkatkan budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran minuman keras secara illegal dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif.	Persen								
	Melakukan Sosialisasi secara intensif Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku.	Persen								
	Meningkatkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Persen								

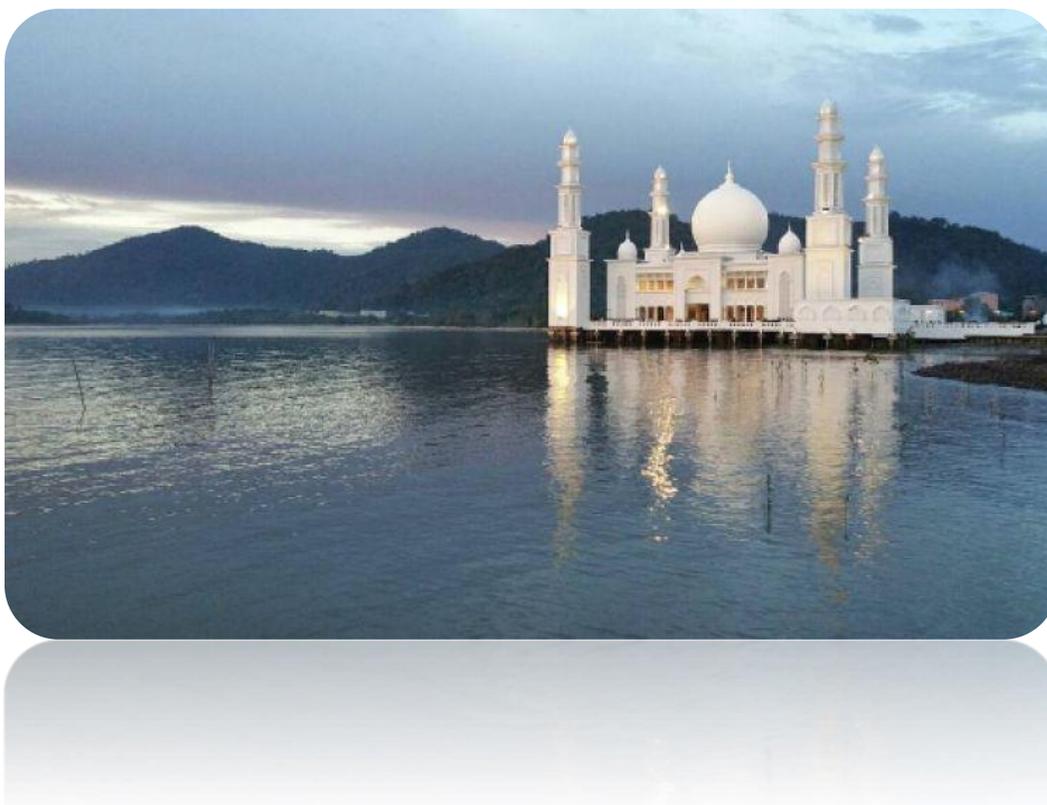
No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib dasar									
	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemda dan Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Persen							
	Meningkatkan peran siskamling	Persen							
	Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat:	Persen							
	Keagamaan								
	Peningkatan bantuan pembangunan atau perbaikan tempat ibadah	Persen							
	Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh dan bimbingan keagamaan.	Persen							
	Peningkatan bantuan untuk perizinan dan sertifikasi tanah wakaf.	Persen							

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Peningkatan pelayanan ibadah Haji	Persen								
	Pembinaan dan pengembangan lembaga- lembaga pembina agama.	Persen								
	Peningkatan kerjasama lembaga antar umat beragama.	Persen								
	Silaturahmi dan dialog- dialog tokoh- tokoh agama dan pembina umat beragama.	Persen								
	Peningkatan wawasan dan pendalaman materi pendidikan agama.	Persen								
	Peningkatan peran rumah- rumah ibadah sebagai pusat kebudayaan dan tempat pendidikan dan pembelajaran nilai- nilai keagamaan.	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1.	Program Perencanaan Pembangunan									
1.1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen								
1.2.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persen								
1.3.	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persen								
2.	Program Perencanaan Tata Ruang									
2.1.	Perencanaan Tata Ruang	Persen								
2.2.	Pengembangan Data dan Informasi	Persen								
2.3.	Perencanaan Tata Ruang Wilayah	Persen								
4	Pengairan	Persen								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
4.1.	Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persen								
4.2.	Program Pengendalian Banjir	Persen								
4.3.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persen								
11.	Pengembangan Wilayah perbatasan									
11.1.	Peningkatan Jalan Kabupaten DAK Perbatasan									
11.2.	Pemeliharaan Jalan Kabupaten									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib dasar										
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Sandi									
	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Buah		1	5	1	1			
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada/tidak		tidak ada	ada	ada	ada			



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka nation and state building. Manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan.

Dalam upaya perwujudan manajemen keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat

dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Dalam konteks yang lebih visioner, manajemen keuangan pemerintah tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis capaian dan proyeksi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Analisis keuangan daerah yang tepat, mampu merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap pembangunan daerah yang lebih memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Pada Bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir, dan kerangka pendanaan proyeksi APBD lima tahun kedepan selama periode 2019-2024.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah 2013-2018

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD hendaknya diikuti dengan penggunaan anggaran di sisi pengeluaran yang dikelola dengan baik melalui *prinsip value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara. Di samping itu juga harus didukung oleh peningkatan prosedur akuntabilitas dan pengendalian dari intern pemerintah daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui proses penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran ini disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perencanaan, Pengelolaan, evaluasi, dan Kinerja keuangan pemerintah daerah diatur dalam beberapa regulasi normatif antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Sebagaimana termaktub dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara substantif, Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semula *open list* menjadi *close list*. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenis pungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah

pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi secara umum digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi

Jasa Usaha; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Secara rinci, jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam ketiga golongan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN	477,221,348,250.64	522,983,878,324.99	603,308,230,337.50	700,472,770,108.34	785,939,457,931.89
1.1	Pendapatan Asli Daerah	10,977,368,903.64	17,452,030,854.08	13,182,872,167.40	10,812,481,174.34	36,486,217,742.14
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	2,570,297,622.21	4,825,999,347.23	3,789,183,384.33	4,170,537,773.96	5,274,248,031.39
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	610,656,861.00	3,325,374,635.00	2,294,310,071.00	1,550,125,017.99	2,204,530,162.03
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,344,226,927.90	1,352,967,992.19	1,354,084,341.51	1,771,522,861.00	2,124,516,243.00.
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	6,452,187,492.53	7,947,688,879.66	5,745,294,370.56	3,320,295,521.39	26,882,923,305.72
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	460,489,579,347.00	499,777,447,470.91	584,094,582,870.10	682,620,757,434.00	748,459,930,189.75
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	431,242,857,031.00	470,610,369,830.00	518,410,191,569.00	623,954,671,582.00	683,887,224,744.00
1.2.1.1	Pajak Dana Bagi Hasil	21,264,652,589.00	19,915,801,036.00	14,629,401,150.00	15,756,200,041.00	11,246,975,330.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5,255,993,442.00	8,598,847,794.00	7,636,179,419.00	7,107,832,386.00	6,035,775,998.00

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	343,376,301,000.00	380,125,181,000.00	415,875,881,000.00	467,183,234,000.00	464,063,739,000.00
1.2.1.4.	Dana alokasi khusus	61,345,910,000.00	61,970,540,000.00	80,268,730,000.00	133,907,405,155.00	202,540,734,416.00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	11,656,580,000.00	14,391,100,000.00	37,996,352,000.00	30,936,362,000.00	38,665,294,000.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	11,656,580,000.00	14,391,100,000.00	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			37,996,352,000.00	667,442,000.00	0.00
1.2.2.3	Dana Desa				30,268,920,000.00	38,665,294,000.00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	17,590,142,316.00	14,775,977,640.91	25,833,639,301.10	26,917,083,852.00	25,907,411,445.75
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17,280,414,541.00	14,484,443,000.00	25,833,639,301.10	26,917,083,852.00	25,907,411,445.75
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	309,727,775.00	291,534,640.910	-	-	-
1.2.4	Bantuan Keuangan	-	-	1,854,400,000.00	812,640,000.00	-
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	1,854,400,000.00	812,640,000.00	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5,754,400,000.00	5,754,400,000.00	6,030,775,300.00	7,039,531,500.00	993,310,000.00

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	7,039,531,500.00	993,310,000.00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	5,754,400,000.00	5,754,400,000.00	6,030,775,300.00	0.00	0.00
2	BELANJA	506,115,481,761.09	507,628,305,671.00	543,156,726,974.89	630,660,733,783.32	699,835,948,938.48
2.1	BELANJA OPERASI	321,381,398,646.00	325,879,712,588.00	355,408,661,947.89	397,822,139,219.32	440,092,882,223.38

2.1.1	Belanja Pegawai	159,731,315,151.00	175,600,017,828.00	199,693,688,527.89	220,618,720,274.32	216,646,193,030.38
2.1.2	Belanja Barang	121,863,659,405.00	114,433,512,694.00	133,220,825,825.00	168,405,468,945.00	203,868,951,993.00
2.1.3	Belanja Hibah	19,462,694,292.00	8,609,500,000.00	14,669,343,220.00	8,605,350,000.00	19,048,033,200.00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1,963,691,580.00	9,287,831,050.00	7,824,804,375.00	192,600,000.00	529,704,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	18,360,038,218.00	17,948,851,016.00	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	184,531,396,512.09	181,477,645,599.00	186,406,604,254.00	232,122,323,064.00	258,707,544,733.10
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2,179,094,363.00	5,455,306,250.00	4,773,895,350.00	7,589,463,800.00	3,525,927,110.00

2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,815,033,401.09	17,521,018,864.00	20,678,071,479.00	21,143,503,615.00	30,516,979,944.10
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51,725,617,502.00	46,775,509,252.00	56,978,430,107.00	49,057,543,960.00	57,813,376,961.00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	99,312,414,717.00	100,280,737,038.00	100,169,445,318.00	151,693,047,354.00	160,964,647,003.00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	10,499,236,529.00	11,420,074,195.00	3,806,762,000.00	2,638,764,335.00	5,886,613,715.00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	25,000,000.00	0.00	-	-
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	202,686,603.00	270,947,484.00	1,341,460,773.00	716,271,500.00	1,035,521,982.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	202,686,603.00	270,947,484.00	1,341,460,773.00	716,271,500.00	
3	TRANSFER			57,279,343,119.15	82,619,017,628.65	92,809,499,100.00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL			382,000,720.57	1,342,876,000.00	803,439,800.00

	PENDAPATAN					
3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah			338,866,547.37	1,093,035,000.00	538,268,233.00
3.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			43,134,173.20	249,841,000.00	265,171,567.00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN			56,897,342,398.58	81,276,141,628.65	92,006,059,300.00
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			-	-	3,421,190,000.00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			56,352,940,438.58	80,597,502,388.65	87,973,348,700.00
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			544,401,960.00	678,639,240.00	611,520,600.00
4	PEMBIAYAAN					
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51,634,742,117.89	22,740,608,607.44	36,096,181,261.43	36,968,341,504.89	22,161,360,201.26
4.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan	51,634,742,117.89	22,740,608,607.44	36,096,181,261.43	36,968,341,504.89	22,161,360,201.26

	Anggaran (SILPA)					
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sangat baik dan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada tahun 2013, total pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kayong Utara adalah sebesar Rp 10,977,368,903.64. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan tabel 3.1. dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2013 nilai PADnya 10,977,368,903.64milyar. Sedangkan pada Tahun 2015 nilai PAD 13,182,872,167.40 milyar, sempat mengalami penurunan pada Tahun 2016 dengan nilai PAD 10,812,481,174.34 milyar. Namun pada Tahun 2017, terjadi peningkatan menjadi 36,486,217,742.14

Pada sisi dana perimbangan, nilainya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 masih sebesar Rp 431,242,857,031.00 milyar, sementara pada Tahun 2015 nilainya 518,410,191,569.00 milyar. Pada Tahun 2017 nilainya meningkat menjadi Rp 683,887,224,744.00 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan transfer dana yang begitu besar untuk Kabupaten Kayong Utara.

Sedangkan pada lain-lain pendapatan yang sah, dalam empat tahun terakhir mengalami naik-turun. Dimana pada Tahun 2013 dengan nilai 6,452,187,492.53 milyar, sementara itu, 3 Tahun kemudian yakni pada Tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup banyak yakni sebesar 3,320,295,521.39 milyar. Namun pada Tahun 2017 kembali mengalamai peningkatan yang cukup besar, dengan nilai 26,882,923,305.72 milyar.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Bagi Hasil Provinsi, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk 5 Tahun ini hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2018, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat. Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang cukup dinamis selama beberapa tahun terakhir, maka pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari Dana Perimbangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi Pajak Daerah.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2019-2023 difokuskan pada:

1. Peningkatan volume PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Pemkab melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lain dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.

7. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan
9. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah.
10. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
11. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Kayong Utara.
12. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
13. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Tabel 3.2
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019-2023

NO	URAIAN	Proyeksi			
		2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	774.295.498.003,20	785.876.211.483,58	799.230.270.620,97	807.659.674.642,74
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.197.839.339,00	24.166.281.906,00	26.711.755.316,00	27.093.349.416,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.771.554.663,00	6.880.067.413,00	7.080.126.421,00	7.190.416.621,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.445.133.213,00	5.092.130.530,00	7.331.934.932,00	7.468.638.832,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.124.516.243,00	2.234.936.243,00	2.300.036.243,00	2.304.636.243,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.856.635.220,00	9.959.147.720,00	9.999.657.720,00	10.129.657.720,00
1,2	DANA PERIMBANGAN/ TRANSFER	675.542.852.135,20	684.633.239.048,58	693.441.824.775,97	698.489.634.697,74
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	20.709.867.000,00	21.526.947.000,00	22.612.917.000,00	23.388.189.100,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	499.563.735.235,20	505.902.086.965,98	511.596.572.687,97	517.656.701.178,74

1.2.3	Dana Alokasi Khusus	155.269.249.900,00	157.204.205.082,60	159.232.335.088,00	157.444.744.419,00
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	75.554.806.529,00	77.076.690.529,00	79.076.690.529,00	82.076.690.529,00
1.3.1	Pendapatan Hibah				
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.873.539.529,00	28.395.423.529,00	30.395.423.529,00	33.395.423.529,00
1.3.3	Dana Desa	48.681.267.000,00	48.681.267.000,00	48.681.267.000,00	48.681.267.000,00

3.1.1.2 Belanja Daerah

Secara umum, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

APBD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada Tahun 2013 belanja daerah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 506,115,481,761.09milyar dan Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 699,835,948,938.48 . Rincian perkembangan Belanja Daerah disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	BELANJA DAERAH	506,115,481,761.09	507,628,305,671.00	543,156,726,974.89	630,660,733,783.32	699,835,948,938.48
1.1.	Belanja Tidak Langsung	321,381,398,646.00	325,879,712,588.00	355,408,661,947.89	397,822,139,219.32	440,092,882,223.38
1.1.1.	Belanja Pegawai	159,731,315,151.00	175,600,017,828.00	199,693,688,527.89	220,618,720,274.32	216,646,193,030.38
1.1.2.	Belanja Barang	121,863,659,405.00	114,433,512,694.00	133,220,825,825.00	168,405,468,945.00	203,868,951,993.00
1.1.3.	Belanja Hibah	19,462,694,292.00	8,609,500,000.00	14,669,343,220.00	8,605,350,000.00	19,048,033,200.00
1.1.4.	Belanja bantuan sosial	1,963,691,580.00	9,287,831,050.00	7,824,804,375.00	192,600,000.00	529,704,000.00
1.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan	18,360,038,218.00	17,948,851,016.00	-	-	-
1.1.6.	Belanja Tidak Terduga	202,686,603.00	270,947,484.00	1,341,460,773.00	716,271,500.00	1,035,521,982.00
1.2.	Belanja langsung	184,531,396,512.09	181,477,645,599.00	186,406,604,254.00	232,122,323,064.00	258,707,544,733.10
1.2.1.	Belanja Tanah	2,179,094,363.00	5,455,306,250.00	4,773,895,350.00	7,589,463,800.00	3,525,927,110.00

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	20,815,033,401.09	17,521,018,864.00	20,678,071,479.00	21,143,503,615.00	30,516,979,944.10
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	51,725,617,502.00	46,775,509,252.00	56,978,430,107.00	49,057,543,960.00	57,813,376,961.00
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	99,312,414,717.00	100,280,737,038.00	3,806,762,000.00	151,693,047,354.00	160,964,647,003.00
1.2.5.	Belanja Aset Tetap lainnya	10,499,236,529.00	11,420,074,195.00	100,169,445,318.00	2,638,764,335.00	5,886,613,715.00
1.2.6.	Belanja Aset Lainnya	-	25,000,000.00	3,806,762,000.00	--	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa selama periode 2013-2017 untuk realisasi belanja tidak langsung setiap tahunnya mengalami fluktuasi, hal ini di buktikan pada Tahun 2013 sebesar 321,381,398,646.00, sedangkan pada Tahun 2015 sebesar 355,408,661,947.89, dan pada Tahun 2107 meningkat lagi menjadi 699,835,948,938.48. Demikian juga untuk Belanja langsung setiap tahunnya juga mengalami kenaikan.

Antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2013-2017, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan. Target realisasi belanja daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2013	530,339,672,920.67	506,115,481,761.09	95.43
2014	550,288,579,288.59	507,628,305,671.00	92.25
2015	596,798,633,198.85	543,156,726,974.89	91.01
2016	674,111,139,912.30	630,660,733,783.32	93.55
2017	735,572,591,232.15	699,835,948,938.48	95.14

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara

Di dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai harus penuh sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran. Diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target dan realisasi belanja.

Penambahan alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan dasar wajib publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dilakukan secara berkelanjutan. Tindakan tersebut, selain menjalankan amanat Undang Undang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pada hakikinya untuk mewujudkan pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan nasional kepada masyarakat sampai ke daerah terpencil, terisolasi, kepulauan, dan perbatasan. Pelayanan dasar wajib publik yang semakin merata

penyebarannya sampai menjangkau daerah-daerah pinggiran dan terpencil, dalam jangka menengah dan panjang akan dapat meningkatkan tingkat kecerdasan dan kesehatan masyarakat, serta bersamaan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat semakin baik dan sejahtera.

Belanja daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (*Performance Based Budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanaan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan belanja daerah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik- baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.
3. Tolak ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
4. Optimalisasi Belanja langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.

5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya pun dilaksanakan secara transparan lewat multilateral meeting dan bilateral meeting.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk tahun anggaran 2019-2023 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;

Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Proyeksi belanja juga dilakukan berdasarkan masing masing prioritas program dengan prioritas utama mendapatkan alokasi tertinggi. Proyeksi belanja ini dirancang terus meningkat untuk memenuhi pelayanan publik terkait urusan wajib sebagai agenda nasional maupun kepala daerah. Besarnya belanja tidak langsung disebabkan semakin besarnya bagi hasil propinsi kepada daerah kabupaten kota terkait dengan lokasi sasaran program prioritas yang mendorong indikator kinerja umum.

Tabel 3.5
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019-2023

2	BELANJA DAERAH	796.624.472.218,70	803.343.691.535,86	815.365.996.315,47	823.208.196.012,24
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	374.689.584.824,70	381.408.804.141,86	387.315.218.373,84	392.934.977.428,85
2.1.1	Belanja Pegawai	249.592.070.208,10	264.331.054.333,49	268.020.527.373,85	271.971.534.272,91
2.1.2	Belanja Hibah	15.914.500.000,00	5.914.500.000,00	5.914.500.000,00	5.914.500.000,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.165.722.660,00	5.443.976.160,00	5.741.707.405,00	6.060.279.837,15
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.121.668.787,60	1.197.219.794,30	1.441.206.135,30	1.065.905.545,30
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	100.857.423.169,00	102.422.707.854,07	104.034.951.079,69	105.695.561.602,08
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	2.038.200.000,00	2.099.346.000,00	2.162.326.380,00	2.227.196.171,40
2,2	BELANJA LANGSUNG	421.934.887.394,00	421.934.887.394,00	428.050.777.941,63	430.273.218.583,39
2.2.1	Belanja Pegawai	53.652.095.700,00	40.652.095.700,00	42.567.095.700,00	43.652.095.700,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.438.760.345,00	180.456.745.000,00	182.500.900.000,00	183.843.876.500,00

2.2.3	Belanja Modal	179.844.031.349,00	200.826.046.694,00	202.982.782.241,63	202.777.246.383,39
SURPLUS/(DEFISIT)		-22.328.974.215,50	-17.467.480.052,28	-16.135.725.694,50	-15.548.521.369,50
3	PEMBIAYAAN DAERAH	24.328.974.215,50	19.467.480.052,28	18.135.725.694,50	17.548.521.369,50
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.328.974.215,50	19.467.480.052,28	18.135.725.694,50	17.548.521.369,50
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	24.328.974.215,50	19.467.480.052,28	18.135.725.694,50	17.548.521.369,50
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.2.2	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga				
PEMBIAYAAN NETTO		22.328.974.215,50	17.467.480.052,28	16.135.725.694,50	15.548.521.369,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Kayong Utara

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah kurun waktu tahun anggaran 2013-2017:

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.1.	Penerimaan Pembiayaan	51,634,742,117.89	22,740,608,607.44	36,096,181,261.43	36,968,341,504.89	22,161,360,201.2622
1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	51,634,742,117.89	22,740,608,607.44	36,096,181,261.43	36,968,341,504.89	22,161,360,201.26
1.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kayong Utara

Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kayong Utara masih kurang stabil. Beberapa komponen pembiayaan lain masih cukup rendah meskipun cukup potensial yaitu penyertaan modal investasi.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah terkait aset, kewajiban dan ekuitas dana. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	ASET					
1.	ASET	0.00	49,447,663,7	65,923,471,05	0.00	0.00
1.	LANCAR		36.81	5.93		
	KAS	0.00	36,149,709,5	37,175,427,2	0.00	0.00
			10.43	89.30		
	Kas di Kas Daerah	22,204,669,714.44	35,464,772,455.43	34,938,439,922.78	19,235,104,117.56	9,483,928,065.74
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0.00	1,737,500.00	6,327,917.00	113,257,777.00
	Kas Bendahara Pengeluaran	574,645,818.00	684,937,055.00	547,006,725.52	677,884,735.00	1,445,524,021.00
	Kas di BLUD	0,00	0.00	0.00	0.00	
	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0.00	0.00	0.00	
	Kas di Bendahara BOS	0,00	0.00	0.00	0.00	646,493,888.20
	Kas Lainnya	0,00	0.00	1,688,243,141.00	3,785,683,531.82	2,964,599,210.37
	Setara Kas	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piutang Pajak	168,528,874.00	1,218,632,442.00	21,467,429,614.79	0.00	0.00
	Piutang Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piutang Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piutang Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piutang Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piutang Pendapatan	0.00	1,218,632,442.00	1,978,406,694.16	2,430,825,101.16	5,229,358,724.16
	Piutang Lainnya	2,669,554,511.00	6,747,119,741.00	20,347,948,810.00	9,896,332,343.00	2,725,523.15
	Penyisihan Piutang	0.00	0.00	-858,925,889.37	-1,095,650,881.88	-1,385,302,649.40
	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	30,163,934.43	0.00	0.00
	Persediaan	4,549,482,284.02	5,332,202,043.38	7,250,450,217.41	7,193,153,805.34	5,401,268,301.88

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	JUMLAH ASET LANCAR	30,166,881, 201.46	49,447,663,7 36.81	0.00	42,129,660,6 69.00	23,901,852,8 62.10
1.	INVESTASI	0.00	9,469,500,00	10,000,000,0	0.00	0.00
2.	JANGKA PANJANG		0.00	00.00		
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	1,469,500,00 0.00	0.00	0.00	0.00
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi dalam Proyek Pembangu nan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi Non Permanen Lainnya	1,469,500,0 00.00	1,469,500,00 0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non	1,469,500,0 00.00	1,469,500,00 0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Permanen					
	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	8,000,000,00	10,000,000,00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6,000,000,00	8,000,000,00	10,000,000,00	12,000,000,00	14,000,000,00
	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	6,000,000,00	8,000,000,00	0.00	12,000,000,00	14,000,000,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7,469,500,00	9,469,500,00	0.00	0.00	0.00
1. 3.	ASET TETAP	0.00	0.00	973,849,676,126.48	0.00	0.00
	Tanah	42,440,929,528.74	50,600,279,854.82	54,016,517,273.88	79,629,680,057.85	72,456,999,277.06
	Peralatan dan Mesin	130,133,014,729.30	149,003,316,750.02	172,916,780,963.05	174,013,522,881.15	184,627,817,297.28
	Gedung dan Bangunan	263,768,413,578.64	318,388,572,273.20	387,573,568,034.20	416,791,675,235.02	440,633,753,413.65
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	385,263,609,068.55	470,959,320,649.13	593,920,644,274.23	709,382,874,254.63	855,423,538,808.67
	Aset Tetap Lainnya	14,064,883,115.25	17,533,661,713.23	20,361,239,874.23	23,300,652,666.79	29,747,374,078.44
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28,309,995,805.40	40,965,439,258.64	6,598,269,036.31	27,631,208,756.39	4,744,792,946.96
	Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	-261,537,343,329.42	-334,956,973,358.77	-418,371,186,482.12
	JUMLAH ASET TETAP	863,980,845,825.88	1,047,450,590,499.04	0.00	1,095,792,640,493.06	1,169,263,089,339.94
1. 4.	DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH					

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	DANA CADANGAN					
1.	ASET	0.00	0.00	3,806,406,86	0.00	0.00
5.	LAINNYA			7.63		
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aset Tidak Berwujud	624,950,892.83	899,496,892.83	910,996,892.83	1,171,296,892.83	283,943,830.34
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	-	-	0.00
	Aset Lain-lain	561,373,927.90	542,236,367.90	5,009,338,910.50	33,618,281,146.53	31,685,011,543.54
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00	-	-	0.00
	JUMLAH ASET LAINNYA	1,186,324,820.73	1,441,733,260.73	0.00	32,514,509,355.45	31,685,011,543.54
	JUMLAH ASET	902,803,551,848.07	1,107,809,487,496.58	1,053,579,554,050.04	1,182,436,810,517.51	1,239,133,897,575.92
2	KEWAJIBAN					
2.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0.00	0.00	1,068,341,270.94	0.00	0.00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38,706,925.00	53,528,249.00	200,003,284.41	201,898,635.00	127,854,350.96
	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Utang Bank					
	Bagian Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang- Utang Obligasi					
	Bagian Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang- Utang					
	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	46,491,104.53	102,232,770.57	71,371,645.19
	Utang Beban	0.00	0.00	9,744,900.00	0.00	2,148,066,918.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	812,101,982.00	812,101,982.00	13,205,300,315.00	5,742,048,094.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38,706,925.00	865,630,231.00	0.00	0.00	8,089,341,008.15
2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00		0.00	0.00	0.00
	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Pemerintah Kabupaten/ Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Luar Negeri – Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	38,706,925.00	865,630,231.00	1,068,341,270.94	13,509,431,720.57	8,089,341,008.15
3	EKUITAS DANA					
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR				1,168,927,378,796.94	1,231,044,556,567.77
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	22,740,608,607.44	36,096,181,261.43	0.00	0.00	0.00
	Cadangan Piutang	22,740,608,607.44	7,965,752,183.00	0.00	0.00	0.00
	Cadangan Persediaan	22,740,608,607.44	5,332,202,043.38	0.00	0.00	0.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	22,740,608,607.44	-812,101,982.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan yang Ditangguhkan	22,740,608,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	22,740,608,607.44	48,582,033,505.81	0.00	0.00	0.00
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	22,740,608,607.44		0.00	0.00	0.00
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	22,740,608,607.44	9,469,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	22,740,608,607.44	1,047,450,590,499.04	0.00	0.00	0.00
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	22,740,608,607.44	1,441,733,260.73	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	22,740,608,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	22,740,608,607.44	1,058,361,823,759.77	0.00	0.00	0.00
	EKUITAS DANA CADANGAN	22,740,608,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	22,740,608,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	22,740,608,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA	902,764,844,923.07	1,106,943,857,265.58	1,053,511,212,779.10	1,168,927,378,796.94	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DANA EKUITAS DANA	902,803,551,848.07	1,107,809,487,496.58	1,053,579,554,050.04	1,182,436,810,517.51	1,239,133,897,575.92

Sumber : BPKAD Kabupaten Kayong Utara

a) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara selama periode Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,2 %, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis asset antara lain investasi jangka panjang rata-rata naik sebesar 1,7%, aset tetap peningkatan dengan rata-rata turun sebesar 9,3%. Sedangkan aset lancar terjadi penurunan sebesar 18,21 %

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada 2013 hanya Rp. 38.706.925 menjadi Rp. 8.089.341.008,15 di 2017. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2016 menuju 2017, dimana pada 2016 sebesar Rp. 13.509.431.720,57 turun menjadi Rp. 8.089.341.008,15 di 2017. Dan, mulai 2013 mengalami kenaikan sampai 2016. Dalam hal kewajiban jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selama 2013 sampai 2017 tidak memiliki kewajiban jangka Panjang.

C) . Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas Kabupaten Kayong Utara selama 2013 – 2017 cenderung meningkat. Pada 2013 sebesar Rp. 902.803.551.848,07, untuk 2014 menjadi Rp. 1.107.809.487.496,58 menurun pada 2015 menjadi Rp. 1.053.579.545.050,04 dan kemudian meningkat di 2015 menjadi Rp. 1.182.436.810.517,51 serta meningkat lagi di 2017 sebesar Rp. 1.239.133.897.575,92.

Selanjutnya untuk menganalisis neraca Kabupaten Kayong Utara periode 2013-2017 akan digunakan analisis rasio sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Dengan kata lain, rasio ini berusaha untuk mengetahui seberapa jauh jumlah asset lancar menjamin hutang lancar. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan menunjukkan bahwa hutang dijamin oleh asset yang lebih banyak sehingga menunjukkan pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik. Adapun rasio likuiditas terbagi menjadi dua yaitu Rasio lancar (current ratio) dan Rasio Quick (Quick ratio).

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar menunjukkan seberapa jauh asset lancar menjamin kewajiban jangka pendek pemerintah daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar

semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, kriteria kemampuan batas aman pemerintah daerah untuk mencairkan asset lancar untuk melunasi kewajiban jangka pendek yaitu memiliki rasio likuiditas sebesar 4.0. Meskipun demikian, rasio likuiditas senantiasa tetap dijaga mengingat apabila angka tersebut lebih kecil dari 1,5 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Dari hasil perhitungan diperoleh rasio lancar Pemerintah Daerah Kayong Utara untuk tahun 2013 sebesar 779,37 sedangkan pada tahun 2017 sebesar 2,95. Nilai rasio yang lebih besar dari 4.0 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kayong Utara tidak mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang dimiliki, ini terjadi pada tahun 2013. Jadi dapat disimpulkan, meskipun memiliki nilai rasio lancar yang fluktuatif namun secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara sangat liquid karena memiliki kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek sangat tinggi.

b. Quick Ratio

Quick Ratio merupakan rasio lancar dengan mengurangi tingkat persediaan dari current asset-nya. Rasio ini berusaha mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki tanpa memperhitungkan asset dalam bentuk persediaan. Rasio ini dinilai lebih valid pengukurannya dibandingkan rasio lancar karena kurang liquid. Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 (lebih dari 1). Kondisi saat rasio quick lebih kecil dari 1 menunjukkan pemerintah daerah tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Dari hasil perhitungan rasio quick Pemerintah Kayong Utara, diperoleh quick ratio 191,85 pada tahun 2013. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Kayong Utara setelah dikurangi persediaan yang dimiliki sangat liquid untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimilikinya. Dapat disimpulkan bahwa rasio quick Kabupaten Kayong Utara menunjukkan nilai yang tinggi.

Secara umum indicator rasio likuiditas yang tercermin dari rasio lancar dan rasio quick Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan nilai yang tinggi sehingga tergolong

sangat terjamin dalam konteks pelunasan kewajiban jangka pendek dengan menggunakan asset lancar.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka Panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutannya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka Panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas : Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dan Rasio Hutang Terhadap Modal.

a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total asset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total asset Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,0000428 untuk tahun 2013. Nilai rasio pada tahun berikutnya 2014-2017 yaitu 0,0007814; 0,001014; 0,011425; dan 0,00653. Jika dilihat secara umum, kecilnya nilai rasio hutang terhadap total asset menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara sangat solvable sehingga tidak bergantung kepada hutang untuk memiliki asset-asetnya.

b. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,000042, menjadi 0,000782 pada 2014. Sedangkan 2015 sampai 2017 rasio tersebut sebesar 0,001; 0,0122; dan 0,008. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai

modal yang dimiliki Kabupaten Kayong Utara, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

Perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan, dalam kurun waktu 2013-2017. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya). semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Rasio hutang terhadap aset serta hutang terhadap total modal menunjukkan tingkat *leverage* Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Nilai *leverage* menunjukkan kisaran angka dibawah di bawah 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kabupaten Kayong Utara didanai dari modal sendiri. Tingkat *leverage* tersebut mengindikasikan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada kondisi yang sehat. Sedangkan rasio aktifitas yang dihitung rata rata umur piutang, menunjukkan lama terbayarnya piutang yang cukup pendek. Kondisi ini juga menunjukkan membaiknya

kemampuan untuk aktifitas kinerja keuangan. Secara umum kondisi keuangan yang dicerminkan melalui rasio neraca dan APBD dapat ditunjukkan pada uraian di bawah ini.

Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Kemandirian Fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Pemerintah Kabupaten. Kemandirian Fiskal ini diketahui dengan mengukur rasio antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.8
Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2017

Tahun	PAD	Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	Rasio
2013	10,977,368,903.64	431,242,857,031.00	25,45%
2014	17,452,030,854.08	470,610,369,830.00	37,08%
2015	13,182,872,167.40	518,410,191,569.00	25,42%
2016	10,812,481,174.34	623,954,671,582.00	17,32%
2017	36,486,217,742.14	683,887,224,744.00	53,35%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kayong Utara

Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan trend yang fluktuatif (naik turun) sebagaimana tertuang dalam tabel di atas. Namun demikian, di tahun terakhir (2017) dari tabel di atas menunjukkan kondisi yang kian membaik dimana rasio kemandirian Fiskal Kabupaten Kayong Utara menunjukkan angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 53,35%. Rasio Kemandirian Fiskal ini berarti bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka berarti bahwa tingkat ketergantungan Pemkab terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

3.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tertuang pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Kayong 2017

No	Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
		Anggaran	Realisasi	%												
	BELANJA	530,339,672,920.67	506,115,481,761.09	95.43	550,288,579,288.59	507,628,305,671.00	92.25	596,798,633,198.85	543,156,726,974.89	91.01	674,111,139,912.30	630,660,733,783.32	93.55	735,572,591,232.15	699,835,948,938.48	95.14
A	BELANJA OPERASI	336,924,058,950.00	321,381,398,646.00	95.39	350,410,652,021.59	325,879,712,588.00	93.00	387,372,933,609.91	355,408,661,947.89	91.75	419,042,065,514.90	397,822,139,219.32	94.94	462,498,233,350.55	440,092,882,223.38	95.16
1	Belanja Pegawai	163,714,233,562.00	159,731,315,151.00	97.57	184,349,151,574.59	175,600,017,828.00	95.25	211,347,416,410.24	199,693,688,527.89	94.49	229,282,929,732.36	220,618,720,274.32	96.22	226,134,917,182.55	216,646,193,030.38	95.80
2	Belanja Barang	130,969,470,532.00	121,863,659,405.00	93.05	128,329,048,057.00	114,433,512,694.00	89.17	156,959,748,648.64	133,220,825,825.00	84.88	180,614,665,782.54	168,405,468,945.00	93.24	215,975,987,968.00	203,868,951,993.00	94.39
3	Belanja Hibah	20,842,034,856.00	19,462,694,292.00	93.38	8,826,400,000.00	8,609,500,000.00	97.54	8,408,900,000.00	14,669,343,220.00	174.45	8,661,350,000.00	8,605,350,000.00	99.35	19,687,328,200.00	19,048,033,200.00	96.75
4	Belanja Bantuan Sosial	2,842,520,000.00	1,963,691,580.00	69.08	9,763,249,500.00	9,287,831,050.00	95.13	10,656,868,551.03	7,824,804,375.00	73.42	483,120,000.00	192,600,000.00	39.87	700,000,000.00	529,704,000.00	75.67
5	Belanja Bantuan Keuangan	18,555,800,000.00	18,360,038,218.00	98.95	19,142,802,890.00	17,948,851,016.00	93.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	BELANJA	192,633,942,502.00	184,531,396,512.09	95.79	198,797,342,267.00	181,477,645,599.00	91.29	207,659,979,097.94	186,406,604,254.00	89.77	254,350,843,354.40	232,122,323,064.00	91.26	271,195,069,623.00	258,707,544,733.10	95.40

	A MO DAL															
1	Belanja Modal Tanah	2,188,815,000.00	2,179,094,363.00	99.56	5,460,708,900.00	5,455,306,250.00	99.90	5,489,805,000.00	4,773,895,350.00	86.96	7,632,803,653.00	7,589,463,800.00	99.43	3,859,131,904.00	3,525,927,110.00	91.37
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,316,974,216.00	20,815,033,401.09	97.65	19,138,854,324.00	17,521,018,864.00	91.55	23,835,374,330.94	20,678,071,479.00	86.75	23,134,126,671.00	21,143,503,615.00	91.40	35,207,143,804.00	30,516,979,944.10	86.68
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53,059,841,784.00	51,725,617,502.00	97.49	48,967,484,498.00	46,775,509,252.00	95.52	59,505,008,863.00	56,978,430,107.00	95.75	50,222,654,559.40	49,057,543,960.00	97.68	60,504,947,241.00	57,813,376,961.00	95.55
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jalinan	104,419,378,866.00	99,312,414,717.00	95.11	110,835,464,710.00	100,280,737,038.00	90.48	114,905,289,904.00	100,169,445,318.00	87.18	170,239,196,000.00	151,693,047,354.00	89.11	165,567,795,893.00	160,964,647,003.00	97.22
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,648,932,636.00	10,499,236,529.00	90.13	14,369,829,835.00	11,420,074,195.00	79.47	3,924,501,000.00	3,806,762,000.00	0.00	3,122,062,471.00	2,638,764,335.00	84.52	6,056,050,781.00	5,886,613,715.00	97.20

	ya															
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	781,671,468.67	202,686,603.00	25.93	1,080,585,000.00	270,947,484.00	25.07	1,765,720,491.00	1,341,460,773.00	75.97	718,231,043.00	716,271,500.00	99.73	1,879,288,258.60	1,035,521,982.00	55.10
1	Belanja Tidak Terduga	781,671,468.67	202,686,603.00	25.93	1,080,585,000.00	270,947,484.00	25.07	1,765,720,491.00	1,341,460,773.00	75.97	718,231,043.00	716,271,500.00	99.73	1,879,288,258.60	1,035,521,982.00	55.10

Proporsi anggaran dan realisasi Belanja Operasi lebih tinggi dibanding anggaran dan realisasi Belanja Modal setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD Kabupaten Kayong Utara untuk mendanai program pembangunan selama ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan besaran alokasi belanja operasi yang bersifat rutin.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 - 2018

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundangundangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada tahun anggaran 2013-2018 lebih fokus pada upaya untuk mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
2. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
3. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun Celah Fiskal (CF);

4. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan analisa data yang diperlukan Pemerintah baik instrument umum Indeks Fiskal Netto (IFN) maupun instrument khusus berupa karakteristik wilayah;
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
6. Meningkatkan hubungan/kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah;
7. Mengembangkan fasilitas kerjasama dengan kabupaten/kota di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dituntut semakin profesional dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kontribusi pendapatan daerah dibangun melalui arah pengembangan BUMD Kayong Utara yang meliputi :

- 1) Penguatan tugas dan fungsi BUMD:
 - a. Memberikan pelayanan jasa atau menghasilkan produk untuk kepentingan umum dan meraih laba guna memenuhi tujuan perusahaan;
 - b. Mengembangkan perekonomian daerah, yang berarti harus mampu menjadi motor penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah;
 - c. Menambah penghasilan daerah, yang berarti harus mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian guna menjalankan tugas pokoknya maka BUMD harus benar-benar mampu berfungsi optimal dalam :

- a. Mengelola dirinya secara berdaya guna dan berhasil guna, yakni dengan menerapkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat dan professional, sehingga mampu menempatkan dirinya sebagai penyumbang PAD yang handal;

- b. Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan antar BUMD, BUMN, swasta (khususnya UMKM) sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Memasuki era pasar bebas yang makin kompetitif dibutuhkan sebuah strategi khusus yang dilakukan oleh BUMD antara lain melalui aliansi strategis agar mampu menghadapi tantangan global dan mampu meningkatkan daya saing untuk menghadapi perubahan dan pesaing baru.
 - 3) Menghadapi perubahan yang sedang melanda dunia bisnis saat ini dengan mendorong BUMD untuk meningkatkan aksesibilitas dalam bidang pendanaan, teknologi, manajemen modern dan pasar internasional.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut

kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II, adalah program prioritas ditingkat organisasi perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan perangkat daerah untuk mendukung visi misi pembangunan daerah secara holistik. Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada:

- 1) Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin;
- 2) Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan;
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis

potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

- 4) Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasibelanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III dengan memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar :

- 1) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/distribusi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 2) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

3.2.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Tabel 3.10
Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran
2013-2017 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi	477,221,348,25	522,983,878,360	3,308,230,337	00,472,770,10	785,939,457,9
	0.64	24.99	7.50	8.34	31.89
Pendapatan Daerah	506,115,481,7	507,628,305,6	543,156,726,9	630,660,733,7	699,835,948,9
Belanja Daerah	61.09	71.00	74.89	83.32	38.48
Pengeluaran		2,000,000,000.	2,000,000,000.	2,000,000,000.	2,000,000,000.
		00	00	00	00
Pembiayaan Daerah	-				
Defisit riil					

Sumber : BPKAD Kabupaten Kayong Utara

Kurun waktu tahun 2013-2017 Realisasi PAD terus menunjukkan peningkatan demikian juga dengan belanja daerah. Ini digambarkan pada Tabel 3.10. bahwa untuk menutupi defisit anggaran dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA periode ini berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Di masa mendatang diharapkan SiLPA semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kayong Utara.

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program). Kebijakan yang dilakukan pengeluaran anggaran harus mempertimbangan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan.

Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pendanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah akan dikembangkan sistem pembiayaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, rumah sakit, dan beberapa sarana prasarana lainnya. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal ini, kebijakan pembiayaan Kabupaten Kayong Utara diarahkan pada:

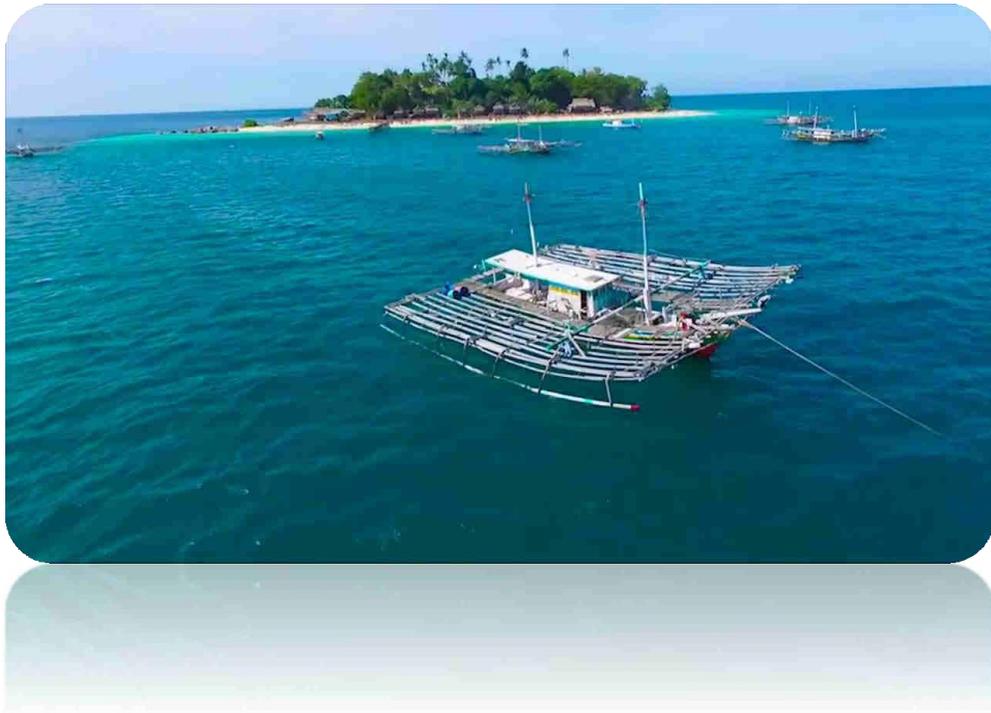
1) Pinjaman Daerah

Terkait dengan pinjaman daerah Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun meningkatkan daya saing daerah dari berbagai bidang.

2) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Kerjasama Pemerintah dan Swasta/KPS (*Public Private Partneship*).

Kerjasama ini diutamakan untuk pembiayaan infrastruktur dan percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan public yang bersifat *cost recovery* dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian daerah jangka panjang, daya saing dan mengurangi disparitas antar daerah.

Kemitraan dengan dunia usaha melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP)/*Corporate Sosial Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dalam mewujudkan dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkait peningkatan pelayanan publik pada kegiatan sosial, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembinaan UMKM. Untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten serta dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan dalam konteks pembangunan daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan diperoleh dengan cara mengidentifikasi keseluruhan permasalahan pembangunan di seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena beberapa hal yang meliputi:

1. Kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal;
2. Kelemahan yang tidak diatasi;
3. Peluang yang tidak dimanfaatkan; dan
4. Ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan adanya tahapan perumusan permasalahan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kayong Utara untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD.

Berdasarkan dari berbagai permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah, maka dirumuskan beberapa permasalahan pembangunan yang menjadi prioritas yang meliputi:

4.1.1. Perekonomian

Perekonomian merupakan komponen yang vital bagi pemerintah daerah, dimana keberhasilan dan kegagalan pembangunan pemerintah dapat dilihat dari keberhasilan terhadap pembangunan sektor ekonomi. Keberlanjutan roda pemerintahan seorang kepala daerah sangat erat kaitannya dengan sektor perekonomian, dimana apabila seorang kepala daerah mampu menghadirkan kondisi ditengah-tengah masyarakat sebuah perekonomian yang baik dan stabil maka dapat dipastikan roda pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar demikian pula dengan sebaliknya.

Oleh karena itu, perekonomian menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan mengingat kedudukan yang vital tersebut. Karena pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan distribusi pendapatan,

meningkatkan hubungan regional dan usaha melakukan pergeseran kegiatan sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder.

Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan hasil perhitungan PDRB, berada pada posisi paling bawah dari 14 Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat, dimana Kabupaten Kayong berdasarkan nilai PDRB atas harga berlaku hanya mencapai 3,15 triliun rupiah. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yaitu 5,93% namun angka capaian tersebut tidak terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Perekonomian masyarakat yang sangat tergantung terhadap ketersediaan sumber daya alam menjadi salah satu indikasi yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kayong Utara kurang optimal. Hal tersebut ditandai dengan peranan sektor pertanian yang cukup sentral terhadap Kabupaten Kayong Utara dimana lebih dari 29% nilai tambah berasal dari sektor pertanian (tanaman pangan dan perikanan). Adapun beberapa permasalahan yang diindikasikan menjadi penyebab terjadinya permasalahan bidang perekonomian antara lain: masyarakat Kayong Utara masih bertumpu pada ketersediaan sumberdaya alam sebagai sumber perekonomian (pertanian dan perikanan), masih banyak masyarakat Kayong Utara yang menggunakan sistem pengelolaan tradisional dalam mengelola pertanian dan perikanan, belum optimalnya mengelola potensi-potensi sumberdaya perekonomian lainnya seperti pariwisata, pertambangan dan lainnya.

4.1.2. Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai lokal suatu daerah. Bidang sosial budaya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena keberhasilan suatu pembangunan selain dari sektor ekonomi dapat juga dilihat dari keberhasilan bidang sosial budaya. Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia harus menjadi salah satu prioritas permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu mengingat keberhasilan pembangunan manusia dimasa akan datang sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan bidang sosial budaya di Kabupaten Kayong Utara dalam beberapa waktu terakhir menghadap berbagai permasalahan

diantaranya: IPM, pendidikan, kesehatan, pengeluaran perkapita, kemiskinan, kependudukan, budaya dan permasalahan lainnya.

Indeks Pembangunan manusia merupakan ukuran yang dipergunakan oleh pemerintah untuk mengetahui sejauh mana capaian pembangunan sumberdaya manusia. Hal demikian dikarenakan IPM merupakan komposit daripada 3 dimensi yang meliputi dimensi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Di Kabupaten Kayong Utara saat ini dihadapkan pada posisi yang serius terhadap permasalahan sumberdaya manusia, kondisi ini disebabkan karena capaian IPM di Kayong Utara berada pada posisi terendah apabila disbanding dengan IPM se Kota/ Kabupaten Kalimantan Barat. Adapun angka IPM di Kabupaten Kayong Utara adalah 60,87. Selain faktor usia Kabupaten Kayong Utara yang masih muda setelah pemekaran dari Kabupaten Ketapang, faktor dimensi-dimensi penyusun IPM memiliki andil yang cukup signifikan terhadap permasalahan tersebut.

Keberadaan sumberdaya yang berkualitas tidak dapat lepas dari dunia pendidikan, dimana semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka semakin baik pula wilayah tersebut mengingat ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas sangat melimpah. Terlebih saat ini ada kewenangan pendidikan yang dahulunya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, namun kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu pendidikan menengah. Kabupaten Kayong Utara telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat, namun hingga tahun 2016 capaian pembangunan tersebut masih menemui berbagai kendala diantaranya capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten hanya berkisar pada angka 5,84 yang berarti bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Kabupaten Kayong Utara hanya sampai pendidikan SD kelas 6. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya: kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan berserta sebarannya, dan kondisi geografis daerah.

Selain pendidikan, bidang kesehatan harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah Kayong Utara mengingat kesehatan merupakan salah unsur penyusun daripada kualitas sumberdaya manusia seutuhnya. Keberhasilan

pembangunan bidang kesehatan yang baik pada suatu wilayah biasaya ditandai dengan capaian angka harapan lama hidup (AHH). Di Kayong Utara capaian AHH berada pada angka 67,39 yang berarti bahwa rata-rata usia hidup penduduk Kayong Utara berada pada usia 67 tahun dan capaian tersebut merupakan capaian terendah dibandingkan dengan AHH Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat. Berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kayong Utara yang berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan diantaranya: ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik seperti rumah sakit yang baru berdiri beberapa saat terakhir, sebaran fasilitas kesehatan yang belum merata keseluruh wilayah beserta tenaga medis pendukungnya dan keterbatasan ketersediaan tenaga medis spesialis yang ada di Kayong Utara.

Kabupaten Kayong Utara yang secara umum memiliki penduduk mayoritas sebagai petani dan nelayan memiliki kontribusi besar terhadap capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan metode pertanian dan perikanan yang masih tradisional menjadi faktor pembentuk permasalahan belum optimalnya tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Saat ini pengeluaran perkapita yang disesuaikan masyarakat Kayong Utara hanya berkisar pada angka 7.030.

Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat dan sangat bergantungnya masyarakat kepada hasil sumberdaya alam sebagai salah satu sumber mata pencarian menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kemiskinan di Kayong Utara. Jumlah Penduduk Miskin meningkat dari tahun sebelumnya (2014-2016 konsisten mengalami peningkatan). Tahun 2016 sebesar 10.890 orang (10,19%) dengan garis kemiskinan 244.046 rp/kapita/bln. Permasalahan kemiskinan harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah, karena semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin tinggi pula beban yang harus dipikul oleh pemerintah. Oleh karena, penyelesaian permasalahan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan dan comprehensive.

Berbicara tentang sosial budaya maka tidak dapat lepas dari permasalahan kependudukan, pengendalian terhadap kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk

perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut perlu diupayakan secara optimal untuk meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki daya saing dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2016 sebanyak 107.268 jiwa yang terdiri dari 50.88% laki-laki dan 49.12% perempuan dengan rasio jenis kelamin penduduk adalah 104 yang berarti penduduk Kabupaten Kayong Utara didominasi oleh penduduk laki-laki. Selain itu, kelompok umur usia 0-14 tahun merupakan kelompok umur yang mendominasi jumlah penduduk di Kayong Utara. Hal demikian berarti Kabupaten Kayong Utara saat ini masih didominasi oleh penduduk usia non produktif sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Terlebih dengan kepadatan penduduk di Kayong Utara tahun 2016 diketahui hanya berkisar 23 jiwa per km² dengan sebaran penduduk yang tidak merata dimana kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah kecamatan simpang hilir.

Tantangan yang tidak kalah penting yang harus dihadapi oleh Kayong Utara adalah bagaimana mempertahankan eksistensi nilai-nilai budaya lokal yang baik ditengah gempuran kemajuan teknologi informasi yang secara tidak langsung membawa dampak negative terhadap eksistensi nilai-nilai budaya lokal tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa perkembangan arus globalisasi yang semakin kuat yang didorong oleh pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara untuk mampu mempertahankan eksistensi identitas diri, daerah dan bangsa serta mampu memanfaatkannya dalam peningkatan kehidupan kerukunan beragama dan daya saing. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah bagaimana mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, mengendalikan tindakan penyalahgunaan agama, serta mewujudkan rasa aman, tenteram, dan tertib dari berbagai ancaman perilaku yang menyimpang dan pelanggaran.

4.1.3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan agar mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kemudahan dalam aksesibilitas dapat membawa dampak yang positif terhadap pembangunan bidang lainnya terutama bidang ekonomi dan sosial budaya, mengingat kunci keberhasilan bidang ekonomi dan sosial budaya di antaranya adalah akses (infrastruktur). Kabupaten Kayong Utara dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur diantaranya sebaran akses yang belum menjangkau seluruh wilayah administratif, perencanaan infrastruktur seperti rencana makro pembangunan infrastruktur yang belum terbentuk, masih terbatasnya jumlah jalan dalam kondisi mantap dimana hanya berkisar 47,9% dari keseluruhan total jalan di Kayong Utara, keterbatasan jumlah kontraktor di wilayah Kayong Utara, sebaran air bersih yang belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kayong Utara, permasalahan pengelolaan persampangan yang belum optimal yang didukung lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan sistem drainase yang belum optimal. Berbagai permasalahan infrastruktur sangat penting untuk diperhatikan karena keberadaannya dapat menunjang keberhasilan bidang lainnya.

4.1.4. Lingkungan

Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kayong Utara harus diselaraskan dengan tata kelola sumber daya yang baik dan berkelanjutan. Artinya bahwa didalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kayong Utara harus memperhatikan faktor ekonomi (*feasible*), sosial (*acceptable*) dan lingkungan (ramah lingkungan). Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, anggapan masyarakat secara luas bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas dan dapat mempergunakannya secara cuma-cuma serta pandangan bahwa lingkungan hidup akan senantiasa mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian secara mandiri merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian yang serius bagi Kabupaten Kayong Utara.

Menurunnya kualitas lingkungan, rendahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan yang disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia serta semakin tingginya aktivitas penambangan liar menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Mengingat kerusakan alam merupakan awal dari rusaknya kondisi lingkungan secara keseluruhan.

Dibutuhkan langkah riil dan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam yang selalu memelihara dan menjaga keserasiandan kelestariannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah reformasi kebijakandalam penanganannya, peningkatan kesadaran masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu akan pentingnya menjaga lingkungan dengan menggunakan berbagai forum kemasyarakatan yang ada. Selain itu, penegakan hukum yang kuat akan memberikan efek jera kepada para pelaku perusakan alam sehingga yang diperlukan adalah aturan hukum yang jelas dan pasti.

4.1.5. Tata Kelola Pemerintahan

Perencanaan dan program pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip pelaksanaan *good governance* adalah adanya transparansi, responsifitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Terselenggarakannya *good governance* akan mendorong kemudahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketersediaan birokrasi yang memadai akan dapat mendukung dan mendorong terlaksananya program pembangunan dan pelayanan secara lebih baik. Upaya tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik.

Tantangan Kabupaten Kayong Utara dalam mewujudkan *good governance* bukan pekerjaan yang mudah, terlebih ditengah isu-isu tentang rendahnya kapasitas aparatur, lemahnya kapasitas birokrasi pemerintah daerah, dan rendahnya kapasitas keuangan daerah. Sektor keuangan daerah Pemerintah daerah dihadapkan pada sebuah tuntutan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjamin efektifitas dan efisiensi pemanfaatannya. Di pihak lain, pembiayaan pembangunan perlu diarahkan pada optimalisasi peningkatan pelayanan publik dan penyediaan sarana dan prasarana. Kaitannya dengan aparatur, Pemerintah

kabupaten Kayong Utara dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana upaya pengembangan sistem perencanaan SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi berdasarkan hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Demikian juga dengan kemampuan membangun budaya kerja dan pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta kemampuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Selain itu, dibutuhkan pengembangan terhadap kemampuan dalam sistem perencanaan SDM aparatur sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Memperbaiki lemahnya upaya pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta tuntutan untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam aspek kelembagaan, persoalan yang dihadapi adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, masalah yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tantangan ke depan adalah membangun koordinasi dan sinergisitas yang baik antar pusat dan daerah, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara.

Tantangan selanjutnya adalah masih kurangnya fungsi pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif, sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum efektif. Sehingga diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif dengan membangun suatu sistem monitoring dan pengawasan dengan sebaik mungkin.

Berikut daftar permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	Permasalahan
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Layanan Urusan Wajib dasar			
1	Pendidikan		1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia belum memadai. 2. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih banyak memerlukan penanganan agar memenuhi standar untuk peningkatan kualitas pendidikan. 3. Ketersediaan
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
1.2	Angka partisipasi kasar		
	APK SD/MI	melampaui (>)	
	APK SMP/MTs	2014 dan 2015 belum tercapai (<), sementara 2016 melampaui (>)	

	APK SMA/MA/SMK	2014 dan 2015 melampaui (>), sementara 2016 belum tercapai (<)	infrastruktur penunjang pendidikan seperti ketersediaan listrik dan jaringan internet khususnya pada daerah-daerah 3T belum memadai.
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan		
1.4	Angka Partisipasi Murni		
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	dari tahun ke tahun naik turun dengan tahun 2017 belum tercapai (<)	
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	belum tercapai (<)	
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	belum tercapai (<)	
1.5	Angka partisipasi sekolah		
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A		
	7 – 12 Tahun		
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah		
	Masih Sekolah		
	Tidak Bersekolah lagi		
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B		
	13 – 15 Tahun		
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah		
	Masih Sekolah		
	Tidak Bersekolah lagi		
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C		
	16 – 18 Tahun		
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah		
	Masih Sekolah		
	Tidak Bersekolah lagi		
1.6	Angka Putus Sekolah:		
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		

1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA		
1.7	Angka Kelulusan:		
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA		
1.8	Angka Melanjutkan (AM):		
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		
1.9	Fasilitas Pendidikan:		
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik		
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		
1.12	Rasio Guru/murid SD/MI		
1.13	Rasio Guru/murid SLTP/MTs		
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		
	Rasio Guru/murid SLTA/SMK/MA		
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata		
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki		

1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
2	Kesehatan		
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2013,2014,2016 belum tercapai (<), sementara 2015 melampaui (>)	masih belum memadai/terbatasnya sarana dan prasarana penunjang
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi		
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	belum tercapai (<)	
2.6	Rasio posyandu per satuan balita		
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		
	Puskesmas		
	Poliklinik / Balai Pengobatan		
	Puskesmas Pembantu		
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		
2.9	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk		
2.10`	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		
2.13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)		
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		

2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		
2.20`	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		
2.25	Penderita diare yang ditangani		
2.26	Angka kejadian Malaria		
2.27	Tingkat kematian akibat malaria		
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		
2.30`	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		

2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		
2.34	Cakupan kunjungan bayi		
2.35	Cakupan puskesmas		
2.36	Cakupan pembantu puskesmas		
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		
2.38	Cakupan pelayanan nifas		
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		
2.40`	Cakupan pelayanan anak balita		
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Pekerjaan Umum		Rasio Jumlah Tenaga Teknis Yang Menangani Kegiatan Fisik Tidak Sebanding dengan Jumlah Paket yang ditangani
3.1.1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik		
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		

3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		
3.1.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		
3.1.7	Rumah Tangga Bersanitasi		
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar		
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		
3.1.12	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik		
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi		
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum		
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan air minum layak		
3.1.16	Kawasan Kumuh		
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		
3.2	Penataan Ruang		

3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		
3.2.3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		
3.2.3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya		
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
4.1	Rasio rumah layak huni		<p>1) Perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman yang masih belum optimal. 2) Belum tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah (RP4D) Kabupaten serta dokumen data base kampung kumuh 3) kurangnya pembahasan dengan pihak OPD terkait tentang perda tata ruang</p>
4.2	Rasio permukiman layak huni		
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		
4.5	Persentase permukiman yang tertata		
4.6	Persentase lingkungan permukiman kumuh		
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		
			<p>yang mengakomodasi perkembangan wilayah, perkembangan permukiman yang semakin intensif tetapi tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan 4) terbatasnya kemampuan pendanaan APBD kabupaten dalam penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, system</p>

4.9	Rumah tangga (RT) pengguna air bersih		pembuangan sampah, system pembuangan kotoran air limbah dan tata pembangunan. 5) belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 6) belum optimalnya penanganan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Kayong Utara 7) belum tersedianya Master Plan Drainase yang memadai 8) system drainase yang kurang baik sehingga mengganggu kenyamanan dan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		
5.4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
5.5	Persentase Penegakan PERDA		
6	Sosial		
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		1) Adanya keterbatasan dana dalam proses pembinaan PMKS. 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk proses penyaluran bantuan sosial pada daerah yang terkena musibah bencana alam 3) Masih kurangnya partisipasi lembaga-lembaga swasta dalam proses penggalangan dana dan bantuan sosial
6.2	Penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)		
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		

6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		untuk korban bencana alam. 4) Masih belum optimalnya kegiatan pembinaan bagi keluarga miskin dan PMKS karena daerahnya sulit dijangkau. 5) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan data dan informasi mengenai
6.5	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi		masalah-masalah sosial dalam lingkungannya.
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			

1	Tenaga Kerja		
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		
1.3	Pencari kerja yang ditempatkan		
1.4	Keselamatan dan perlindungan		
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan		
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		

2.4	Rasio KDRT		
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan		
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit		
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.		
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		

2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		
2.18	angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas		
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian		
3	Pangan		
3.1	Ketersediaan pangan utama		masih kurangnya kebutuhan pengisian jabatan structural PNS di Kantor/bagian Administrasi
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita		
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		
3.4.	Regulasi ketahanan pangan		
4	Pertanahan		
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat		masih belum memadainya sarana dan prasarana serta masih terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitasnya
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara		
4.3	Pengajuan izin lokasi		

4.4.	Izin lokasi yang telah ditetapkan		
5	Lingkungan Hidup		
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		<p>1) Belum memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk membentuk pos pengaduan dan sengketa lingkungan sesuai kriteria SPM</p> <p>2) Belum adanya perda penetapan kelas air sungai, perbup izin pembuangan air limbah</p> <p>3) Rendahnya pemahaman penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan</p> <p>4) Belum optimalnya pemanfaatan IPAL yang ada pada lokasi usaha atau kegiatan menjadi kendala terpenuhinya persyaratan teknis</p> <p>5) Belum adanya penetapan kelas air seperti persiapan data dasar yaitu petatopografi dengan koreksi citra satelit, tata guna lahan eksistinsi atau rencana umum tata ruang dan sebagainya</p> <p>6) Tidak adanya pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal</p> <p>7) Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL).</p> <p>8) Belum adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam menunjang kegiatan pendidikan lingkungan hidup di sekolah.</p>
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota		
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		
5.9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		
5.10.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		
5.11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		
5.12	Penetapan hak MHA		
5.13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		
5.14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		

5.15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		
5.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		
5.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		
5.18	Timbulan sampah yang ditangani		
5.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		
5.20.	Persentase cakupan area pelayanan		
5.21	Penanganan Sampah		
5.22	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		
5.23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan		
5.24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		
5.25	Indikator Kinerja Kunci Kebersihan		
5.26	Penegakan hukum lingkungan		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1	Kepemilikan KTP		

6.2	Kepemilikan akta kelahiran		
6.3	Rasio pasangan berakte nikah		
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran		
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		
7.4	Persentase LSM aktif		
7.5	Persentase LPM Berprestasi		
7.6	Persentase PKK aktif		

7.7	Persentase Posyandu aktif		
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		
8.2	Total Fertility Rate (TFR)		
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB		
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		

8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		
8.9	Ratio Akseptor KB		
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		

8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita		

8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes		
	Persentase Prevalensi peserta KB aktif		
9	Perhubungan		<p>1. Infrastruktur Perhubungan yang belum memadai.</p> <p>2. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di bidang perhubungan</p> <p>3. Sumber daya manusia Kabupaten Kayong Utara sangat terbatas terutama untuk menanggapi bidang perhubungan.</p>
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		
9.2	Rasio ijin trayek		
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum		
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		
9.5	angkutan darat		
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		
9.7	Pemasangan Rambu-rambu		
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun		
10	Komunikasi dan Informatika		<p>1. Masih banyak daerah yang belum terjangkau pelayanan jaringan telekomunikasi dengan baik</p> <p>2. Masih sulitnya mengakses telekomunikasi bagi daerah-daerah yang letaknya jauh di pelosok-pelosok serta kepulauan.</p>
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		
10.6	website resmi milik Pemerintah Daerah		

10.7	Pameran/Expo yang telah diselenggarakan		
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
11.1	Persentase koperasi aktif		1) Masih kurangnya pemahaman pelaku UKM terkait aturan dan kebijakan untuk UKM. 2) Masih kurangnya pemahaman pelaku UKM terkait aturan dan kebijakan untuk UKM. 3) Sarana dan prasarana koperasi yang belum memadai.
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif		
11.3	Persentase BPR/LKM aktif		
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		
12	Penanaman Modal		
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		1) Kurangnya SDM di lingkungan OPD 2) Kurangnya tenaga profesional 3) Kurangnya sarana dan prasarana
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja		
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		
13	Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif		1) Sumberdaya yang ahli sebagai Pelatih olahraga dirasa masih kurang. 2) Koordinasi antar organisasi kepemudaan belum dapat berjalan dengan baik, terutama dalam pelaksanaan kegiatan.
13.2	Persentase wirausaha muda		
13.3	Cakupan pembinaan olahraga		
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi		

13.5	Cakupan pembinaan atlet muda		
13.6	Jumlah atlet berprestasi		
13.7	Jumlah prestasi olahraga		
13.8	jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)		
13.9	jumlah lapangan olah raga		
14	Statistik		
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"		
14.3	Buku "PDRB"		
15	Persandian		
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		
16	Kebudayaan		
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundangan terkait proses intervensi pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan melindungi cagar budaya serta situs peninggalan sejarah.
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		
16.5	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		
17	Perpustakaan		

17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		1) Masih terbatasnya tenaga pustakawan. 2) Informasi yang diinginkan masyarakat dapat diperoleh dengan mudah seperti melalui website sehingga mengurangi minat baca masyarakat di Perpustakaan Daerah.
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun		
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat		
18	Kearsipan		
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		Hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan urusan kearsipan yaitu perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana didalam depo arsip
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		
Layanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata		
1.1	Kunjungan wisata		1) Kurangnya dana dan sarana yang memadai guna mendukung kegiatan promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri. 2) Kurangnya tenaga yang berkualitas untuk melakukan pelayanan pada para turis yang berkunjung ke objek wisata tujuan. 3) Belum adanya alat transportasi yang lancar dan kontinyu yang dapat menghubungkan dari ibukota kabupaten ke objek wisata yang dituju. 4) Minimnya jumlah pelaku pariwisata termasuk Biro Perjalanan, Team Operator, dan lain-lain yang menangani pariwisata di Kabupaten Kayong Utara.
1.2	Lama kunjungan Wisata		
1.3	PAD sektor pariwisata		

2	Pertanian		
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		
2.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		
2.6	Cakupan bina kelompok petani		
2.7	Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa pertanian		
2.8	Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan		
1.2	Tanaman Pangan		
1.2.1.	Produksi Padi		
1.2.2.	Produksi Jagung		
1.2.3.	Produktivitas Padi		
1.2.4.	Produktivitas Jagung		
1.3.	Tanaman Perkebunan		
1.3.1.	Produksi Karet		
1.3.3.	Luas Karet Rakyat		
1.4.1.	Jumlah Kambing		
1.4.2.	Jumlah sapi		
1.4.3.	Jumlah ayam pedaging		

1.4.4.	Jumlah itik		
3	Kehutanan		
3.1	Rehabilitasi lahan kritis	2013 dan 2016 melampaui (>), 2014 dan 2015 belum tercapai (<)	
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan		
3.3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan		
	Luas Lahan Kritis		
4	Energi dan Sumber Daya Mineral		
4.1	Rumah tangga dengan akses listrik		
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik		
4.3	Persentase pertambangan tanpa ijin		
5	Perdagangan		
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan		Keterbatasan anggaran untuk pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		
6	Perindustrian		
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin		1) Pemasaran produk-produk industri masih belum meluas sampai
7	Transmigrasi		keluar wilayah Kabupaten Kayong Utara. 2) Minimnya sentra-sentra industri rakyat. 3) Akses permodalan yang masih dinilai sulit, terutama bagi industri yang berskala kecil. 4) Produk unggulan daerah yang belum terdata semua
7.1	Persentase transmigran swakarsa		

8	Kelautan dan Perikanan		
8.1	Produksi perikanan laut	2013 belum tercapai (<), sementara 2014-2017 melampaui (>)	nelayan masih kurang terampil menggunakan teknologi dalam hal menangkap ikan, masyarakat masih mengutamakan penghasilan dari usaha penangkapan dari pada usaha budidaya. Hal ini dikarenakan usaha penangkapan ikan membutuhkan waktu yang singkat untuk menghasilkan uang dibandingkan dengan budidaya, pembudidaya dan nelayan masih kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung usaha perikanan
8.2	Konsumsi ikan		
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan		
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan		
8.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		
8.7	Nilai tukar nelayan		
Penunjang Urusan			
1	Perencanaan Pembangunan		
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		masih belum maksimalnya hasil dari koordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan urusan
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		perencanaan pembangunan
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		
1.5	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		
2	Keuangan		
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		
2.2	Persentase SILPA		

2.3	Persentase SILPA terhadap APBD		
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana		
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)		
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)		
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		
2.9	Penetapan APBD		
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		
4	Penelitian dan pengembangan		
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		
	Penerapan SIDA:		
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		

4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		
5	Pengawasan		
5.1	Persentase tindak lanjut temuan		
5.2	Persentase pelanggaran pegawai		
5.3	Jumlah temuan BPK		
6	Sekretariat Dewan		
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

4.2.1. Isu-isu Internasional

4.2.1.1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 telah dimulai tanggal 31 Desember 2015. Asean akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja trampil antar negara-negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi.

4.2.1.2. Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

4.2.1.3. Gejala Perekonomian Global

Krisis ekonomi global adalah peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan / degresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi global ini adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Dan ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap perubahannya, kadang sistem ekonomi dunia naik kadang merosot drastis. Ini menyebabkan gejala besar bagi kehidupan ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat langsungnya adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok di Indonesia.

4.2.1.4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim

Pemanasan global akibat tingginya emisi gas rumah kaca menjadi isu internasional yang banyak diperbincangkan. Mencairnya es di kutub utara dan selatan bumi, mengakibatkan muka air laut meningkat dan perubahan musim yang terjadi di beberapa belahan bumi, bencana banjir, badai, serta tenggelamnya beberapa pulau juga diduga akibat tingginya emisi gas rumah kaca. Atas dasar isu tersebut, Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN-GRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) yang ditetapkan melalui peraturan gubernur serta dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN API). Kebijakan penurunan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termuat dalam RPJMN 2015-2019 dengan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

4.2.1.5. Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 sudah di depan mata, ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong otomasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Era ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak soal pekerjaan manusia yang akan digantikan teknologi mutakhir. Dalam konteks di Indonesia, Revolusi Industri Keempat telah mengeliminasi beberapa pekerjaan saat ini, karena tenaga kerja yang ada telah banyak berkurang yang dinilai karena akumulasi beberapa faktor di antaranya efisiensi dan disrupsi teknologi. Tidak hanya menjadi perbincangan di tanah air, Revolusi Industri Keempat juga menjadi pembahasan utama di dunia.

Revolusi teknologi ini akan mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat akan mengacu pada bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Perubahan teknologi ini secara drastis akan mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah bekerja yang pada akhirnya mengarah pada transformasi masyarakat yang serupa dengan revolusi industri sebelumnya.

Revolusi industri ini tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Bagi Indonesia, fenomena revolusi industri 4.0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadialah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Dalam rangka ini, Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan *roadmap* revolusi industri 4.0 yang diberi nama “*Making Indonesia 4.0*” untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Oleh karenanya, langkah tersebut juga menuntut pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti *roadmap* yang telah tersusun.

4.2.2. Isu-isu Nasional

4.2.2.1. *Universal Access 100% layanan air minum, 0% kawasan kumuh, 100% layanan sanitasi*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang mengamanatkan 100 persen akses aman air minum, bebas kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak pada akhir 2019. Indikator 100% yang dimaksud ialah, Indonesia bisa memenuhi 85% Standart Pelayanan Minum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar. Dalam memenuhi SPM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik. Sedangkan, untuk sektor sanitasi yaitu tersedianya sistem air limbah setempat sebesar 60%, tersediaanya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20% dan adanya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 70%.

4.2.2.2. Jaminan Kesehatan Nasional

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Sedangkan untuk rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaanya JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).

Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.

Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

4.2.2.3. Kedaulatan Pangan

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini adalah merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan ekonomi lainnya. Kedaulatan pangan merupakan sebuah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal, dimana terdapat 7 (tujuh) prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, yakni : pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan SDA secara berkelanjutan, pangan untuk pangan (tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan), pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

4.2.2.4. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian persepektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

4.2.3. Isu-isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat

Adapun isu strategis utama pembangunan Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran.
2. Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah.
3. Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian.
4. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dan Kesehatan.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.
6. Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian Kalbar yang belum optimal.
7. Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.
8. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

4.2.4. Isu-isu Strategis Kabupaten Kayong Utara

4.2.4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berbasis pada potensi unggulan daerah

Pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan merupakan suatu tuntutan yang wajib dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah, karena hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa barang faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang baik merupakan pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan potensi-potensi lokal yang ada di daerah. Sebagaimana telah diketahui bahwa Kabupaten Kayong Utara memiliki sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian di daerah yaitu pertanian pangan dan perikanan. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pengelolaan pertanian yang tidak disertai dengan kualitas SDM yang baik dan penggunaan metode serta teknologi yang tepat guna tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan adanya sentuhan SDM yang berkualitas yang disertai dengan penggunaan teknologi yang tepat guna maka produk pertanian tersebut khususnya tanaman pangan akan memiliki nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih di era globalisasi dan persaingan bebas ini setiap daerah akan berlomba-lomba untuk meningkatkan potensi unggulan berbasis

teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka dari itu, Kabupaten Kayong Utara yang saat ini memiliki potensi di bidang pertanian harus mampu memperhatikan kondisi tersebut dan menangkap setiap peluang yang ada mengingat saat ini era persaingan bebas.

Seperti halnya pertanian sektor perikanan yang tidak dapat dikelola dengan baik yang tidak disertai dengan teknologi yang tepat guna tidak akan mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah harus mampu memberikan solusi terhadap pengelolaan perikanan yang menjadi salah satu potensi di Kabupaten Kayong Utara baik dalam segi penangkapan, pengolahan, dan pemasaran. Selain itu, Kayong Utara juga dapat memulai pengembangan budidaya perikanan tertentu yang dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih bagi masyarakat dan menjadi icon daripada Kayong Utara.

Potensi Kayong Utara yang ke ketiga yang tidak kalah penting adalah pariwisata. Sebagaimana telah diketahui bahwa Selat Karimata memiliki potensi yang luar biasa baik di permukaan maupun di bawah laut. Potensi tersebut berupa perikanan dan keindahan dunia bawah laut. Potensi tersebut tidak akan memiliki nilai tambah manakala tidak ada kemudahan aksesibilitas yang mendukung seperti sarana dan prasarana (jalan, transportasi air, penginapan dan lain sebagainya). Selain itu, dibutuhkan kesiapan daripada sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mengelola potensi pariwisata sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para wisatawan.

4.2.4.2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kepadatan penduduk, kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Kayong utara saat ini adalah kualitas sumberdaya manusia dan kemiskinan. Berbicara

terkait kualitas sumber daya manusia paling tidak akan bersinggungan dengan dua hal yaitu kondisi pendidikan dan kesehatan.

Kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara saat ini masih membutuhkan perhatian yang sangat serius mengingat capaian IPM, rata-rata sekolah masyarakat yang masih rendah. Bahkan saat ini Kabupaten Kayong Utara belum mampu bersaing dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Kalimantan Barat. Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan manusia di masa yang akan datang. Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas akan memberikan banyak pilihan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi di segala sektor. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan banyak memberikan alasan bagi masyarakat untuk tetap tinggal di wilayah tersebut karena pemerintah tidak mampu menjamin kualitas pelayanan pendidikan. Betapa pentingnya kedudukan pendidikan bagi proses pembangunan dan merupakan kebutuhan wajib masyarakat maka pendidikan selayaknya menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah daerah.

Selain pendidikan, pemerintah harus mampu menjamin kualitas kesehatan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan manusia selain diukur dari keberhasilan di bidang pendidikan dapat pula dilihat dari kualitas kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik dan memadai diseluruh wilayah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih di wilayah pesisir dan kepulauan.

Perihal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara adalah kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang cukup tinggi akan menjadi beban bagi pemerintah daerah untuk berlari dalam proses pembangunan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik diantaranya keturunan, keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak, rendahnya pendidikan sehingga tidak mampu bersaing dan lainnya. Pemerintah daerah harus mampu mengurai berbagai penyebab utama kemiskinan di Kayong Utara sehingga mampu menemukan formulasi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Bidang pemuda dan olah raga menjadi perihal yang tetap harus diperhatikan oleh Pemerintah Kayong Utara mengingat para pemuda Kayong Utara sudah mampu membuktikan di level nasional di cabang olahraga tinju. Hal tersebut harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga identitas Kayong Utara sebagai daerah penghasil para petinju profesional di level nasional.

4.2.4.3. Meningkatkan sebaran kuantitas dan kualitas infrastruktur ke seluruh wilayah

Pembangunan daerah belum optimal apabila ketersediaan infrastruktur belum memadai. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kualitas infrastruktur yang baik menjadi tolak ukur dalam penentu suatu daerah dinyatakan berhasil. Akan tetapi di Kabupaten Kayong Utara masih banyak ditemui kualitas infrastruktur yang rendah dan perlu peningkatan, yakni:

Pertama, masih adanya jaringan jalan yang dalam kondisi kurang baik dan ketersediaan jaringan telekomunikasi dan informatika yang belum merata. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas serta kuantitas terhadap jaringan jalan dan jaringan telekomunikasi dan informatika.

Kedua, perkembangan jaman menuju modernisasi menuntut daerah untuk mampu berkompetisi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan pembangunan infrastruktur inovasi teknologi. Dengan penggunaan dan pencapaian teknologi terkini, diharapkan dapat membangun desa-desa mandiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia serta produk hukum yang mengatur tata laksana untuk mendukung pencapaian desa mandiri melalui inovasi teknologi.

Ketiga, dalam rangka mewujudkan kota maupun desa cerdas, perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman yang harus dilakukan dengan cara revitalisasi atau perbaikan lingkungan. Penataan lingkungan pemukiman guna menunjang kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan sehat.

4.2.4.4. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan

Sebagai daerah yang tergolong masih baru, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus dapat memperhatikan kondisi lingkungan agar dikemudian hari permasalahan terkait lingkungan seperti penambangan liar,

pencemaran, persampahan dan penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir. Aktivitas penambangan liar di Kabupaten Kayong Utara saat ini mulai marak, hal tersebut harus ditindak tegas mulai saat ini dikarenakan kerusakan lingkungan dapat berawal dari ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penambangan liar tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat kebijakan yang kuat, penerapan yang konsisten dan pengawasan dari seluruh lapisan dalam menjaga kelestarian lingkungan Kayong Utara.

Persampahan memang belum menjadi fokus utama bagi pemerintah saat ini, namun dengan seiringnya pertumbuhan penduduk khususnya wilayah perkotaan harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mulai memikirkan bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan tepat.

4.2.4.5. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik, yakni lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Oleh karena itu, dalam mendukung terwujudnya kualitas pelayanan yang baik, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang berfokus kepada kelembagaan dan aparatur dengan memegang prinsip *good governance*.

Peningkatan kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam melayani, berpegang teguh pada prinsip *good governance* dapat menjadikan birokrat lebih akuntabel dan transparansi sehingga tercapainya kualitas dokumen perencanaan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kinerja aparatur. Kemudian perlu ketegasan terhadap produk hukum dan

meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan kinerja birokrasi berbasis teknologi (*e-governance*).

Selain itu, permasalahan utama di bidang pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara adalah pengelolaan data dan pengelolaan kearsipan. Kedua hal tersebut merupakan perihal yang sangat vital bagi pelaksanaan roda pemerintahan. Setiap kebijakan yang akan dirumuskan dapat dipastikan didasarkan pada kondisi nyata daerah yang ada di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan data dan kearsipannya.

Bab V



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab V ini disajikan Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 – 2023. Dari Visi dan Misi yang merupakan janji kerja Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta menjadi dasar dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2023. Sedangkan tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi serta capaian pembangunan selama lima tahun kedepan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil bupati . Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan , maksudnya sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam Jangka Waktu tertentu harus terukur dan kuantitatif. Harapannya dengan ditetapkannya Sasaran maka proses kegiatan untuk mencapai tujuan dapat berlangsung efektif, fokus dan efisien.

5.1 VISI

Visi kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten KayongUtara periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang, Sejahtera dan Aman”

Penjabaran filosofi pembangunan Kabupaten Kayong utara tahun 2019-2023, sebagaimana tertuang pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Visi

VISI : “Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang, Sejahtera dan Aman”		
NO	FILOSOFI VISI	PENJELASAN VISI
1	“Beriman” (Misi 1)	Bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai religious dan kearifan local untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani
2	“Berbudaya” (Misi 1)	Bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan dengan menjunjung tinggi budaya nasional dan kearifan local melalui pemberdayaan pada kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan
3	“Berdaya saing” (Misi 2)	Bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing daerah agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang
4	“Seimbang” (Misi 5)	Bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan dengan memutamakan kesimbangan dan keserasian tat ruang dan wilayah yang berwawasan lingkungan
5	“Sejahtera” (Misi 3)	Bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan transportasi dan infrastruktur yang merata
6	“Aman” (Misi 4)	Bermakna bahwa Pembangunan Kayong utara dilaksanakan dalam upaya menjaga kondusifitas keamanan wilayah dengan menrapkan prinsip-prinsip <i>good</i> dan <i>clean</i> governance serta ketaatan hokum dan perundang undangan

5.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Kayong utara, maka ditetapkan misi Kabupaten Kayong utara 2019-2023 sebagaimana tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Perumusan Penjelasan Misi

VISI : “Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang, Sejahtera dan Aman”		
NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif	Bermakna pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan terhadap perempuan dan generasi muda.
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD	Bermakna meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat yaitu hasil usaha masyarakat mampu bersaing, dan meningkatkan daya beli masyarakat, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran
3	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan konektivitas sarana dan prasarana dasar moda transportasi serta pembangunan infrastruktur yang merata terutama didaerah yang masih termarginalkan untuk membuka terisolirnya masyarakat.
4	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan hukum dan perundang undangan	Melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip <i>good</i> dan <i>clean</i> governance serta terwujudnya ketaatan hokum masyarakat terhadap hokum dan perundang-undangan
5	Mewujudkan tata ruang dan wilayah yg seimbang serasi dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau melalui tata ruang dan wilayah yang seimbang dan serasi

5.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kayong Utara Tahun 2008 - 2025

Pada umumnya Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi Jangka Menengah merupakan

bentuk dari suatu visi antara menuju jangka panjang. Misi yang diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Kayong Utara adalah **“Kabupaten Kayong Utara Mandiri dan Sejahtera tahun 2025”** diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu **“Kayong Utara Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang, Sejahtera dan Aman”**

Misi 1 Jangka Panjang *“Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan produksi pertanian, perikanan, kelautan, dan perkebunan serta pengolahan hasil akhir produk, dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat”*.

Diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 2 *“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD”*.

Misi 2 jangka panjang *“Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK”* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 1 : *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif”*

Misi 3 jangka panjang *“Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai untuk membuka kawasan terisolir dan tertinggal sekaligus untuk mengembangkan kegiatan investasi”* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3 : *“Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat”*

Misi 4 jangka panjang *“Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan menjaga fungsi lingkungan hidup*

secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” diwujudkan melalui misi 5 jangka menengah “Mewujudkan tata ruang dan wilayah yg seimbang serasi dan berwawasan lingkungan”

Misi 5 jangka panjang *“Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, penataan ruang dan pertanahan, dan percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin”* diwujudkan melalui misi 1 jangka menengah *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif “*

Misi 6 jangka panjang *“Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan religius, serta memiliki kultur produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa, dan agama”. ”* diwujudkan melalui misi 1 jangka menengah *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif “*

Misi 7 jangka panjang *“Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik”,* diwujudkan melalui misi 4 jangka menengah *“Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan hukum dan perundang undangan” .*

Misi 8 jangka panjang *“Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas sosial dan politik dalam masyarakat. diwujudkan melalui misi 4 jangka menengah “Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan hukum dan perundang undangan” .*

5.4. Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2023 dengann Visi Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Provinsi Kalimantan Barat, Visi Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah “*Kalimantan Barat Bersatu dan Maju*” Proses pencapaian visi tersebut dilakukan melalui pentahapan lima tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini Dokumen RPJMD 2018 – 2023 merupakan tahapan kesatu dengann Visi “*Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan* “ Dokumen RPJMD ini telah ditetapkan dalam bentuk Perda No 1 tahun 2019.

Visi Pembangunan Kabupaten Kayong Utara lima tahun mendatang 2019 – 2023 **Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang, Sejahtera dan Aman** “ selaras dengan Visi RPJMD Provinsi 2018 – 2023 Kalimantan Barat yang bertujuan Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya

Berikut ini hubungan antara Misi RPJMD Kabupaten kayong Utara tahun 2019 – 2023 dengan Misi dan Prioritas dalam agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3. Hubungan antara Misi RPJMD kabupaten Kayong Utara 2019 – 2023 dengan RPJMD Prov. Kalbar 2018 – 2023 serta RPJMN 2015-2019

Misi RPJMD 2019 - 2024 KKU	Misi RPJM 2018 – 2023 Prov. Kalbar	Misi RPJMN 2015 - 2019
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia,	Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Misi 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif		Misi 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD	Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera	Misi1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	Misi 1: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur	Misi 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan hukum dan perundang undangan	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance. Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang tertib	Misi 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
Mewujudkan tata ruang dan wilayah yg seimbang serasi dan berwawasan lingkungan	Misi 6: Mewujudkan pembangunan lingkungan berwawasan	Misi 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

5.5.TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Kayong utara, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Kayong utara selama kurun waktu jangka menengah lima tahun yang ingin dicapai sebagai berikut:

Misi Pertama : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif” .

Tujuan pertama : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani

Indikator Tujuan : IPM

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan berakhlak mulia serta berbudaya santun.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan
3. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pemuda yang berdaya saing, inovatif dan meningkatnya kesetaraan gender pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
5. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk.

Misi Kedua : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD”

Tujuan Pertama : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing untuk seluruh masyarakat.

Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran :

1. Meningkatnya kekayaan ekonomi
2. Meningkatnya kontribusi kelompok usaha pertanian terhadap PDRB
3. Meningkatnya kontribusi sektor usaha perdagangan terhadap PDRB
4. Meningkatnya kontribusi sektor usaha pariwisata terhadap PDRB

Indikator Tujuan : Indeks Gini

Sasaran :

1. Terkendalinya inflasi
2. Peningkatan usaha mikro yang berkualitas
3. Meningkatnya nilai investasi
4. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat

Indikator Tujuan : Angka Pengangguran

Sasaran : Meningkatnya kreatifitas dan kemandirian masyarakat sebagai kelompok usaha.

Misi Ketiga : yaitu “Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat”

Tujuan Pertama : Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi dan pembangunan infrastruktur untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan

Indikator Tujuan : Indeks Infrastruktur

Sasaran :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana dasar transportasi

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
3. Meningkatnya ketersediaan serta kecukupan listrik
4. Meningkatnya ketersediaanya air bersih

Indikator Tujuan : Angka Kemiskinan

Sasaran : Berdayanya masyarakat yang termaginalkan dalam kehidupan

Misi Keempat : “Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan hukum dan perundang undangan”,

Tujuan Pertama : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan : Indeks reformasi Birokrasi

Sasaran :

1. Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah
4. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah
5. Optimalnya Pendapatan Asli Daerah
6. Meningkatnya kualitas ASN Kabupaten Kayong Utara

Misi Kelima “Mewujudkan tata ruang dan wilayah yg seimbang serasi dan berwawasan lingkungan”

Tujuan Pertama : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui tata ruang yang seimbang dan serasi.

Indikator Tujuan : Indeks kualitas lingkungan Hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Air, udara dan tanah
2. Meningkatnya tata kelola ruang nyaman, serasi dan seimbang

5.6 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam table 5.4 dibawah ini:

Tabel 5. 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Serta Target Capaian Pembangunan Daerah

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani	IPM			Angka	61.52	62.89	63.62	64.40	65.07	65.78	66.5
				1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Index Pendidikan	Angka	0,52	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,60
				2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Index Kesehatan	Angka	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74
				3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Index pengeluaran	Angka	Angka	0,62	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65
				4. Meningkatnya kualitas Pemuda yang berdaya saing, inovatif,	Prestase pemuda Berprestasi	Persen	5	5	5	6	6	6	6
				5. Meningkatnya Kesetaraan gender	Index Pembangunan gender	Angka	85,14	85,28	85,38	85,48	85,59	85,69	85,69

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing untuk seluruh masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi			Persen	5,47	5,47	5,48	5,49	5,53	5,65	5,65
			Index Gini			Angka	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
				1. Meningkatkan kekayaan ekonomi Daerah	Nilai PDRB ADHB	Miliar Rupiah	3.498	4.198	4.547	4.897	5.247	5.597	5.597
					Persentase Porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Persen	1,6	2,2	2,4	3,1	3,6	4,0	4,0

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2019	2020	2021	2022	2023	
				2. Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasin (PMDN)	Rp Juta	5.935	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200	8.200
				3. Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka	TPT	5,0	4,7	4,5	4,3	4	3,7	3,7	3,7
				4. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Persentase kejadian konflik	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi pembangunan infrastruktur untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik			Persen	30,73	38.77	44.30	52.40	63.10	72.81	72.81

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2019	2020	2021	2022	2023	
				Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi dalam kondisi baik	Persen	44,76	50,09	55,93	58,47	65,70	69,28	69,28
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	16,67	27,45	32,67	46,33	60,50	76,33	76,33
			Angka Kemiskinan			Persen	9,89	9,6	9,5	9,4	9,3	9,3	9,3
				Berdayanya masyarakat yang termarginalkan dalam kehidupan	Persentase PMKS yang ditangani	Persen	3,11	6,22	9,33	12,44	15,55	18,66	18,66
				Meningkatnya Ketahanan Bencana	Persentase penanganan korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan hukum dan perundang undangan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi			Angka	N/A	44.50	44.90	45.40	45.90	46.40	
				Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang Baik	Nilai IKM	Persen	79.27	84.07	85.27	86.47	87.67	88.87	88.87
					Predikat SAKIP	Angka	CC	CC	CC	CC	B	B	B
					Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5
					Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 1	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5
					Persentase kesesuaian dokumen perencanaan	Persen	78	100	100	100	100	100	100
					Persentase Penegakkan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2019	2020	2021	2022	2023	
					Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Huruf	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
					Tingkat Kematangan Organisasi	Persen	93.1	93.1	100	100	100	100	100
					Persentase Penerapan SOP	Persen	33.6	37.93	44.83	51.72	58.62	65.52	65.52
					Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	59.63	60	65	70	75	80	80
					Tingkat Kepatuhan ASN	Persen	93.53	95	97	98	99	100	100
5	Mewujudkan tata ruang dan wilayah yg seimbang serasi dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui tata ruang yang seimbang dan serasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Angka		65	65.5	66	66.5	67	67
				1Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas air (IKA BMAS Kelas 2)	Angka	1.93	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
					Indeks Kualitas udara (IKU PMIO)	Angka	22	<50	<50	<50	<50	<50	<50

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2019	2020	2021	2022	2023	
				2.Meningkatnya tata kelola ruang nyaman, serasi dan seimbang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	%	N/A	35%	38%	40%	45%	50%	50%



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dapat tercapai apabila perumusan Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah-nya dilakukan secara tepat. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Sedangkan rumusan Arah Kebijakan merasionalkan pilihan Strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan

pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, Arah Kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

6.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan Arah Kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Kayong Utara dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun strategi yang digunakan untuk menjalankan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 dirumuskan pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kayong Utara

VISI: Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang, Sejahtera dan Aman					
MISI 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang beraya saing dan inovatif					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
T. 1	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani	S.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	ST. 1	Peningkatan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan
		S.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	ST. 2	Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan
		S.3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	ST. 3	Peningkatan daya beli masyarakat
		S.4	Meningkatnya kualitas Pemuda yang berdaya saing, inovatif,	ST. 4	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
		S.5	Meningkatnya Kesetaraan gender	ST. 5	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga unggulan

MISI 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktivitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD					
T.2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing untuk seluruh masyarakat	S.6	Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah	ST. 6	Peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha pertanian dan perikanan
				ST. 7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		S.7	Meningkatnya nilai investasi	ST. 8	Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi
		S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	ST. 9	Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja
		S.9	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	ST. 10	Peningkatan keamanan dan ketertiban agar dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat
MISI 3: Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat					
T.3	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi dan pembangunan infrastruktur untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	S.10	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	ST. 11	Peningkatan konektivitas daerah tertinggal, terpencil dan terluar yang terjangkau melalui transportasi
		S.11	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	ST. 12	Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan dan saluran irigasi
				ST. 13	Memfasilitasi dan Mendorong Pembangunan Bandar Udara
		S.12	Berdayanya masyarakat yang termarginalkan dalam kehidupan	ST. 14	Peningkatan kualitas hidup PMKS dan pengentasan masyarakat miskin secara terpadu
		S.13	Meningkatnya ketahanan Bencana	ST.15	Peningkatan Sumber Daya dalam penanganan bencana
MISI 4: Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan hukum dan perundang undangan					
T.4	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip <i>good</i> dan <i>clean governance</i> melalui reformasi birokrasi	S.14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	ST. 16	Peningkatan kapasitas individu dan system yg terintegrasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
				ST. 17	Peningkatan kapasitas individu dan system yg terintegrasi sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah
				ST. 18	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah sesuai standar pelayanan prima
				ST. 19	Peningkatan kapasitas individu dan system terintegrasi dalam menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan
				ST. 20	Peningkatan kesadaran masyarakat agar taat pada hukum dan peundang-undangan

MISI 5: Mewujudkan tata ruang dan wilayah yang seimbang serasi dan berwawasan lingkungan					
T. 5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui tata ruang yang seimbang dan serasi	S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan	ST.21	Peningkatan kualitas air dan tutupan lahan melalui kemitraan dengan berbagai pihak
				ST.22	Peningkatan kualitas udara melalui kemitraan dengan berbagai pihak
		S.16	Meningkatnya tata kelola ruang nyaman, serasi dan seimbang	ST.23	Peningkatan ruang terbuka hijau secara berkesinambungan

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selain itu, Arah Kebijakan mengarahkan rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun periode RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023. Arah Kebijakan akan mengarahkan dan merasionalkan pilihan-pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaan dan penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama lima tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kayong Utara

Sasaran Pembangunan	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
S10. T3.1	Peningkatan konektivitas daerah tertinggal, terpinggirkan dan terluar yang terjangkau melalui transportasi darat dan air				
S.11 T3.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan dan saluran irigasi				
S.12 T3.1	Peningkatan kualitas hidup PMKS dan pengentasan masyarakat miskin secara terpadu				

<p>S.1-3 T1.1</p> <p>S.4-5 T1.1</p>	<p>Peningkatan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan</p> <p>Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan</p> <p>Peningkatan daya beli masyarakat</p>				
<p>S14.1 T4.1</p>		<p>Peningkatan kapasitas individu dan system yg terintegrasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>Peningkatan kapasitas individu dan system yg terintegrasi sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah</p> <p>Peningkatan kapasitas individu dan system terintegrasi dalam menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan</p>		<p>Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah sesuai standar pelayanan prima</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat agar taat pada hukum dan peundang-undangan</p>	
<p>S15-16 T5.1</p>				<p>Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan melalui kemitraan dengan</p> <p>Peningkatan ruang terbuka hijau secara berkesinambungan</p>	

Dari Tabel 6.2. di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Adapun arah kebijakan pada tiga tahun berturut-turut 2019, 2020 dan 2021 adalah meliputi; Peningkatan konektivitas daerah tertinggal, terpencil dan terluar yang dijangkau melalui transportasi darat dan air; Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan dan saluran irigasi; Peningkatan kualitas hidup PMKS dan pengentasan masyarakat miskin secara terpadu; Peningkatan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan; Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan; Peningkatan daya beli masyarakat; Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan Peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha pertanian dan perikanan.

Sedangkan Pengembangan potensi pariwisata terpadu akan diutamakan mulai Tahun 2020 s/d 2023. Pada Tahun 2019 dan 2020, Arah Kebijakan juga ditujukan pada peningkatan kapasitas individu dan system yg terintegrasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Peningkatan kapasitas individu dan system yg terintegrasi sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah; Peningkatan kapasitas individu dan system terintegrasi dalam menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya, pada Tahun 2020 s/d 2023 Arah Kebijakan adalah pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja; Peningkatan keamanan dan ketertiban agar dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat; Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah sesuai standar pelayanan prima. Pada dua tahun terakhir periode ini; yaitu Tahun 2022 dan 2023, Arah Kebijakan diletakkan pada; Peningkatan kesadaran masyarakat agar taat pada hukum dan peundang-undangan; Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan melalui kemitraan dengan berbagai pihak; dan Peningkatan ruang terbuka hijau secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan Arah Kebijakan yang akan menjadi landasan penentuan tematik RKPD tahunan, maka program-program prioritas akan diberikan bobot yang lebih sesuai dengan tematik tahunannya agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun

penentuan Program Prioritas sebagaimana Table 6.3 dibawah ini merupakan program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatifnya.

6.3. Program Pembangunan

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing Strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif																
Tujuan:																
T.1	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani	Indeks Pembangunan Manusia	61.52	62.89		63.62		64.40		65.07		65.78				
Sasaran:																
S.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0.52	0.55		0.56		0.57		0.58		0.60				
Program:																
	P.1 Program Pendidikan Dasar	APK SD	120.10%	100%	21,464,469,200	100%	22,001,080,930.00	100%	22,551,107,953.25	100%	23,114,885,652.08	100%	23,692,757,793.38	100%	24,285,076,738.22	DINAS PENDIDIKAN
		APK SMP	110.78%	100%		100%		100%		100%		100%				
		APM SD	99.98%	100%		100%		100%		100%		100%				
		APM SMP	82.72%	85.23%		87.74%		90.25%		92.76%		95.27%				
		Angka Kelulusan SD	99.02%	100%		100%		100%		100%		100%				
		Angka Kelulusan SMP	99.06%	100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase satuan pendidikan Dasar terakreditasi A	5.63%	16%		25.63%		36%		45.63%		56%				
	P.2 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal terakreditasi C	35%	45%	4,833,595,500.00	55%	5,316,955,050.00	65%	5,848,650,555.00	75%	6,433,515,610.50	85%	7,076,867,171.55	60%	5,307,650,378.66	
Saran:																
S.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.73	0.73	10,905,777,000.00	0.73	10,905,777,000.00	0.74	10,905,777,000.00	0.74	10,905,777,000.00	0.74	10,905,777,000.00	0.74	10,905,777,000.00	
Program:																
	1. Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah desa siaga aktif yang dibina	43 Desa	43 Desa	2.815.096.000	43 Desa	2.815.096.000	43 Desa	3.311.096.600	43 Desa	3.848.096.000	43 Desa	3.483.096.000	43 Desa	13.457.384.600	
		Jumlah Kecamatan Bebas Rawan Gizi	6 Kec	6 Kec		6 Kec		6 Kec		6 Kec		6 Kec				

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan anak dan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes	70,1	82		85		88		90		92		92		
		Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)	53,94	102		102		102		102		102		102		
		Angka kematian Bayi (Per 1.000 KH)	15,10	12		10		8		8		8		8		
S.3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran (Daya Beli)	0,61	0,62		0,63		0,64		0,64		0,65		0,65		
Program		Persentase Koperasi yang dilakukan pelatihan manajemen koperasi	0,8	0,85		-				0,9		0,95		1		
		Jumlah Pelaku UKM yang membentuk koperasi	10kop	-	60,238,500	10kop	55,000,000	10 kop	120,500,000	10 kop	221,550,000	10 kop	411,410,000	40 kop	411,410,000	
		Persentase UKM yang dilakukan pelatihan manajemen UKM	0,85	-		-		0,85		0,9		0,95		1		
	Program Perindustrian	Jumlah Ikm yang telah dilakukan fasilitasi perijinan (5/tahun)	6	10	50,200,000	11		12		14		15		62		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah IKM yang diberikan Bantuan Sarana Prasarana, target 5/tahun	-	-	-	3	73.358.000	5	73.358.000	6	86.829.000	7	95.511.000	21	329.056.000	
		Jumlah IKM yang telah diberikan peningkatan kualitas kemasan	4	5	19,960,000	10		15		20		25		75		
S.5	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	85,14	85,28		85,38		85,48		85,59		85,69				
Program	Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio kesetaraan Gender														DINAS SP3APMD
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan				1.301.344.450		1.301.344.450		1.301.344.450		1.301.344.450		5.205.377.800		

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu															
S.4	Meningkatnya Kualitas Pemuda yang berdaya saing dan inovatif	Persentase prestasi pemuda dan olahraga	n/a	5%		5%		6%		6%		7%					
Program	Program Kepemudaan	jumlah pemuda yang di fasilitasi (204 orang)		204	910.510.000	204	754.510.000	204	800.300.000	204	852.200.000	204	852.200.000	204	3.259.210.000	DINAS PORAPAR	
	Program Keolahragaan	jumlah bibit olahragawan	12	14	1.395.622.000	16	1.146.022.000	18	1.206.022.000	20	1.251.022.000	22	1.251.022.000	22	4.854.088.000		
		Jumlah Cabang olahraga Prioritas yang dikembangkan (cabang olahraga)	1	2		3		4		5		6					
Jumlah cabang olahraga yang di evenkan dalam satu tahun (cabang olahraga)	4	5	6	7		8		9		6							
Misi II	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD																
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing untuk seluruh masyarakat	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5.47	5.47		5.48		5.49		5.53		5.65					
S.6	Meningkatnya Kekayaan Ekonomi Daerah	Indeks Gini	n/a	0.33		0.32		0.3		0.28		0.25					
		Nilai PDRB															
		Atas dasar harga berlaku	3498	4198		4547		4897		5247		5597					
		Atas dasar harga konstan	2303	2533		2648		2764		2879		2994					
Program	PROGRAM TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1. Produksi Tanaman Pangan Utama Masyarakat (padi)	52,636	52,768	659,891,000	52,900	725,880,100	53,032	798,468,110	53,164	878,314,921	53,297	966,146,413	53,297	4,028,700,544	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		2. Produksi Hortikultura (Buah-buahan)	13,385	13,418		13,452		13,485		13,519		13,553					
		3. Pembentukan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil TPH	26	3		3		3		3		41					
Program	PROGRAM PERKEBUNAN	1. Produksi Tanaman Perkebunan	59,818	60,715	287,585,200	61,626		62,550	947,978,092	63,489	982,755,901	64,441	1.021.053.491	64,441	3.868.151.204		

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2. Pembentukan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan	5	1		1		1		1		1		10		
	PROGRAM PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1. Produksi Daging	925.26	942.00	130,959,050	959	1.044.054.955	976	1.058.460.451	994	1.091.737.145	1.012	1.091.737.145	1012	4.268.559.047	
		2. Produksi Telur	185	186		187		188		189		190		190		
		3. Pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosis	168	151		136		123		110		99		99		
		4. Pembentukan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	17	3		3		3		3		3		32		
	PROGRAM PENYULUHAN	1. Jumlah Kelas Kelompok Tani tingkat "Lanjut" (Poktan)	159	25	690,202,900	25	695,202,900	25	700,202,900	25	705,202,900	25	710,202,900	284	2.810.811.600	
		2. Persentase Tenaga Penyuluh yang dilatih (%)	10	15		15		20		20		100		100		
		3. Persentase akurasi data base kelompok tani dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (%)	82	85		87		90		95		100		100		
	PROGRAM PRASARANA, SARANA DAN PERTANIAN	1. Penyediaan prasarana pengelolaan lahan dan air (Unit)	71	10	3,392,897,800	11	3,732,187,580	12	4,105,406,338	13	4,515,946,972	14	4,967,541,669	131	17,321,082,559	
		2. Penyediaan alat mesin pertanian (Unit)	0	2		3		4		5		6		20		
		3. Penyediaan pupuk (Ton)	0	5		10		15		20		25		75		
	PROGRAM KETAHANAN PANGAN	1. Konsumsi Beras Per kapita/tahun	87.12	86.25	287,585,200	85.39	616,343,720	84.53	647,978,092	83.69	682,775,901	82.85	721,053,491	82.85	2,668,151,204	
		2. Persentase ketersediaan pangan utama masyarakat (padi)	149.2	149.9		150.7		151.4		152.2		153.0		153		
		3. Jumlah keragaman konsumsi jenis pangan lokal	5	1		1		1		1		1		10		
	Program Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (Ton)	35812.30 (ton)	35,812.30	688,000,000	36,062.30	678,000,000	36,312.30	638,000,000	36,562.30	638,000,000	36,812.30	638,000,000	36,812.30	2,592,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (Ton)	385.90 (ton)	385.9	739,664,000	405.9	1,110,000,000	425.9	1,115,000,000	445.9	1,315,000,000	465.9	1,114,664,000	465.9	4,654,664,000	
	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pemberdayaan ikan	1. Jumlah unit lembaga usaha kelautan dan perikanan yang berkembang dan mandiri (Kelompok)	4	2	492,000,000	2	382,000,000	2	362,000,000	2	382,000,000	2	462,000,000	14	1,588,000,000	
		2. Jumlah kelompok nelayan yang terampil/ mandiri (Kelompok)	9	4		4		4		4		28				
		3. Jumlah kelompok pemula (Kelompok)	179	5		5		5		5		204				

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
S.6	Meningkatnya Kekayaan Ekonomi Daerah	Persentase Porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	4.6	2.2		2.4		2.6		3.1		3.6					BAKEUDA	
Program	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1: Persentase kenaikan penerimaan dari pajak daerah		47,113	847,923,000	47119	704,991,000	47119	790,041,000	47119	850,739,600	47119	905,342,000	235,589	3,251,113,600			
		Persentase porsi PAD terhadap target PAD																
		Persentase realisasi PAD terhadap target PAD																
		Persentase kontribusi Pariwisata thdp PAD																
Program	Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sarana Prasarana wisata dalam kondisi baik (80,80,80,80) (paket)	30	40	3,000,000,000.00	70	2,000,000,000	80	2,100,000,000	80	2,725,000,000	100	3,000,000,000.00		9,825,000,000		DINAS PORAPAR	
		Fasilitas even pariwisata (DAU)	1	2	50,000,000.00	3		3		3		4						
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang telah dilakukan pembinaan (20%, 40%, 60%, 80%) (DAK)	33	33	25,000,000.00	53		66		80		100						
		Cakupan pembinaan dan pembentukan Kelompok sadar wisata (even)	2	5	30,000,000.00	10		15		20		25						
S.7	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (PMDN) (Rp.000.000)	5935	7500		7600		7800		8000		8200						
Program	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Modal (Indikator: Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-71,73%	5%	74,703,500	6%	310,110,500	7%	320,708,000	8%	350,785,000	9%	350,708,000	0.07	1,332,311,500		DINAS PMPTSP	
S.8	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	5	4.7		4.5		4.3		4		3.7						
Program	Program Ketenagakerjaan	Menurunnya angka pengangguran		3.85		3.3		2.95		2.5		2		2			DINAS TRANSMIGRASI	
		Peningkatan tenaga kerja yang terlatih		59	996,619,800	68	810,000,000	70	850,000,000	74	850,000,000	78	850,000,000	78	3,360,000,000			
		Menurunnya angka perselisihan hubungan industrial		12		15		18		20		20		85				

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
S.9	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Persentase kejadian konflik yang diselesaikan	n/a	100		100		100		100		100		100			
Program	Program wawasan kebangsaan dan Fasilitasi Parpol dan Ormas	Persentase peningkatan peserta wawasan kebangsaan (%)	99.9	75	55,450,000	75.5	690,995,000	75.5	697,094,500	75.5	703,303,950	75.5	720,302,781	75.5	2,811,696,231	KESBANGPOL	
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	75	75.5		75.5		75.2		75.5							
S.13	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Persentase Penanganan Program bencana	100	100		100		100		100		100		100			BPBD
Program	Program Pencegahan & Penanggulangan Bencana	Persentase kegiatan penyebaran informasi potensi bencana yang terlaksana 100% dari 2019-2023 (%)	100	100		100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	1,400,000,000		
		Jumlah Masyarakat perwakilan desa yang dilakukan pembinaan potensi bencana (Desa)	4	4	4	5		6		7							
		persentase kejadian bencana yang tertangani (%)	100	100	100	100		100		100							
		Persentase korban bencana yang diberikan bantuan (%)	100	100	100	100		100		100							
MISI III	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat																
Tujuan III	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi dan pembangunan infrastruktur untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	Angka Kemiskinan	9.89	9.7		9.6		9.5		9.4		9.3					
S.10	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi dalam Kondisi Baik	30.72	38.77		44.30		52.40		63.10		72.81		72.81			
Program	Program Prasarana dan Keselamatan	Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik (%)	43,69% (data tahun 2017)	46	1,437,068,562.00	49	5,985,000,000.00	52	2,285,000,000.00	55	3,085,000,000.00	58	3,035,000,000.00	58	14,390,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase sarana transportasi dalam kondisi baik (%)	45,83% (data tahun 2017)	54.17		62.85		64.93		76.39		80.56					

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Jumlah Kajian Transportasi yang dihasilkan (Dok)	32 dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		15 Dokumen	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Koordinasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan (Bandar Udara Baru)	n/a	3		3		3		3		3		3		3	Dinas Perhubungan
S.11	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase insfrastuktur dalam kondisi baik	44.76	50.09		55.93		58.47		65.70		69.28		69.28			
Program	Program Pembangunan Infrastruktur SDA untuk mendukung pertanian, pengendalian banjir dan penyediaan air baku	Peningkatan luasan areal pertanian terlayani jaringan irigasi (%)		20		35		45		57		77		77		21,350,505,040	DINAS PUPR
		Meningkatnya jumlah sarana air baku (satuannya titik) (unit)		2	105,268,751,000	1	5,283,488,520	2	5,283,486,520	1	5,238,530,520	1	5,545,000,000	7			
	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)		20	45,099,519,500	41	45,885,685,000	53	46,814,393,000	64	45,193,654,315	81	45,741,000,000	81	183,635,132,315		
		Peningkatan jumlah jembatan (%)		15		30		45		60		75					
	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan peningkatan keciptakaryaan untuk menunjang masyarakat	Presentase penanganan sampah (%)		10		22		36		52		67		67		121,320,862,970	
		Presentase rumah tangga pengguna air bersih (%)		15	7,515,891,042	33	30,637,400,000	45	30,260,762,970	58	30,211,350,000	78	30,211,350,000	78			
	Persentase panjang jalan lingkungan/ pedesaan dalam kondisi baik (%)		15		15		15		15		15		15				
S.12	Berdayanya Masyarakat yang termaginalkan dalam kehidupan	Persentase PMKS yang tertangani	3.11	6.22		9.33		12.44		15.55		18.66		18.66			
program	Program pelayanan PMKS	Angka PMKS Prioritas yang ditangani		50		50		50		50		50		250			DINAS SP3APMD
MISI IV Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan hukum dan perundang undangan																	
Tujuan	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance melalui reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	cc (50-64)		B (65-69)		BB (70-75)		BB (76-79)		B (80-90)					
S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Predikat SAKIP	cc	cc		cc		cc		B		B					
Program	Program Bagian	Prosentase Pengelolaan		100		100		100		100		100		12,775,275,964			SETDA

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Umum dan Keuangan	Keuangan sesuai Aturan (%)			12,049,442,780		12,116,383,259		12,325,391,512		12,544,850,178						
		Prosentase Pengelolaan Aset Setda sesuai Aturan (%)		100		100		100		100		100					
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pimpinan (%)		100		100		100		100		100					
	Program Bagian Aparatur Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)		100	5,890,711,605	100	5,122,101,550	100	5,330,101,550	100	5,566,601,550	100	5,760,601,550			21,779,406,200	
		Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian (%)		100		100		100		100		100					
	Program Bagian Organisasi	Prosentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran (%)		60	870,226,500	70	1,113,000,000	80	1,319,000,000	90	1,073,000,000	100	1,130,000,000			4,635,000,000	
		Prosentase Jabatan dan Beban Kerja yang teranalisis (%)		80		90		100		100		100					
		Prosentase Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai pelayanan baik (%)		30		40		50		80		100					
	Program Bagian Hukum dan HAM	Prosentase Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)		100	1,227,704,224	100	1,315,474,646	100	1,477,022,111	100	1,554,724,322	100	1,750,196,754			6,097,417,833	
		Prosentase Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat (%)		100		100		100		100		100					
	Program Bagian Pemerintahan	Peringkat LPPD (peringkat)		13	1,289,900,000	12	1,240,562,600	10	1,264,885,800	9	1,247,074,944	8	1,242,500,833			4,995,024,177	
	Program bagian Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kegiatan di bidang Kesra (%)		100	14,739,727,000	100	15,203,802,000	100	15,283,469,000	100	15,640,452,000	100	16,719,144,000			61,846,867,000	
	Program bagian Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi (%)		93	701,982,000	97	1,010,487,200	97.5	1,112,842,920	97.9	1,216,563,012	99.5	1,373,391,313			4,713,284,445	
	Program Bagian Humas dan Keprotokolan	Prosentase kepuasan terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan (%)		100	1,136,263,620	100	1,136,263,620	100	1,136,263,620	100	1,136,263,620	100	1,136,263,620			4,545,054,480	
	Program Bagian Layanan Pengadaan	Prosentase Pengadaan Barang Jasa selesai tepat waktu dan efisien (%)		95	1,295,200,024	95	1,120,000,000	95	1,235,000,000	95	1,240,000,000	95	1,238,000,000			4,833,000,000	
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik															
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 5					
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 1	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 5					
	Program	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan indikasi tindak pidana korupsi yang material	70	75	2.946.635.000,00	80	3.280.350.000,00	85	3.339.100.000,00	90	3.317.850.000,00	95	3.400.850.000,00	425	13.338.150.000,00	INSPEKTORAT

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase OPD yang telah mengimplemetasikan SPIP pada level berkembang	20	40		60		80		90		100		100		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah di tindaklanjuti	54,48	60		70		80		90		95		95		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah di tindaklanjuti	64,92	60		75		85		95		95		95		
		Porsentase OPD yang tertib administrasi barang/ aset daerah	60	75		85		90		95		95		95		
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi.	50	60	247.500.000,00	70	380.000.000,00	80	420.000.000,00	90	485.000.000,00	95	503.500.000,00	395	1.788.500.000,00	
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatnya level kapabilitas APIP	2 (level)	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	100.000.000,00	
S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Nilai Opini BPK terhadap LKPD	WDP	WDP		WDP		WDP		WTP		WTP				
Program	Program Asset Daerah	Persentase aset daerah yang terinventarisir		317	7.407.645,000	349	904.685,200	462	1.156.556,100	320	1.120.930,000	262	1.116.005,000	1.710	4.298.175,300	BAKEUDA
	Program Akutansi Daerah	Peningkatan laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar dan tepatan waktu		135	811.930,250	135	703.650,000	135	752.277,570	135	762.945,000	135	850.543,950	675	3.069.416,520	
	Program Anggaran	Persentase ketepatan anggaran dalam RKA terhadap Renja		123	1.332.479,625	152	1.415.171,870	152	1.497.781,084	152	1.530.474,034	152	1.562.974,034	731	6.006.401,022	
	Program Pembendaharaan	persentase ketepatan waktu dalam proses pencairan keuangan daerah		2.411	710.704,800	2423	899.738,600	2423	902.287,375	2423	909.915,643	2423	949.452,425	12.103	3.661.394,043	
S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	79.27	84.07		85.27		86.47		87.67		88.87		88.87		
Program	Program Pelayanan Hukum dan Persidangan	Persentase Kegiatan yang terlaksana (100%) 2020-2023	96,92%	100	Rp 11.065.380.005	100	Rp 12.501.331.505	100	Rp 13.030.617.375	100	Rp 13.406.617,550	100	Rp 13.064.717,300	97,46%	Rp 52.003.283,730	SETWAN

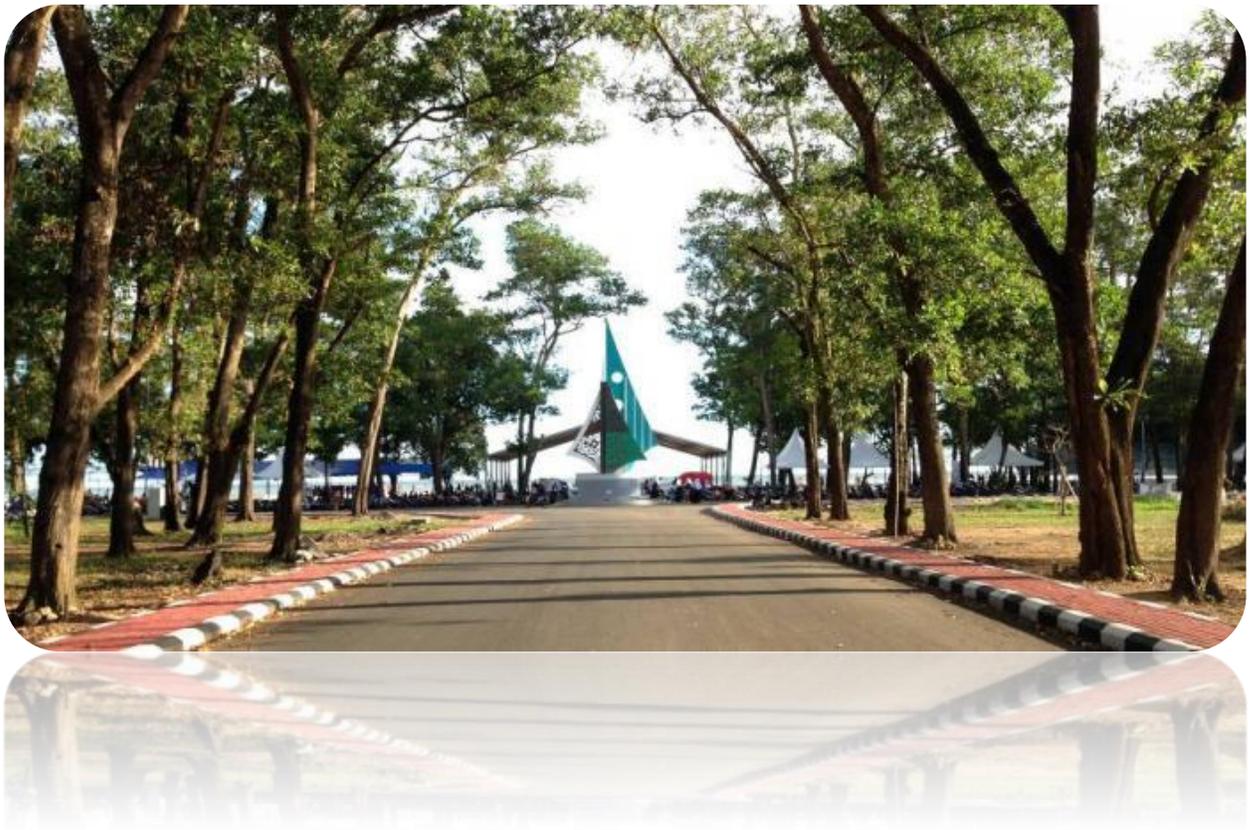
BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	63.7	85	201,000,000	88	255,000,000	91	255,000,000	95	255,000,000	100	255,000,000	80.84	1,020,000,000	DISDUKCAPIL
			Rasio kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 terhadap seluruh penduduk 0-17 (%)	80.26	88		91		95		98		100	85.61			
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	79.27	84.07		85.27		86.47		87.67		88.87	88.87			
	Program	Program Perizinan dan non perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan	71,10	82,74	241,537,850	84,39	315,233,000	86,25	358,746,300	88,15	365,058,245	89,47	393,764,070	81,92	1,423,801,615	DINAS PMPTSP
			Rata rata Lama Proses Perizinan (Dalam Hari)	189	193		200		209		217		226		144		
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	79.27	84.07		85.27		86.47		87.67		88.87	88.87			
	Program	Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Peningkatan intensitas diseminasi informasi (%)		90	1,150,000,000	92	1,100,000,000	94	1,100,000,000	96	1,100,000,000	99	1,100,000,000	99	4,400,000,000	DISKOMINFO
			Program penyelenggaraan e-gov		90	1,038,850,866	92	1,105,008,830	94	1,105,860,471	96	1,157,092,984	99	1,175,068,359	99	4,543,030,608	
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	79.27	84.07		85.27		86.47		87.67		88.87	88.87			
	Program	Program Perpustakaan	Kenaikan jumlah pengunjung	591	2400	334.175.000,00	2600	215.215.000,00	3000	255.215.000,00	3500	255.215.000,00	4200	255.215.000,00	4500	980,680,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARDA
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	79.27	84.07		85.27		86.47		87.67		88.87	88.87			

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program	Program Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Nilai SKM															KECAMATAN
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	79.27	84.07	564,448,000.00	85.27	626,584,000.00	86.47	626,856,000.00	87.67	639,015,200.00	88.87	643,564,000.00	88.87	3,100,467,200.00		
	Program	Program Administrasi Rumah Sakit	Persentase Kegiatan yang dapat terlaksana (%)		80		82	13,500,000,000	83	14,600,000,000	84	15,700,000,000	85	16,800,000,000	85	60,600,000,000		RUMAH SAKIT
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan	78	100		100		100		100		100					
	Program	Program Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan (%)	100	100%	1,366,080,000	100%	1,114,489,500	100%	1,114,489,500	100%	1,795,489,500	100%	1,920,489,500	100%	5,944,958,000		BAPPEDA
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Persentase Penegakkan Perda	100	100		100		100		100		100					
	Program	Program Penyidikan dan Penegakan Perda	Persentase penegakan perda (%)	80	85	214,154,350	85	564,025,000	90	601,737,500	95	607,901,250	100	607,901,250	100	2,381,565,000		SATPOL PP
	S.14	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik	Indeks tanggap bencana Persentase penanganan korban bencana	n/a	100		100		100		100		100					
	MISI V	Mewujudkan tata ruang dan wilayah yang seimbang serasi dan berwawasan lingkungan																
	Tujuan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui tata ruang yang seimbang dan serasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	65		65.5		66		66.5		67					

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
S.15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas air	1,93	≤ 1		≤ 1		≤ 1		≤ 1		≤ 1		≤ 1		
				Indeks Kualitas udara	22	< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		< 50
	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks pencemaran air (IKA BMAS Kelas 2)	1,93	≤ 1	78,796,000	≤ 1	102,800,000	≤ 1	105,390,000	≤ 1	105,390,000	≤ 1	108,109,500 51,000,000	≤ 1	421,689,500	PERKIMLH
		Indeks pencemaran udara (IKU PMIO)	22	< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		< 50		
	Program perlindungan lingkungan hidup	cakupan Pengawasan Amdal	0.75	0.8	112,000,000	0.85	225,000,000	0.9	255,000,000	0.95	285,000,000	1	315,000,000	1	1,080,000,000	
		Cakupan Penegakan hukum lingkungan	1	1		1		1		1		1		1		
Program pengembangan Perumahan Layak Huni	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	19	0,6	2,250,000,000	0,6	1,050,000,000	0,6	1,100,000,000	0,6	1,200,000,000	0,6	1,200,000,000	0,6	4,450,000,000		
S.16	Meningkatnya Tata Kelola Ruang yang nyaman serasi dan seimbang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	N/A	35		38		40		45		50		50		
Program	Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB			1,103,157,000	0,164	1,705,000,000	0,164	1,893,000,000	0,164	1,975,000,000	0,164	2,030,000,000	82	7,603,000,000	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

Berdasarkan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kayong Utara untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sejumlah Rp.3.928.630.632.705,49 atau mengalami pertumbuhan sebesar 1.48 %. Sedangkan untuk belanja daerah dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang berjumlah Rp. 4.027.278.288.454,65 atau mengalami pertumbuhan sebesar 1.08 %. Adapun proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan dalam membiayai program-program pembangunan yang mendukung visi dan misi Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 sampai dengan 2023 berkisar antara Rp. 419.934.887.394,00 sampai dengan Rp. 428.273.218.483,40. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Total	Rata-Rata Pertumbuhan
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	429,387,510,544.11	419,934,887,394.00	419,934,887,394.00	426,050,777,941.63	428,273,218,483.40	2,123,581,281,757.14	(0.06)
	Pendapatan	761,568,978,055.00	774,295,498,003.20	785,876,211,483.58	799,230,270,620.97	807,659,674,542.74	3,928,630,632,705.49	1.48
	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	14,528,674,135.50	22,328,974,215.50	17,467,480,052.28	16,135,725,694.50	15,548,521,369.50	86,009,375,467.28	5.16
	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
II	Belanja	788,735,932,372.39	796,624,472,218.70	803,343,691,535.86	815,365,996,315.47	823,208,196,012.23	4,027,278,288,454.65	1.08
A	Belanja Tidak Langsung	344,710,141,646.39	374,689,584,824.70	381,408,804,141.86	387,315,218,373.84	392,934,977,428.84	1,881,058,726,415.63	3.37
	Belanja Pegawai	232,691,797,680.39	249,592,070,208.10	264,331,054,333.49	268,020,527,373.85	271,971,534,272.91	1,286,606,983,868.74	4.01
	Belanja Hibah	5,914,500,000.00	15,914,500,000.00	5,914,500,000.00	5,914,500,000.00	5,914,500,000.00	39,572,500,000.00	26.56
	Belanja Bantuan Sosial	4,905,672,660.00	5,165,722,660.00	5,443,976,160.00	5,741,707,405.00	6,060,279,837.15	27,317,358,722.15	5.43
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah	814,442,006.00	1,121,668,787.60	1,197,219,794.30	1,441,206,135.30	1,065,905,545.30	5,640,442,268.50	9.70
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan	99,337,729,300.00	100,857,423,169.00	102,422,707,854.07	104,034,951,079.69	105,695,561,602.08	512,348,373,004.84	1.56
	Belanja Tidak terduga	1,046,000,000.00	2,038,200,000.00	2,099,346,000.00	2,162,326,380.00	2,227,196,171.40	9,573,068,551.40	25.96
B	Belanja Langsung	444,025,790,726.00	421,934,887,394.00	421,934,887,394.00	428,050,777,941.63	430,273,218,583.39	2,146,219,562,039.02	(0.75)
	Belanja Pegawai	55,720,947,305.00	53,652,095,700.00	40,652,095,700.00	42,567,095,700.00	43,652,095,700.00	236,244,330,105.00	(5.17)
	Belanja Barang dan Jasa	209,077,832,943.00	188,438,760,345.00	180,456,745,000.00	182,500,900,000.00	183,843,876,500.00	944,318,114,788.00	(3.06)
	Belanja Modal	179,227,010,478.00	179,844,031,349.00	200,826,046,694.00	202,982,782,241.63	202,777,246,383.39	965,657,117,146.02	3.25

7.2. Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Kayong Utara menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Selain mencakup pemenuhan Urusan Konkuren dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya di dukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam tabel 7.2 hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara dan bersifat indikatif.

Tahun 2019 adalah masa transisi penyusunan RPJMD 2019 – 2023 sehingga program perangkat daerah tahun 2019 mengacu kepada RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kayong Utara

Tabel 7.2Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019-2023Kabupaten Kayong Utara

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	3			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar															
Pendidikan															DISDIKBUD
Program Pendidikan Dasar	APK SD	Persen	120.10%	100%	22,001,080,930	100%	22,551,107,953	100%	23,114,885,652	100%	23,692,757,793	100%	91,359,832,328		
	APK SMP	Persen	110.78%	100%		100%		100%		100%		100%			
	APM SD	Persen	99.98%	100%		100%		100%		100%		100%			
	APM SMP	Persen	82.72%	87.74 %		90.25 %		92.76%		95.27 %		95.27 %			
	Angka Kelulusan SD	Persen	99.02%	100%		100%		100%		100%		100%			
	Angka Kelulusan SMP	Persen	99.06%	100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase satuan pendidikan Dasar terakreditasi A	Persen	5.63%	25.63 %		36%		45.63%		56%		56%			
					19,140,413,350		19,618,923,684		20,109,396,776		20,612,131,695		79,480,865,505		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,	Persentase satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal terakreditasi C	Persen	35%	55%	2,316,955,050	65%	2,448,650,555	75%	2,533,515,611	85%	2,676,867,172	60%	9,975,988,388	
Program Ketenagaan	Persentase Peningkatan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pesen	54.28	9	10,905,777,000	9	10,905,777,000	9	10,905,777,000	3	10,905,777,000	93.28	43,623,108,000	
Program Pelayanan Administrasi Pendidikan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	96.52%	100.00%	7,247,028,920	100.00%	7,319,499,209	100%	7,354,632,805	100%	7,354,632,805	100%	29,275,793,739	
Kesehatan														DINKESKB
Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah desa siaga aktif yang dibina	Desa	43 Desa	43 Desa		43 Desa		43 Desa		43 Desa		43 Desa		
	Jumlah Kecamatan Bebas Rawan Gizi	Kecamatan	6 Kec	6 Kec		6 Kec		6 Kec		6 Kec		6 Kec		
	Cakupan anak dan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes	Persen	70,1	85	2,815,096,000		3,311,096,600		3,848,096,000		3,483,096,000		13,457,384,600	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	53,94	102		102		102		102		102		
	Angka kematian Bayi	Per 1.000 KH	15,10	10		8		8		8		8		
Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit)	Menurunnya jumlah kasus Kesakitan morbiditas (kesakitan)	Kasus	90308		1,992,15 2,965		2,022,1 52,965		2,032,1 52,965		2,042, 152,96 5		8,088,6 11,860	
Program Pelayanan Kesehatan (bidang Pelayanan Kesehatan)	Ketersediaan pengadaan obat dan alat kesehatan	Persen	81	87.5		90		92.5		95		95		
	Rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk	Rasio	1 : 15625	1 : 13800	39,125,1 84,000	1 : 13800	39,125, 184,00 0	1 : 12500	39,125, 184,000	1 : 12500	39,125 ,184,0 00	1 : 12500	156,500 ,736,00 0	
	Jumlah Peserta PBI Daerah	Orang	39,159	53594		55149		56748		58394		58394		
	Jumlah Peserta PBI Pusat	Orang	46,057	48057		48057		48057		48057		48057		
	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi madya	Pukesmas	2	5		7		8		10		10		
Program Pelayanan Administrasi	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	96%	100%	10,860,0 00,000	100%	9,543,5 00,000	100%	10,288, 000,000	100%	9,516, 000,00 0	100%	40,207, 500,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Kesehatan														
Program Pelayanan Medik dan Keperawatan	Persentase Kegiatan yang dapat terlaksana	Persen	n/a	100%	5,868,340,900	100%	6,067,674,990	100%	6,170,194,245	100%	6,329,636,738	100%	24,435,846,873	RUMAH SAKIT
Program Administrasi Rumah Sakit	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	n/a	100%	4,943,131,600	100%	5,016,769,760	100%	5,293,546,736	100%	5,242,401,410	100%	20,495,849,506	
Program UPT Puskesmas	Persentase Kegiatan yang dapat terlaksana		80	82%	13,500,000,000	83%	14,600,000,000	84%	15,700,000,000	85%	16,800,000,000	85%	60,600,000,000	UPT
Pekerjaan umum dan penataan ruang													0	PUPR
Program Pembangunan Infrastruktur SDA	Peningkatan luasan areal pertanian terlayani jaringan irigasi	persen	n/a	35	5,283,488,520	45	5,283,486,520	57	5,238,530,000	77	5,545,000,000	77	21,350,505,040	
	Meningkatkannya jumlah sarana air baku (satunya titik)	unit	n/a	1		2		1		1		6		
					27,946,473,882		27,946,473,480		25,946,473,480		22,946,473,480			
					6,100,000,260		7,727,000,000		5,665,853,805		6,077,329,050			

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Infrastruktur Bina Marga	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	persen	34.59	46.59	45,885,685,000	53.59	46,814,393,000	60.59	45,193,654,315	67.59	45,741,400,000	67.59	183,635,132,315	
Program Infrastruktur Cipta karya	Presentase penanganan sampah	persen	13.76	23.76		30.76		30.76		30.76		30.76		
	Presentase rumah tangga pengguna air bersih	persen	15	33	30,637,400,000	45	30,260,762,970	58	30,211,350,000	78	30,211,350,000	78	121,320,862,970	
	Persentase panjang jalan lingkungan/ pedesaan dalam kondisi baik;	persen	15	30		45		60		75		75		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perda RTRW	persen	n/a	38	1,705,000,000	40	1,893,000,000	45	1,975,000,000	50	2,030,000,000	50	7,603,000,000	
Program Pelayanan Administrasi PUPR	Persentase target kinerja yang terealisasi	persen	80	100	6,504,223,660	100	6,500,000,000	100	6,500,000,000	100	6,500,000,000	42	26,004,223,660	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														PERKIMLH

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	Persen	19	0.6	1,050,000,000	0.6	1,100,000,000	0.6	1,200,000,000	0.6	1,200,000,000	16	4,550,000,000	
Program Pelayanan Administrasi PERKIMLH	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	94.26	100	1,350,000,000	100	1,400,000,000	100	1,400,000,000	100	1,450,000,000	100	5,600,000,000	
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat														
Program wawasan kebangsaan dan Fasilitasi Parpol dan Ormas	Persentase peningkatan peserta wawasan kebangsaan	Persen	75.90%	3.50%	690,995,000	4.00%	697,094,500	4.50%	703,303,950	5.00%	720,302,781	95.90%	2,811,696,231	KESBANGPOL
	Persentase peningkat organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	75%	3.50%		4.00%		4.50%		5.00%		95.00%		
Program Pelayanan Administrasi Kesbangpol	Persentase Target Kinerja Yang terealisasi	Persen	98.50%	100	728,986,357	100	735,884,992	100	740,420,840	100	750,462,924	100	2,955,755,113	
Pol PP													0	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penyidikan dan Penegakan Perda	Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda	Persen	80%	90%	564,025,000	95%	601,737,500	100%	607,901,250	100%	607,901,250	100%	2,381,565,000	POL PP
Program Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan	Persen	80%	90%	1,920,451,000	95%	1,920,451,000	100%	1,920,451,000	100%	1,920,451,000	100%	7,681,804,000	
Program Pelayanan Administrasi Satpol PP	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	100	100	1,063,325,242	100	1,063,325,242	100	1,063,325,242	100	1,063,325,242	100%	4,253,300,968	
Sosial														
Program pelayanan PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	1434	1600	908,717,060	1600	908,717,060	1700	908,717,060	1700	908,717,060	1700	3,634,868,240	SP3APMD
Program Pelayanan Administrasi SP3APMD	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	100	100	1,814,735,616	100	1,814,735,616	100	1,814,735,616	100	1,814,735,616	100	7,258,942,464	
Urusan Wajib Tidak terkait pelayanan dasar														
Tenaga kerja														TRANSIMGRASI
Program Ketenaga kerjaan	Peningkatan tenaga kerja yang terlatih	Persen		68	810,000,000	70	850,000,000	74	850,000,000	78	850,000,000	78	3,360,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Menurunnya angka perselisihan hubungan industrial	Persen		15		18		20		20		85		
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak														
													SP3APMD	
Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		n/a	100	1,301,344,450	100	1,301,344,450	100	1,301,344,450	100	1,301,344,450	100	5,205,377,800	
Pangan														
Program Tanaman pangan dan hortikultura	1. Produksi Tanaman Pangan Utama Masyarakat (padi)	Ton	52,636	52,900	725,880,100	53,032	798,468,110	53,164	878,314,921	53,297	966,146,413	53,297	3,368,809,544	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2. Produksi Hortikultura (Buah-buahan)	Ton	13,385	13,452		13,485		13,519		13,553		13,553		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3.Pembentukan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil TPH	Pelaku Usaha	26	3	3	3	3	3	3	3	41			
Progran ketahanan pangan	1. Konsumsi Beras Per kapita/tahun	Ton/Th	87.12	85.39	84.53	83.69	82.85	82.85						
	2. Persentase ketersediaan pangan utama masyarakat (padi)	Persen	149.2	150.7	616,343,720	647,978,092	682,775,901	721,053,491	2,668,151,204	153	153			
	3. Jumlah keragaman konsumsi jenis pangan lokal	Jumlah Pangan	5	1	1	1	1	10						
Lingkungan hidup														
Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks pencemaran air (IKA BMAS Kelas 2	Angka	1,93	≤ 1	102,800,000	≤ 1	105,390,000	≤ 1	108,109,500	≤ 1	421,689,500	PERKIMLH		
	Indeks pencemaran udara (IKU PMIO)	Angka	22	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50			
Program perlindungan lingkungan hidup	cakupan Pengawasan Amdal	Persen	75%	85%	225,000,000	90%	255,000,000	95%	285,000,000	100%	315,000,000	1,080,000,000		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan Penegakan hukum lingkungan	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	63.7	88%		91%		95%		100%		80.84 %		DISPENDUKC APIL
	Rasio kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 terhadap seluruh penduduk 0-17	Persen	80.26	91%	255,000,000		255,000,000		255,000,000		255,000,000		1,020,000,000	
Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase pengelolaan informasi kependudukan	Persen	n/a	75%	510,000,000		510,000,000		550,000,000		550,000,000		2,120,000,000	
Program Pelayanan Administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	71.98	100	2,168,85,000		2,168,895,000		2,168,895,000		2,168,895,000		8,675,580,000	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pemberdayaan masyarakat	Persentase keterlibatan Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	n/a	85	576,002,000	90	656,002,000	90	706,002,000	95	756,002,000	2,694,008,000	SP3APMD	
Program Pemerintah Desa	Persentase Desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik	Persen	62.5	65	3,070,564,000	70	660,564,000	75	2,570,564,000	80	750,564,000	7,052,256,000		
	Persentase fasilitasi Pilkades	Persen	100	100				100						
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
Program Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (Bidang Pengendalian Penduduk dan KB)	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	51	52,5	2,174,000,000	53	2,129,000,000	53,5	2,159,000,000	54	2,164,000,000	8,626,000,000	DINKESKB	
					601,441,000		601,441,000		601,441,000		601,441,000			
Perhubungan														

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Prasarana dan Keselamatan	Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik		43,69%	49,00 %		52,00 %		55,00 %		58,00 %		58,00 %	DINAS PERHUBUNGAN	
	Persentase sarana transportasi dalam kondisi baik	Persen	45,83%	62,85 %	5,985,000,000	64,93 %	2,285,000,000	76,39%	3,085,000,000	80,56 %	3,035,000,000	80,56 %		14,390,000,000
	Jumlah Kajian Transportasi yang dihasilkan	Dokumen	32	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		15 Dokumen		
Program Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Pelanggaran	1.953	1.500 pelanggaran	1,178,900,000	1.400 pelanggaran	1,336,296,000	1.300 pelanggaran	1,571,996,000	1.200 pelanggaran	1,593,662,000	1.200 pelanggaran	5,680,854,000	
	Jumlah orang melalui dermaga / bandara / terminal	Orang	60.03	62.000 orang	42,700,000.00	63.000 orang	42,700,000.00	64.000 orang	42,700,000.00	65.000 orang	43,200,000.00	65.000 orang	171,300,000.00	UPT
	Jumlah barang melalui dermaga / bandara / terminal	Ton	615.598	700.000 ton		750.000 ton		800.000 ton		850.000 ton		850.000 ton		
Program Pelayanan Administrasi Perhubungan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	95,88 %	100%	1,738,662,842	100%	1,798,822,842	100%	1,888,822,842	100%	1,902,672,842	100%	7,328,981,368	
Komunikasi & Informatika														

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Peningkatan intensitas diseminasi informasi	Persen	n/a	92%	1,100,000,000	94%	1,100,000,000	96%	1,100,000,000	99%	1,100,000,000	99%	4,400,000,000	DISKOMINFO
Program penyelenggaraan e-gov	Peningkatan persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persen	n/a	92%	1,105,008,830	94%	1,105,860,471	96%	1,157,092,948	99%	1,175,068,359	99%	4,543,030,608	
Program pelayanan administrasi Kominfo	Presentase target kinerja yang teralisasi	Persen	n/a	100	1,187,399,991	100	1,187,399,991	100	1,187,399,991	100	1,187,399,991	100	4,749,599,964	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
Program Pengembangan Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi yang dilakukan pelatihan manajemen koperas	Persen	80%	-				90%		95%		100%		DINAS PERDAGANGAN
	Jumlah Pelaku UKM yang membentuk koperasi	Koperasi	10kop	10kop	255,000,000	10 kop	220,500,000	10 kop	221,550,000	10 kop	301,410,000	40 kop	998,460,000	
	Persentase UKM yang dilakukan pelatihan	Persen	85%	-		85%		90%		95%		100%		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	manajemen UKM													
Penanaman modal dan Perizinan														
Program Perizinan dan non perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan	Persen	71,10	84,39	315,233,000	86,25	358,746,300	88,15	356,058,245	89,47	393,764,070	81,92	1,423,801,615	DINAS PMPTSP
	Rata rata Lama Proses Perizinan (Dalam Hari)	Hari	189	200		209		217		226		144		
Program Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	-71,73%	6%	310,110,500	7%	320,708,000	8%	350,785,000	9%	350,708,000	0.07	1,332,311,500	
Program pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	80%	85%	280,567,000	87%	300,480,400	90%	300,902,460	93%	320,492,706	83%	1,202,442,566	
Program Pelayanan Administrasi PMPTSP	Persentase Target Kinerja Yang terealisasi	Persen	98%	100%	1,648,736,903	100%	1,713,610,594	100%	1,794,971,654	100%	1,894,468,819	99%	7,051,787,970	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Kepemudaan dan Olah Raga														DINAS PORAPAR
Program Kepemudaan	jumlah pemuda yang di fasilitasi (204 orang)	Orang	204	204	754,510,000.00	204	800,300,000.00	204	852,200,000.00	204	852,200,000.00	204	3,259,210,000	
Program Keolahragaan	jumlah bibit olahragawan	Orang	12	16	1,146,022,000	18	1,206,022,000	20	1,251,022,000	22	1,251,022,000	22	4,854,088,000	
	Jumlah Cabang olahraga Prioritas yang dikembangkan	cabang olahraga	1	3		4		5		6		6		
	Jumlah cabang olahraga yang di evenkan dalam satu tahun	cabang olahraga	4	6		7		8		9		9		
Program Pelayanan Administrasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase target kinerja yang terealisasi	persen	100	100	1,372,822,072	100	1,383,941,612	100	1,399,425,612	100	1,412,444,112	100	5,568,633,408	
Kebudayaan														
Program Kebudayaan	Jumlah Festival seni dan Budaya berorientasi peserta didik yang terselenggara	Festival	26	28	1,393,954,000	26	1,393,954,000	26	1,393,954,000	26	1,393,954,000	26	5,575,816,000	DISDIKBUD
Perpustakaan dan Kearsipan														

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Perpustakaan	Kenaikan jumlah pengunjung	Orang	1.6	20	215,215,000	21	255,215,000	40	255,215,000	50	255,215,000	50	980,860,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARDA
Program Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	40	72	205,000,000	76	205,000,000	80	205,000,000	84	250,000,000	84	865,000,000	
Program pelayanan administrasi Perpus	Presentase target kinerja yang teralisasi	Persen		100	1,250,000,000	100	1,300,000,000	100	1,300,000,000	100	1,350,000,000	100	5,200,000,000	
Kelautan dan perikanan														
Program Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	35812.30 (ton)	36,062	678,000,000	36,312	638,000,000	36,562	638,000,000	36,812.30	638,000,000	36,812	2,592,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Konsumsi ikan perkapit	Kg/Kap /Th	39.2	41		41		41		42.00				
Program Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya	Ton	385.90 (ton)	405.9	1,110,000,000	425.9	1,115,000,000	445.9	1,315,000,000	465.9	1,114,664,000	465.9	4,654,664,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaa Nelayan Kecil dan Pembudidaya ikan	2. Jumlah kelompok nelayan yang terampil/ mandiri	kelompok	8 (Kelompok)	4	382,000,000	4	362,000,000	4	382,000,000	4	462,000,000	28	1,588,000,000	
Program Pelayanan Administrasi Kelautan dan perikanan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	89.90%	100%	2,360,925,065	100%	2,243,736,505	100%	2,249,736,505	100%	2,290,244,065	100%	9,144,642,140	
Pariwisata														PORAPAR
Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sarana Prasarana wisata dalam kondisi baik	paket	30	70		80		80		100				
	Fasilitasi even pariwisata	even	1	3	2,000,000,000	3	2,100,000,000	3	2,725,000,000	4	3,000,000,000		9,825,000,000	
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang telah dilakukan pembinaan	Persen	33	53		66		80		100				

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan pembinaan dan pembentukan Kelompok sadar wisata	pokdar wis	2	10		15		20		25				
Pertanian														
Program perkebunan	1. Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	59,818	61,626	947,978,092	62,550	947,978,092	63,489	982,775,901	64,441	1,021,053,491	64,441	3,899,785,576	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2. Pembentukan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan	Pelaku Usaha	5	1		1	1	1	1	1	10			
Program peternakan dan kesehatan hewan	1. Produksi Daging	Ton	925.26	959		976		994		1,012		1012		
	2. Produksi Telur	Ton	185	187		188		189		190		190		
	3. Pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosis	Persen	168	136	1,044,054,955	123	1,058,460,451	110	1,074,306,496	99	1,091,737,145	99	4,268,559,047	
	4. Pembentukan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	Pelaku Usaha	17	3		3	3	3	3	3	32			

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENYULUHAN	1. Jumlah Kelas Kelompok Tani tingkat "Lanjut"	Poktan	159	25	25	25	25	25	25	25	284	2,810,811,600		
	2. Persentase Tenaga Penyuluh yang dilatih	Persen	10	15	20	20	20	20	20	100	100			
	3. Persentase akurasi data base kelompok tani dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian	Persen	82	87	90	95	100	100	100	100	100			
PROGRAM PRASARANA, SARANA DAN PERTANIAN	1. persentase peningkatan ketersediaan sarana/prasarana pengelolaan lahan dan air	Unit	39	8	8	9	10	10	10	10	4,967,541,669	17,321,082,559		
	2. Ketersediaan alsintan pratanam dan prapanen	Unit	470	26	28	30	32	32	32	32	32			
		Ton												
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANIAN	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	100%	100	100	100	100	100	100	100	3,981,821,959	15,081,394,224		
Perdagangan														

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Perdagangan	Persentase peningkat pelaku usaha yang tertib niaga			80	4,500,500,000	85	2,500,500,000	90	2,500,500,000	95	2,500,500,000	95	12,002,000,000	DINAS PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Presentase target kinerja yang terealisasi	Persen	97.03	96%	1,558,520,019	100%	1,556,372,021	100%	1,621,709,223	100%	1,625,380,148	100%	6,361,981,411	
Perindustrian														
Program Perindustrian	Persentase pembinaan IKM	Persen	35.5	5	73,358,000	5	73,358,000	5	86,829,000	5	95,511,000	55.5	329,056,000	DINAS PERDAGANGAN
Transmigrasi.			-								21 IKM			
Program Transmigrasi	Peningkatan levelisasi pemanfaatan lahan transmigrasi menjadi level "Lahan Pekarangan"		n/a	520 Ha	2,100,000,000	400 Ha	2,000,000,000	220 Ha	1,100,000,000	340 Ha	1,700,000,000	1780 Ha	6,900,000,000	DINAS TRANSMIGRASI
Program Pelayanan Administrasi	Persentase target kinerja yang terealisasi		100	100	1,144,628,000	100	1,179,178,000	100	1,162,698,000	100	1,169,428,000	100	4,655,932,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Transmigrasi														
Fungsi penunjang urusan														
Keuangan														
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase kenaikan penerimaan dari pajak daerah													BAKEUDA
	Persentase porsi PAD terhadap target PAD				704,991,000		790,041,000		850,739,600		905,342,000		3,251,113,600	
	Persentase realisasi PAD terhadap target PAD													
Program Asset Daerah	Persentase aset daerah yang terinventarisir				904,685,200		1,156,555,100		1,120,930,000		1,116,005,000		4,298,175,300	
Program Akutansi Daerah	Peningkatan laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar dan tepatan waktu				703,650,000		752,277,570		762,945,000		850,543,950		3,069,416,520	
Program Anggaran	Persentase ketersesuaian anggaran dalam				1,415,171,870		1,497,781,084		1,530,474,034		1,562,974,034		6,006,401,022	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	RKA terhadap Renja													
Program Pembendaharaan	persentase ketepatan waktu dalam proses pencairan keuangan daerah			100	899,738,600	100	902,287,375	100	909,915,643	100	949,452,425	100	3,661,394,043	
Program Pelayanan Administrasi BKD	Persentase Target Kinerja Yang terealisasi			100	3,501,574,400	100	3,528,626,400	100	3,841,144,742	100	4,082,938,631	100	14,954,284,173	
Perencanaan														
Program Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pemangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan	persen	100	100%	1,114,489,500	100%	1,114,489,500	100%	1,795,489,500	100%	1,920,489,500	100%	5,944,958,000	BAPPEDA
Program penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian, Pengembangan dan Kajian Yang Ditindaklanjuti	persen	50	75%	860,000,000	75%	960,000,000	75%	960,000,000	75%	960,000,000	75%	3,740,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	persen	100	100%	861,278,500	100%	875,310,464	100%	989,693,224	100%	904,435,556	100%	3,630,717,744	
Program Perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	persen	100	100%	1,318,475,000	100%	1,393,475,000	100%	1,444,424,000	100%	1,554,424,000	100%	5,710,798,000	
Program Pelayanan administrasi Bappeda	Persentase Target Kinerja Yang terealisasi	persen	85	100%	3,058,076,650	100%	3,574,301,650	100%	3,558,076,650	100%	3,676,234,650	100%	13,866,689,600	
Pengawasan														INSPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan indikasi tindak pidana korupsi yang	Persen	70	80	3,280,350,000	85	3,339,100,000	90	3,317,850,000	95	3,400,850,000	425	13,338,150,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
pelaksanaan kebijakan kepala daerah	material													
	Persentase OPD yang telah mengimplemetasikan SPIP pada level berkembang	Persen	20	60	80	90	100	100						
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah di tindaklanjuti	Persen	54,48	70	80	90	95	95						
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah di tindaklanjuti	Persen	64,92	75	85	95	95	95	95					
	Porsentase OPD yng tertib administrasi barang/ aset daerah	Persen	60	85	90	95	95	95	95					

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi.	Persen	50	70	380,000,000	80	420,000,000	90	485,000,000	95	503,500,000	395	1,788,500,000	
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Angka	2 (level)	3	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	5	25,000,000	5	100,000,000	
Program pelayanan administrasi Inspektorat	Presentase target kinerja kesekretariatan yang terealisasi	Persen	70	80	3,121,471,000	85	3,197,107,500	90	3,237,146,500	95	3,226,712,500	95	12,782,437,500	
Penanganan Bencana														
Program Pencegahan & Penanggulangan Bencana	Persentase kegiatan Penyebaran informasi potensi bencana yang terlaksana 100% dari 2019-2023	persen	100	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000		1,400,000,000	BPBD
	Jumlah Masyarakat perwakilan desa yang dilakukan	Desa	4	4		5		6		7				

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pembinaan potensi bencana													
	persentase kejadian bencana yang tertangani	persen	100	100		100		100		100				
	Persentase korban bencana yang diberikan bantuan	persen	100	100		100		100		100				
Program Pelayanan Administrasi BPBD	Presentase target kinerja kesekretariatan yang terealisasi				1,351,350,000		1,351,350,000		1,441,350,000		1,441,350,000		5,585,400,000	
Administrasi														
Program Bagian Umum dan Keuangan	Prosentase Pengelolaan Keuangan sesuai Aturan		100	100	11,416,383,259		11,525,391,512		11,644,850,178		11,775,275,964		46,361,900,913	SETDA
	Prosentase Pengelolaan Aset Setda sesuai Aturan			100		100		100		100		100		
	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pimpinan		17	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Bagian Aparatur Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur			100	5,122,101,550	100	5,330,101,550	100	5,566,601,550	100	5,760,601,550	100	21,779,406,200	
	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian			100		100		100		100		100		
Program Bagian Organisasi	Prosentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran			70	1,113,000,000	80	1,319,000,000	90	1,073,000,000	100	1,130,000,000	100	4,635,000,000	
	Prosentase Jabatan dan Beban Kerja yang teranalisis			90		100		100		100		100		
	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai pelayanan baik			40		50		80		100		100		
Program Bagian Hukum dan HAM	Prosentase Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			100	1,315,474,646	100	1,477,022,111	100	1,554,724,322	100	1,750,196,754	100	6,097,417,833	
	Prosentase Tingkat Kesadaran Hukum			100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Masyarakat													
Program Bagian Pemerintahan	Peringkat LPPD			12	1,240,562,600	10	1,264,885,800	9	1,247,074,944	8	1,242,500,833	8	4,995,024,177	
Program bagian Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis bidang Kesejahteraan Rakyat	persen	n/a	100	15,203,802,000	100	15,283,469,000	100	15,640,452,000	100	15,719,144,000	100	61,846,867,000	
	Persentase Kegiatan yang terlaksana	persen	100	100		100		100		100		100		
Program bagian Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi	persen		97	1,010,487,200	97.5	1,112,842,920	97.9	1,216,563,012	99.5	1,373,391,313		4,713,284,445	
Program Bagian Humas dan Keprotokolan	Prosentase kepuasan terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	persen		100	1,136,263,620	100	1,136,263,620	100	1,136,263,620	100	1,136,263,620	100	4,545,054,480	
Program Bagian Layanan Pengadaan	Persentase pengadaan barang dan jasa tepat waktu	persen		90	1,120,000,000.00	100	1,235,000,000.00	100	1,240,000,000	100	1,238,000,000	100	4,833,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Efisiensi anggaran barang dan jasa	persen		3		3		5		5		5	-	
Sekretariat Dewan Program Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Persentase Kegiatan yang terlaksana	persen	96,92%	100	12,501,331,505.00	100	13,030,617,375.00	100	13,406,617,550.00	100	13,064,717,300.00	97,46%	52,003,283,730	SETWAN
Program Pelayanan Umum Sekretariat DPRD	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	97,65%	95	4,352,976,500.00	96	4,422,565,875.00	97	5,622,565,875.00	98	6,422,565,875.00	98,62%	20,820,674,125	
Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Kegiatan yang terlaksana	Persen	89,97%	100	2,133,374,000.00	100	2,121,700,000.00	100	2,221,700,000.00	100	2,321,700,000.00	98,70%	8,798,474,000	
Program Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Nilai SKM	Angka		85	158,215,000	90	188,487,000	95	170,646,200	98	205,195,000	451	722,543,200	KECAMATAN SUKADANA
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen		93	515,593,798	96	521,343,798	98	525,943,798	98	544,793,798	98	2,107,675,192	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Nilai SKM	Angka		85	304,853,000	88	274,853,000	90	304,853,000	95	274,853,000	440	1,159,412,000	KECAMATAN SIMPANG HILIR
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen		93	582,006,560	95	648,905,475	96	582,006,560	98	654,905,475	98	2,467,824,070	
Program Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Nilai SKM	Angka	B (79.93)	A(90.102)	42,172,000	A(91.102)	42,172,000	A(92.102)	42,172,000	A (93.102)	42,172,000	A (93.102)	168,688,000	KECAMATAN TELUK BATANG
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	99.45%	85%	686,503,544	90%	686,503,544	95%	686,503,544	100%	686,503,544	100%	2,746,014,176	
Program Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Nilai SKM	Angka	80,33 %b (B)	81,33 % (B)	37,000,000	82,33 % (B)	37,000,000	83,33% (B)	37,000,000	84,33 % (B)	37,000,000	84,33 % (B)	148,000,000	KECAMATAN SEPONTI
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	80%	85%	665,828,200	90%	665,828,200	95%	660,828,200	100%	660,828,200	1	2,653,312,800	
Program Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Nilai SKM	Angka		81,33 % (B)	37,000,000	82,33 % (B)	37,000,000	83,33% (B)	37,000,000	84,33 % (B)	37,000,000	84,33 % (B)	148,000,000	KECAMATAN PULAU MAYA

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal RPJMD											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen		85%	634,475,000	90%	634,475,000	95%	634,475,000	100%	634,475,000	100%	2,537,900,000	
Program Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Nilai SKM	Angka		81,33 % (B)	37,000,000	82,33 % (B)	37,000,000	83,33% (B)	37,000,000	84,33 % (B)	37,000,000	84,33 % (B)	148,000,000	KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen		85%	637,475,000	90%	637,475,000	95%	637,475,000	100%	637,475,000	100%	2,549,900,000	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan ukuran keberhasilan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung kinerja utama daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kayong Utara ditunjukkan pada Tabel 8.1. berikut:

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023

No.	Indikator	TARGET TAHUN ke-n				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62.89	63.62	64.40	65.07	65.78
2	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5.47	5.48	5.49	5.53	5.65
3	Indeks Gini	0.33	0.32	0.3	0.28	0.25
4	Angka Kemiskinan	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3
5	Indeks Reformasi Birokrasi	30-32.5	32.5-33.0	33-33.6	33.5-34	34-34.7
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65	65.5	66	66.5	67

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Untuk mencapai indikator kinerja utama yang merupakan agregasi dan akumulasi dari capaian indikator kinerja program (*outcome*) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur, dilaksanakan perangkat daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Selain adanya penetapan indikator kinerja daerah terdapat juga penetapan indikator kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara ditunjukkan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019 -2023

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik (%)	n/a	16,67	32,67	46,33	60,50	76,33	76,33
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi (Interval)	n/a	50-64	65-69	70-75	76-79	80-90	80-90
1.3	Indeks Pembangunan Manusia (%)	61,52	62,89	63,62	64,35	65,07	65,78	65,78
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	n/a	4,7	4,5	4,3	4,0	3,7	3,7
1.5	Desa Mandiri (Jumlah)	1	4	10	17	26	36	36
1.6	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,42	5,47	5,48	5,49	5,53	5,56	5,56
1.7	Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Indeks Gini (%)	n/a	0,33	0,32	0,3	0,28	0,25	0,25
1.9	Persentase Angka Kemiskinan (%)	9,89	9,7	9,6	9,5	9,4	9,3	9,3

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	61,52	62,89	63,62	64,35	65,07	65,78	65,78
1.1	Pendidikan							
1.1.1	Indeks Pendidikan	0,52	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,60
1.1.2	Angka rata-rata lama sekolah(%)	5,90	5,95	6,00	6,50	6,75	6,90	6,90
1.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah(%)	11,87	11,96	12,05	12,14	12,23	12,32	12,32
1.2	Kesehatan							
	Indeks Kesehatan	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74
1.2.1	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup (orang)	150	145	145	130	130	120	120
1.2.2	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup (Orang)	13	12	10	8	8	8	8
1.2.3	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,25	3,10	2,08	2,00	1,8	1,5	1,5
1.2.4	Angka usia harapan hidup (usia)	67,46	67,68	67,70	67,75	67,85	67,90	67,90
1.3	Ketenagakerjaan							
1.3.1	Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja (%)	68,31	70,25	70,79	71,12	71,35	71,42	71,42
1.3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	4,7	4,5	4,3	4	3,7	3,7
1.3.3	Rasio Penduduk yang Bekerja	0	0	0	0	0	0	00
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga								

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Kebudayaan							
1.1	Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam pegelaran/festival	0						
2	Kepemudaan dan Olah Raga							
2.4	Jumlah Cabang olahraga yang dikembangkan	1	2	3	4	5	6	6
2.5	Jumlah Pemuda yang difasilitasi	204	204	204	204	204	204	204
2.6	Jumlah bibit olahragawan	12	14	16	18	20	22	22
2.7	Jumlah Cabor yang di Eventkan	4	5	6	7	8	9	9
2.8	Persentase restasi pemuda dan olah raga	n/a	5%	5%	6%	6%	7%	7%
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Pelayanan Urusan Wajib								
Terkait Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Dasar							
1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35	45	55	65	75	85	85
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	120,10	100	100	100	100	100	100
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	110,78	100	100	100	100	100	100
1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI	99,98	100	100	100	100	100	100

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	82,72	85,23	87,74	90,25	92,76	95,27	95,27
1.1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,21	0,21
1.1.9	Angka Putus Sekolah(APS)SMP/MTs	1,06	0,92	0,78	0,64	0,50	0,33	0,33
1.1.10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,02	100	100	100	100	100	100
1.1.11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,06	100	100	100	100	100	100
1.1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93,60	94,8	96,00	97,2	98,4	100	100
1.1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	71,27	73,27	75,27	77,27	79,27	81,96	81,96
1.1.14	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Terakreditasi A	5,63	16	25,63	36	45,63	56	56
2	Kesehatan (indeks)							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	0	0	0	0	0	0	0
2.2	PersentasePosyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (Perbandingan)	8	8	9	9	10	10	10
2.5	Rasio dokter per 100.000 penduduk	9,25	9,5	9,5	9,5	10	10	10
2.7	Cakupan komplikasi kebidanan yg tertangani	54,71	54,28	53,84	53,40	52,96	52,53	52,53

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan (%)	62,68	62,78	63,00	70,75	75,50	78,00	78,00
2.9	Cakupan Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	76,74	77,50	78,25	78,89	79,35	82,00	82,00
2.10	Cakupan Balita gizi buruk (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBCTBA (%)	63,8	68,20	72,60	77,00	83,75	86,00	86,00
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	78,75	85	90	95	100	100	100
2.14	Cakupan kunjungan bayi (%)	70,01	75	80	80	85	90	90
2.15	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi madya (jumlah un it)	2	4	5	7	8	10	10
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Proporsi panjang jalan kota kabupaten dalam kondisi baik (%)	54,07	59,4	63,80	69,20	75,60	81	81
3.2	Peningkatan jumlah jembatan (%)	n/a	15	30	45	60	75	75

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Persentase Panjang jalan/lingkungan pedesaan dalam kondisi baik (%)	n/a	15	30	45	60	75	75
3.4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	n/a	10	22	36	52	67	67
3.5	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	42,10	47,00	51	55	60	65	65
3.7	Meningkatnya luasan areal pertanian terlayani jaringan irigasi	20	20	35	45	57	77	77
3.9	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	24.1	25,25	26,50	27,10	28,50	30	30
3.10	Lingkungan Pemukiman Kumuh	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
3.11	Sarana air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	n/a	2	1	2	1	1	7
3.12.	Prosentase Penduduk berakses air bersih	n/a	15	33	45	58	78	78
3.13.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	n/a	35%	38%	40%	45%	50%	50%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
3.14	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HL/HGB	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
4.1	Rasio rumah layak huni	81	81,6	81,6	82,2	82,2	84	84
4.8	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,04	0,04	0,03	0,03	0,025	0,02	0,02
	Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih	55,19	60,00	65,00	71,00	77,00	85,00	85,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	2	2	2	2	2	2
5.2	Pembinaan Politik Daerah	2	2	3	3	4	4	4
5.4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	80	85	85	90	95	100	100
5.5	Cakupan Pelayan bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Prosentase penegakan PERDA	80	85	85	90	95	100	100
6	Sosial							

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
6.1	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	93,37	93,37	94,00	94,37	95,00	95,00	95,00
6.2	Jumlah PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan social) (orang)	1.434	1.350	1.300	1.250	1.200	1.150	1.150
	Jumlah PMKS yang tertangani (orang)	n/a	50	50	50	50	50	250
6.2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	8,42	8,42	10	10	12	12	12
Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar								
1	Tenaga Kerja							
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
	Pencari kerja yang ditempatkan	70,09	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
1.5	Persentase Angka Pengangguran (%)	3.85	3.85	3.30	2.95	2.50	2.00	2.00
1.7	Besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	84,34	85,34	85,34	86,34	87,34	88,50	88,50
1.9	Persentase Tenaga kerja yang terlatih (%)	n/a	59	68	70	74	78	78

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Besaran penurunan angka perselisihan hubungan industrial	n/a	12	15	18	20	20	85
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,14	85,28	85,38	85,48	85,59	85,69	85,69
2.2	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	6,95	7,50	10	12	15	20	20
2.7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43,73	45,73	48,73	52,73	57,73	63,73	63,73
2.9	Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 ke atas	72,79	73,00	76,00	80,00	85,00	85,00	85,00
3	Pangan							
3.1	Pola Pangan Harapan Konsumsi	78,52	78,80	80,61	82,70	84,79	86,66	86,66
3.2.	Ketersediaan Energi & Protein							
	- Konsumsi Energi	1.833	1.857	1.896	1.917	1.938	1.958	1.958
	- Konsumsi Protein	55,60	56,07	56,30	56,53	56,77	57,00	57,00
3.5	Regulasi Ketahanan Pangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pertanahan							

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
4.3	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup							
5.3	Persentase Kualitas Air	1,93	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
5.4	Persentase Kualitas Udara	22	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
5.13	Cakupan pengawasan Amdal	75	80	85	90	95	100	100
6	Administrasi kependudukan dan catatan sipil							
6.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	67,82	78,99	85	88	91	95	95
6.2	Rasio kepemilikan akte kelahiran usia 0-18	80,26	88	91	95	98	100	100
6.5	Ketersediaan data base kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
7.6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk	2,35	2,30	2,30	2,25	2,25	2,20	2,20

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
8.2	Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber KB	29	30	31	32	33	34	34
9	Perhubungan							
9.10	Jumlah barang melalui dermaga / dermaga/terminal	615.598	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	850.000
9.11	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal	60.03	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000	65.000
10	Komunikasi dan Informatika							
10.2	Web site milik pemerintah daerah	10	10	10	10	10	10	10
10.4	Persentase penerapan layanan publik berbasis TIK/aplikasi oleh OPD Kabupaten	n/a	90	92	94	96	99	99
11	Koperasi dan UKM							
11.1	Jumlah Koperasi aktif	60,71	60,71	61,29	61,29	62,00	62,00	62,00
11.5	Persentase usaha mikro dan kecil	100	100	100	100	100	100	100
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam jutaan)	5.935.	7.500.	7.600.	7.800.	7.800.	8.200.	8.200

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
12.4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	n/a	5%	6%	7%	8%	9%	9%
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.4	Persentase prestasi pemuda dan olah raga	5	5	5	5	6	6	6
13.5	Jumlah pemuda yang difasilitasi	204	204	204	204	204	204	204
13.6	Jumlah bibit olahragawan	12	14	16	18	20	22	22
14	Statistik							
14.1	Tersedianya data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian							
15.2	Indek Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Level I	Level I	Level I +	Level II	Level II+	Level III	Level III
16	Kebudayaan							
16.3	Penyelenggaraan festival seni budaya	8	8	8	8	8	8	8

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
16.4	Benda, situs, keurbakalaan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64
16.7	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	2	2
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan	1750	2400	2600	3000	3500	4200	4200
18	Kearsipan							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	82,76	86,21	86,21	86,21	86,21	86,21	86,21
PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	Kelautan dan Perikanan							
1.2	Produksi perikanan kelompok nelayan/ton	32,959.70	35.812	36.062	36.312	36.562	36.812	36.812
1.3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	385.90	385.90	405.9	425.9	445.9	465.9	465.9
1.4	Jumlah unit lembaga usaha kelautan dan perikanan yang berkembang dan mandiri	4	2	2	2	2	2	14
1.5	Jumlah kelompok nelayan yang terampil dan mandiri	8	4	4	4	4	4	28
1.6	Jumlah kelompok pemula	179	5	5	5	5	5	204

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2	Pariwisata							
2.1	Persentase sarana prasarana wisata dalam kondisi baik	30	40	70	80	80	100	100
2.2	Fasilitasi event pariwisata	1	2	3	3	3	4	4
2.6	PAD sektor pariwisata	4,3	4,5	4,7	4,9	5,2	5,5	5,5
2.7	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,2	3,2
3	Pertanian							
3.1.	Produksi Tanaman Pangan							
	a) Padi	52.636	52.786	52.900	53.032	53.146	53.297	53.297
3.2.	Produksi Tanaman Hortikultura							
	a) Tanaman Buah-buahan	13.385	13.418	13.452	13.485	13.519	13,553	13,553
3.3.	Produktivitas Tanaman Pangan							
	a) Padi	52.636	52.768	52.900	53.032	53.146	53.297	53.297
6	Perdagangan							
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,3	13,5	13,7	13,9	14,0	14,1	14,1
7	Perindustrian							

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7.3	Jumlah IKM mendapat bantuan dari pemerintah daerah	0	0	3	5	6	7	21
7.4	Jumlah IKM yang diberikan peningkatan kualitas kemasan	4	5	10	15	20	25	75
7.7	Jumlah IKM yang telah difasilitasi izinnya	6	10	11	12	14	15	62
8	Transmigrasi							
8.1	Peningkatan levelisasi pemanfaatan lahan Trasmigrasi menjadi level "Lahan pekarangan" (Ha)	300	520	400	220	340	1780	
LAYANAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN								
1	Perencanaan							
1.1	Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100		100	100	100	100	
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	n/a	35	38	40	45	50	50
1.8	Dokumen KLHS	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase asset daerah yang terinventarisir	317	349	462	320	262	1710	1710
2.3	Peningkatan laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase ketersesuaian anggaran dalam RKA terhadap Renja (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase ketepatan waktu dalam proses pencairan keuangan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Persentase Porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	4,6	2,2	2,4	2,6	3,1	3,6	3,3
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	59,63	60	65	70	75	80	80
4	Penelitian dan Pengembangan							

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	n/a	50	80	80	80	80	80
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	n/a	-	-	16	16	16	16
5	Sekretariat Daerah							
5.1	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat (%)	81,67	84,07	85,27	86,47	87,67	88,87	88,87
5.2	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	CC	B	B	B
5.3	Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase SOP penyelenggara pemerintah yang diterapkan (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.8	Level kematangan (self assessment) layanan pengadaan pemerintah	Level 5	Level 4	Level 4	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2
5.9	Kategori nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Sekretariat DPRD							

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dalam dokumen rencana 5 tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	ASPEK DAYA SAING DAERAH.							
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persediaan							
1.1	Nilai PDRB							
	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	3.498	4.198	4.457	4.897	5.247	5.597	5.597
	Nilai PDRB Atas Dasar Harga konstan	2.303	2.533	2.648	2.764	2.879	2.994	2.994
1.1	Indeks Pengeluaran per kapita	0,62	0,62	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65
1.5	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	2	2	2	2	2	2
1.8	Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Jumlah desa mandiri	1	4	10	17	26	36	36
1.13	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	79,27	84,07	85,27	86,47	87,67	88,87	88,87
2	Pertanian							
2.1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	29,80	29,90	30,00	30,10	30,20	30,30	30,30
	Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah							
1	Perhubungan							
1.2	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi dalam kondisi baik	44,76	50,09	55,93	58,47	65,70	69,28	69,28
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persadian							
3.1	Jenis dan jumlah Bank dan Cabang							
4	Lingkungan Hidup							
4.1	Cakupan Pelayanan air bersih	55,46	55,60	55,90	56,30	56,90	60,10	60,10
4.3	Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100
	Fokus Iklim Investasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persadian							

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Angka kriminalitas yang ditangani							
1.2	Jumlah Surat Izin yang diterbitkan							
	Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Ketenagakerjaan							
2	Pengawasan							
2.1	Persentase Penyelesaian TLHP BPK (%)	64,92	60	75	85	95	95	95
2.2	Persentase Penyelesaian TLHP ITJEN(%)	54,48	60	70	80	90	95	95
2.3	Persentase Penyelesaian TLHP APIP(%)	Level 1	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5
2.5	Tingkat Maturitas SPIP	Level 1	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5
3	Fokus Pengelolaan Aset Daerah							



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara selama 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, RPJMD ini juga merupakan arahan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran selama periode tahun 2019 – 2023.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara untuk dapat mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati “**Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang, Sejahtera dan Aman**” perlu didukung oleh : (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas, dan demokratis; (2) Tata Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*); (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara ; (4) Keberpihakan kepada rakyat (*pro-poorpolicy*); (5) Partisipasi aktif masyarakat,

media massa dan dunia usaha; serta (6) Mekanisme pengendalian dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas public yang baik.

Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kayong Utara diharapkan akan membawa masyarakat yang beriman, berbudaya, berdaya saing, seimbang, sejahtera dan aman sebagai mana yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

9.1. Pedoman Transisi

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2019-2023. Ketentuan ini berlaku pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara untuk masa bakti 2019-2023 yang akan berakhir pada tahun 2023, maka program tahun 2023 dalam dokumen RPJMD ini sekaligus merupakan program transisi untuk tahun 2024 bagi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjabat pada periode tahun 2024-2028.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kayong Utara tahun 2019-2023 merupakan tahapan periode ke-3 (tiga) dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2005-2025. Upaya perwujudan visi RPJMD 2019-2023, akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif; (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD; (3). Meningkatkan sarana dan prasarana dasar modal transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat; (4). Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good dan clean governance* serta ketaatan

hukum dan perundang-undangan; (5). Mewujudkan tata ruang dan wilayah yg seimbang serasi dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kabupaten Kayong Utara akan digunakan sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2019- 2023;
2. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan perencanaan penganggaran;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi Kalimantan Barat dan perencanaan pembangunan kabupaten yang berbatasan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 tergantung pada kesepahaman dan komitmen Bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu Tahun 2019-2023. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kayong Utara dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara ;
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kabupaten Kayong Utara dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Kayong Utara ;
- (3) Seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 dengan sebaik- baiknya;
- (4) Setiap Satuan Perangkat Daerah (PD) yang berbentuk Badan, Dinas, dan Kantor berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023;

- (5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara ;
- (6) Penyusunan RKPD Kabupaten Kayong Utara dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- (7) RKPD Kabupaten Kayong Utara harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Kayong Utara merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- (9) Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- (10) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Intansi vertikal di Kabupaten Kayong Utara, maupun masyarakat sipil;
- (11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Kayong Utara menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- c. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Kayong Utara menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

BUPATI KAYONG UTARA

CITRA DUANI